



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN



LAPORAN KINERJA (LKj) TAHUN 2024

SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN ORGANISASI)

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, dengan mengucapkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat, taufik dan inayah-Nya kita dapat menyusun dan menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Balangan Tahun 2024.

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Balangan ini adalah perwujudan dari pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis Tahun Anggaran 2024. Laporan Kinerja ini merupakan tahun keempat pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Balangan periode Tahun 2021-2026.

Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Balangan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Balangan adalah bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Balangan dan wujud transparansi/pertanggungjawaban kepada masyarakat, serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan. Kinerja Pemerintah Kabupaten Balangan diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Balangan Tahun 2024.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun beberapa indikator belum menunjukkan capaian sesuai target karena pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Balangan sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan *civil society* sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi negara.

Berdasarkan analisis dan evaluasi objektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Balangan Tahun 2024 ini, diharapkan dapat terjadi

optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan pada tahun-tahun selanjutnya sehingga dapat mendukung kinerja Pemerintah Kabupaten Balangan secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Paringin, 27 Maret 2025

BUPATI BALANGAN,



H. ABDUL HADI, S.Ag., M.I.Kom.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
PERNYATAAN TELAH DI REVIU	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GRAFIK	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Gambaran Umum Kabupaten Balangan	2
B. Tugas Pokok dan Struktur Organisasi	3
C. Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Tujuan RPJMD	6
B. Perjanjian Kinerja (PK)	8
C. Anggaran	10
D. Definisi Operasional Kinerja pada Perjanjian Kinerja	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Pengukuran Kinerja Tujuan	14
B. Pengukuran Kinerja Sasaran	34
C. Analisis Capaian Kinerja Sasaran	36
D. Realisasi Anggaran	134
E. Hasil Evaluasi SAKIP Pemda, Rekomendasi Menpan RB dan Rencana Aksi Pemda	136
F. Piagam Penghargaan	139
BAB IV PENUTUP	
KESIMPULAN	
A. Capaian Kinerja Tujuan	143
B. Capaian Kinerja pada Perjanjian Kinerja	144
C. Upaya Perbaikan dan Rencana Aksi	146

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Nama Satuan Kerja/Organisasi Perangkat Daerah Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah	4
Tabel 2.1	Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Balangan Tahun 2024	9
Tabel 2.2	Program dan Anggaran dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Balangan Tahun 2024	10
Tabel 3.1	Hasil Pengukuran atas Pencapaian Kinerja Tahun 2024	35
Tabel 3.2	Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 1 Meningkatnya Kontribusi Ekonomi Sektor Unggulan Non Pertambangan	36
Tabel 3.3	Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 2 Meningkatnya Pertumbuhan Investasi	55
Tabel 3.4	Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 3 Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	61
Tabel 3.5	Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 4 Meningkatnya Kualitas Pendidikan	70
Tabel 3.6	Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 5 Meningkatnya Pengeluaran Perkapita	81
Tabel 3.7	Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 6 Menurunnya Ketimpangan Pendapatan	89
Tabel 3.8	Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 7 Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka	101
Tabel 3.9	Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 8 Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi	108
Tabel 3.10	Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 13 Meningkatnya Kualitas SDGs Desa	129

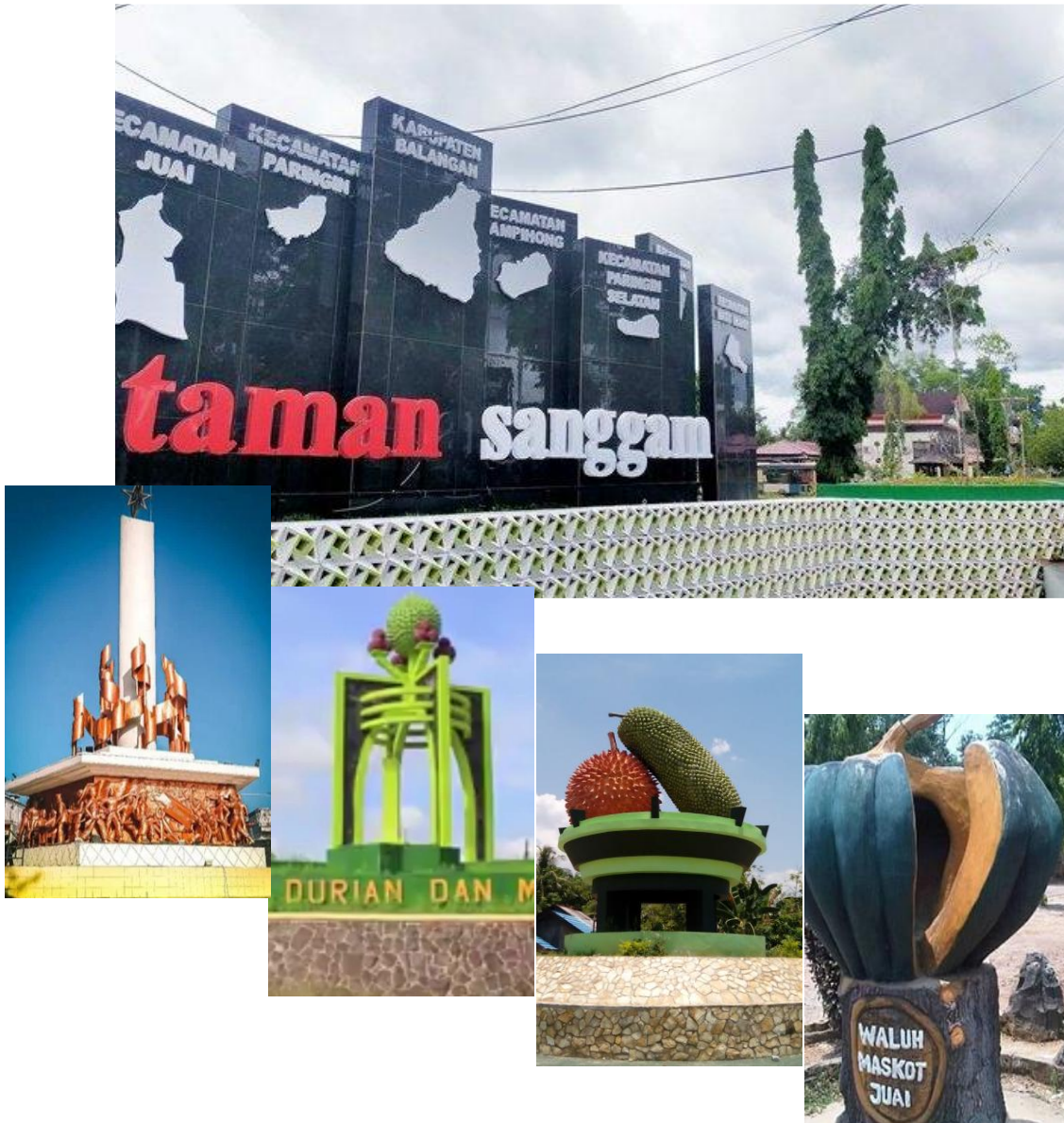
DAFTAR GAMBAR DAN GRAFIK

Gambar 1.1	Gambaran Kondisi Geografis Kabupaten Balangan	2
Gambar 1.2	Luas Masing-masing Kecamatan dalam Satuan Km ²	2



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

BAB I PENDAHULUAN



- A. GAMBARAN UMUM KABUPATEN BALANGAN**
- B. TUGAS POKOK DAN STRUKTUR ORGANISASI**
- C. SISTEMATIKA PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**

BAB I

PENDAHULUAN

Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan salah satu aspek yang menjamin kesejahteraan nasional. Tata kelola tidak dapat lepas dari prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan yang baik yaitu transparansi, partisipasi dan akuntabilitas sebagai syarat untuk mencapai tujuan dan sasaran. Akuntabilitas kinerja disusun oleh instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP, Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD. Kebijakan terkait laporan kinerja yaitu Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan ini menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Balangan dalam melakukan penyusunan laporan kinerja. Dalam sudut pandang yang lebih luas laporan kinerja berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Pemerintah Kabupaten Balangan akan mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanahkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai visi misi daerah secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan melalui perjanjian kinerja, dan akan disajikan dalam sebuah bentuk pertanggungjawaban pelaporan kinerja. Pelaporan Kinerja yang disusun diharapkan dapat memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya. Informasi yang disajikan dalam laporan kinerja menjadi perhatian utama pimpinan untuk melakukan langkah-langkah strategis untuk menyusun rencana kinerja, penyesuaian aktivitas kinerja dan penyesuaian penggunaan anggaran guna mencapai keberhasilan kinerja. Selain itu informasi laporan kinerja dapat mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi dan dalam upaya melakukan perbaikan berkesinambungan bagi Pemerintah Kabupaten Balangan untuk meningkatkan kinerjanya.

Sebagai wujud nyata dampak informasi yang diberikan dalam laporan kinerja, Pemerintah Kabupaten Balangan saat ini sedang melakukan penyusunan rancangan RPJMD tahun 2025-2029 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Informasi kinerja yang akan disajikan dalam LKIP ini dan LKIP beberapa tahun yang lewat akan menjadi salah satu alat utama untuk melakukan penyusunan kinerja daerah yang lebih *outcome* sesuai dengan pohon kinerja yang telah disusun berdasarkan *logical framework* isu strategis daerah.

A. GAMBARAN UMUM KABUPATEN BALANGAN

A.1. Luas dan Batas Wilayah

Gambar 1.1

Gambaran Kondisi Geografis Kabupaten Balangan



Letak Geografis

2001'37"-2035'58" LS
114050'24"-115050'24" BT

Luas Wilayah

1878,30 km²

Ketinggian

25 – 100 mdpl

Kecamatan Tebing Tinggi menjadi kecamatan dengan wilayah tertinggi di Kabupaten Balangan yaitu pada ketinggian 79 mdpl.

Kecamatan Halong menjadi kecamatan terluas di Kabupaten Balangan dengan persentase wilayah sebesar 35,13 persen (659,84 km²).

Sumber Data : Peta BPS Kabupaten Balangan Tahun 2024 diolah

Secara astronomis, Kabupaten Balangan terletak pada posisi 2° 35' 58" sampai dengan 2° 35' 58" Lintang Selatan dan 114° 50' 24" sampai dengan 115° 50' 24" Bujur Timur mempunyai daerah yang sebagian besar berada pada ketinggian antara 25-100 meter di atas permukaan laut. Kabupaten Balangan termasuk daerah pegunungan dimana banyak jalannya yang berkelak-kelok dan naik turun.

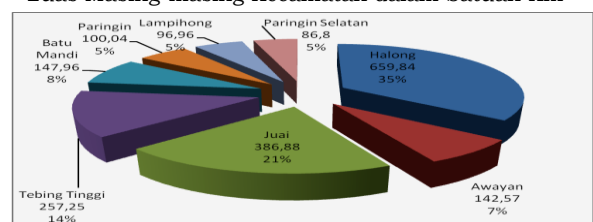
Kabupaten Balangan beribu kota kabupaten di Paringin, berbatasan dengan Kabupaten Tabalong (Kalimantan Selatan) dan Kabupaten Paser (Kalimantan Timur) di bagian utara, Kabupaten Kotabaru (Kalimantan Selatan) dan Kabupaten Paser (Kalimantan Timur) di bagian timur, Kabupaten Hulu Sungai Tengah di bagian selatan, serta Kabupaten Hulu Sungai Utara di bagian barat.

Kabupaten Balangan mempunyai luas 1.878,30 km² atau sekitar 5 persen dari total luas wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Secara administratif, Kabupaten Balangan terbagi menjadi 8 wilayah kecamatan dengan Kecamatan Halong sebagai kecamatan dengan wilayah terluas dan Kecamatan Paringin Selatan sebagai kecamatan dengan wilayah tersempit.

Kabupaten Balangan merupakan kabupaten otonom hasil pemekaran dari Kabupaten Hulu Sungai Utara melalui Undang-undang Nomor 2 Tahun 2003. Pada awal berdirinya, Kabupaten Balangan hanya terdiri dari 6 kecamatan. Kemudian pada tahun 2006 terjadi pemekaran wilayah menjadi 8 kecamatan.

Kabupaten Balangan dipimpin oleh H. Abdul Hadi sebagai Bupati dan (Alm) H. Supiani sebagai Wakil Bupati sejak tahun 2021. Berdasarkan hasil Pemilu yang dilaksanakan pada tanggal 27 Nopember 2025, H. Abdul Hadi dan Akhmad Fauzi ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Balangan terpilih Periode 2025-2029.

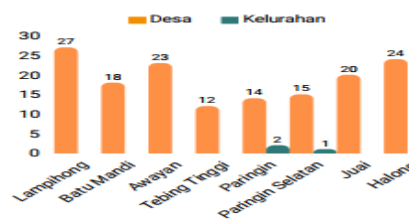
Gambar 1.2
Luas Masing-masing Kecamatan dalam Satuan Km²



Sumber : BPS, Kabupaten Balangan Dalam Angka Tahun 2017

Dari 8 kecamatan yang ada, total desa dan kelurahan yang dimiliki Kabupaten Balangan adalah sebanyak 157. Dengan rincian Desa berjumlah 154 desa dan 3 kelurahan. Kecamatan dengan jumlah desa/kelurahan terbanyak yaitu Kecamatan Lampihong dengan 27 desa. Sedangkan kecamatan dengan jumlah desa/kelurahan paling sedikit adalah Kecamatan Tebing Tinggi dengan 12 desa.

Jumlah Desa dan Kelurahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Balangan, 2023



A.2 Aspek Strategis RPJMD Periode 2021-2026

Aspek strategis yang menjadi bagian dari perwujudan visi Bupati untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) periode 2021-2026 yang ingin diwujudkan pada masa awal sampai akhir jabatan Bupati Balangan adalah:

- Infrastruktur Perdesaan dan Perkotaan.** Masih terbatasnya ketersediaan infrastruktur untuk pemukiman, ekonomi, transportasi, pendidikan dan kesehatan sehingga mengharuskan daerah berusaha meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur desa dan perkotaan untuk pemerataan pembangunan.
- Perekonomian Masyarakat Balangan Berbasis Pertanian, Perkebunan, dan Pariwisata serta Ekonomi Kreatif.** Perekonomian daerah masih didominasi sektor pertambangan, sedangkan sektor pertanian, perdagangan, perindustrian dan pariwisata masih sangat terbatas sehingga mengharuskan daerah berusaha meningkatkan perekonomian masyarakat Balangan berbasis pertanian, perkebunan, dan pariwisata serta ekonomi kreatif.
- Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat Balangan.** Kurangnya kuantitas dan kualitas SDM, sarana dan prasarana, fasilitas pelayanan, dan akses pendidikan dan kesehatan sehingga mengharuskan daerah berusaha meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat Balangan.
- Kualitas dan Layanan Birokrasi Pemerintahan sebagai Abdi Masyarakat dan Abdi Negara.** Masih rendahnya Indeks Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Balangan sehingga mengharuskan daerah untuk meningkatkan IRB dalam rangka meningkatkan kualitas dan layanan birokrasi pemerintahan sebagai abdi masyarakat dan abdi negara.
- Kehidupan Sosial, Budaya, dan Agama serta Pemerintahan yang Harmonis dan Kondusif.** Masih rendahnya angka PPKS yang tertangani, upaya dalam pelestarian seni dan budaya, peningkatan angka konflik sosial bernuansa SARA, serta belum maksimalnya kinerja pemerintahan mengharuskan daerah untuk mewujudkan kehidupan sosial, budaya, dan agama serta pemerintahan yang harmonis dan kondusif.

B. TUGAS POKOK DAN STRUKTUR ORGANISASI

B.1. Tugas Pokok

Pemerintah Kabupaten Balangan mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan, pelayanan, pemberdayaan masyarakat dan pembangunan. Salah satu tugas utama pemerintah adalah pelayanan umum (*public service*), selain tugas pembangunan (*development*) dan pemberdayaan masyarakat (*empowerment*). Meski demikian sering kali pelayanan publik dikeluhkan masyarakat karena tidak memenuhi ekspektasi dan kepuasan pengguna layanan. Mengingat fungsi utama pemerintah adalah melayani masyarakat maka pemerintah perlu terus berupaya meningkatkan pelayanan. Ukuran keberhasilan penyelenggaraan pelayanan ditentukan oleh tingkat kepuasan penerima pelayanan. Kepuasan penerima pelayanan dicapai apabila penerima pelayanan memperoleh pelayanan sesuai dengan yang dibutuhkan dan diharapkan. Salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Balangan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik adalah dengan upaya membangun Mall

Pelayanan Publik, melaksanakan standar kepatuhan pelayanan publik sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009.

B.2. Struktur Organisasi

Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Balangan telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Balangan Nomor 55 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Balangan mulai diberlakukan dan dilaksanakan pelantikan pejabat struktural dan fungsional pada bulan Januari tahun 2024. Adapun Nama Satuan Kerja/Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Balangan dapat dilihat pada tabel 1.1 di bawah ini:

Tabel 1.1
Nama Satuan Kerja/Organisasi Perangkat Daerah Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah

Nama Satuan Kerja/Organisasi			
1.	Sekretariat Daerah	14.	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.	Sekretariat DPRD	15.	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
3.	Inspektorat	16.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
4.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	17.	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
5.	Dinas Kesehatan	18.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
6.	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	19.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja
7.	Satuan Polisi Pamong Praja	20.	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
8.	Dinas Sosial	21.	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
9.	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup	22.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
10.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	23.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
11.	Dinas Perhubungan	24.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
12.	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	25.	Kecamatan (8 Kecamatan)
13.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		

Sumber data Bagian Organisasi Setda Kabupaten Balangan 2023

C. SISTEMATIKA PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Pelaporan kinerja ini ditekankan kepada capaian kinerja terhadap Indikator Kinerja Utama atas pertanggungjawaban terhadap keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan untuk pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan. Adapun sistematika penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Balangan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan :

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja :

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan dan sedikit gambaran tujuan tahun 2024 karena masa transisi akhir RPJMD.

Bab III Akuntabilitas Kinerja :

- A. Pengukuran Kinerja Tujuan
- B. Pengukuran Kinerja Sasaran
- C. Analisa Capaian Kinerja Sasaran

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

- 1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- 2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- 3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
- 4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
- 5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
- 6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- 7. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

- D. Realisasi Anggaran.
- E. Hasil evaluasi SAKIP Pemda, Rekomendasi KemenPAN RB dan Rencana Aksi Pemda.
- F. Piagam Penghargaan Tahun 2024.

Bab IV Penutup :

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran :

- 1) Perjanjian Kinerja.
- 2) Lain-lain yang dianggap perlu.



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

BAB II PERENCANAAN KINERJA



- A. TUJUAN RPJMD**
- B. PERJANJIAN KINERJA (PK)**
- C. ANGGARAN**
- D. DEFINISI OPERASIONAL KINERJA PADA
PERJANJIAN KINERJA**

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Tujuan RPJMD

Berdasarkan berita acara kesepakatan hasil pembahasan dan asistensi perbaikan cascading kinerja kabupaten dan SKPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Balangan mengacu pada Permenpan RB Nomor 89 Tahun 2021 tentang penjenjangan kinerja instansi pemerintah. Pada hari Jumat tanggal 05 Mei Tahun 2023 telah dilakukan Rapat Koordinasi Tim Sakip dan SKPD setelah asistensi dan review pohon kinerja oleh Kemenpan RB, dimana disepakati bahwa :

- a. Pohon kinerja hasil review akan dituangkan dalam dokumen perencanaan.
- b. SKPD telah melakukan tindaklanjut sebagaimana dimaksud dalam huruf A dalam perubahan renstra SKPD. Dan PK Tahun 2023 perubahan JPT sudah berdasarkan pada pokin hasil review oleh Kemenpan RB. Diikuti oleh PK JPT murni ataupun perubahan tahun 2024.
- c. Pemerintah Kabupaten Balangan akan melakukan perubahan RPJMD seiring dengan *timeline* perubahan yang diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Dan pohon kinerja kabupaten yang telah direview per tanggal 05 Mei 2023 ini telah dilakukan perubahan pada perjanjian kinerja tahun 2024.
- d. Berita acara sebagaimana dimaksud menjadi lampiran LKIP Pemda ini sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- e. Adapun matrik atau tabulasi rancangan perubahan RPJMD sesuai dengan berita acara ini ini adalah :

RANCANGAN KETERKAITAN RPJMD PENYESUAIAN DAN PK KABUPATEN

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target			
					2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi	1 Meningkatkan Kontribusi Ekonomi Sektor Unggulan Non Pertambangan	1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Industri Pengolahan	5,57	6,57	4,24	4,59
				2 Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan	6,53	7,53	5,36	5,8
				3 Laju Pertumbuhan Ekonomi Pertanian dan Perikanan	1,35	2,35	4,92	5,32
				4 Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pariwisata	6,45	7,45	5,57	6,03
			2 Meningkatkan Pertumbuhan Investasi	5 Persentase Peningkatan Investasi Daerah	48,88	53,61	60	75
2	Meningkatnya kualitas SDM	Indeks Pembangunan Manusia	3 Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	6 Usia Harapan Hidup	68,32	73,89	68,72	68,92
			4 Meningkatkan Kualitas Pendidikan	7 Angka Rata-Rata Lama Sekolah	8,36	8,63	8,9	9,17
				8 Angka Harapan Lama Sekolah	12,85	12,98	13,11	13,24
3	Menurunnya kemiskinan	Angka Kemiskinan	5 Meningkatkan Pengeluaran Perkapita	9 Pengeluaran Perkapita	1.308.553	1.341.267	1.374.798	1.409.168
			6 Menurunnya Ketimpangan Pendapatan	10 Indeks Gini Rasio	0,285	0,285	0,28	0,275
			7 Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka	11 Tingkat Pengangguran Terbuka	2,4	2,37	2,34	2,3
4	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Indeks Reformasi Birokrasi	8 Meningkatkan kualitas reformasi birokrasi	12 Nilai Sakip	72,40 (BB)	74,40 (BB)	76,40 (BB)	78,20 (BB)
				13 Nilai Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP
				14 Nilai EKPPD	3,5900	3,593	3,6	3,662
				15 Nilai IPP	3,51 (B)	4,51 (A)	4,77 (A)	4,91 (A)
				16 Nilai IKM	85	86	88	90
			9 Meningkatkan kualitas SDGS desa	17 Indeks Desa Membangun	0,7293	0,6795	0,6895	0,6995


 Kepala Bapperida
 Kabupaten Balangan,
M. Ismail Yusni, S.Sos, M.AP
 NIP. 19701207 199503 1 002

- f. Pada bulan September 2024 telah dilakukan perubahan terhadap target PK Tahun 2024 melalui evaluasi mandiri oleh Tim Sakip Pemerintah Kabupaten Balangan serta perubahan beberapa target tujuan dan sasaran akhir RPJMD Kabupaten Balangan sesuai dengan Berita Acara Bupati Balangan Nomor: 060/390/ORG/SETDA-BLG/2024 tentang Penajaman Target RPJMD. Karena target akhir RPJMD ini akan menjadi salah satu bahan analisa dalam penyusunan LKIP Tahun 2024 yang disusun tahun 2025. Adapun berita acara perubahan dan penajaman target akhir RPJMD sebagaimana lampiran LKIP ini, dan lampiran berita acara sebagaimana data berikut ini

Lampiran Berita Acara

No	Uraian Tindakanjnut Review
1.	Perbaikan pohon kinerja telah dilakukan namun belum dapat dilakukan penyesuaian terhadap Dokumen RPJMD Tahun 2021-2026 mengingat masa perubahan RPJMD belum dapat dilakukan sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Alasan kedua karena pada tahun 2025 akan disusun RPJMD terbaru 2025-2029 sehingga penyesuaian akan dilakukan pada periode tersebut. Hal ini selaras dengan berita acara yang dibuat pada tanggal 5 Mei 2023, dan ditandatangani oleh Tim Sakip Kabupaten dan Perwakilan SKPD serta diketahui oleh Bupati Balangan. Dan telah diupload ke dalam E-Sakip review Kemen PAN RB pada tanggal 26 Agustus 2023.
2.	Perbaikan pohon kinerja sebagaimana dimaksud pada poin 1 dilakukan dengan menuangkan kinerja ke dalam Perjanjian Kinerja Kabupaten Tahun 2024.
3.	Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada poin 2 sebagaimana Lampiran Berita Acara ini dan akan dipergunakan dalam Penyusunan LKIP tahun 2024 yang disusun pada tahun 2025.
4.	Beberapa target dalam Bab V RPJMD juga dilakukan rasionalisasi mengingat ada beberapa target yang sudah tercapai pada tahun 2023. Dan matrik target Bab V yang dirasionalisasi sebagaimana data dibawah ini: a. Target Akhir RPJMD Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Industri Pengolahan semula 4,59 menjadi 5,24. b. Target Akhir RPJMD Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan semula 5,8 menjadi 20,30. c. Target Akhir RPJMD Laju Pertumbuhan Ekonomi Pertanian dan Perikanan semula 5,32 menjadi 11,42. d. Target Akhir RPJMD Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pariwisata semula 6,03 menjadi 12,87. e. Target Akhir RPJMD Usia Harapan Hidup semula 68,92 menjadi 74,49. f. Target Akhir RPJMD Indeks Gini Ratio semula 0,275 menjadi 0,224. g. Target Akhir RPJMD Nilai IKM semula 85 menjadi 90. h. Target Akhir RPJMD Indeks Desa Membangun semula 0,6995 menjadi 0,8459.

- g. Adapun tujuan dan indikator tujuan tahun 2024 yang akan kami bahas dalam BAB III adalah gambaran tujuan sebagaimana kesepakatan berita acara yang tertuang dalam huruf d dan huruf e sebagaimana gambaran tabulasi data berikut:

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target 2024	Target Akhir RPJMD
1.	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi	3,3-3,5	4 - 4,5
2.	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia	70,61	71,50
3.	Menurunnya Kemiskinan	Angka Kemiskinan	5,1 - 4,9	4,9 - 4,7
4.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Indeks Reformasi Birokrasi	61,80	65,80

- h. Namun kami akan tetap menyajikan gambaran tabulasi tujuan sesuai dokumen RPJMD (sebelum berita acara ini dibuat) dalam BAB III. Karena tujuan RPJMD belum dituangkan dalam dokumen perencanaan sebagaimana sasaran kinerja yang sudah kami tuangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Kepala Daerah Tahun 2024 baik murni ataupun perubahan. Adapun matrik tujuan RPJMD sebagaimana data dibawah ini:

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target 2024	Target Akhir RPJMD
1.	Meningkatnya Infrastruktur Wilayah Perdesaan dan Perkotaan	Indeks Infrastruktur Wilayah	77,79	85,82
2.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	68,48	69,38
3.	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan	Pertumbuhan Ekonomi	3,3 – 3,5	4 – 4,5
4.	Menurunnya Angka Pengangguran Terbuka	Angka Pengangguran Terbuka	2,37	2,3
5	Meningkatnya Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Yang Berkualitas	Angka Rata-rata Lama Sekolah	8,63	9,17
		Angka Harapan Lama Sekolah	12,98	13,24
		Usia Harapan Hidup	68,52	68,92
6	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	61,80	65,80
7	Meningkatnya Kualitas Kehidupan Sosial, Budaya, dan Agama serta Pemerintahan Yang Harmonis dan Kondusif	Angka Kemiskinan	5,1 – 4,9	4,9- 4,7
		Angka Konflik Sosial Bernuansa SARA	0	0
		Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	100
		Persentase Pengembangan Seni dan Budaya	81	100
8	Meningkatnya Nilai Indeks Desa Membangun	Indeks Desa Membangun	0,6795	0,9595

B. Perjanjian Kinerja (PK)

Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Balangan Tahun 2024 ditetapkan pada bulan Januari 2024 dan telah dilakukan perubahan PK pada bulan September tahun 2024. Adapun Perjanjian Kinerja tahun 2024 tergambar dalam tabulasi berikut :

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Balangan Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Awal	Target Revisi
1.	Meningkatnya Kontribusi Ekonomi Sektor Unggulan Non Pertambangan	1. Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Industri Pengolahan	6,57	4,49
		2. Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan	7,53	17,40
		3. Laju Pertumbuhan Ekonomi Pertanian dan Perikanan	2,35	9,79
		4. Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pariwisata	7,45	11,03
2.	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi	5. Persentase Peningkatan Investasi Daerah	53,61	51,13
3.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	6. Usia Harapan Hidup	73,89	73,89
4.	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	7. Angka Rata-Rata Lama Sekolah	8,63	8,63
		8. Angka Harapan Lama Sekolah	12,98	12,98
5.	Meningkatnya Pengeluaran Perkapita	9. Pengeluaran Perkapita	1.341.267	1.109.546
6.	Menurunnya Ketimpangan Pendapatan	10. Indeks Gini Rasio	0,285	0,258
7.	Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka	11. Tingkat Pengangguran Terbuka	2,37	2,37
8.	Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi	12. Nilai Sakip	74,40 (BB)	74,40 (BB)
		13. Nilai Opini BPK	WTP	WTP
		14. Nilai EKPPD	3,593	3,593
		15. Nilai IPP	4,51 (A)	4,51 (A)
		16. Nilai IKM	86	86
9.	Meningkatnya Kualitas SDGS Desa	17. Indeks Desa Membangun	0,6795	0,7997

Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Balangan pada Tahun 2024 mengalami beberapa perubahan pada target dan alokasi anggaran. Adapun kondisi yang menyebabkan perlu dilakukannya revisi adalah adanya penyesuaian strategi perubahan sistem kerja, antara lain perubahan alokasi anggaran, perubahan pelaksanaan kegiatan, dan perubahan pola kerja.

Perubahan Perjanjian Kinerja tersebut sejalan dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang mengatur:

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

- a. *Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;*
- b. *Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran); dan*
- c. *Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.*

C. Anggaran

Dalam upaya mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024, ditetapkanlah beberapa program dan anggaran yang terdiri dari 75 (tujuh puluh lima) program yang secara detail dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.2
Program dan Anggaran dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Balangan Tahun 2024

No	Program	Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan
1.	Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Rp. 1.055.900.400	Rp. 1.154.410.500
2.	Pengendalian Izin Usaha Industri	Rp. 75.530.600	Rp. 106.805.200
3.	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Rp. 3.937.611.600	Rp. 7.270.306.500
4.	Pengembangan UMKM	Rp. 1.745.930.000	Rp. 2.760.930.000
5.	Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp. 13.654.872.700	Rp. 13.836.978.700
6.	Pengembangan Ekspor	Rp. 1.973.984.500	Rp. 2.569.134.000
7.	Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Rp. 50.600.000	Rp. 51.500.000
8.	Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Rp. 116.750.000	Rp. 276.750.000
9.	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Rp. 757.219.200	Rp. 1.172.019.100
10.	Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Rp. 578.639.200	Rp. 744.252.700
11.	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rp. 65.793.749.131	Rp. 124.507.018.281
12.	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Rp. 12.930.011.050	Rp. 23.730.181.050
13.	Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Rp. 1.143.684.300	Rp. 1.523.934.700
14.	Penyuluhan Pertanian	Rp. 12.545.871.600	Rp. 12.631.368.200
15.	Pengelolaan Perikanan Budidaya	Rp. 31.798.311.919	Rp. 42.889.294.194
16.	Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rp. 65.016.307.750	Rp. 69.848.887.750
17.	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Rp. 78.371.548.595	Rp. 87.035.446.495
18.	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Rp. 589.944.200	Rp. 689.944.100
19.	Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Rp. 2.253.260.062	Rp. 2.400.539.662
20.	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp. 9.063.806.156	Rp. 12.218.112.608
21.	Pengawasan Keamanan Pangan	Rp. 78.747.200	Rp. 78.747.200
22.	Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Rp. 4.472.520.800	Rp. 4.843.407.300
23.	Pemasaran Pariwisata	Rp. 1.529.405.500	Rp. 2.048.458.900
24.	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Rp. 1.454.244.900	Rp. 2.172.982.300
25.	Pengembangan Kebudayaan	Rp. 2.758.890.000	Rp. 396.500.000
26.	Pengembangan Kesenian Tradisional	Rp. 5.700.501.000	Rp. 2.070.955.000
27.	Pembinaan Sejarah	Rp. 3.063.085.900	Rp. 4.873.682.000
28.	Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Rp. 3.148.067.800	Rp. 644.941.000
29.	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp. 237.322.000	Rp. 320.622.000
30.	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp. 570.409.000	Rp. 661.209.000
31.	Promosi Penanaman Modal	Rp. 492.902.900	Rp. 521.783.700
32.	Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp. 212.895.000	Rp. 147.695.000
33.	Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Rp. 38.465.007.183	Rp. 45.606.020.271
34.	Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Rp. 125.556.079.700	Rp. 165.705.719.700
35.	Penataan Bangunan Gedung	Rp. 172.417.586.000	Rp. 241.194.974.600

No	Program	Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan
36.	Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Rp. 5.230.539.500	Rp. 6.829.269.500
37.	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 9.389.229.620	Rp. 10.210.533.240
38.	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp. 3.933.361.400	Rp. 5.499.730.200
39.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp. 18.095.140.000	Rp. 23.318.050.000
40.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rp. 28.348.783.000	Rp. 32.171.292.200
41.	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp. 107.807.768.584	Rp. 229.667.623.192
42.	Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Rp. 495.527.400	Rp. 1.097.827.400
43.	Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp. 1.026.762.550	Rp. 1.526.762.390
44.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp. 12.773.969.300	Rp. 14.981.795.000
45.	Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Rp. 3.143.997.100	Rp. 3.314.814.600
46.	Pengendalian Penduduk	Rp. 5.708.902.800	Rp. 7.026.285.800
47.	Peningkatan Kualitas Keluarga	Rp. 315.187.700	Rp. 1.090.621.200
48.	Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rp. 3.402.152.750	Rp. 3.451.592.950
49.	Pengelolaan Pendidikan	Rp. 215.986.230.390	Rp. 117.524.112.800
50.	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rp. 5.720.512.900	Rp. 4.496.361.400
51.	Pembinaan Perpustakaan	Rp. 4.303.261.600	Rp. 4.873.079.300
52.	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Rp. 46.330.000	Rp. 66.330.000
53.	Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Rp. 1.018.510.000	Rp. 1.457.909.800
54.	Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Rp. 23.817.058.200	Rp. 23.974.668.200
55.	Penyelenggaraan Jalan	Rp. 251.682.511.600	Rp. 248.931.396.600
56.	Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp. 26.507.226.328	Rp. 41.017.418.328
57.	Penempatan Tenaga Kerja	Rp. 838.649.200	Rp. 1.092.719.700
58.	Administrasi Pemerintahan Desa	Rp. 3.496.029.600	Rp. 16.721.392.000
59.	Pemberdayaan Sosial	Rp. 5.814.339.700	Rp. 7.785.258.400
60.	Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp. 15.928.131.100	Rp. 15.121.159.100
61.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Rp. 8.829.408.500	Rp. 13.419.728.200
62.	Rehabilitasi Sosial	Rp. 3.256.211.100	Rp. 3.062.286.500
63.	Penanganan Bencana	Rp. 1.048.842.300	Rp. 1.607.329.800
64.	Penanggulangan Bencana	Rp. 11.241.698.110	Rp. 13.933.888.460
65.	Perekonomian dan Pembangunan	Rp. 4.624.344.400	Rp. 4.705.464.400
66.	Perencanaan Tenaga Kerja	Rp. 32.718.000	Rp. 32.718.000
67.	Hubungan Industrial	Rp. 6.818.754.900	Rp. 10.648.154.900
68.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 110.993.120.011	Rp. 142.799.186.565
69.	Penyelenggaraan Pengawasan	Rp. 4.327.067.000	Rp. 3.108.355.000
70.	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp. 4.253.683.400	Rp. 3.881.460.400
71.	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 3.753.168.400	Rp. 4.364.356.400
72.	Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp. 2.420.213.600	Rp. 2.816.002.600
73.	Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp. 469.975.378.253	Rp. 517.236.357.461
74.	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp. 4.203.459.500	Rp. 11.389.027.600
75.	Peningkatan Kerjasama Desa	Rp. 15.807.473.800	Rp. 36.313.953.300

D. Definisi Operasional Kinerja pada Perjanjian Kinerja

No	Indikator Kinerja	Rumus	Sumber Data	Keterangan
1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Industri Pengolahan	Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor industri / Jumlah PDRB x 100%	Data Badan Pusat Statistik; Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
2.	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan	Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor Perdagangan / Jumlah PDRB x 100%	Data Badan Pusat Statistik; Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
3.	Laju Pertumbuhan Ekonomi Pertanian dan Perikanan	Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pertanian / perkebunan Jumlah PDRB x 100%	Data Badan Pusat Statistik; Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	
4.	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pariwisata	Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pariwisata / Jumlah PDRB x 100%	Data Badan Pusat Statistik; Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
5.	Persentase Peningkatan Investasi Daerah	(Nilai Realisasi Investasi Tahun N - Nilai Realisasi Investasi Tahun Sebelumnya) / Nilai Realisasi Investasi Tahun Sebelumnya x 100%	Rilis LKPM Kementerian Investasi; Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
6.	Usia Harapan Hidup	Jumlah umur orang meninggal dibagi jumlah orang yang meninggal	Data Badan Pusat Statistik; Dinas Kesehatan	
7.	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	$RLS = 1/n \times \sum_{i=1}^n x_i$ Ket: RLS = Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 25 tahun ke atas x_i = Lama Sekolah Penduduk ke -/ yang berusia 25 tahun N = Jumlah Penduduk Usia 25 tahun ke atas	Data Badan Pusat Statistik; Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
8.	Angka Harapan Lama Sekolah	$HLSta = FK \times n / \sum_{i=a}^t P_{ti}$ Ket: HLSta = Harapan Lama Sekolah pada umur a di tahun t Eti = Jumlah Penduduk Uisa I yang Bersekolah pada tahun t I = Usia (a, a + 1, . . . N) FK = Faktor Koreksi Pesantren	Data Badan Pusat Statistik; Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
9.	Pengeluaran Perkapita	$EYS = \text{Sigma}(E/P)$	Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas).	
10.	Indeks Gini Rasio	Gini Rasio = $1 - \sum_{i=1}^n P_i (Q_i + Q_{i-1}) P_i$: persentase rumahtangga atau penduduk pada kelas ke-i Q_i : persentase kumulatif total pendapatan atau pengeluaran sampai kelas ke-i	Data Badan Pusat Statistik; Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

No	Indikator Kinerja	Rumus	Sumber Data	Keterangan
11.	Tingkat Pengangguran Terbuka	Jumlah penganggur terbuka usia angkatan kerja/ jumlah penduduk angkatan kerja x 100%	Data Badan Pusat Statistik, Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja	
12.	Nilai Sakip	LHE SAKIP Kemenpan RB RI	LHE SAKIP Kemenpan RB RI; Sekretariat Daerah; Inspektorat; Bapperida; dan Seluruh SKPD	
13.	Nilai Opini BPK	Perolehan Opini WTP dalam LHP BPK atas LKPD (UU Nomor 15 Tahun 2004)	LHP BPK atas LKPD, BPKPAD; Inspektorat	
14.	Nilai EKPPD	Hasil Penilaian LPPD oleh Kementrian Dalam Negeri	Hasil Penilaian LPPD oleh Kementrian Dalam Negeri; Sekretariat Daerah	
15.	Nilai IPP	Tahapan Penghitungan Indeks Pelayanan Publik : 1. Menentukan Nilai untuk Setiap Indikator : Nilai per Indikator : (nilai F01 + Nilai F02 + Nilai F03) / 3 x Bobot per Indikator 2. Menentukan nilai setiap aspek Nilai per aspek: $\sum \text{nilai per indikator}$ 3. Menentukan Indeks Nilai Indeks : $\sum \text{nilai aspek } n \times \text{bobot aspek } n$ Aspek Penilaian Indeks Pelayanan Publik: Kebijakan Pelayanan, Profesionalisme SDM, Sarana Prasarana, Sistem Informasi Pelayanan Publik, Konsultasi dan Pengaduan Inovasi	Hasil Penilaian Kementerian PANRB; Sekretariat Daerah dan UPP	
16.	Nilai IKM	Bobot nilai rata-rata tertimbang = Jumlah bobot/jumlah unsur IKM = (Total dari Nilai Persepsi Per Unsur/Total Unsur yang terisi) x Nilai Penimbang	Perhitungan Mandiri; Sekretariat Daerah dan UPP	
17.	Indeks Desa Membangun	Indeks Variabel = $(\sum \text{Indikator } X) / (\text{Nilai Maksimum } (X))$ Indeks dari setiap variabel menjadi Indeks Komposit yang disebut dengan Indeks Desa membangun (IDM)	Perhitungan Mandiri; Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.	



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA



- A. PENGUKURAN KINERJA TUJUAN**
- B. PENGUKURAN KINERJA SASARAN**
- C. ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN**
- D. REALISASI ANGGARAN**
- E. HASIL EVALUASI PEMDA, REKOMENDASI MENPAN RB DAN RENCANA AKSI PEMDA**
- F. PIAGAM PENGHARGAAN**

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Kinerja Tujuan

Pada BAB III tujuan ini pemerintah daerah Kabupaten Balangan akan tetap menyajikan data kinerja tujuan RPJMD yang termaktub dalam dokumen RPJMD mengingat tujuan RPJMD hasil revisi pohon kinerja belum dituangkan dalam dokumen sebagaimana sasaran RPJMD ke dalam perjanjian kinerja tahun 2024 baik murni ataupun perubahan.

Mengacu pada dokumen RPJMD sebelum review pohon kinerja oleh Kementerian PAN RB, tujuan dapat kami sajikan dalam tabulasi data berikut :

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024	Target Akhir RPJMD	Keterangan
1.	Meningkatnya Infrastruktur Wilayah Perdesaan dan Perkotaan	Indeks Infrastruktur Wilayah	77,79			85,82	
2.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	68,48			69,38	
3.	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan	Pertumbuhan Ekonomi	3,3 – 3,5			4 – 4,5	
4.	Menurunnya Angka Pengangguran Terbuka	Angka Pengangguran Terbuka	2,37			2,3	
5	Meningkatnya Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Yang Berkualitas	Angka Rata-rata Lama Sekolah	8,63			9,17	
		Angka Harapan Lama Sekolah	12,98			13,24	
		Usia Harapan Hidup	68,52			68,92	
6	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	61,80			65,80	
7	Meningkatnya Kualitas Kehidupan Sosial, Budaya, dan Agama serta Pemerintahan Yang Harmonis dan Kondusif	Angka Kemiskinan	5,1 – 4,9			4,9- 4,7	
		Angka Konflik Sosial Bernuansa SARA	0			0	
		Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum	100			100	

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024	Target Akhir RPJMD	Keterangan
		Persentase Pengembangan Seni dan Budaya	81			100	
8	Meningkatnya Nilai Indeks Desa Membangun	Indeks Desa Membangun	0,6795			0,9595	

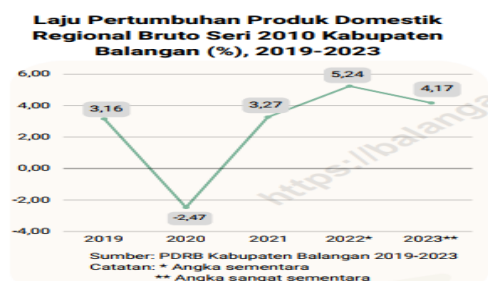
Adapun gambaran realisasi tujuan sesuai hasil review pohon kinerja yang difasilitasi oleh Kemenpan RB pada bulan Mei 2023 sebagaimana telah dijelaskan pada BAB II dan juga karena tahun 2024 ini merupakan masa transisi akhir RPJMD sehingga perlu disajikan kondisi realisasi tujuan sebagaimana tabulasi data berikut:

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024	Target Akhir RPJMD	Keterangan
1.	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi	3,3-3,5	4,15	125,75	4-4,5	Realisasi mencapai target akhir
2.	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia	70,61	73,83	104,56	71,50	Realisasi melampaui target akhir
3.	Menurunnya Kemiskinan	Angka Kemiskinan	5,1 - 4,9	4,87	104,51	4,9-4,7	Realisasi belum melampaui target akhir
4.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Indeks Reformasi Birokrasi	61,80	83,06	134,40	65,80	Realisasi melampaui target akhir

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju Pertumbuhan Ekonomi Pemerintah Kabupaten Balangan tahun 2024 adalah 4,15 dengan capaian 125,75. Berdasarkan data tersebut di atas diketahui bahwa realisasi kinerja Laju Pertumbuhan Ekonomi tahun 2023 adalah 4,17 dengan capaian 126,36 persen.

Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Balangan pada umumnya bernilai positif yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi. Namun laju pertumbuhan sempat bernilai negatif pada tahun 2020. Nilai negatif tersebut menunjukkan terjadinya kontraksi perekonomian di Kabupaten Balangan akibat pandemi Covid-19. Kemudian pada tahun 2021, kondisi perekonomian Kabupaten Balangan mulai membaik dengan laju pertumbuhan 3,27 persen dan terus mengalami peningkatan hingga pada tahun 2022 dengan laju pertumbuhan sebesar 5,24 persen. Pada tahun 2023, terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi, namun tetap positif di angka 4,17 persen. Dan pada tahun 2024 sebesar 4,15 persen.



LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI

NO	TAHUN	Laju pertumbuhan ekonomi
1	2021	3,27
2	2022	5,24
3	2023	4,17
4	2024	4,15

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Balangan tahun 2023 sebesar 4,17 sangat didominasi oleh pertambangan. Fluktuasi naik turun pertumbuhan ekonomi Kabupaten Balangan beberapa tahun terakhir membuka kesempatan bagi Pemerintah Kabupaten Balangan untuk melakukan diversifikasi perekonomian diluar sektor pertambangan dan ingin mewujudkan kemandirian perekonomian.

Berdasarkan data BPS. Pada bulan Pebruari tahun 2025 didapatkan realisasi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Balangan adalah 4,15. Ada perlambatan laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2024. Adapun matrik perbandingan antar kabupaten kota se Kalimantan Selatan dapat kami sajikan dalam tabulasi data berikut :

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tanah Laut	3,47	5,12	4,78	5,01
Kotabaru	3,35	4,58	4,29	5,34
Banjarnegara	3,21	4,48	4,35	4,76
Barito Kuala	3,17	3,59	4,07	5,02
Tapin	3,43	4,91	4,88	4,89
HSS	4,19	4,02	5,27	5,15
HST	3,01	3,92	4,11	4,95
HSU	3,21	4,08	4,51	4,43
Tabalong	3,27	5,29	4,90	4,87
Tanah Bumbu	4,23	5,45	4,84	4,82
Balangan	3,27	5,24	4,17	4,15
Banjarmasin	3,41	5,69	5,62	5,63
Banjarnegara	3,33	7,93	6,81	6,71

Catatan/Note: ...
Sumber/Source: Badan Pusat Statistik, berbagai sensus, survei, dan sumber lain/BPS-Statistics Indonesia, various censuses, surveys and other sources

Jika Pemerintah Kabupaten Balangan menginginkan pertumbuhan ekonomi diatas 7 persen dan tidak lagi bergantung pada distribusi pertambangan maka perlu adanya *extra ordinary effort* terutama mendatangkan investasi berskala besar, massif dan berkelanjutan. Hal ini bukan hanya sekedar menarik investor diluar sektor pertambangan, tetapi juga menarik minat penduduk yang berkualitas secara person sumber daya manusianya agar tertarik untuk bekerja di Kabupaten Balangan. Upaya terobosan lain misalnya masuknya perguruan tinggi atau fakultas yang bertaraf nasional yang sementara ini sudah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Balangan melalui PSDKU UNLAM. Potensi ini akan memiliki *value added* dan *multiplier effect* tidak hanya terhadap jasa pendidikan tercapai juga sektor lainnya. Pengembangan universitas dan kampus maupun prodi dari tahun ke tahun diupayakan akan meningkatkan kuantiti sehingga jumlah mahasiswa akan bertambah setiap tahunnya hingga menuju Indonesia Emas dan Balangan akan semakin berkembang secara tata kelola dan pertumbuhan ekonomi.

Kemudian adanya visi misi Kepala Daerah terpilih yang ingin menggerakkan pelaku usaha UMKM agar lebih SMART, pertanian yang lebih maju melalui agrowisata dan penarikan minat para investor diluar area tambang juga menjadi dominasi penarikan kinerja strategis Pemda untuk dituangkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah lima tahun mendatang.

Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi ketergantungan pada zona pertambangan banyak hal yang harus dilakukan sebagaimana dijelaskan dalam paragraf sebelumnya yakni diversifikasi ekonomi sektor pertanian berkelanjutan yang dapat menghasilkan produk bernilai tambah, mendukung pembangunan industri kreatif seperti kerajinan tangan, desain dan seni yang dapat menarik wisatawan dan menciptakan lapangan kerja, mengembangkan pariwisata berbasis alam seperti batariis dan melestarikan budaya Balangan sehingga dapat menarik wisatawan dan menciptakan lapangan kerja, membangun teknologi informasi untuk meningkatkan akses informasi bagi masyarakat dengan kolaborasi penggunaan dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD). Pemerintah Kabupaten Balangan juga terus mendorong dan mendukung pengembangan usaha kecil dan menengah (UMKM) dengan pelatihan dan akses ke modal seperti inovasi bantuan usaha tanpa bunga kerjasama dengan perbankan.

Sarana prasarana infrastruktur yang menjadi faktor pendukung terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Balangan juga turut menjadi perhatian Kepala Daerah terpilih. Dan sampai saat ini kondisi jalan sudah hampir 90 persen mengalami kemajuan pesat dengan kondisi jalan yang mantap, kondisi infrastruktur yang baik akan sangat berpengaruh terhadap alur distribusi bahan mentah maupun bahan jadi produk unggulan perekonomian daerah. Berbagai kebijakan dan juga perbaikan juga secara berkelanjutan diberlakukan dan dilakukan oleh pemerintah,

baik yang di pusat maupun di daerah, untuk terus memutar roda perekonomian yang sempat macet dan senantiasa berupaya meningkatkan produksi berbagai lapangan usaha yang memungkinkan semaksimal mungkin, termasuk halnya di Kabupaten Balangan.

Upaya-upaya perbaikan perekonomian yang terus dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, dan unit usaha yang ada di Kabupaten Balangan pada akhirnya mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang positif dan dipercepat tahun 2022, yaitu sebesar 5,24 persen.

Dari seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Balangan merupakan kabupaten dengan jumlah penduduk paling sedikit selama sepuluh tahun terakhir, dengan jumlah penduduk pada tahun 2023 yaitu 136.520 jiwa. Dengan laju pertumbuhan penduduk 1,10 persen, angka beban ketergantungan 47,46 persen dan rasio jenis kelamin sebesar 103 persen.

Dalam hal perekonomian, pada tahun 2023 seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan mengalami pertumbuhan ekonomi yang positif. Dari keseluruhan kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Balangan menduduki peringkat ke-11 dengan nilai pertumbuhan ekonomi sebesar 4,17 persen dan tahun 2024 sebesar 4,15. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi paling tinggi yaitu Kota Banjarbaru dengan pertumbuhan sebesar 6,81 persen.

Lapangan Usaha/Industry	2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/Agriculture, Forestry, and Fishing	-1,80	3,54	0,35	3,99	3,63
B Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying	-3,74	3,84	6,19	3,62	3,39
C Industri Pengolahan/Manufacturing	-2,75	4,26	4,57	3,54	3,82
D Pengadaan Listrik dan Gas/Electricity and Gas	3,82	4,05	7,68	8,19	6,20
E Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities	6,10	0,53	3,05	2,94	2,31
F Konstruksi/Construction	-0,09	0,74	4,25	7,33	7,10
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles	-1,10	1,23	5,53	6,67	4,96
H Transportasi dan Pengudangan/Transportation and Storage	-2,20	1,54	6,08	6,50	7,54
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/Accommodation and Food Service Activities	-0,26	1,34	5,45	9,11	7,69
J Informasi dan Komunikasi/Information and Communication	6,75	5,20	5,44	5,71	6,64
K Jasa Keuangan dan Asuransi/Financial and Insurance Activities	4,50	-3,99	1,59	6,38	9,12

Lapangan Usaha/Industry	2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
L Real Estate/Real Estate Activities	2,48	3,39	3,69	5,54	5,34
M,N Jasa Perusahaan/Business Activities	-2,60	4,34	7,28	8,59	7,29
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/Public Administration and Defence; Compulsory Social Security	3,60	-2,44	2,90	5,48	8,47
P Jasa Pendidikan/Education	3,78	2,15	5,48	4,79	8,17
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/Human Health and Social Work Activities	5,87	8,88	6,42	6,12	6,76
R,S,T,U Jasa Lainnya/Other Services Activities	-1,18	1,04	6,26	6,20	8,03
Produk Domestik Regional Bruto/Gross Regional Domestic Product	-2,47	3,27	5,24	4,17	4,15

Catatan/Note: --- Badan Pusat Statistik, berbagai sensus, survei dan sumber lain/BPS-Statistics Indonesia, various census, survey, and other sources

Secara umum, seluruh kategori lapangan usaha di dalam PDRB Balangan tumbuh positif, bahkan hampir semuanya mengalami percepatan pertumbuhan ekonomi di tahun 2023. Akan tetapi, masih terdapat kategori lapangan usaha yang mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi, seperti Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; dan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sehingga realisasi tahun 2023 turun dibandingkan tahun 2022. Kemudian ditambah data BPS menunjukkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan pada tahun 2024 menjadi 4,15. Distribusi persentase PDRB ADHB menurut lapangan usaha tahun 2024, terbesar pada kategori pertambangan dan penggalian yakni 72,61 persen disusul oleh kategori pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 7,87 persen. PDRB menurut lapangan usaha mengalami perubahan klasifikasi dari 9 lapangan usaha menjadi 17 lapangan usaha.

Beberapa arah kebijakan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Balangan Tahun 2025 – 2029 dalam aspek transformasi ekonomi dan konsep diversifikasi ekonomi adalah:

- A. Penerapan iptek serta inovasi dan peningkatan produktivitas ekonomi seperti pengembangan pusat-pusat agroindustri dan agrobisnis, persiapan hilirisasi industri strategis berbasis sektor ekonomi eksisting yang ditingkatkan, peningkatan produktivitas khususnya komoditas unggulan hasil pertanian dan perikanan, pengembangan kawasan sentra produksi pangan terpadu, modern, dan berkelanjutan untuk pemenuhan konsumsi pangan dan gizi, penguatan cadangan pangan dan peningkatan kesejahteraan petani, pengembangan diversifikasi pangan dan peningkatan ketahanan pangan, pengembangan basis sektor-sektor ekonomi baru yang ramah lingkungan yang didorong oleh pengembangan inovasi, penyediaan tenaga kerja

dengan talenta terampil dan berpengalaman antara lain melalui *up-skilling* dan *re-skilling* sesuai kebutuhan kegiatan ekonomi masa depan yang dikembangkan melalui skema *education to employment* dan Peningkatan kesempatan kerja.

- B. Penerapan ekonomi hijau yaitu pengembangan basis sektor-sektor ekonomi baru yang ramah lingkungan yang didorong oleh pengembangan inovasi. Hal ini juga penting dilakukan agar pertambangan yang ada tidak merusak ekosistem.
- C. Transformasi digital yakni peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau digital *skill* dan pengembangan TIK dengan meningkatkan digitalisasi di sektor strategis. Dan bahkan tahun 2025 ada beberapa desa yang akan diusung untuk menerapkan desa digital dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat.
- D. Perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yakni pengembangan dan pembangunan kawasan yang berorientasi pada keterpaduan antar perkotaan dan perdesaan sebagai satu kesatuan wilayah, pembangunan perkotaan yang cerdas, hijau, dan berkelanjutan, peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat perdesaan serta penanggulangan kemiskinan dan peningkatan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pemerintahan desa dengan pemerintahan daerah kabupaten untuk pengembangan wilayah yang terpadu sesuai karakteristik masing-masing desa.

2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia Pemerintah Kabupaten Balangan tahun 2024 adalah 73,83 dengan capaian sebesar 104,56%, tercapai sesuai target dan termasuk dalam kategori sangat tinggi. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Balangan mengalami kenaikan tiap tahunnya dan akumulasi kenaikan dari tahun 2021 ke 2024 adalah 2,25. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Pemerintah Kabupaten Balangan dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat sebagaimana grafik di bawah ini:

**Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Kabupaten Balangan, 2021-2024**



Sumber : IPM Provinsi Kalimantan Selatan 2024(Metode Baru),
[Umur Harapan Hidup Hasil Long Form SP2020]

Pada tahun 2024 IPM Balangan tumbuh 1,18 persen. Tetap tumbuh positif dibandingkan tahun sebelumnya dan mengalami pertumbuhan yang lebih besar dibandingkan pertumbuhan nilai IPM dari tahun 2022 ke tahun 2023. Hal tersebut mengindikasikan sudah terjadinya pertumbuhan dan perkembangan berbagai aspek kesehatan, pendidikan, dan konsumsi di Kabupaten Balangan tahun 2024 dengan cukup baik namun harus terus ditingkatkan agar lebih baik lagi. Dengan pembangunan yang dilaksanakan dan fokus pada pengembangan ekonomi, pendidikan dan kesehatan diharapkan di tahun mendatang IPM Kabupaten Balangan akan mengalami peningkatan yang signifikan dan SDM Kabupaten Balangan dapat berperan dalam pengembangan berbagai bidang baik ditingkat lokal dan nasional.

Pada tahun 2024, semua komponen pembentuk angka IPM juga mengalami peningkatan. Angka Harapan Hidup saat lahir meningkat 0,18 tahun menjadi 73,87 tahun, Rata-rata Lama Sekolah meningkat 0,10 tahun menjadi 8,13 tahun dan Harapan Lama Sekolah meningkat 0,27 tahun menjadi 13,09 tahun. Kemudian, pengeluaran per kapita yang disesuaikan untuk Kabupaten Balangan mencapai nilai 12.325 ribu rupiah per orang per tahun.



Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan, 2021-2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)			
	2021	2022	2023	2024
Kalimantan Selatan	73,45	74	74,66	75,19
1. Tanah Laut	71,86	72,33	72,98	73,39
2. Kota Baru	70,94	71,57	72,01	72,42
3. Banjar	72,4	73,25	74,01	74,41
4. Barito Kuala	69,08	69,87	70,67	71,40
5. Tapin	71,9	72,61	73,52	74,06
6. Hulu Sungai Selatan	71,93	72,47	73,21	73,95
7. Hulu Sungai Tengah	71,67	72,32	72,76	73,33
8. Hulu Sungai Utara	69,63	70,33	71,12	71,70
9. Tabalong	74,25	74,82	75,43	75,97
10. Tanah Bumbu	72,55	73,34	73,86	74,50
11. Balangan	71,58	72,2	72,97	73,83
12. Kota Banjarmasin	79,09	79,46	79,98	80,53
13. Kota Banjarbaru	80,41	80,82	81,25	81,65

Sumber : BPS Indeks Pembangunan Manusia BPS Provinsi Kalimantan Selatan 2024

Bila dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Selatan, angka pertumbuhan IPM Balangan pada tahun 2024 ini lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan IPM Provinsi Kalimantan Selatan yang hanya sebesar 0,71 persen. Begitupun dengan keterbandingan antar kabupaten, pertumbuhan IPM Kabupaten Balangan lebih tinggi daripada nilai IPM kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan.

Banyak hal yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Balangan dalam rangka meningkatkan nilai IPM dan sebenarnya juga telah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya namun perlu Upaya percepatan antara lain adalah

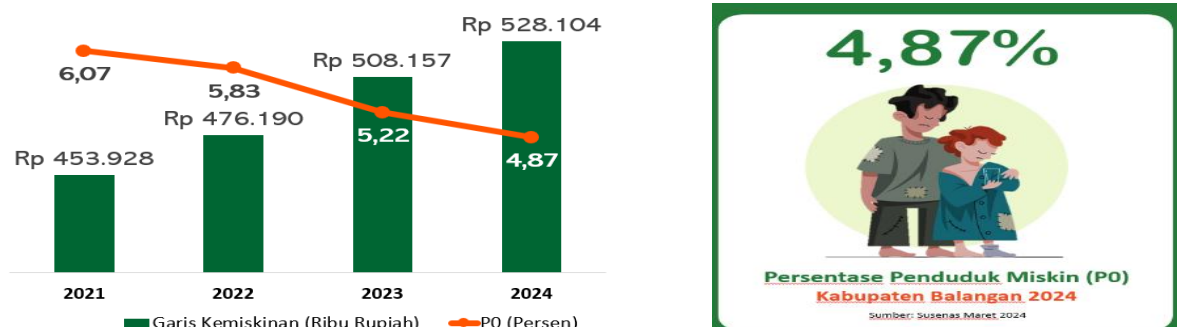
- Meningkatkan akses Pendidikan termasuk Pendidikan dasar, menengah dan vokasi. Menyediakan beasiswa untuk anak-anak dari keluarga tidak mampu seperti Kartu Balangan Pintar, Beasiswa seribu sarjana, perkuliahan diluar negeri kerjasama *Britin English Education* dan *Cambridge University*, UK. Disamping itu juga

Balangan harus mengembangkan program pendidikan non formal untuk mengedukasi masyarakat yang tidak memiliki akses ke pendidikan formal.

- b. Mengadakan program pelatihan keterampilan untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja di bidang yang relevan dengan kebutuhan pasar. Dan saat ini sedang digagas sebuah inovasi Balai Latihan Kerja bertaraf internasional kerjasama Jepang dan Australia.
- c. Memperbaiki infrastruktur dan sistem layanan kesehatan, termasuk pusat kesehatan masyarakat dan rumah sakit.
- d. Melakukan kampanye tentang kesehatan preventif, termasuk imunisasi dan gaya hidup sehat serta memberikan pendidikan kesehatan kepada masyarakat untuk mencegah penyakit dan meningkatkan pemahaman tentang Kesehatan.
- e. Memfasilitasi pertumbuhan UMKM melalui pelatihan, akses modal dan pemasaran.
- f. Melakukan diversifikasi ekonomi dengan mendorong pertumbuhan dan pengembangan sektor-sektor ekonomi selain pertambangan seperti pertanian, pariwisata dan industri kreatif.
- g. Memberikan dukungan bagi wirausaha muda melalui pelatihan, inlubasi dan akses ke jaringan pasar.
- h. Lebih meingkatkan lagi infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, listrik dan air bersih yang mendukung aktivitas sosial dan ekonomi.
- i. Memeperbaiki transportasi publik untuk meningkatkan mobilitas masyarakat dan memudahkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan.
- j. Mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait pembangunan di daerah mereka melalui FKP Musrenbang.
- k. Mengintegrasikan teknologi dalam pendidikan, kesehatan dan sektor ekonomi lain untuk meningkatkan efisiensi dan akses informasi.
- l. Menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik untuk meningkatkan transparansi akuntabilitas dan pelayanan public.
- m. Mengembangkan sistem pengumpulan dan analisis data untuk memantau kemajuan pembangunan dan memperbaiki kebijakan berdasarkan hasil yang dicapai dan melakukan evaluasi program secara berkala terhadap program-program yang telah diterapkan untuk memastikan dampak positif terhadap IPM.

3. Angka Kemiskinan

Angka Kemiskinan tahun 2024 adalah 4,87 dengan capaian sebesar 104,51 telah tercapai sesuai target. Berdasarkan data BPS Angka Kemiskinan Kabupaten Balangan mengalami penurunan setiap tahunnya dan menunjukkan *trend* yang positif hingga tahun 2024. Perkembangan Garis Kemiskinan (GK) dan Persentase Kemiskinan Kabupaten Balangan 2021-2024 dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



Penduduk Miskin (Po) dikatakan miskin jika pengeluaran per kapita per bulan kurang dari Rp. 528.104,-. Persentase Penduduk Miskin (PO) Kabupaten Balangan Maret 2024 (4,87%) turun 0,35 persen poin dibandingkan Maret 2023 (5,22%). Dari tahun ke tahun terjadi perubahan Garis Kemiskinan yang mengalami kenaikan setiap tahun. Peningkatan ini salah satunya dipengaruhi oleh inflasi.

Tahun Year	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan) Poverty Line (rupiah/capita/month)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu) Number of Poor People (thousand)	Persentase Penduduk Miskin Percentage of Poor People
(1)	(2)	(3)	(4)
2016	348.442	7.090	5,67
2017	368.580	7.213	5,68
2018	382.835	7.214	5,59
2019	396.532	7.266	5,55
2020	441.488	7.064	5,32
2021	453.928	8.062	6,07
2022	476.190	7.825	5,83
2023	508.157	7.074	5,22
2024	528.104	6.680	4,87

Catatan/Note: ---
Sumber/Source: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional Maret/BPS-Statistics Indonesia, March National Socioeconomic Survey

Tahun Year	Indeks Kedalaman Kemiskinan Poverty Gap Index	Indeks Keparahan Kemiskinan Poverty Severity Index
(1)	(2)	(3)
2016	0,780	0,180
2017	0,800	0,160
2018	1,040	0,250
2019	0,870	0,200
2020	0,880	0,240
2021	0,785	0,187
2022	0,667	0,119
2023	0,554	0,128
2024	0,850	0,200

Catatan/Note: ---
Sumber/Source: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional Maret/BPS-Statistics Indonesia, March National Socioeconomic Survey

Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Balangan Tahun 2014 – 2024 dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Propinsi Kalimantan Selatan Nomor 400.9.14/215/BAPPEDA/2024 tentang Penetapan Hasil Penilaian Kinerja Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Balangan menduduki Ranking 4 dengan total skor 6,82. Hasil Penilaian Kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No	Kabupaten/Kota	Total Skor	Ranking
1.	Kabupaten Hulu Sungai Utara	6,995	1
2.	Kabupaten Banjar	6,95	2
3.	Kabupaten Hulu Sungai Selatan	6,825	3
4.	Kabupaten Balangan	6,82	4
5.	Kota Banjarmasin	6,425	5
6.	Kabupaten Tapin	6,225	6
7.	Kota Banjarbaru	5,825	7
8.	Kabupaten Hulu Sungai Tengah	5,8	8
9.	Kabupaten Barito Kuala	5,575	9
10.	Kabupaten Tabalong	5,55	10
11.	Kabupaten Tanah Bumbu	5,37	11
12.	Kabupaten Kotabaru	4,85	12
13.	Kabupaten Tanah Laut	4,55	13

Sumber : Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan 2024, diolah

Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin pada Pemerintah Kabupaten Balangan dilaksanakan melalui :

1. Pembagian peran dan tanggung jawab kepada SKPD yang terlibat dalam pengentasan kemiskinan melalui Pokja Tim Penanggulangan Kemiskinan Daerah
 - a. Melakukan pengembangan ekonomi lokal dengan cara memberikan dukungan usaha kecil dan menengah (UKM) dengan cara memberikan akses modal, pelatihan dan dukungan pemasaran untuk UKM agar dapat tumbuh dan menciptakan lapangan kerja (Dinas Perindustrian dan Perdagangan).
 - b. Mengembangkan berbagai sektor ekonomi termasuk pertanian, industri dan pariwisata untuk menciptakan peluang kerja alternatif bagi masyarakat (Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Tenaga Kerja).
 - c. Menjamin anak-anak dari keluarga miskin mendapatkan akses pendidikan berkualitas termasuk penyediaan beasiswa (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan).
 - d. Menyediakan program pelatihan keterampilan untuk orang dewasa terutama di daerah pedesaan agar mereka memiliki keterampilan yang dibutuhkan oleh pasar kerja (Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Tenaga Kerja).
 - e. Mengadakan program pemberdayaan masyarakat yang focus pada peningkatan kemampuan dan keterampilan perempuan serta kelompok rentan lainnya (Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa).
 - f. Mendorong pembentukan koperasi dan kelompok usaha untuk meningkatkan daya tawar dan akses pasar bagi anggota (Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Tenaga Kerja).
 - g. Menyediakan bantuan langsung kepada keluarga miskin untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, kesehatan dan pendidikan (Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Sosial).
 - h. Meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan gratis atau berbiaya rendah, termasuk jaminan kesehatan (Dinas Kesehatan).
 - i. Mengembangkan infrastruktur seperti jalan, irigasi dan listrik untuk mendukung kegiatan ekonomi masyarakat (Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman).
 - j. Memastikan ketersediaan air bersih dan sanitasi layak untuk meningkatkan kesehatan masyarakat (Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman).
 - k. Melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan agar sesuai dengan kebutuhan (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah).
 - l. Mendorong teknik pertanian yang ramah lingkungan dan berkelanjutan untuk meningkatkan hasil pertanian (Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan).
 - m. Membangun sistem pengumpulan data dan analisis data yang baik untuk memantau kemiskinan dan efektivitas program yang ada (Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah dan Dinas Sosial).
 - n. Melaksanakan program bantuan sosial yang tepat sasaran antara lain bantuan langsung tunai (BLT), bantuan pangan untuk memenuhi nutrisi (Dinas Sosial).
 - o. Mengembangkan program jaminan sosial yang mencakup perlindungan bagi anak, wanita, dan lanjut usia serta memberikan dukungan bagi mereka yang kehilangan pekerjaan atau mengalami kesulitan ekonomi (Dinas Sosial).
 - p. Menggandeng sektor swasta untuk menciptakan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang focus pada pengurangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat (Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah).

- q. Melakukan evaluasi berkala terhadap kebijakan dan program yang diterapkan untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitasnya dalam mengurangi kemiskinan (Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah dan Dinas Sosial).
- r. Melakukan efektivitas data kependudukan (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil).
2. Mengoptimalkan peran dan inovasi masing-masing SKPD sesuai tupoksi antara lain :
- Dinas Sosial melalui program bantuan sosial dan jaminan sosial yaitu bantuan sosial reguler, seperti Program Keluarga Harapan dan Kartu Sembako, bantuan sosial khusus, seperti Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD), Bantuan Sosial Tunai, Bantuan Sosial Presiden/Gubernur/Bupati, Top Up Bansos Reguler, Bantuan dan Rehabilitasi Sosial bagi kelompok berkebutuhan khusus seperti lanjut usia, anak, dan penyandang disabilitas. Kemudian Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Tenaga Kerja melalui peningkatan produktivitas dan pemberdayaan masyarakat, diantaranya melalui peningkatan akses pekerjaan, melalui program padat karya, bantuan individu/kelompok, serta penyediaan sarana dan prasarana, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, melalui program vokasi dan pelatihan dan peningkatan akses terhadap aset produktif, akses pinjaman modal, dan akses penggunaan lahan, pendampingan dan penguatan kewirausahaan, melalui peningkatan akses pembiayaan dan pasar serta pendampingan dan penguatan kewirausahaan dan pengembangan dan penjaminan keberlanjutan usaha ultra mikro dan mikro. Kemudian Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman melalui program pemenuhan hak-hak dasar melalui pemenuhan pelayanan dasar, seperti peningkatan akses layanan dan infrastruktur pendidikan, layanan dan infrastruktur kesehatan, dan infrastruktur sanitasi air minum layak (Program RH Rutilahu, Toilet Ramah Gender/Cuci Tangan Sekolah, peningkatan jumlah puskesmas, program gratis penyambungan PDAM, Program TPS-3R), peningkatan konektivitas antar wilayah, seperti pembangunan dan peningkatan sarana transportasi serta pembangunan infrastruktur jalan dan (Kecamatan Halong dan Tebing Tinggi yang dapat tembus ke kabupaten/provinsi lain terutama akses alternatif menuju IKN, peningkatan/pelebaran jalan nasional/provinsi/kabupaten).
3. Melakukan monitoring dan evaluasi serta intervensi program penanggulangan kemiskinan pada lintas SKPD yang memiliki relevansi tugas dan fungsi terkait penanganan kemiskinan. Intervensi dilakukan melalui inovasi SIAP PD.

Intervensi Kemiskinan Ekstrem Per Triwulan III Tahun 2024 oleh masing-masing SKPD yang diambil dari data inovasi SIAP PD adalah sebagai berikut:

No.	SKPD	Program Intervensi	Target	Realisasi	Keterangan
1.	Dinas PUPRPERKIM	Rehap RTRH	72	45	Tahap 1
			52	17	Tahap 2 (masih dalam tahapan verifikasi oleh TFL)
2.	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	Bantuan Saprodi, Bibit Ternak dan Perikanan	187	147	Progress Realisasi Intervensi
3.	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja	Peningkatan Sarana Prasarana Berusaha	53	28	16 bantuan tidak bisa direalisasikan karena calon penerima meninggal/tidak berkenan menerima
4.	Dinas Kesehatan	Pelayanan Kesehatan (Homecare)	138	117	11 orang belum terlaksana 2 pindah 1 orang meninggal dunia
5.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Beasiswa Balangan Pintar	355	50	Terkendala ada peserta didik yang terdoubbling menerima PIP, data peserta didik masih tidak sinkron dengan sekolah/terkendala data pada MTs/MI.
		Bantuan pembiayaan sekolah non formal/kejar paket	175	-	22 sudah masuk data Dapodik dan menunggu verifikasi lanjutan dari Disdik, terdapat kendala keterbatasan usia minimum untuk pembiayaan sekolah non formal dari dana BUP. Solusinya dengan menggunakan BUP daerah

4. Indeks Reformasi Birokrasi

Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2024 adalah 83,06. Berikut data indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Balangan yang diperoleh dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2023 berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia yaitu :

No	Uraian	Nilai	Predikat
1.	Nilai Reformasi Birokrasi Tahun 2021	54,63	CC
2.	Nilai Reformasi Birokrasi Tahun 2022	60,03	B
3.	Nilai Reformasi Birokrasi Tahun 2023	70,01	BB
4.	Nilai Reformasi Birokrasi Tahun 2024	83,06	A

Berdasarkan data pada tabel di atas diketahui bahwa Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Balangan dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 mengalami kenaikan setiap tahunnya. Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2023 tidak dapat dibandingkan dengan indeks reformasi birokrasi dari tahun 2022 karena penilaian reformasi birokrasi tahun 2023 dengan tahun 2022 terjadi perubahan komponen penilaiannya. Adapun penilaian pada tahun 2024 mencakup penilaian terhadap aspek RB General dan RB Tematik sebagaimana tabulasi data berikut berdasarkan hasil LHE Kementerian PANRB Nomor B/43/RB.04/2025 tentang Hasil Evaluasi Pelaksanaan RB Tahun 2024 sebagai berikut:

No	Penilaian	Bobot	Nilai	Predikat
A.	RB General	100	72,41	
B.	RB Tematik	20	10,65	
C.	Indeks RB	120	83,06	A

Berdasarkan hasil evaluasi RB tahun 2024 atas surat Kemenpan RB Nomor B/43/RB.04/2025 perihal penyampaian hasil evaluasi RB 2024 tanggal 26 Februari 2025 ada beberapa rekomendasi yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Balangan yakni :

1. Rekomendasi atas indikator penilaian Rencana Aksi Pembangunan RB General adalah Mengawal kegiatan utama yang sudah ditetapkan. Mengawal ketercapaian target Indikator Kegiatan Utama yang sudah ditetapkan. Mengawal rencana aksi yang sudah ditetapkan. Memastikan seluruh rencana aksi telah logis untuk memenuhi kebutuhan pencapaian sasaran RB general. Memastikan seluruh rencana aksi telah memiliki indikator yang relevan dan cukup untuk mengukur keberhasilan pencapaian rencana aksi. Memastikan seluruh indikator pada rencana aksi telah memiliki target yang ditetapkan berdasarkan *baseline* tahun sebelumnya, serta berorientasi pada peningkatan kinerja. Memastikan seluruh rencana aksi yang membutuhkan anggaran telah didukung oleh anggaran yang memadai. *Adapun tindaklanjut yang akan dilakukan adalah melakukan rapat koordinasi teknis dengan SKPD pemangku RB untuk melakukan penyusunan rencana aksi Tahun 2025 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*
2. Rekomendasi atas indikator penilaian Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi adalah Segera melakukan perbaikan dan pengembangan proses bisnis dan/atau penyesuaian Standar Operasional Prosedur (SOP). *Adapun tindaklanjut yang akan dilakukan adalah melakukan rapat teknis terkait proses bisnis berdasarkan RPJMD baru.*
3. Rekomendasi atas indikator penilaian Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi adalah sebagai berikut :
 - 1) Memperbaiki perencanaan dengan memperhatikan cascading sesuai proses bisnis yang didukung dengan indikator kinerja yang berorientasi outcome, memenuhi kriteria SMART, dan didukung oleh target yang tepat; *(Adapun tindaklanjut yang akan dilakukan adalah melakukan perbaikan dokumen perencanaan RPJMD 2025-2029 dan Renstra SKPD)*
 - 2) Menerapkan dan melakukan penyempurnaan implementasi manajemen risiko secara menyeluruh di seluruh perangkat daerah dengan:

- a. Menjadikan penerapan manajemen risiko sebagai indikator kinerja utama pada Pemerintah Kabupaten Balangan; *(Adapun tindak lanjut yang akan dilakukan adalah melakukan implementasi manajemen resiko ke dalam aplikasi SAKIP terintegrasi).*
- b. Melakukan identifikasi, analisis, dan pengelolaan risiko kemitraan pada seluruh kemitraan/kerja sama internal dan eksternal serta risiko *fraud* pada seluruh proses bisnis; *(Akan melakukan analisa SPIP dan matrik resiko sesuai dokren RPJMD 2025-2029).*
- c. Mengalokasikan anggaran yang memadai untuk penerapan manajemen risiko dan peningkatan pemahaman SDM terkait manajemen risiko; *(Melakukan penetapan pagu prioritas sesuai dengan konsep Money Follow Priority Program saat penyusunan dokumen perencanaan RPJMD 2025-2029).*
- d. Menerapkan manajemen risiko mulai dari perencanaan, pelaksanaan proses bisnis, dan dalam pengambilan keputusan di seluruh perangkat daerah; *(Akan melakukan rapat FGD terkait manajemen resiko).*
- e. Melakukan monitoring pelaksanaan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) pada masing-masing UPR sehingga dapat mengetahui efektivitas RTP dalam menurunkan risiko, mengurangi dampak, dan menghilangkan penyebab; *(Akan melakukan rapat tindak lanjut RTP).*
- f. Melakukan evaluasi efektivitas dan implementasi manajemen risiko oleh Inspektorat; *(Akan melakukan monev implementasi manajemen resiko).*
- g. Meningkatkan pengendalian risiko korupsi dengan:
 1. Mengimplementasikan kebijakan anti korupsi dan kode etik serta didukung SOP yang mencakup tiga prinsip dalam pengelolaan risiko korupsi, yakni cegah, deteksi, dan respon; *(Akan disusun SOP terkait kebijakan anti korupsi).*
 2. Mengoptimalkan penggunaan saluran pengaduan dengan memastikan perlindungan terhadap pelapor dan ditindaklanjutnya pengaduan *(Akan dilakukan optimalisasi benturan kepentingan dan pengaduan).*
- 3) Memperbaiki pengelolaan program / kegiatan dengan melakukan evaluasi efektivitas atas pengendalian yang telah dilaksanakan dan melakukan koordinasi lintas sektoral antar perangkat daerah terkait dalam rangka mewujudkan pencapaian kinerja sektor *(Akan melakukan monev pengendalian program dan kegiatan terkait crosscutting kinerja).*
- 4) Melakukan identifikasi akar penyebab temuan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK untuk selanjutnya menyusun pengendalian yang tepat untuk mencegah temuan berulang *(Akan melakukan monitoring tindak lanjut LHP).*
- 5) Menindaklanjuti dan memonitor tindak lanjut rekomendasi perbaikan yang tertuang pada Laporan Hasil Penilaian Mandiri dan Laporan Hasil Evaluasi BPKP *(Akan melakukan efektivitas dan monev atas feedback hasil monev mandiri dan penilaian BPKP).*
- 6) Memperbaiki pengelolaan sektor Pengentasan Kemiskinan dan Ketahanan Pangan, dengan cara:
 - a. Melakukan pembaharuan atas *risk register* sesuai dengan konteks sasaran strategis pemerintah daerah terkait sektor pengentasan kemiskinan dan ketahanan pangan; *(Akan dilakukan review atas roadmap kemiskinan daerah).*
 - b. Inspektorat Daerah melakukan pengawasan lintas sektoral/tematik atas konteks strategis pemerintah daerah *(Akan dilakukan monev pengawasan lintas sektoral area tematik).*
4. Rekomendasi atas indikator penilaian Tingkat Digitalisasi Arsip adalah Penjelasan rekomendasi tingkat digitalisasi arsip dapat dikonfirmasi ke Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi. *(Akan dilakukan FGD antara Diskominfotiksan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan serta Bagian Organisasi dan Bapperida terkait tindak lanjut hasil evaluasi kearsipan).*
5. Rekomendasi atas indikator penilaian Indeks Kualitas Kebijakan yaitu:

1. Memperkuat dukungan pimpinan terkait pengelolaan kualitas kebijakan dan meningkatkan konsolidasi antar unit kerja untuk menggali data dan informasi tata kelola kebijakan yang dimiliki (*Melakukan rapat koordinasi terkait pengelolaan kualitas kebijakan*).
2. Meningkatkan penerapan tata kelola kebijakan yang baik dengan beberapa agenda antara lain:
 - a. Memperkuat dukungan pengkajian/analisis/telaah kebijakan dalam perencanaan kebijakan dan evaluasi kebijakan;
 - b. Memperkuat partisipasi *stakeholder* dalam proses kebijakan secara lebih representatif termasuk dengan kelompok *stakeholder* di luar instansi atau kelompok rentan di lapangan;
 - c. Mengelola komunikasi kebijakan kepada seluruh *stakeholder* sasaran dalam seluruh proses kebijakan;
 - d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kebijakan secara berkelanjutan untuk memastikan dampak/ketercapaian tujuan kebijakan atau keselarasan implementasi kebijakan dalam penyelesaian masalah kebijakan atau target pencapaian yang menjadi latar belakang inisiasi kebijakan.
 - e. Melibatkan secara aktif SDM fungsional Analis Kebijakan/pejabat fungsional terkait lainnya yang kompeten untuk melakukan analisis dan menyusun rekomendasi kebijakan di seluruh proses kebijakan.
6. Rekomendasi atas indikator penilaian Indeks Reformasi Hukum adalah Dipertahankan dan ditingkatkan (*Kabupaten Balangan akan melakukan rangkaian kegiatan rakor dalam rangka peningkatan nilai IRH*).
7. Rekomendasi atas indikator penilaian Indeks Pembangunan Statistik adalah :
 - Pemerintah Kabupaten Balangan perlu menerapkan Aspek Interoperabilitas Data terkait Tingkat Kematangan Penerapan Interoperabilitas Data ke seluruh produsen data sesuai dengan Surat Edaran Walidata Nomor 050/110/DISKOMINFOSANBLG/2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Statistik Sektorial 2023 yang mengatur tentang Aspek Interoperabilitas Data (*Akan dilakukan rapat koordinasi teknis terkait kebijakan Interoperabilitas Data yang digawangi oleh Dinas Kominfotiksan dan Bapperida*).
 - Pemerintah Kabupaten Balangan perlu melaksanakan penerapan kompetensi SDM bidang statistik dan manajemen data secara terkoordinir oleh instansi yang ditunjuk (*Akan dilakukan rapat koordinasi teknis kapasitas SDM antara Diskominfotiksan dan BKPSDM kabupaten Balangan*).
8. Rekomendasi atas indikator penilaian Indeks Tata Kelola Pengadaan adalah sebagai berikut:
 1. Tingkatkan dan pertahankan kinerja pengumuman RUP SIRUP;
 2. Tingkatkan dan pertahankan kinerja realisasi paket tender;
 3. Perlu ada kolaborasi dan sinergi untuk menyelesaikan paket katalog elektronik yang sudah direalisasikan;
 4. Pertahankan kinerja realisasi toko daring;
 5. Perlu ditingkatkan kinerja realisasi paket non-tender/non e-purchasing sesuai RUP;
 6. Tingkatkan dan pertahankan kinerja pencatatan e-kontrak;
 7. Segera memenuhi keterisian JF PPBJ melalui pengangkatan pertama, PPPK, dan/atau Perpindahan dari Jabatan Lain;
 8. Implementasi dengan baik pencapaian tersebut. Selanjutnya persiapan menuju tingkatan berikutnya.
9. Rekomendasi atas indikator penilaian Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik adalah Melaksanakan saran dalam surat Ketua Ombudsman yang telah disampaikan kepada Pimpinan Kementerian / Lembaga / Pemerintah Daerah (*Akan dilakukan pembentukan pioneer SDM pelayanan publik pada beberapa SKPD lokus yakni narahubung, front office dan petugas pengelola layanan dan pengaduan, melakukan rapat teknis persiapan data dukung dan pembinaan terhadap pioneer untuk menjadi TFT , serta pembinaan pada SKPD yang akan menjadi lokus baru*).
10. Rekomendasi atas indikator penilaian Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah Rekomendasi terdapat dalam LHE masing-masing instansi. (*Akan disusun rapat tindaklanjut atas hasil rekom indeks SPBE oleh Kemenpan RB*).

11. Rekomendasi atas indikator penilaian Capaian IKU Non Makro adalah Mengawal seluruh target IKU yang sudah ditetapkan (*Akan dilakukan monev berkala atas capaian kinerja IKU non makro*).
12. Rekomendasi atas indikator penilaian Indeks BerAkhlak adalah Laporan lengkap dapat diunduh pada *website* evalbudker.menpan.go.id dengan username dan password yang sama sewaktu pengisian evaluasi budaya kerja (*Akan dilakukan penyusunan rencana aksi RB indeks berakhlak terutama menyikapi hal-hal yang masih kurang sesuai LHE*).
13. Rekomendasi atas indikator penilaian Survei Penilaian Integritas adalah Setelah mengetahui analisis terkait faktor koreksi pada subbab sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Balangan dapat melakukan analisis mendalam mengenai perumusan rekomendasi dan rencana aksi untuk menindaklanjuti hasil SPI 2024. Pada SPI 2024, Pemerintah Kabupaten Balangan mendapat skor SPI sebesar 74.96. Indeks tersebut menempatkan Pemerintah Kabupaten Balangan dalam kategori waspada, yang berarti praktik korupsi masih terjadi berdasarkan penilaian dari responden internal, eksternal maupun eksper. Situasi ini bisa terjadi akibat dari sistem pencegahan antikorupsi yang ada saat ini belum berjalan optimal dan/atau meningkatnya kemunculan oknum pejabat/pegawai yang kurang berintegritas pada unit kerja/layanan lembaga. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Balangan perlu memperkuat upaya perbaikan yang berfokus pada penguatan level integritas di kalangan pejabat/pegawai disertai dengan penyempurnaan sistem pencegahan antikorupsi yang sudah ada dan berjalan, agar menjadi lebih efektif. Untuk menjamin akurasi dan ketepatan program dalam menjawab risiko korupsi lembaga yang bersifat kontekstual serta strategi mitigasi dapat disusun dan diimplementasikan secara efektif, ada beberapa rekomendasi langkah dan tahapan yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Balangan. (*Akan dilakukan rapat koordinasi teknis menyikapi temuan SPI tahun 2024*).
14. Rekomendasi atas indikator penilaian Survei Kepuasan Masyarakat adalah Pertahankan Pelaksanaan SKM, Melakukan Pemerataan Kualitas Pelayanan Publik. (*Akan dilakukan pembinaan SKM sampai pada level desa dalam rangka mendukung upaya pembentukan desa anti maladministrasi*).
15. Rekomendasi atas indikator penilaian Pengentasan Kemiskinan (Strategi Pembangunan) yaitu :
 1. Memastikan seluruh indikator memenuhi kriteria SMART dan Cukup.
 2. Memastikan rencana aksi telah mendukung ketercapaian indikator keberhasilan RB Tematik Instansi Pemerintah.
 3. Memastikan intervensi dalam rencana aksi memenuhi sebagian besar dari aspek perencanaan & penganggaran, proses bisnis & Standar Operasional Prosedur (SOP), Sumber Daya Manusia (SDM), pengawasan, teknologi informasi, dan inovasi.
 4. Menyempurnakan rencana aksi yang menunjukkan kolaborasi nyata dengan unsur *pentahelix* lain.
16. Rekomendasi atas indikator penilaian Realisasi Investasi (Strategi Pembangunan) adalah:
 1. Memastikan penetapan sasaran menjawab permasalahan yang ditetapkan.
 2. Memastikan seluruh indikator memenuhi kriteria SMART dan Cukup.
 3. Memastikan rencana aksi telah mendukung ketercapaian indikator keberhasilan RB Tematik instansi Pemerintah.
 4. Memastikan intervensi dalam rencana aksi memenuhi sebagian besar dari aspek perencanaan dan penganggaran, proses bisnis dan Standar Operasional Prosedur (SOP), Sumber Daya Manusia (SDM), pengawasan, teknologi informasi, dan inovasi.
 5. Menyempurnakan rencana aksi yang menunjukkan kolaborasi nyata dengan unsur *pentahelix* lain.
17. Rekomendasi atas indikator penilaian Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting (Strategi Pembangunan) adalah sebagai berikut:
 1. Memastikan rencana aksi telah mendukung ketercapaian indikator keberhasilan RB Tematik instansi Pemerintah.
 2. Memastikan intervensi dalam rencana aksi memenuhi sebagian besar dari aspek perencanaan dan penganggaran, proses bisnis dan Standar Operasional Prosedur (SOP), Sumber Daya Manusia (SDM), pengawasan, teknologi informasi, dan inovasi.

3. Menyempurnakan Rencana aksi yang menunjukkan kolaborasi nyata dengan unsur *pentahelix* lain.
18. Rekomendasi atas indikator penilaian Penggunaan Produk Dalam Negeri (Strategi Pembangunan) adalah terus meningkatkan kualitas rencana aksi.
19. Rekomendasi atas indikator penilaian Pengendalian Inflasi (Strategi Pembangunan) yaitu:
 1. Memastikan rencana aksi telah mendukung ketercapaian indikator keberhasilan RB Tematik instansi Pemerintah.
 2. Memastikan intervensi dalam rencana aksi memenuhi sebagian besar dari aspek perencanaan dan penganggaran, proses bisnis dan Standar Operasional Prosedur (SOP), Sumber Daya Manusia (SDM), pengawasan, teknologi informasi, dan inovasi.
 3. Menyempurnakan rencana aksi yang menunjukkan kolaborasi nyata dengan unsur *pentahelix* lain.
20. Rekomendasi atas indikator penilaian Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE adalah Instansi perlu menyusun Arsitektur As-Is (*akan melakukan penyusunan arsitektur SPBE as is yang akan difasilitasi oleh kemenpan RB sebagai tenaga narasumber atau fasilitator*)

Sedangkan beberapa progres upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Balangan terhadap rekomendasi hasil penilaian RB Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- a. Pemerintah Kabupaten Balangan telah melakukan asistensi penyusunan rencana aksi reformasi birokrasi dan melakukan review secara berkala dengan difasilitasi oleh Kementerian PAN RB. Fokus review adalah penajaman terhadap indikator rencana aksi dan memastikan bahwa ada anggaran dalam rencana aksi. Hasil review telah dibuatkan berita acara dan diupload ke portal RB.
- b. SOTK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan telah mempedomani model penyederhanaan struktur organisasi dan telah ditetapkan Perda Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2021 ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Nomor 107 Tahun 2021 tentang SOTK Penyederhanaan Birokrasi dan telah dilakukan perubahan lagi sesuai dengan perubahan SOTK tahun 2023 kemudian diturunkan dalam peraturan Bupati Balangan Nomor 55 Tahun 2023 tentang SOTK.
- c. Telah ditetapkan Peraturan Bupati Balangan Nomor 129 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan dan telah dilakukan monitoring dan evaluasi implementasi sistem kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan. Monitoring terkait penerapan sistem kerja juga di upload pada Aplikasi Evinbalaks KemenPANRB.
- d. Zona Integritas WBK telah berhasil diraih oleh 2 (dua) SKPD lokus pada tahun 2024 yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Kedepannya SKPD ini tetap mendorong Pembangunan ZI secara berkelanjutan, melakukan perbaikan pelayanan publik, melakukan perbaikan kinerja sampai pada ke level individu (SKP), mengembangkan inovasi untuk mendukung pencapaian sasaran strategis SKPD, mengelola manajemen resiko strategis dan operasional dengan baik dan mampu menjadi percontohan SKPD lain. Inspektorat Kabupaten Balangan juga telah melakukan pendampingan dari pelaksanaan Survei SPKP dan SPAK sampai dengan pengisian LKE ZI dan telah melakukan kegiatan penguatan kualitas substansi dan pemahaman SDM Assesor OPD dan TPI dengan KemenpanRB di Bandung.
- e. Nilai SAKIP Pemda Kabupaten Balangan tahun 2024 adalah 72,07. Banyak upaya perbaikan yang harus dilakukan dan saat ini telah dilakukan antara lain adalah melakukan review penyusunan pohon kinerja untuk memastikan indikator kinerja SMART dan memastikan program kegiatan lebih efektif untuk mendukung terhadap sasaran strategis. Hasilnya adalah adanya pohon kinerja baru yang telah diverifikasi difasilitasi oleh Kementerian PAN RB dan akan menjadi dasar dalam penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan SKPD tahun 2025. Kemudian juga telah melakukan pembaharuan terhadap aplikasi SAKIP yang memuat pengukuran kinerja individu selain pengukuran kinerja organisasi serta adanya pengendalian resiko (SPIP).
- f. Tingkat implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE. Tindak Lanjut Implementasi Arsitektur SPBE tahun 2024. Secara umum Pemerintah Kabupaten Balangan telah melaksanakan pengisian seluruh domain pada

arsitektur SPBE Balangan dan telah menetapkan arsitektur SPBE menjadi kebijakan melalui Surat Keputusan Bupati Balangan 188.45/755/Kum Tahun 2024 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Balangan Tahun 2024-2027.

- g. Tingkat Digitalisasi Arsip. Pemerintah Kabupaten Balangan telah menetapkan Peraturan Bupati Balangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan dinamis terintegrasi (SRIKANDI) di Lingkungan Pemerintah Daerah. Adapun tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk mendukung percepatan pelaksanaan SRIKANDI, mewujudkan kemudahan, efektivitas dan efisiensi serta tertib administrasi penyelenggaraan SPBE, menetapkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan kelancaran penyelenggaraan kearsipan dinamis secara elektronik antar perangkat daerah atau unit kerja dan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif. Sosialisasi penerapan SRIKANDI juga telah dilakukan kepada seluruh SKPD. Kemudian pada tahun 2024 juga telah dilakukan FGD implementasi penerapan SRIKANDI dengan narasumber dari Dinas Kearsipan Propinsi Kalimantan Selatan.
- h. Tingkat tindak lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan. Pada tahun 2024 ada sekitar 78 aduan yang masuk melalui SP4N Lapor dan statusnya masih ada 1 laporan yang belum ditindaklanjuti sedangkan 6 aduan masih dalam proses dan sebanyak 71 laporan aduan sudah ditindaklanjuti. Dalam rangka mempercepat laju tindak lanjut, Pemerintah Kabupaten menekankan pada perlunya komitmen bersama seluruh Kepala SKPD dalam penanganan pengaduan masyarakat (Lapor) secara cepat dan tepat mengikuti SOP yang sudah ditetapkan dan melakukan peningkatan dukungan sumber daya manusia pengelola aduan masyarakat (Lapor) melalui pelatihan atau workshop.
- i. Indeks Kualitas Kebijakan. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan mengadakan rapat koordinasi evaluasi penyusunan Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) yang melibatkan beberapa SKPD yang menjadi sampel penilaian IKK yakni Dinas PUPRPERKIM, Bapperida, Badan Kesbangpol, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, dan Dinas Kesehatan. Langkah yang harus dilakukan untuk meningkatkan IKK adalah mengoptimalkan peran serta JF untuk melakukan. *Self assesment* dalam pengukuran IKK, melaksanakan konsultasi ke LAN dan mengikuti bimtek agar lebih memahami penilaian IKK, mengoptimalkan tugas dan fungsi admin instansi untuk menginventarisasi, menyiapkan daftar kebijakan yang telah ditetapkan 3 (tiga) tahun terakhir untuk disampaikan ke LAN sebagai objek penilaian serta berperan aktif sebagai narahubung penilaian IKK dengan perangkat daerah pemrakarsa penilaian, mengoptimalkan tugas dan fungsi enumerator pada perangkat daerah agar lebih aktif dalam melakukan koordinasi dengan admin instansi perihal penilaian pengukuran IKK terkait validasi jawaban serta pengunggahan data dukung pada sistem aplikasi IKK.
- j. Indeks Reformasi Hukum. Menindaklanjuti rekomendasi tahun lalu maka upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Balangan adalah memperkuat koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan Kementerian Hukum dalam rangka harmonisasi peraturan perundang-undangan, meningkatkan kompetensi ASN sebagai *legal drafter* dengan mengikuti diklat/bimtek perancang dan Analisis Hukum dan hal ini telah dilakukan pada tahun 2024, mendorong re regulasi dan de regulasi peraturan perundang-undangan melalui peran Analisis Hukum dan terakhir menata database peraturan perundang-undangan di daerah melalui integrasi website JDIH dan pelaporan kegiatan JDIH melalui aplikasi *e report*.
- k. Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektor. Dalam upaya peningkatan kualitas dan penyeragaman penyelenggaraan statistik sektoral, maka walidata daerah yang dalam hal ini adalah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Balangan menerbitkan Surat Edaran Walidata Nomor: 050/105.1/Diskominfo-BIG/2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan Statistik Sektor dalam Mendukung Satu Data Indonesia di Kabupaten Balangan. Dengan dasar surat edaran tersebut, maka dilakukan pula sosialisasi, dan pendampingan dalam penyusunan rekomendasi dan penyusunan metadata kepada produsen data, serta penyusunan rancangan rekomendasi kegiatan dan penyusunan metadata sebagai bahan pustaka yang bisa digunakan oleh produsen data. Selanjutnya, dilaksanakan juga koordinasi dengan Koordinator Data Daerah, dan Pembina Data Daerah dalam upaya meningkatkan kinerja forum satu data daerah dalam upaya menyelaraskan program dan kegiatan dalam penyelenggaraan statistik sektoral di daerah.

Hasil dari penyelenggaraan kegiatan tersebut, hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) Kabupaten Balangan sebagaimana tertuang dalam Keputusan Badan Pusat Statistik Nomor 605 Tahun 2024, Kabupaten Balangan dari sebelumnya 1,3 dengan predikat kurang, dapat ditingkatkan Indeks Pembangunan Statistik (IPS) menjadi 2,7 dengan predikat baik (peringkat 5 se-Kalimantan Selatan).

1. Indeks Tata Kelola Pengadaan. Berdasarkan rekomendasi dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) tahun 2022 bahwa jumlah JF PPBJ pada Pemerintah Kabupaten Balangan adalah 23 (dua puluh tiga) orang, sesuai dengan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah bahwa per tanggal 31 Desember 2023 JF PPBJ harus terpenuhi minimal 60% dari jumlah yang telah di rekomendasikan, dan berdasarkan Peraturan LKPP Nomor 8 Tahun 2022 Bagian Pengadaan Barang/Jasa harus menyusun rencana aksi pemenuhan JF PPBJ. Berdasarkan hal tersebut diatas maka dalam rencana aksi RB General salah satu sasaran indikator adalah Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) yang diantara komponen sasarannya adalah penunhan JF PPBJ, untuk tindak lanjut atas sasaran RB General tersebut maka Bagian Pengadaan Barang dan Jasa telah menyusun Rencana Aksi Pemenuhan JF PPBJ mulai tahun 2023 sampai dengan tahun 2025, dengan *base line* jumlah JF PPBJ pada tahun 2023 adalah 5 (lima) orang, pada tahun 2024 bertambah 5 (lima) orang melalui formasi PPPK sehingga bertambah menjadi 10 (orang), selanjutnya pada tahun 2025 sesuai dengan formasi dari pengadaan CPNS tahun 2024 sebanyak 6 (enam) orang, sehingga pada tahun 2025 jumlah JF PPBJ pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan adalah 16 (enam belas) orang dari target renaksi 23 (dua puluh tiga) orang sudah tercapai 69,56 %, maka amanat Presiden Nomor 16 tahun 2018 sudah dapat terpenuhi. Namun sesuai dengan LKPP Nomor 8 tahun 2022 Bagian Pengadaan Barang/Jasa harus menyusun rencana aksi pemenuhan JF PPBJ dan berdasarkan rencana aksi yang dibuat oleh Bagian Pengadaan Barang dan Jasa tentunya belum dapat dipenuhi dengan target di tahun 2025 adalah 100%. Nilai Capaian ITKP Bagian Pengadaan Barang/Jasa yang di keluarkan LKPP Tahun 2024 saat ini sudah posisi Zona Hijau/Baik, yaitu dari 62,44 menjadi 72,02 (saat JF PPBJ masih berjumlah 7 orang atau 30,43%). Untuk posisi JF PPBJ 10 orang ITKP akan mencapai 75,94. Apabila JF PPBJ yang CPNS Tahun 2024 masuk berjumlah 6 Orang maka ITKP akan naik lagi menjadi 83,76.
- m. Indeks Sistem Merit. Nilai Sistem Merit Pemerintah Kabupaten Balangan sudah mencapai nilai 271,5 kategori Baik. Upaya untuk meningkatkan nilai sistem merit antara lain dengan menindaklanjuti rekomendasi dan memaksimalkan nilai 8 aspek sistem merit yg ditetapkan BKN. Pada Tahun 2024 telah diadakan FGD dengan BKN untuk validasi penilaian sistem merit di Banjarmasin. Setelah pelaksanaan kegiatan FGD tersebut Pemerintah Kabupaten Balangan menindaklanjuti dengan melengkapi semua kekurangan data khususnya manajemen talenta yang saat ini juga telah dilakukan MoU antara Pemerintah Kabupaten Balangan dan Pemerintah Propinsi Bali. Pada tahun 2024 juga diadakan uji kompetensi manajemen talenta secara bertahap di Kantor Regional BKN Banjarmasin.
- n. Indeks SPBE. Pemerintah Kabupaten Balangan telah mengoptimalkan aspek Perencanaan Strategis SPBE dengan memenuhi 4 indikator, Teknologi Informasi dan Komunikasi yaitu meningkatkan kematangan layanan pusat data, layanan jaringan intra dan penggunaan sistem penghubung layanan, penyelenggara SPBE dengan meningkatkan kolaborasi antar Daerah dan Internal, dan pengoptimalan Penerapan Manajemen SPBE. Aspek Teknologi Informasi dan Penyelenggara SPBE yang tingkat kematangannya masih rendah, ditahun 2024 telah melaksanakan evaluasi secara menyeluruh. Sehingga pada domain layanan Pemerintah Kabupaten Balangan mengalami kenaikan tingkat kematangan. sehingga pada tahun 2023 dengan Nilai Indeks SPBE 2,69 meningkat di tahun 2024 menjadi 3,34 dengan predikat Baik.
- o. Indeks Pelayanan Publik. Pada tahun 2024 Indeks Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Balangan adalah 4,29 (A minus). Adapun nilai masing-masing lokus adalah Disdukcapil (4,21), Dinas Sosial (4,12) dan RSUD (4,53). Upaya yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Balangan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik adalah melakukan pembinaan secara menyeluruh terhadap SKPD pemangku pelayanan publik secara umum dan khususnya pada lokus penilaian PEKPP. Rapat juga dilakukan untuk memonitoring

- saran perbaikan dan hasil penilaian tahun sebelumnya serta pemenuhan terhadap unsur yang dipersyaratkan, melakukan *coaching klinik* pembinaan dokumen layanan terutama pada *service delivery* dan *manufacturing* terhadap semua lokus dan calon lokus mengingat lokus setiap tahun mengalami pergantian sampel, melakukan rapat koordinasi teknis dengan SKPD lokus dengan melibatkan Kementerian PAN RB dan Pemerintah Provinsi (Biro Organisasi) sebagai narasumber atau pendamping, melakukan monitoring atau tindak lanjut pelayanan publik melalui aplikasi e-kino, monitoring dilakukan secara berkala yakni triwulan, rapat koordinasi teknis dengan Tim Anggaran terkait prioritas anggaran SKPD lokus dalam hal pemenuhan sarana prasarana pelayanan publik, melakukan koordinasi dengan Dinas Kominfotiksan terkait akses internet.
- p. Kepatuhan Ombudsman. Nilai Kepatuhan Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Balangan tahun 2024 adalah 92,09 dengan kategori A dan berada pada zona Hijau. Beberapa catatan yang perlu ditingkatkan adalah pengetahuan tentang lembaga Ombudsman, merujuk pada UU Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI, pengetahuan tentang layanan ramah terhadap kelompok marginal/rentan, bukan penyediaan sapras, namun meliputi pelayanan khusus seperti kunjungan ke rumah, petugas khusus, prioritas antrian, penyuluhan khusus, pendampingan khusus, bantuan sosial. Ketersediaan pelayanan terpadu yang dilaksanakan pada Pemerintah Kabupaten Balangan akan memperoleh nilai maksimal apabila Pemda memiliki Mall Pelayanan Terpadu. Kemudian juga dipengaruhi oleh nilai SPM Pemerintah Kabupaten Balangan. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Balangan adalah melaksanakan sosialisasi tentang Ombudsman dan pelayanan publik termasuk seluruh kriteria penilaian, melakukan rapat koordinasi progres pembangunan MPP dan sebagai informasi tambahan saat ini sudah dilakukan pembangunan MPP yang akan diperkirakan selesai bulan Agustus 2025. Kemudian untuk meningkatkan realisasi dan capaian SPM Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah telah melakukan sosialisasi dan evaluasi capaian SPM tahun 2024 bekerjasama dengan Kemendagri. Kedepan dalam rangka persiapan opini kepatuhan pelayanan publik, maka Pemda Balangan akan melakukan pembinaan kepada SKPD lokus dengan melibatkan Pihak Ombudsman Perwakilan Kalimantan Selatan.
- q. Indeks berakhlak Pemerintah Kabupaten Balangan berada pada kategori Cukup Sehat dengan nilai 74,2%. Adapun deskripsi indeks sebagaimana dimaksud adalah bahwa pegawai sudah mengimplementasikan nilai-nilai berakhlak dalam perilaku kerja sehari-hari dengan baik. Dalam rangka menindaklanjuti hasil indeks berakhlak tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Balangan akan melakukan penyusunan rencana aksi RB area indeks berakhlak tahun 2025 dengan memperhatikan saran peningkatan antara lain melakukan forum dialog atau diskusi secara berkala dengan masyarakat dan *stakeholder* untuk mengetahui kebutuhan mereka (berorientasi pelayanan), meningkatkan keterbukaan penggunaan data untuk peningkatan kinerja individu dan organisasi (Akuntabel), memberikan akses kepada pegawai untuk bisa mengikuti pelatihan non klasikal melalui portal pengembangan kompetensi dengan mudah (Kompeten), pertahankan program-program yang sudah berjalan baik dan program-program yang sudah ada dilakukan evaluasi secara berkala (Harmonis dan Loyal), mengadakan program orientasi yang komprehensif bagi pegawai untuk membantu mereka beradaptasi dengan budaya dan prosedur kerja (Adaptif), membentuk jaringan kolaborasi antara unit/instansi untuk berbagi sumber daya dan informasi (Kolaboratif). Pemerintah Kabupaten Balangan juga melakukan penyusunan rencana program/kegiatan/aksi implementasi berakhlak, melakukan publikasi konten berakhlak pada akun media sosial instansi secara berkala, melakukan penyusunan contoh perilaku *core values* ASN berakhlak.
- r. Opini BPK. Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Balangan sudah menerima WTP yang kesebelas kalinya. Prestasi kinerja bagi Pemerintah Kabupaten Balangan dalam aspek pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah. Hal yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Balangan antara lain adalah melakukan Perubahan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Balangan dalam rangka menyesuaikan kebijakan akuntansi dengan peraturan yang berlaku yakni dengan menetapkan dalam Peraturan Bupati Balangan Nomor 65 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Balangan Nomor 130 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dan Peraturan Bupati Balangan Nomor 66 Tahun 2024 tentang

Perubahan atas Peraturan Bupati Balangan Nomor 131 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.

- s. Survei Penilaian Integritas. Inspektorat Kabupaten Balangan telah melaksanakan Reviu Resiko Tingkat Strategis Pemerintah Kabupaten Balangan dan melaksanakan Evaluasi Manajemen Risiko Strategis dan Risiko Operasional untuk seluruh SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Balangan. Bapperida Kabupaten Balangan juga selaku SKPD yang memiliki relevansi utama dengan SPIP telah melakukan berbagai upaya berikut melaksanakan reviu terhadap draft cascading kinerja Pemda dan OPD dalam rangka perbaikan indikator yang SMART, melaksanakan tindaklanjut perbaikan EVRAN 2023, melaksanakan workshop penyusunan dan penerapan manajemen risiko dan penilaian SPIP Terintegrasi, menjadikan SPIP sebagai indikator kinerja namun masih di level Inspektorat serta telah dilakukan reviu manajemen risiko oleh Inspektorat dan Monev secara berkala oleh Bapperida.
- t. Survey Kepuasan Masyarakat. Menindaklanjuti hal ini Pemerintah Kabupaten Balangan telah melakukan sosialisasi secara daring dengan melibatkan Kemenpan RB Deputy Pelayanan Publik untuk memastikan penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2024 dan bagaimana prosedur pengentrian data hasil SKM tahun 2024 mengingat batasan waktu entri data di web SIPP Kemenpan RB adalah tanggal 15 Desember 2024. Dan Pemerintah Kabupaten Balangan telah melakukan entri hasil SKM tahun 2024 pada tanggal 23 Nopember 2024. Kemudian pada tanggal 31 Januari 2025 telah melakukan entri data aplikasi SKM online Kemenpan RB.
- u. Melakukan penyusunan rencana aksi RB tematik dengan memperhatikan indikator kinerja rencana aksi yang lebih SMART terhadap upaya Pengentasan Kemiskinan, Realisasi Investasi, Digitalisasi Stunting, Pengendalian Inflasi dan Penggunaan Produk Dalam Negeri. Rencana aski RB tematik sebagaimana dimaksud disusun dengan memperhatikan keterkaitan dan koordinasi lintas sektor (*Cross Functional Map*) dan aturan khusus yang mendasari 5 area tematik tersebut.
- v. Berikut daftar inovasi berupa Layanan Aplikasi terkait Reformasi Birokrasi Tematik serta manfaat dari inovasi untuk pencapaian target kinerja sebagai berikut:

No	Area RB Tematik	Layanan Aplikasi	Manfaat Inovasi	SKPD
1.	Kemiskinan	Sistem Integrasi Data Perencanaan Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (SIAP PD)	Membantu SKPD teknis maupun terkait perencanaan dalam verifikasi data, merencanakan pensasaran kemiskinan, pelaksanaan intervensi, monitoring dan evaluasi intervensi kemiskinan	Bapperida
		Layar si Balang	Memudahkan masyarakat apabila ada pelaporan atau penjangkauan layanan sosial	Dinas Sosial
		Galuh Sanggam	Aplikasi yang memudahkan masyarakat mengurus dokumen kependudukannya tanpa dibatasi ruang dan waktu	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Kolaborasi Usulan Laporan Aduan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Kularakat)	Memudahkan pengusulan masyarakat atau akselerasi terhadap pendataan terkait calon penerima RTLH dan memudahkan penyampaian data terhadap pihak-pihak yang terkait dengan urusan permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Sistem Perencanaan Pembangunan Berbasis Data Regsosek Terpadu (SEPAKAT)	Aplikasi berbasis web yang menyediakan analisis berbasis data makro dan data mikro untuk mendukung perencanaan dan penganggaran berbasis bukti (Pemda Balangan sudah mendapatkan hak akses data Regsosek melalui media SEPAKAT)	BAPPENAS

No	Area RB Tematik	Layanan Aplikasi	Manfaat Inovasi	SKPD
		Layanan Data P3KE	Aplikasi yang digunakan oleh Pemda Kabupaten Balangan untuk mendapatkan data P3KE dan melaporkan progres intervensi secara rutin per triwulan ke KemenkoPMK	KEMENKOPMK
2.	Peningkatan Investasi	OSS	1. Untuk memantau Realisasi investasi melalui Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). 2. Untuk melaksanakan pengawasan perizinan (Inspeksi Lapangan)	Aplikasi Kementerian Investasi/BKPM
		Daku Pentas	Untuk mengetahui perkembangan jumlah pelaku usaha, permodalan, dan rencana investasi pelaku usaha.	Masih dalam proses pembuatan Aplikasi
		Ladang Porang Paman Linbat	Untuk membantu Para Pelaku Usaha yang mengalami kesulitan atau ada kendala dalam pelaporan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal)	Layanan pendampingan/Bukan Aplikasi
		Terasa Singkat	Untuk mengevaluasi permasalahan dan kendala yang dihadapi para pelaku usaha pada saat pelaporan LKPM	Pertemuan Rutin per Triwulan/Bukan Aplikasi
		Awat Nasa Jebol	Untuk mengetahui perkembangan usaha, perkembangan Permodalan, perkembangan Jumlah Tenaga Kerja, Permasalahan dan Kendala yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan usaha serta memantau pemenuhan perizinan yang dipersyaratkan	Inspeksi Lapangan dalam rangka Pembinaan kepada Pelaku Usaha/Bukan Aplikasi
3.	Stunting	8 Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting	1. Gambaran prevalensi, jumlah stunting perdesa 2. Gambaran keluarga berisiko stunting perdesa 3. Gambaran 29 indikator determinan stunting perdesa 4. Penganggaran stunting tahun berjalan dan tahun depan 5. Koordinasi dan komitmen daerah dalam rangka percepatan penurunan stunting 6. Peran TPK, KPM dalam percepatan penurunan stunting 7. Regulasi percepatan penurunan stunting	Aplikasi dari Kemendagri
		Balanting	1. Gambaran prevalensi, jumlah stunting perdesa 2. Gambaran keluarga berisiko stunting perdesa 3. Intervensi yang dilaksanakan oleh Adaro Group untuk percepatan penurunan stunting 4. Anggaran percepatan penurunan stunting 5. Peran Bapak dan Ibu asuh untuk percepatan penurunan stunting	Inovasi dari Bidang PPM Bapperida

No	Area RB Tematik	Layanan Aplikasi	Manfaat Inovasi	SKPD
		EPPGBM	1. Memperoleh data sasaran individu (Balita /Ibu Hamil) 2. Mengetahui status gizi individu secara cepat dan akurat. 3. Mengetahui pertumbuhan Balita 4. Memantau pemberian makanan tambahan 5. Memantau pemberian imunisasi pada anak 6. Mengetahui secara cepat balita gizi buruk yang harus di rujuk /dilakukan tindakan 7. Mengetahui laporan indikator gizi dan RPJMN gizi. 8. Bisa dijadikan dasar penyusunan perencanaan dan perumusan kebijakan gizi.	Aplikasi dari Kemenkes
		Elsimil	Pendampingan calon pengantin, ibu hamil, ibu bersalin dan balita beresiko stunting	Aplikasi dari BKKBN
4.	Pengendalian Inflasi	SP2KP	Salah satu aplikasi atau sistem dalam pelaporan harga barang kebutuhan pokok dan penting pada suatu pasar pantau yang dilaporkan setiap hari kerja	Telah dilaksanakan sejak 2023
5.	Prioritas Aktual Presiden (Penggunaan Produk Dalam Negeri)	Aplikasi Ekatalog	Pengadaan Barang dan Jasa secara <i>epruchasing</i> melalui Katalog LKPP	-
		Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Pemilihan penyedia barang dan jasa secara elektronik untuk moode tender / seleksi / non tender / dan pencatatan pengadaan barang dan jasa	-
		Aplikasi SI Open Balangan	Pengadaan Barang dan Jasa secara <i>epurchasing</i> dengan toko daring/marketplace yang yang dikelola Pemerintah Kabupaten Balangan untuk UMKM lokal	-
		Sistem Informasi Pemantauan dan Evaluasi PBJ	Aplikasi untuk melakukan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	-
		Dashboard Monitoring PDN LKPP	Aplikasi untuk melakukan Monitoring dan Evaluasi Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri	-

B. Pengukuran Kinerja Sasaran

Sebagaimana dijelaskan bahwa Perjanjian Kinerja tahun 2024 adalah memuat sasaran kinerja yang berinduk pada pohon kinerja hasil review Kemenpan RB yang difasilitasi pada bulan Mei Tahun 2023 dan telah dijelaskan dalam BAB II. Adapun sebagai bahan perbandingan sasaran kinerja sebelum review Kemenpan RB yang masih mengacu pada dokumen RPJMD, pengukuran kinerjanya kami sajikan pada bagian lampiran LKIP ini. Sehingga dalam BAB III ini Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Kabupaten Balangan tahun 2024 fokus menggambarkan hasil pengukuran dan analisa kinerja atas pencapaian sasaran kinerja hasil review Kemenpan RB yang tertuang dalam dokumen perjanjian kinerja Kabupaten Balangan tahun 2024 dan dapat kami gambarkan sebagai berikut:

Tabel 3.1
Hasil Pengukuran atas Pencapaian Kinerja Tahun 2024

Tujuan 1 : Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi (IK : Laju Pertumbuhan Ekonomi)					
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Kontribusi Ekonomi Sektor Unggulan Non Pertambangan	1. Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Industri Pengolahan	4,49	4,01*	89,31
		2. Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan	17,40	15,54*	89,31
		3. Laju Pertumbuhan Ekonomi Pertanian dan Perikanan	9,79	8,74*	89,27
		4. Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pariwisata	11,03	9,85*	89,30
2.	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi	5. Persentase Peningkatan Investasi Daerah	51,13	53	103,66

Tujuan 2 : Meningkatnya Kualitas SDM (IK : IPM)					
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
3.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	6. Usia Harapan Hidup	73,89	73,87	99,97
4.	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	7. Angka Rata-Rata Lama Sekolah	8,63	8,13	94,21
		8. Angka Harapan Lama Sekolah	12,98	13,09	100,85
5.	Meningkatnya Pengeluaran Perkapita	9. Pengeluaran Perkapita	1.109.546	1.027.083	92,57

Tujuan 3 : Menurunnya Kemiskinan (IK: Angka Kemiskinan)					
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
6.	Menurunnya Ketimpangan Pendapatan	10. Indeks Gini Rasio	0,258	0,218	115,50
7.	Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka	11. Tingkat Pengangguran Terbuka	2,37	2,69	86,50

Tujuan 4 : Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (IK : Indeks RB)					
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
8	Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi	12. Nilai Sakip	74,40 (BB)	72,09 (BB)	96,90
		13. Nilai Opini BPK	WTP	WTP	100
		14. Nilai EKPPD	3,593	3,3047*	91,87
		15. Nilai IPP	4,51 (-A)	4,29 (-A)	95,12
		16. Nilai IKM	86	87,07	101,24
9	Meningkatnya Kualitas SDG's Desa	17. Indeks Desa Membangun	0,7997	0,8049	100,65

C. Analisis Capaian Kinerja Sasaran

1. Sasaran Meningkatnya Kontribusi Ekonomi Sektor Unggulan Non Pertambangan

Tabel 3.2
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 1
Meningkatnya Kontribusi Ekonomi Sektor Unggulan Non Pertambangan

No	Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2023	Kinerja 2024			Target Akhir RPJMD	Capaian Terhadap Akhir RPJMD	Realisasi / Capaian Terhadap Kab/Kota	Realisasi / Capaian Terhadap RPJMD Provinsi	Realisasi / Capaian Terhadap RPJMN
			Target	Realisasi	Capaian					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Industri Pengolahan	4,01	4,49	4,01*	89,31	5,24	76,53	-	-	-
2.	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan	15,54	17,40	15,54*	89,31	20,30	76,55	-	-	-
3.	Laju Pertumbuhan Ekonomi Pertanian dan Perikanan	8,74	9,79	8,74*	89,27	11,42	76,53	-	-	-
4.	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pariwisata	9,85	11,03	9,85*	89,30	12,87	76,53	-	-	-

Sumber Data Pemerintah Kabupaten Balangan Tahun 2024, data diolah

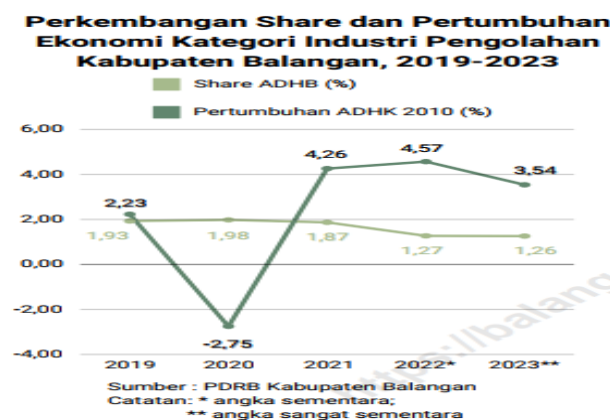
1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Industri Pengolahan

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Industri Pengolahan pada tahun 2024 belum rilis, sehingga angka realisasi/data yang dipakai adalah realisasi tahun 2023 yaitu 4,01.

b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023 dan 2022.

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa laju pertumbuhan sektor industri pengolahan Kabupaten Balangan sempat mencapai laju terendah pada tahun 2020 dikarenakan adanya pandemi Covid-19 yang mulai masuk di Indonesia. Pada tahun tersebut, laju pertumbuhan sektor industri mengalami kontraksi sebesar 2,75 persen. Akan tetapi, sektor industri mulai bertumbuh kembali sejak tahun 2021 dengan nilai pertumbuhan sebesar 4,26. Laju pertumbuhan sektor industri kembali naik menjadi 4,57 persen. Pertumbuhan tersebut menunjukkan terjadinya proses pemulihan sektor industri pasca pandemi Covid-19. Kemudian terjadi perlambatan laju pertumbuhan sektor industri namun tetap positif pada 3,54 di tahun 2023.



Jika kita melihat realisasi kinerja tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023 dan 2022 maka realisasi kinerja ini mengalami fluktuasi naik turun.

Industri Sektor Pengolahan yang seringkali disebut sebagai industri manufaktur adalah salah satu sektor dalam perekonomian yang berperan penting dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di suatu daerah atau negara. PDRB mencerminkan nilai tambah yang dihasilkan oleh semua sektor ekonomi, termasuk sektor pengolahan, dan diukur berdasarkan output yang dihasilkan oleh industri tersebut. Sektor pengolahan mencakup kegiatan yang mengubah bahan mentah (seperti bahan baku dari sektor pertanian, pertambangan, atau sumber daya alam lainnya) menjadi barang jadi dan setengah jadi yang siap untuk dipasarkan. Ini termasuk berbagai jenis industri seperti makanan, tekstil, otomotif, elektronik, kimia, dan lainnya. Kontribusi Sektor Pengolahan terhadap PDRB

1. Sektor pengolahan berkontribusi terhadap PDRB dengan menciptakan nilai tambah melalui proses produksi, di mana nilai barang akhir biasanya lebih tinggi dari sekadar nilai bahan mentah.
2. Lapangan Kerja, sektor ini merupakan sumber utama lapangan kerja bagi banyak masyarakat, membantu menurunkan angka pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi.
3. Dengan adanya sektor pengolahan, ekonomi suatu daerah bisa lebih terdiversifikasi, mengurangi ketergantungan pada satu sektor, seperti pertanian atau sumber daya alam.
4. Banyak produk hasil industri pengolahan yang diekspor. Sektor ini sering kali memiliki kontribusi signifikan terhadap neraca perdagangan suatu negara, terutama bagi negara yang sangat bergantung pada ekspor manufaktur.
5. Sektor pengolahan mendorong inovasi dan adopsi teknologi baru, yang dapat meningkatkan efisiensi produksi dan kualitas produk.

Industri sektor pengolahan merupakan komponen vital dalam PDRB karena kontribusinya yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, diversifikasi industri, dan inovasi. Oleh karena itu, kebijakan yang mendukung pengembangan sektor ini, seperti investasi dalam infrastruktur, pendidikan dan pelatihan tenaga kerja, serta dukungan kepada pengusaha, sangat penting untuk meningkatkan kontribusi sektor pengolahan terhadap PDRB dan perekonomian secara keseluruhan.

Sektor industri pengolahan meliputi semua kegiatan produksi yang bertujuan meningkatkan mutu barang dan jasa. Industri umumnya juga dikenal sebagai mata rantai selanjutnya dari usaha-usaha mencukupi kebutuhan ekonomi yang berhubungan dengan bumi, yaitu sesudah pertanian, perkebunan dan pertambangan yang berhubungan erat dengan tanah. Kedudukan industri semakin jauh dari tanah, yang merupakan basis ekonomi, budaya dan politik antara lain adalah :

- a. Industri makanan dan minuman *manufacture of food product and beverages*.
- b. Industri tekstil dan pakaian jadi *manufacture of tekstile and wearing apparel*.
- c. Industri kayu barang dari kayu *manufacture wood and products wood*.
- d. Industri kertas dan barang dari kertas *manufacture paper and paper products*.
- e. Industri kimia dan barang dari kimia *manufacture chemical and chemical products*.

Adapun rumus yang dipakai dalam menghitung laju pertumbuhan ekonomi sektor industri pengolahan adalah sebagai berikut

Setelah mendapatkan total nilai tambah dari sektor industri pengolahan dan total PDRB, kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Kontribusi PDRB Sektor Industri Pengolahan} = \left(\frac{\text{Total Nilai Tambah Sektor Industri Pengolahan}}{\text{Total PDRB}} \right) \times 100\%$$

Semakin besar persentase kontribusi, semakin signifikan peran sektor industri pengolahan dalam perekonomian daerah.

c. *Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun ini Dengan Target Jangka Menengah Dalam RPJMD*
 Realisasi kinerja tahun 2024 belum rilis, akan tetapi jika menggunakan realisasi tahun 2023 sebesar 4,01* dibandingkan dengan target jangka menengah dalam RPJMD adalah berada pada angka 4,24 dengan capaian sebesar 76,53 persen, belum mencapai target akhir RPJMD.

d. *Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Dengan Standar Nasional*
 Belum ada data perbandingan secara nasional maupun antar kabupaten/kota.

e. *Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan*

Laju pertumbuhan ekonomi sektor industri pengolahan tahun 2023 terealisasi pada angka 4.01* dipengaruhi oleh beberapa faktor penghambat yakni ketersediaan modal yang masih terbatas pada setiap sektor industri, ketersediaan tenaga kerja yang belum memenuhi permintaan pasar, masih bergantungnya bahan mentah atau bahan baku diluar lokasi industri, transportasi yang masih terbatas karena ada beberapa sarana prasarana jalan yang sering mengalami bencana seperti banjir, pemasaran yang belum optimal menjangkau pada seluruh aspek baik pada pemasaran *online* ataupun pemasaran *offline*.

Hal yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Balangan dalam rangka memperkuat laju pertumbuhan ekonomi sektor industri pengolahan terletak pada perkembangan jumlah tenaga kerja dan bantuan modal usaha, mewujudkan kemandirian sumber daya alam sebagai bahan baku utama, perbaikan sarana dan prasarana infrastruktur jalan dan sampai saat ini kondisi jalan mantap Kabupaten Balangan sudah mencapai 369.655 km

Tabel 8.1.3 Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan di Kabupaten Balangan (km), 2022–2024
Length of Roads by Condition of Roads in Kabupaten Balangan (km), 2022–2024

Kondisi Jalan Condition of Roads	2022	2023	2024*
(1)	(2)	(3)	(4)
Baik/Good	229,839	264,214	275,108
Sedang/Moderate	129,628	77,769	94,547
Rusak/Damage	26,289	19,090	16,080
Rusak Berat/Severely Damage	286,497	206,003	181,341
Jumlah/Total	672,253	567,076	567,076

Catatan/Note: ...
 Sumber/Source: Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan/
 Department of Public Works, Spatial Planning, Public Housing and Residential Areas of Balangan Regency

Banyak inovasi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Balangan terkait diversifikasi ekonomi sektor ini antara lain inovasi BABUNGAS (Bahutang Bebas Bunga dan Administrasi), BAKABUN (Bahutang Kada Babunga) Kerjasama dengan Bank Kalsel dan BPR.

Pemerintah Kabupaten Balangan melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan melakukan pembinaan dan pelatihan peningkatan kompetensi bagi pelaku usaha IKM dalam pengolahan kerajinan, membudidayakan tanaman untuk bahan mentah atau bahan baku dalam pengolahan kerajinan. Disamping itu juga memberikan bantuan mesin dan peralatan bagi pelaku usaha IKM untuk meningkatkan produksi produk. Dinas ini juga memfasilitasi pelaku IKM dalam sertifikasi halal produk dan pendaftaran merk produk, mengikut sertakan dalam pameran atau *expo* untuk mempromosikan produk-produk IKM.

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata juga berperan dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi kreatif melalui sektor industri pengolahan ini. Pada tahun 2024 banyak event-event yang dilakukan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata baik didalam wilayah Kalimantan maupun di

luar wilayah Kalimantan Selatan seperti Bali, pemasaran hasil produk sektor industri pengolahan ini menjadi sebuah aktivitas utama event bahkan mengikuti seminar trading UMKM bahan-bahan anyaman tirik bambu. Event ini juga melibatkan kolaborasi antara sektor swasta dan atau Perusahaan ADARO MINING COAL yang telah memberikan cukup besar bantuan *packaging* atau kemasan produk kepada Pelaku IKM sektor industri pengolahan.

Adapun upaya ke depan yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Balangan untuk meningkatkan kinerja sektor ini adalah :

- a. Melakukan pemantauan secara berkala terhadap Pelaku IKM yang telah mendapat peningkatan kompetensi/pelatihan agar dapat melakukan inovasi terhadap produknya sehingga produk yang dibuat adalah produk yang diunggulkan dan dapat dijual di pasaran.
- b. Melakukan pemantauan dan pembinaan berkala kepada Pelaku IKM agar menerapkan teknologi industri kedalam proses produksinya sehingga memiliki kualitas standar produk. Hal ini akan meningkatkan kualitas produk meski pelaku IKM berbeda-beda.
- c. Meningkatkan sarana prasarana pendukung peningkatan laju pertumbuhan ekonomi sektor industri pengolahan seperti sarana prasarana infrastruktur, pemenuhan kompetensi dan kuantitas tenaga kerja yang memadai, peningkatan kuantiti bahan baku dengan memanfaatkan SDA yang ada, penanganan bencana alam seperti banjir untuk mempermudah akses transportasi, pelatihan marketing dan mengarahkan inovasi SKPD pemangku IKU agar lebih memicu terhadap pencapaian kinerja.
- d. Menggalang kolaborasi antar sektor baik swasta, perusahaan atau perbankan dan penggiat industri untuk menciptakan sinergi dalam pengembangan produk dan pemasaran. Dan mengembangkan lagi organisasi FEDEP yang telah dibentuk di Kabupaten Balangan (*Forum For Economic Development and Empowering Program*) dengan konsep *pentahelix* perekonomiannya.

f. *Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya*

Efisiensi penggunaan sumber daya tercermin pada aspek berikut yakni :

- a. Program strategis yang menunjang pencapaian indikator kinerja laju pertumbuhan ekonomi sektor industri pengolahan tahun 2023 hampir sama dengan tahun 2024. Dikarenakan realisasi laju pertumbuhan ekonomi sektor industri pengolahan belum rilis pada tahun 2024, maka kami menarik kesimpulan mundur tahun 2023 yakni realisasi kinerja tercapai.
- b. Telah disusun rancangan matrik resiko strategis Pemerintah Kabupaten Balangan sebagaimana tabulasi data berikut:

Sasaran Strategis	Uraian Resiko	Rencana Tindak Pengendalian
Meningkatnya Kontribusi Ekonomi Sektor Unggulan Non Pertambangan	Komponen terbesar pembentuk PDRB Pemda Kabupaten Balangan adalah dari aspek pertambangan sehingga perlu diversifikasi perekonomian	1. Meminimalisir ketergantungan sumber daya alam lain daerah lain seperti pertanian dan kehutanan sehingga fluktuasi harga dapat terjaga. 2. Menyediakan dukungan infrastruktur yang memadai. 3. Melakukan <i>review</i> kebijakan dan regulasi kemudahan investasi aspek non tambang. 4. Melakukan dukungan inovasi dan teknologi untuk akses marketing hasil sumber daya alam. 5. Mempermudah akses pembiayaan. 6. Meningkatkan kualitas SDM pelaku usaha dan tenaga kerja sektor non pertambangan

- c. Upaya percepatan pencapaian target kinerja melalui inovasi sebagai berikut :

IKU	Nama Inovasi	Manfaat
Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Industri Pengolahan	Sortikpa (Sosialisasi Sertifikat Industri Kecil dan Menengah Pangan)	Kegiatan sosialisasi yang awalnya hanya dilakukan di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Tenaga Kerja dengan waktu yang telah ditentukan dan dengan peserta terbatas menjadi lebih fleksibel dan dapat menjangkau pelaku usaha lain. Keunggulan inovasi ini adalah, tidak terbatasnya jumlah pelaku usaha yang akan menerima informasi dan dapat menjangkau pelaku usaha yang kurang mengerti teknologi digital karena selain dengan media video sosialisasi dilakukan secara langsung.

- g. Analisis Atas Program atau Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Capaian Kinerja Program Tahun 2024

No	Uraian Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Keuangan	% Realisasi Kinerja	Efektifitas Program
1.	Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	1.154.410.500	1.027.453.479	89	99,97	Ya
2.	Pengendalian Izin Usaha Industri	106.805.200	104.770.171	98,09	100,13	Ya
3.	Perencanaan dan Pembangunan Industri	7.270.306.500	5.776.525.086	79,45	101,26	Ya
4.	Pengembangan UMKM	2.760.930.000	2.730.386.827	98,89	426,79	Ya

Sumber Data Laporan SKPD dan Rekonsiliasi Data LKPJ Tahun 2024, data diolah

Berikut analisa program penunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian Sasaran Strategis Meningkatnya Kontribusi Ekonomi Sektor Unggulan Non Pertambangan (Indikator Kinerja Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Industri Pengolahan :

No	Program	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Tindakan lanjut
1.	Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Para IKM antusias ingin produknya mendapatkan sertifikat baik itu sertifikat halal maupun sertifikat merek, setelah dilakukan sosialisasi mengenai kewajiban memiliki akun SIINas, para IKM antusias agar mendapatkan akun SIINas.	Para IKM umumnya belum bisa membuat dokumen halal maupun pendaftaran merek secara mandiri, para IKM masih kesulitan melakukan registrasi SIINas.	Melakukan fasilitasi pembuatan dokumen halal dan pendaftaran merek, melakukan pendampingan registrasi SIINas hingga mendapatkan akun.
2.	Pengendalian Izin Usaha Industri	Pelaku usaha yang belum memiliki izin, di fasilitasi mendapatkan izin berupa NIB sehingga pelaku usaha kooperatif saat di data. Petugas pendata kurang mengenal area yang di data, namun karena ada pelaku usaha industri binaan di desa tersebut sehingga petugas mendapat pendampingan dalam pendataan.	Adanya miskomunikasi antar aparat desa, sehingga target pendataan di desa tersebut tidak tercapai, ketika petugas pendata mengunjungi tempat usaha, terkadang pelaku usaha sedang tidak berada di tempat produksi.	Meminta nomor kontak pelaku usaha ketika pelaku usaha yang di kunjungi tidak ada di tempat kepada pihak desa dan melakukan pendataan via telepon, ketika melakukan pendataan selalu berkoordinasi dengan aparat setempat maupun pelaku usaha binaan serta melakukan follow up terkait kegiatan pendataan yang akan dilaksanakan.

No	Program	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Tindaklanjut
3.	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Tingginya antusiasme pelaku usaha dalam mengikuti kegiatan pelatihan. Tersedianya anggaran untuk mendukung pemberian bantuan peralatan dan mesin produksi bagi IKM.	Pelaku usaha industri sudah mendapat pelatihan enggan mengembangkan produk baru mereka dengan alasan sulit pemasaran sehingga produk yang dibuat adalah produk yang biasa di produksi. Belum adanya pemilihan bahan baku dalam kegiatan produksi sehingga kualitas antar produk bisa berbeda-beda.	Bekerjasama dengan dinas terkait tentang potensi industri agar dapat dibantu pemasaran produknya. Melakukan pendampingan kepada pelaku usaha dalam membuat standar bahan baku produksi, sehingga menghasilkan kualitas produk yang serup.
4.	Pengembangan UMKM	Perhatian dari Pemerintah Daerah dengan adanya anggaran yang diberikan untuk menunjang pelaksanaan pelatihan dan fasilitasi bantuan sarana dan prasarana penunjang usaha bagi pelaku UMKM. Pelaku UMKM di Balangan masih banyak yang perlu diberikan fasilitasi pelatihan untuk meningkatkan SDM sehingga perlu dilaksanakan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan pelaku UMKM.	Tidak semua pelaku UMKM yang dapat terfasilitasi baik berupa pelatihan maupun bantuan sarana prasarana karena jumlah UMKM yang cukup banyak dibandingkan dengan fasilitasi yang bisa dilaksanakan.	Lebih meningkatkan pelaksanaan pelatihan bagi pelaku UMKM yang belum pernah mengikuti pelatihan dan pelatihan dengan materi yang berbeda dari pelatihan sebelumnya.

1.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Realisasi Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan pada tahun 2024 belum rilis, sehingga realisasi data yang dipakai adalah realisasi tahun 2023 yaitu 15,54. Laju pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan dipergunakan untuk menghitung peningkatan perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor.

Jumlah sarana perdagangan terus meningkat sepanjang tahun 2020-2023. Berdasarkan jenis sarana perdagangannya, Kabupaten Balangan memiliki 10 pasar dan 10 toko yang tersebar di beberapa kecamatan pada tahun 2023. Melalui keberadaan sarana perdagangan tersebut, kegiatan jual beli dan perdagangan di Kabupaten Balangan dapat berjalan lancar dan menjadi penggerak bagi perekonomian masyarakat di Kabupaten Balangan.



Tabel 11.1 Jumlah Sarana Perdagangan Menurut Jenisnya di Kabupaten Balangan, 2021–2024
Table 11.1 Number of Trading Facilities by Type of Facility in Balangan Regency, 2021–2024

Jenis Sarana Perdagangan Type of Trading Facilities	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pasar/Market	9	9	10	11
Toko ¹ /Store ²	7	10	10	10
Kios	...	...	...	...
Warung	...	...	...	...
Jumlah/Total	16	19	20	21

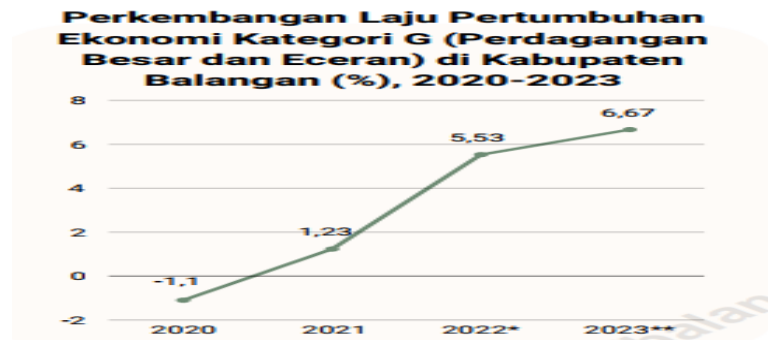
Catatan/Note: ¹Toko adalah toko ritel modern yang tercatat di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan/ ²Store is a modern retail store registered with Department of Industry and Trade of Balangan Regency
Sumber/Source: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan/Department of Industry and Trade of Balangan Regency

Pada tahun 2024 ditetapkan SK Bupati Balangan Nomor: 188.45/850/Kum Tahun 2024, tentang Tim Penataan Pedagang Pasar di Kabupaten Balangan Tahun 2024. Salah satu bentuk penataan adalah mengadakan pelatihan dan sekolah pasar untuk pengelola sarana perdagangan mengenai manajemen pasar, teknologi digital, serta standar keamanan produk, melakukan pembinaan kepada pengelola pasar dan pedagang mengenai cara mengelola pasar secara efisien dan profesional, termasuk pengelolaan kebersihan, keamanan dan pemeliharaan fasilitas pasar. Pada tahun 2024 ini berbagai upaya peningkatan ekonomi sektor perdagangan juga telah dilakukan peningkatan visibilitas produk ekspor Kabupaten Balangan dan memperluas akses pasar internasional antara lain adalah Pemerintah Kabupaten Balangan ikut serta dalam *Internasional Trade Meeting* untuk memperkenalkan produk unggulan berpotensi ekspor.

Beberapa kebijakan terkait peningkatan ekonomi sektor perdagangan juga menjadi hal yang vital dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Balangan antara lain kemudahan izin berusaha, adanya pembinaan ketentraman dan ketertiban umum, inovasi belanja CIL untuk mendukung perekonomian Balangan, adanya pemberian bantuan kepada para pedagang dan pelaku IKM, adanya pembinaan manajemen pemasaran, manajemen keuangan kerjasama dengan perusahaan tambang yang ada di Balangan. Bahkan Pemerintah Kabupaten Balangan juga menjaga kestabilan harga barang yang dijual di pasaran melalui money inflasi yang rutin dilakukan sepekan sekali secara online dengan pihak Kementerian.

b. *Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Tahun 2023 dan 2022.*

Sektor perdagangan adalah penyumbang PDRB ketiga di Kabupaten Balangan, dengan persentase distribusi PDRB sebesar 4,16 persen di tahun 2023. Pertumbuhan ekonomi kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan motor ini juga terus meningkat selama tahun 2020-2023 dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi terbesar pada tahun 2022. Serta dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi pada tahun 2023, yaitu sebesar 6,67 persen.



c. *Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun ini Dengan Target Jangka Menengah Dalam RPJMD*

Realisasi kinerja tahun 2024 belum rilis, akan tetapi jika menggunakan realisasi tahun 2023 sebesar 15,54 dibandingkan dengan target jangka menengah dalam RPJMD adalah berada pada angka 20,30 dengan capaian sebesar 76,55 persen, dan belum mencapai target akhir RPJMD.

d. *Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Dengan Standar Nasional*

Belum ada data perbandingan secara nasional karena realisasi kinerja belum rilis tahun 2024.

e. *Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan*

Hal-hal yang menyebabkan keberhasilan pencapaian target pada IKU ini adalah adanya revitalisasi dan penataan pasar pada tahun 2023 dan terus diperluas pasar-pasar tradisional seperti pasar *modern* Adaro, Pasar Halong, Pasar Uren, Pasar Mauya. Selain itu juga ada beberapa kebijakan pemberdayaan dan pengembangan UMKM serta pengembangan sentra IKM, pengembangan UMKM, pemberdayaan UMKM. Telah banyak dilakukan beberapa inovasi untuk mendorong kinerja ini antara lain adalah Silasardag, Belanja Cil, Bapamu Kuat dan beberapa inovasi lainnya yang akan dijelaskan secara rinci dalam Bab III ini khusus inovasi IKU Pemda.

Pada tahun 2023-2024 terdapat beberapa hal pokok yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Balangan melalui dinas terkait peningkatan kinerja sektor ini yakni :

1. Peningkatan Infrastruktur Pasar

Meningkatkan fasilitas dan infrastruktur pasar Pemerintah, seperti revitalisasi pasar, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, dan meningkatkan aksesibilitas pasar. Hal ini dapat menarik lebih banyak pedagang dan konsumen, yang pada akhirnya meningkatkan volume perdagangan.

2. Mempromosikan Penggunaan Sistem *E-Commerce*

Mempromosikan penggunaan *platform e-commerce* untuk mempermudah transaksi perdagangan, baik untuk pelaku usaha kecil maupun menengah. Dinas Perindustrian dan Perdagangan dapat menyelenggarakan promosi dan pendampingan kepada pelaku usaha untuk memanfaatkan *platform digital*.

3. Penyuluhan kepada Pelaku Usaha

Memberikan penyuluhan kepada para pelaku usaha, khususnya UMKM tentang cara meningkatkan kualitas produk, manajemen bisnis dan strategi pemasaran yang efektif. Hal ini bertujuan agar produk yang dipasarkan dapat bersaing di pasar yang lebih luas.

4. Promosi dan Pameran Produk Daerah

Mengadakan kegiatan promosi, seperti pameran atau bazar, yang melibatkan produk lokal dari berbagai sektor, seperti hasil pertanian, kerajinan, dan produk industri lainnya. Promosi seperti ini dapat menarik pembeli dan meningkatkan volume perdagangan.

5. Pengembangan Jaringan Distribusi

Membangun dan memperluas jaringan distribusi untuk memudahkan akses produk-produk lokal ke pasar yang lebih luas, baik secara regional maupun nasional. Hal ini mencakup peningkatan sistem logistik dan kerja sama dengan distributor serta pengecer.

6. Kemitraan dengan Sektor Swasta

Mendorong kemitraan antara pelaku usaha lokal dengan perusahaan atau sektor swasta lainnya untuk membuka peluang pasar baru dan meningkatkan penjualan produk daerah.

7. Promosi dan Branding Produk Lokal

Kampanye promosi yang lebih masif, mengintensifkan promosi melalui berbagai saluran, baik *online* maupun *offline*, termasuk media sosial, pameran, dan bazar. Fokus pada kampanye *branding* yang menonjolkan keunggulan dan ciri khas produk lokal Balangan. Selain itu juga menentukan produk-

produk unggulan daerah yang memiliki potensi besar, lalu memfokuskan upaya pemasaran untuk menjangkau pasar nasional dan internasional.

8. Inovasi Produk

Riset dan pengembangan dengan mengarahkan perhatian pada inovasi produk untuk meningkatkan daya saing, seperti mengembangkan produk turunan baru dari hasil pertanian atau kerajinan yang lebih bernilai tambah.

f. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya tercermin pada aspek berikut yakni :

1. Telah dilakukan penyusunan rancangan matrik resiko strategis operasional pemerintah daerah. Matrik resiko telah dijabarkan pada sasaran strategis indikator laju pertumbuhan ekonomi sektor industri pengolahan.
2. Adanya Upaya percepatan pencapaian target melalui inovasi sebagai berikut :

IKU	Nama Inovasi	Manfaat
Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan	Silasardag	Implementasi Silasardag belum optimal dalam pelaksanaannya, meskipun demikian dengan adanya Silasardag telah mempermudah dalam pengelolaan data berbasis soft data serta sebagai salah satu pemenuhan indikator pasar sesuai dengan standar kelayakan. Pengelolaan data ini juga berdampak pada peningkatan pengelolaan yang lebih baik dan dapat meningkatkan efisiensi pasar secara keseluruhan serta mempermudah konsumen serta pedagang dalam bertransaksi.
	Belanja Cil	Belanja Cil merupakan inovasi yang dimutasi oleh Bapperida pada awal tahun 2024, Belanja Cil merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Balangan untuk mendukung perkembangan ekonomi lokal di Kabupaten Balangan, setiap ASN dimintakan untuk melaporkan transaksi di pasar ataupun pelaku usaha lokal Balangan setiap bulannya, namun dalam pelaporannya masing-masing ASN belum rutin menyampaikan ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan Balangan.
	Bapamu Kuat	Membantu pemerintah dalam menekan laju angka inflasi daerah. Selain itu juga membantu masyarakat dalam membeli kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau saat HKBN (Hari Besar Keagamaan Nasional) dan saat kenaikan harga barang pokok tertentu.

g. Analisis Atas Program atau Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Capaian Kinerja Program Tahun 2024

No	Uraian Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Keuangan	% Realisasi Kinerja	Efektifitas Program
1.	Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	13.836.978.700	3.415.129.213	24,68	20,45	-
2.	Pengembangan Ekspor	2.569.134.000	2.297.763.723	89,44	0	-
3.	Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	51.500.000	40.370.400	78,39	669,61	Ya

No	Uraian Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Keuangan	% Realisasi Kinerja	Efektifitas Program
4.	Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	276.750.000	109.444.571	39,55	132,38	Ya
5.	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	1.172.019.100	1.135.716.418	96,90	88,11	Ya
6.	Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	744.252.700	698.273.699	93,82	88,08	Ya

Sumber Data Laporan SKPD dan Rekonsiliasi Data LKPD Tahun 2024, data diolah

Berikut analisa program penunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian Sasaran Strategis Meningkatkan Kontribusi Ekonomi Sektor Unggulan Non Pertambangan (Indikator Kinerja Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan :

No	Program	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Tindakanlanjut
1.	Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	(1) Dukungan Pemerintah Daerah. (2) Kemudahan akses transportasi. (3) Pengawasan dan evaluasi yang intens.	(1) Keterbatasan Infrastruktur Pasar. (2) Permasalahan Lingkungan dan Sosial. (3) Kurangnya Sistem Manajemen dan Pengelolaan yang Profesional. (4) Kurangnya Partisipasi dan Kesadaran Masyarakat	(1) Peningkatan Infrastruktur Pasar. (2) Peningkatan wawasan untuk Pengelola Pasar. (3) Meningkatkan Kesadaran Pedagang dan Partisipasi Masyarakat. (4) Penerapan Sistem Pemantauan dan Evaluasi Berkala.
2.	Pengembangan Ekspor	Dukungan Pemerintah Daerah, Kualitas Produk Unggulan	Terbatasnya Pengetahuan tentang Proses Ekspor, Keterbatasan Jaringan dan Akses Pasar, Keterbatasan Dalam Peningkatan Daya Saing Produk	(1) Meningkatkan pemahaman pelaku usaha melalui seminar atau forum yang melibatkan pelaku ekspor sukses dan konsultan internasional. (2) Penyediaan Jaringan dan Pemasaran Pasar Internasional. (3) Peningkatan Kualitas dan Standar Produk.
3.	Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Peningkatan Kualitas Produk Lokal, Dukungan Pemerintah Daerah, Perkembangan Teknologi dan Platform Digital.	Kurangnya Pengetahuan tentang Standarisasi dan Branding, Keterbatasan Akses ke Pasar, Persaingan dengan Produk Impor, Kurangnya Inovasi dan Diversifikasi Produk.	Pelatihan tentang Standarisasi dan Branding, Fasilitasi Akses ke Pasar melalui Digitalisasi, Diversifikasi Produk dan Inovasi, Peningkatan Infrastruktur dan Distribusi, Meningkatkan Kesadaran Masyarakat tentang Pentingnya Produk Lokal, Pemberian Insentif bagi Pelaku Usaha yang Berhasil.
4.	Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Tingginya kesadaran Pelaku Usaha sektor perdagangan terhadap perizinan.	Jumlah target objek sasaran pengawasan yang ditentukan tidak dapat di awasi sesuai target rencana karena keterbatasan SDM.	Koordinasi dengan Dinas Perdagangan Provinsi guna sinkronisasi kegiatan pengawasan agar SDM di daerah mendapat <i>backup</i> dari SDM Dinas Perdagangan Provinsi.
5.	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Adanya kegiatan monitoring harga sembako yang dilakukan secara rutin di beberapa pasar di Kabupaten Balangan sehingga dapat mengetahui data Tingkat harga sembako secara <i>real time</i> , Telah dilaksanakannya kegiatan pasar murah yang diadakan sebanyak 68 kali yang merupakan salah satu	Adanya kenaikan harga barang tertentu yang tidak bisa diantisipasi karena terjadi secara nasional, Belum adanya distributor besar/ gudang penyimpanan bahan. Pokok, Kurangnya varian barang jualan yang tersedia baik dari segi kualitas maupun kuantitas sehingga tidak mencakup semua kebutuhan Masyarakat.	Pembangunan gudang penyimpanan bahan pokok dalam rangka mengamankan stok barang sembako. Pelaksanaan pasar murah secara rutin sehingga stabilitas harga sembako dapat terkendali.

No	Program	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Tindakan lanjut
		bentuk intervensi pemerintah dalam upaya menekan angka inflasi daerah, Bertambahnya animo masyarakat dan pengusaha untuk menera ulang UTTP yang dimiliki karena gratis (tidak ada lagi biaya retribusi).		
6.	Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Bertambahnya animo masyarakat dan pengusaha untuk menera ulang UTTP yang dimiliki karena gratis (tidak ada lagi biaya retribusi). Adanya layanan tera ulang di kantor pada jam kerja. Adanya tim pengawasan metrologi legal yang dibentuk tahun 2024 dengan anggota lintas SKPD dan unsur aparat penegak hukum. Adanya sosialisasi/penyuluhan terkait metrologi legal sebelum pengawasan.	Kurangnya tenaga penera ahli dan reparatir ahli. Belum terlaksananya pengawasan di seluruh SPBU. Bersama tim karena keterbatasan anggaran untuk honorarium APH.	Mengajukan permohonan CPNS/PPPK untuk tenaga penera ahli. Menyesuaikan anggaran honorarium APH sesuai jumlah SPBU dan bila memungkinkan menambahkan juga untuk pengawasan pertashop dan pasar.

1.3 Laju Pertumbuhan Ekonomi Pertanian dan Perikanan

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

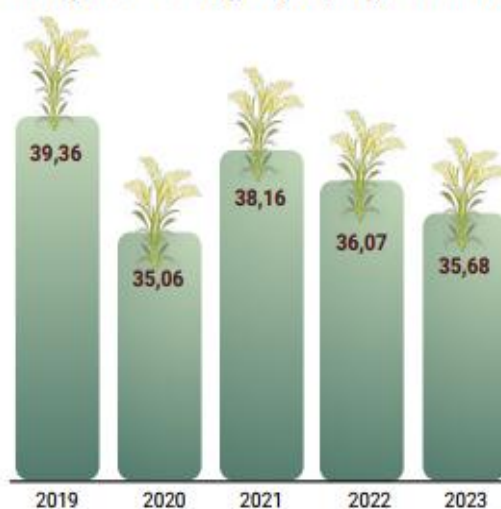
Laju Pertumbuhan Ekonomi Pertanian dan Perikanan pada tahun 2024 belum rilis, sehingga realisasi data yang dipakai adalah realisasi tahun 2023 yaitu 8,74 dengan capaian sebesar 89,27 persen.

b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Tahun 2023 dan 2022.

Sektor pertanian merupakan sektor penyumbang PDRB kedua tertinggi di Kabupaten Balangan, dengan kontribusi sebesar 7,68 persen. Hal ini menjadikan pertanian menjadi aspek penting dalam kehidupan masyarakat Kabupaten Balangan.

Hasil Kerangka Sampel Area (KSA) menunjukkan produksi padi di Balangan tahun 2023 mencapai 16.071 ton GKG dengan luas panen mencapai 4.504 ha dengan produktivitas sebesar 36,07 kw/ha. Nilai ini lebih kecil dibandingkan produktivitas tahun sebelumnya, yaitu tahun 2022 dengan produktivitas sebesar 36,07 kw/ha. Penurunan ini disebabkan oleh produksi padi yang kurang maksimal karena masa tanam yang terlalu cepat, serta pemilihan benih yang kurang tepat.

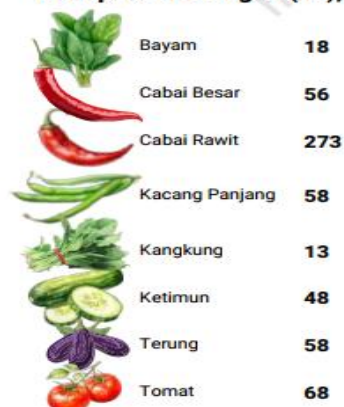
Perkembangan Produktivitas Padi Kabupaten Balangan (kw/ha), 2019-2023



Sumber : Provinsi Kalimantan Selatan Dalam Angka 2024

Sementara itu, untuk produksi sayur-mayur yang dibudidayakan di daerah Kabupaten Balangan diantaranya yaitu komoditas daun bawang, bawang merah, bayam, buncis, cabai besar, cabai rawit, kacang panjang, kangkung, ketimun, melon, semangka, dan terong. Dari data luas tanaman sayur-sayuran yang ada di Kabupaten Balangan pada tahun 2023, yang mempunyai areal terluas adalah tanaman cabai rawit, yaitu sebesar 273 Ha dengan hasil produksi sebesar 13.267 kuintal. Diikuti oleh luas areal tanaman tomat sebesar 68 Ha dengan produksi sebesar 3.939 kuintal.

Luas Panen Tanaman Sayuran Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kabupaten Balangan (ha), 2023



Sumber : Kabupaten Balangan Dalam Angka 2024

Kerangka Sampel Area (KSA) merupakan data 9 sampel yang di ambil untuk mewakili Kabupaten Balangan, Namun dari ke 9 sampel seringkali ditemui 9 titik sampel tersebut ketika diambil data ada yang sudah melaksanakan panen, ada yang tidak melakukan budidaya dan bukan yang mendapat fasilitasi sarana produksi pertanian dari pemerintah. Sehingga rata-rata benih yang dijadikan area sampel adalah titik sampel yang menggunakan benih lokal. Dimana hasil produktifitas benih lokal ini rata-rata rendah. Akibatnya hasil sampel ubinan pun berbeda dengan perhitungan SKPD Kabupaten/Kota, maupun Provinsi bahkan dengan Kementerian Pertanian.

Sebagai pembanding, SKPD mempunyai data hasil perhitungan sendiri melalui perhitungan mandiri tenaga penyuluh, dimana data produktifitas selalu meningkat setiap tahunnya.

No.	Jenis Tanaman Pangan	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Padi Sawah	4,4	4,5	5,5	5,7	5,8	5,9

c. *Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun ini Dengan Target Jangka Menengah Dalam RPJMD*

Realisasi kinerja tahun 2024 belum rilis, akan tetapi jika menggunakan realisasi tahun 2023 sebesar 8,74 dibandingkan dengan target jangka menengah dalam RPJMD adalah berada pada angka 11,42 dengan capaian sebesar 76,53 persen, belum mencapai target akhir RPJMD.

d. *Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Dengan Standar Nasional*

Belum ada data perbandingan laju pertumbuhan sektor ekonomi pertanian dan perikanan

e. *Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan*

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja ini adalah :

- Sektor pertanian merupakan salah satu penyumbang signifikan terhadap Produk Domestik Bruto di Kabupaten Balangan, sektor ini berdasarkan data BPS menyumbang 7,68%, persentasenya mengalami penurunan dibandingkan beberapa tahun sebelumnya akibat pertumbuhan sektor pertambangan. namun sejak tahun 2022 ke 2023 mengalami kenaikan.

- Kontribusi sektor pertanian tidak hanya berasal dari tanaman pangan seperti padi dan jagung, tetapi juga subsektor hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan, yang produk unggulannya telah menjadi produk ekspor yang mendatangkan devisa/saat ini masih belum ada melakukan ekspor.
- Sektor pertanian juga menjadi sumber utama lapangan kerja bagi masyarakat Balangan. Sekitar 80,52% (angkatan kerja tahun 2023) angkatan kerja terlibat dalam aktivitas pertanian, baik sebagai petani kecil, buruh tani maupun pekerja sektor agribisnis. Hal ini menjadikan pertanian sebagai sektor yang berperan dalam mengurangi tingkat pengangguran dan mendukung kesejahteraan masyarakat pedesaan.
- Sebagian besar wilayah pedesaan di Kabupaten Balangan bergantung pada sektor pertanian sebagai sumber utama pendapatan. Oleh karena itu, pertanian memainkan peran penting dalam pembangunan daerah. Peningkatan infrastruktur, seperti jalan, irigasi, dan pasar, di wilayah pedesaan yang berbasis pertanian dan juga pemberian fasilitas sarana produksi pertanian dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal sekaligus mengurangi kesenjangan.

Dalam implementasi tugas pokok SKPD pemangku masih menghadapi beberapa kendala terhadap pencapaian kinerja ini antara lain :

- Tantangan yang dihadapi adalah rendahnya produktifitas tenaga kerja akibat kurangnya akses terhadap teknologi *modern*, pendidikan dan pelatihan.
- Sektor pertanian memiliki potensi besar untuk mendukung ketahanan pangan dan perekonomian, namun tantangan yang ada sering kali menghambat optimalisasi potensinya. Salah satu tantangan utamanya adalah perubahan iklim yang semakin tidak menentu. Anomali cuaca, seperti banjir dan kekeringan, mengancam produktivitas lahan pertanian dan sering kali mempengaruhi ketersediaan hasil panen.
- Selain itu, kurangnya akses terhadap inovasi teknologi juga menjadi masalah besar, terutama bagi petani tradisional yang belum terbiasa dengan metode pertanian canggih/*modern* yang terus berkembang di era *modern* sekarang.
- Di sisi lain, distribusi dan pemasaran hasil panen kerap menjadi titik lemah, di mana petani kecil harus menghadapi rantai distribusi yang panjang dan tidak efisien, menyebabkan kerugian finansial yang signifikan. Rantai distribusi ini sering kali dipenuhi oleh perantara, sehingga harga ditingkat petani menjadi rendah, sedangkan harga di pasar tetap tinggi.
- Kombinasi dari tantangan-tantangan ini menunjukkan perlunya kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk menciptakan solusi berkelanjutan yang dapat memberdayakan petani dan meningkatkan daya saing sektor pertanian.

Sebagai bentuk upaya untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi sektor pertanian dan perikanan yang merupakan sektor kedua setelah pertambangan adalah pengembangan di sektor pertanian juga menjadi langkah penting untuk meningkatkan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Adapun upaya strategis yang dilakukan antara lain adalah

- Pengembangan Kawasan Agropolitan di Kabupaten Balangan yaitu adalah mengembangkan kawasan pertanian sesuai potensi di kecamatan-kecamatan yang menerapkan pertanian dari hulu ke hilir, dari budidaya sampai dengan pengolahan dan pemasaran serta mengintegrasikan sektor hulu dan hilir.
- Selain itu, diversifikasi produk menjadi kunci untuk menghadapi dinamika pasar global. Dengan mengembangkan komoditas bernilai tambah tinggi, seperti produk organik, olahan, atau produk dengan sertifikasi khusus, sektor pertanian dapat lebih kompetitif di pasar domestik dan internasional.
- Peningkatan infrastruktur pertanian juga sangat krusial, terutama dalam hal irigasi yang efisien, pembangunan jalan untuk distribusi hasil panen, dan fasilitas penyimpanan yang memadai untuk mengurangi kerugian pasca-panen.
- Lebih jauh lagi, dukungan kebijakan dari pemerintah diperlukan untuk memastikan keberlanjutan sektor ini. Kebijakan berupa subsidi pupuk dan benih, akses mudah terhadap kredit usaha tani, serta

insentif untuk adopsi teknologi *modern* akan memberikan dorongan signifikan bagi petani untuk meningkatkan produktivitas mereka. Dengan implementasi strategi-strategi tersebut di sektor pertanian ini memberi potensi besar untuk menjadi motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi.

- Menciptakan kolaborasi antar *stakeholder* untuk mendorong peningkatan daya saing pertanian dengan melakukan inovasi, pembinaan, pelatihan, pemanfaatan inovasi teknologi pertanian dan dituangkan dalam dokumen perencanaan SKPD terkait.
- Pengembangan kawasan agropolitan.
- Pembangunan infrastruktur pertanian seperti irigasi pertanian dan pembangunan jalan usaha tani untuk distribusi hasil panen.
- Pemberian saprodi pertanian dan perikanan untuk petani.
- Pemberian alsinta pertanian untuk petani dalam rangka mendukung pertanian *modern*.
- Bimbingan teknis dan pelatihan bagi SDM Pertanian dan Perikanan.

Adapun langkah konkret kedepan yang harus dilakukan untuk meningkatkan produksi pertanian dan perikanan adalah :

1. Pengembangan kampung hortikultura secara berkesinambungan.
2. Perbanyak bimbingan teknis untuk para petani/kelompok tani secara *offline* maupun *online*.
3. Pengembangan kawasan komoditas strategis yang tetap memperhatikan kesesuaian lahan dan *agroklimat* budidaya pengembangan komoditas strategis.
4. Pengembangan kawasan komoditas strategis disesuaikan dengan tujuan dan tetap mempertahankan prinsip ramah lingkungan dan adaptif terhadap perubahan iklim serta hemat air.
5. Penguatan data luas tanam, luas panen dan produksi serta pengembangan *early warning sistem* komoditas strategis.
6. Melanjutkan pengembangan kawasan komoditas strategis dalam skala luas.
7. Pengembangan kawasan komoditas strategis akan difasilitasi dengan sarana produksi, seperti benih bermutu, pupuk, mulsa, likat kuning dan lain-lain, dalam jumlah yang memadai walaupun bersifat *stimulant*.
8. Bersinergi dengan *stakeholder* terkait agar kegiatan pengembangan kawasan komoditas strategis mendapat dukungan pengembangan pada lokasi tersebut. Dukungan tersebut antara lain berupa aspek perbenihan, perlindungan, pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian.
9. Melakukan pertemuan monitoring dan evaluasi secara rutin bagi penerima bantuan serta verifikasi lapangan untuk mengetahui kebenaran dari realisasi tanam dan produksi hortikultura.
10. Mendorong gerakan tanam tingkat masyarakat atau rumah tangga, khususnya komoditas cabai pada bulan-bulan tertentu untuk mengatasi *fluktuasi* harga.
11. Banyaknya bantuan sarana produksi untuk perikanan budidaya berupa keramba, kolam ikan, bioflok dan bibit serta pakan ikan.
12. Sumber daya alam yang mendukung untuk perikanan budidaya.
13. Kebutuhan masyarakat akan protein ikan.
14. Sistem budidaya perikanan yang memberikan keuntungan atau tambahan penghasilan bagi masyarakat Kabupaten Balangan yang mayoritas pekerjaannya adalah petani.

f. *Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya*

Efisiensi penggunaan sumber daya tercermin pada aspek berikut yakni :

1. Telah disusunnya rancangan matrik resiko strategis Pemerintah Daerah sebagaimana telah dijelaskan pada indikator laju pertumbuhan ekonomi sektor industri pengolahan.
2. Telah dilakukannya inovasi dalam rangka percepatan pencapaian target kinerja sebagaimana data dibawah ini :

IKU	Nama Inovasi	Manfaat
Laju Pertumbuhan Ekonomi Pertanian dan Perikanan	E-Bapak Tani	E-Bapak Tani adalah Inovasi sebagai Tools Pembantu untuk penyaluran bantuan ke kelompok tani, sehingga bantuan tepat sasaran ke kelompok yang membutuhkan dan bantuan yang disalurkan tidak tumpang tindih dan sesuai dengan kebutuhan Kelompok Tani.
	E-Ketapang	Merupakan aplikasi yang menyiapkan data ketersediaan pangan di Kabupaten Balangan, harga gabah, harga sembako.
	Si Enak	Merupakan Aplikasi Android yang melakukan pendataan lapangan peternak, kepemilikan ternak dan vaksinasi ternak.

g. Analisis Atas Program atau Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Capaian Kinerja Program Tahun 2024

No	Uraian Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Keuangan	% Realisasi Kinerja	Efektifitas Program
1.	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	124.507.018.281	94.306.921.491	75,74	845,74	Ya
2.	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	23.730.181.050	20.672.238.151	87,11	92,37	Ya
3.	Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	1.523.934.700	1.210.931.833	79,46	103,95	Ya
4.	Penyuluhan Pertanian	13.845.871.699	12.631.368.200	91,23	100	Ya
5.	Pengelolaan Perikanan Budidaya	42.889.294.194	37.653.082.084	87,79	110,34	Ya
6.	Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	69.848.887.750	68.357.473.142	97,86	100	Ya
7.	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	87.035.446.495	71.733.442.000	82,42	90.63	Ya
8.	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	689.944.100	666.504.275	96,60	100	Ya
9.	Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	2.400.539.662	2.300.491.836	95,83	100	Ya
10.	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	12.218.112.608	11.771.572.147	96,35	104,61	Ya
11.	Pengawasan Keamanan Pangan	78.747.200	63.744.000	80,95	122,71	Ya
12.	Perencanaan dan Pembangunan Industri	7.270.306.500	5.776.525.086	79,45	101,26	Ya

Sumber Data Laporan SKPD dan Rekonsiliasi Data LKPJ Tahun 2024, data diolah

Berikut analisa program penunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian Sasaran Strategis Meningkatkan Kontribusi Ekonomi Sektor Unggulan Non Pertambangan Indikator Kinerja Laju Pertumbuhan Ekonomi Pertanian dan Perikanan :

No	Program	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Tindaklanjut
1.	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Ada tambahan jumlah kelahiran dan pengadaan semen beku. Adanya tambahan petugas inseminator sebanyak 4 orang yang berada di Kecamatan Batumandi sebanyak 1 orang dan 1 orang di Kecamatan Tebing Tinggi serta 2 orang dari Dinas. Adanya penganggaran untuk sapirodi	Tidak terealisasinya pengadaan bibit ternak pada DPA bidang peternakan. Kurangnya ketersediaan N2 cair dikarenakan belum adanya tempat penyimpanan khusus N2 sehingga menyebabkan menyusutnya N2 tersebut	Mempercepat realisasi pengadaan bibit ternak pada awal tahun. Perlu dibangunnya tempat khusus penyimpanan N2 untuk mengurangi resiko penguapan. Menyampaikan kepada penyedia untuk mendistribusikan sesuai dengan surat pesanan.

No	Program	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Tindaklanjut
		pertanian seperti Herbisida, NPK, PHC, Pestisida baik hibah maupun barang persediaan. Tingginya minat petani untuk meningkatkan pendapatan melalui berkebun hortikultura.	dikarenakan penguapan. Keterlambatan dalam penyaluran barang. Masih ada beberapa petani yang belum mendapatkan bantuan karena anggaran tidak mencukupi	Meminta anggaran tambahan kepada pemerintah daerah untuk mencukupi permohonan petani.
2.	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Adanya stok ketersediaan obat-obatan.	Adanya keterlambatan dalam mengetahui adanya serangan sehingga serangan sudah menyebar luas.	Petugas Lapangan harus mampu menganalisa kondisi di lapangan sehingga serangan dapat dilakukan pencegahan.
3.	Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Tersedianya sarana prasarana pendukung (obat-obatan dan vaksin hewan) untuk pelayanan kesehatan hewan.	Keterbatasan keterampilan petugas kesehatan hewan untuk menangani kasus penyakit hewan tertentu.	Pengembangan kompetensi dan keterampilan bagi petugas kesehatan hewan.
4.	Penyuluhan Pertanian	-	-	-
5.	Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pemberian sarana budidaya ikan, dan Pelatihan	Monev/pengawasan pemberian bantuan sarana budidaya masih kurang	Meningkatkan monev/pengawasan pemberian bantuan sarana budidaya ikan
6.	Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Komitmen pimpinan untuk meningkatkan sarana prasarana irigasi untuk menunjang ketahanan pangan, serta pengamanan tebing sungai untuk menghindari longsor.	Perubahan iklim yang ekstrem dan tidak terprediksi.	Perlu adanya koordinasi dan manajemen antar instansi dalam peningkatan sarana prasarana ketahanan pangan serta pengamanan tebing sungai.
7.	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Mahalnya harga pakan ternak, tidak ada petugas yang bertugas untuk mendata produksi daging, kurangnya atau rendahnya prasarana pertanian yang memadai.	Meningkatnya populasi ternak, transisi pengadaan barang / jasa dari manual menjadi online sehingga pengadaan barang / jasa terlaksana, keterbatasan SDM, titik lokasi belum fix.	Penambahan petugas yang bertugas untuk mendata produksi daging, pengadaan barang dan jasa dilaksanakan sesuai dengan jadwal perencanaan.
8.	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Pelatihan diversifikasi olahan hasil perikanan, Pemberian bantuan alat-alat pengolahan, Pengembangan wawasan (demo memasak).	Keterbatasan modal dan bahan baku untuk menciptakan produk olahan baru.	Menganggarkan kegiatan sosialisasi mengenai permodalan usaha.
9.	Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Banyak pengusul penyediaan infrastruktur dan pendukung kemandirian pangan.	Koordinasi kurang optimal, pemenuhan kelengkapan dan kesesuaian penerima bantuan masih perlu dievaluasi.	Penambahan anggaran dan koordinasi sinergitas antar pihak yang terlibat.
10.	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Semakin tinggi nya skor PPH konsumsi, maka semakin beragam dan seimbang konsumsi pangan masyarakat, nilai tersebut menunjukkan kualitas konsumsi pangan penduduk. untuk mendukung hal tersebut melalui kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal, antara lain sosialisasi konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA), kepada ibu-ibu PKK Kecamatan se Kabupaten Balangan serta kader pangan, kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada pelajar dari tingkat SD hingga SMA melalui kegiatan B2SA Goes	Promosi peningkatan konsumsi pangan harus terus dilakukan untuk peningkatan wawasan masyarakat untuk mempertahankan kualitas konsumsi pangan, pemantauan ketersediaan seluruh bahan pangan harus terjaga sesuai minimal sesuai kebutuhan masyarakat.	Memperkuat advokasi edukasi dan sosialisasi diversifikasi pangan untuk mencapai pola konsumsi pangan bergizi seimbang dan aman (B2SA), melaksanakan pertemuan, sosialisasi dan pelatihan pengembangan pangan lokal, perkuat koordinasi untuk peningkatan ketersediaan dan akses fisik terhadap pangan ke setiap rumah tangga dan individu dalam keluarga.

No	Program	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Tindaklanjut
		to School, sehingga pola konsumsi pangan B2SA diharapkan dapat di terapkan sejak dini dimulai dari tingkat keluarga. Tercapainya skor PPH Ketersediaan karena ada beberapa kelompok bahan pangan (padi-padian, gula, minyak dan lemak) sudah mencapai skor maksimal PPH Ketersediaan.		
11.	Pengawasan Keamanan Pangan	Alat dan Uji Pestisida sudah tersedia.	Belum adanya Petugas Pengambil Sampel PSAT yang bersertifikat.	Mengikuti Pelatihan Petugas Pengambil Sampel PSAT.
12.	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Tingginya antusiasme pelaku usaha dalam mengikuti kegiatan pelatihan. Tersedianya anggaran untuk mendukung pemberian bantuan peralatan dan mesin produksi bagi IKM.	Pelaku usaha industri sudah mendapat pelatihan enggan mengembangkan produk baru mereka dengan alasan sulit pemasaran sehingga produk yang dibuat adalah produk yang biasa di produksi. Belum adanya pemilihan bahan baku dalam kegiatan produksi sehingga kualitas antar produk bisa berbeda-beda.	Bekerjasama dengan dinas terkait tentang potensi industri agar dapat dibantu pemasaran produknya. Melakukan pendampingan kepada pelaku usaha dalam membuat standar bahan baku produksi, sehingga menghasilkan kualitas produk yang serup.

1.4 Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pariwisata

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pariwisata pada tahun 2024 belum rilis, sehingga realisasi data yang dipakai adalah realisasi tahun 2023 yaitu 9,85 dengan capaian sebesar 89,30 persen.

Kabupaten Balangan memiliki kurang lebih 32 obyek wisata yang terdiri dari obyek wisata religi; alam dan rekreasi; sejarah/budaya; dan kuliner yang tersebar di 8 kecamatan, serta sangat berpotensi untuk menarik pengunjung. Beberapa diantaranya adalah obyek wisata religi Masjid Al-Akbar, Makam Datuk Kandang Haji (Kec. Juai). Obyek wisata alam, seperti, Kecamatan Paringin Selatan (Pulau Beredar/Danau Baruh Bahinu), dan Kecamatan Halong (Gunung Belawan dan Berai, dan Air Terjun Menyandar). Obyek wisata sejarah Benteng Tundakan berada di Kecamatan Aawayan. Sementara itu, wisata kuliner khas Balangan berada di Kecamatan Batumandi (Sirup Batumandi).



b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Tahun 2023 dan 2022.

Jumlah kunjungan wisatawan di Kabupaten Balangan selama tahun 2023 adalah sebesar 45.678 orang. Wisatawan tersebut terdiri dari 45.651 wisatawan asal nusantara dan 27 wisatawan asal mancanegara. Kabupaten Balangan tidak memiliki akomodasi berupa hotel berbintang. Namun demikian, terdapat 3 akomodasi (non bintang) dengan total 45 kamar dan 71 tempat tidur. Adapun data jumlah kunjungan wisata dari tahun 2023 sampai 2024 adalah sebagai berikut :

No	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Tahun 2023	Tahun 2024	Keterangan
1	Mancanegara	20	27	Bertambah 7
2	Nusantara	40.147	45.678	Bertambah 5.531

- c. *Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun ini Dengan Target Jangka Menengah Dalam RPJMD*
Realisasi kinerja tahun 2024 belum rilis, akan tetapi jika menggunakan realisasi tahun 2023 sebesar 9,85 dibandingkan dengan target jangka menengah dalam RPJMD adalah berada pada angka 12,87 dengan capaian sebesar 76,53 persen, belum mencapai target akhir RPJMD.

- d. *Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Dengan Standar Nasional*
Belum ada data perbandingan realisasi kinerja secara nasional.

- e. *Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan*

PDRB sektor pariwisata di Kabupaten Balangan didapatkan dari perhitungan kontribusi PDRB sektor akomodasi dan makan minum. Pada tahun 2023, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata telah melaksanakan beberapa kegiatan dalam mendukung laju pertumbuhan PDRB sektor pariwisata. Diantaranya adalah pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan kepada para pelaku dan pengelola destinasi wisata. Dan juga melakukan pendataan awal kepada penggerak usaha kuliner atau makan dan minum di Kabupaten Balangan. Kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan adalah *Survey Akomodasi* (Penginapan dan Rumah Makan) untuk data SISPARNAS sistem informasi kepariwisataan nasional) tahun 2023, rapat kerja (raker) Pokdarwis Kabupaten Balangan tahun 2023, ekspor akhir pendampingan Pokdarwis Bontar Batarius di Desa Mamigang oleh Tim Nusapada.

Adapun hal-hal yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Balangan melalui Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata adalah

- Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri, destinasi dan kawasan strategis Kabupaten Balangan.
- Penguatan promosi melalui media cetak, elektronik dan media lainnya baik dalam negeri dan luar negeri.
- Fasilitasi kegiatan pemasaran pariwisata baik dalam dan luar negeri.
- Peningkatan kerjasama dan kemitraan pariwisata dalam dan luar negeri.
- Pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten.
- Pengadaan/pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana dalam pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten.
- Penetapan tanda daftar usaha pariwisata daerah.

Selain peran dari Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata dalam peningkatan laju pertumbuhan ekonomi sektor pariwisata antara lain adalah peran dari beberapa SKPD berikut :

- Perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan juga dilakukan oleh Dinas PUPRPERKIM. Dan saat ini kondisi jalan mantap Kabupaten Balangan sudah lebih dari 60 persen. Kemudian juga membangun beberapa titik *interest* area seperti museum, taman sanggam dan lain-lain.
- Bekerjasama dengan beberapa kelompok masyarakat untuk mengembangkan diversifikasi wisata seperti wisata religi, wisata budaya.
- Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian berperan dalam proses digitalisasi mempermudah akses informasi dan promosi wisata dan menyediakan fasilitasi aplikasi layanan *mobile* pariwisata seperti berdirinya *start up* di Balangan seperti Gojek Balangan.

- d. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan membantu memfasilitasi para kerja seni dan tari-tarian dari siswa-siswa atau kelompok belajar yang akan dipertunjukkan pada saat terdapat momen atau *event* budaya di tempat pariwisata.

f. *Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya*

Efisiensi penggunaan sumber daya tercermin pada aspek inovasi berikut yakni :

1. Pandawa (Pencatatan Data Wisatawan)
Sebelum adanya inovasi Pandawa untuk laporan kunjungan wisata dari Pokdarwis lambat terkumpul. Manfaat setelah adanya inovasi Pandawa Laporan Kunjungan Wisata lebih akurat, dan lebih cepat terkumpul.
2. *Calender Of Event* (COE)
Sebelum adanya inovasi *Calender Of Event* (COE) kunjung wisata di Kabupaten Balangan rendah, karena kurangnya informasi ke masyarakat tentang wisata-wisata di Balangan. Setelah adanya inovasi *Calender Of Event* (COE) kunjungan wisata meningkat, perekonomian masyarakat di sekitar objek wisata meningkat.
3. Festival Balangan Pariwisata, Ekonomi Kreatif, UMKM dan Semarak Pemuda Bumi Sanggam.
4. Adanya inovasi Festival Balangan Pariwisata, Ekonomi Kreatif, UMKM dan Semarak Pemuda Bumi Sanggam, maka terbitlah SK Pelaku Ekraf sehingga mereka bisa mendapatkan pelatihan dan pembinaan dari Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata. Kedepannya produk-produk ekraf mereka juga akan didaftarkan ke HAKI (Hak Kekayaan Intelektual) di Kemenkumham melalui Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata.

g. *Analisis Atas Program atau Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja*

Capaian Kinerja Program Tahun 2024

No	Uraian Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Keuangan	% Realisasi Kinerja	Efektifitas Program
1.	Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	4.843.407.300	4.697.965.112	97	100	Ya
2.	Pemasaran Pariwisata	2.048.458.900	1.920.257.002	93,74	100	Ya
3.	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	2.172.982.300	2.106.252.944	96,93	100	Ya
4.	Pengembangan Kebudayaan	396.500.000	396.480.000	99,99	118	Ya
5.	Pengembangan Kesenian Tradisional	2.070.955.000	2.052.907.912	99,13	100	Ya
6.	Pembinaan Sejarah	4.873.682.000	4.346.144.306	89,18	133	Ya
7.	Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	644.911.000	638.551.408	99,01	100	Ya

Sumber Data Laporan SKPD dan Rekonsiliasi Data LKPJ Tahun 2024, data diolah

Berikut analisa program penunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian Sasaran Strategis Meningkatnya Kontribusi Ekonomi Sektor Unggulan Non Pertambangan Indikator Kinerja Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pariwisata :

No	Program	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Tindakan lanjut
1.	Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	8 Desrinasi wisata yang direncanakan pengadaan fasilitas umumnya ditahun 2024 semua sudah terbangun dengan ketersediaan anggaran.	Akses menuju destinasi unggulan yaitu Air Terjun Batarius baru terbangun oleh SKPD terkait sampai dengan Desa Sawang Kecamatan Halong.	Berkoordinasi dengan Dinas PUPRPERKIM mengenai akses menuju destinasi Wisata Air Terjun Batarius.
2.	Pemasaran Pariwisata	Pemasaran pariwisata baik melalui media cetak, elektronik maupun melalui event-event berjalan dengan lancar karena didukung	Belum adanya destinasi wisata yang benar-benar representatif untuk di pasarkan ke level Provinsi maupun Nasional, kebanyakan pengunjung	Melaksanakan <i>event-event</i> di destinasi wisata yang ada di Kabupaten Balangan dan

No	Program	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Tindakanlanjut
		anggaran dan SDM yang memadai.	masih lebih tertarik ketika ada <i>event</i> pariwisata di Kabupaten Balangan.	mempromosikannya melalui media sosial.
3.	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pelaku ekonomi kreatif di Kabupaten Balangan sudah diikuti dalam pelatihan SDM ekonomi kreatif.	Belum terbitnya SK Pelaku Ekonomi Kreatif dari Bagian Hukum.	Menanyakan ke Bagian Hukum untuk proses penerbitan SK Pelaku Ekonomi Kreatif.
4.	Pengembangan Kebudayaan	Sinergi yang baik dan koordinasi yang intensif antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat serta didukung dengan anggaran yang dapat mengkoper semua kegiatan.	Tidak ada hambatan yang signifikan.	Melakukan koordinasi yang intensif terhadap permasalahan yang ada.
5.	Pengembangan Kesenian Tradisional	Anggaran yang cukup.	Kurangnya SDM profesional untuk membantu kegiatan.	Melakukan pembinaan kepada SDM yang ada.
6.	Pembinaan Sejarah	Anggaran yang cukup.	Jarak peneliti dengan objek yang jauh dan menyesuaikan jadwal pekerjaan peneliti membuat waktu penyelesaian lebih lama.	Melakukan koordinasi yang intensif kepeneliti.
7.	Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Perencanaan dan strategi yang dirancang pada implementasinya selaras sehingga memudahkan dalam mencapai tujuan.	Sulit dalam menentukan tanggal kegiatan pada TACB yang memiliki pekerjaan yang berbeda dan jarak yang jauh. Sulit memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk mendaftarkan objek diduga cagar budaya.	Selalu melakukan koordinasi bersama untuk mendapatkan titik temu. Selalu berusaha melakukan edukasi kepada masyarakat dengan berbagai kegiatan edukasi baik di tingkat pelajar maupun masyarakat desa.

2. Sasaran Meningkatnya Pertumbuhan Investasi

Tabel 3.3
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 2
Meningkatnya Pertumbuhan Investasi

No	Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2023	Kinerja 2024			Target Akhir RPJMD	Capaian Terhadap Akhir RPJMD	Realisasi / Capaian Terhadap Kab/Kota	Realisasi / Capaian Terhadap RPJMD Provinsi	Realisasi / Capaian Terhadap RPJMN
			Target	Realisasi	Capaian					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	Persentase Peningkatan Investasi Daerah	16,76	51,13	52,63	102,93	75	70,17	-	-	-

Sumber Data Pemerintah Kabupaten Balangan Tahun 2024, data diolah

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Persentase Peningkatan Investasi Daerah pada tahun 2024 sebesar 52,63 persen. Yang diperoleh dari perbandingan realisasi investasi tahun 2024 sebesar 719,226 Milyar dibanding realisasi tahun sebelumnya yakni tahun 2023 sebesar 471,266 Milyar ada peningkatan sebesar 247,959 Milyar. Sehingga indikator kinerja ini memiliki capaian sebesar 102,93 persen.

Pencapaian kinerja tahun 2024 didapat berdasarkan data yang didapat dari rilis LKPM oleh Kementerian Investasi/BKPM RI sampai dengan triwulan 4 Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 719.226.207.247,- (Tujuh Ratus Sembilan Belas Milyar Dua Ratus Dua Puluh Enam Juta Dua Ratus Tujuh Ribu Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah). Sedangkan untuk tahun 2023 realisasi investasinya sebesar Rp.471.226.861.079 (Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Milyar Dua Ratus Dua Puluh Enam Juta Delapan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Tujuh Puluh Sembilan Rupiah). Nilai realisasi investasi mengalami peningkatan sebesar Rp. 247.959.346.168 atau 52,63%

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KATEGORI CAPAIAN KINERJA
Nilai Realisasi Investasi	610 M	719,226 M	117,91%	Sangat Memuaskan

Nilai Realisasi Investasi adalah jumlah nilai investasi pelaku usaha yang terealisasi pada tahun bersangkutan. Nilai realisasi investasi dilaporkan secara berkala oleh pelaku usaha baik PMDN maupun PMA melalui dokumen Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). Tingginya nilai realisasi investasi dapat mengindikasikan bahwa iklim investasi di suatu daerah semakin kondusif bagi pelaku usaha untuk menanamkan modalnya. Nilai realisasi investasi berkorelasi positif dengan tingkat pertumbuhan ekonomi di suatu daerah dan juga berdampak pada ketersediaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sebaran Investasi berdasarkan Sektor di Kabupaten Balangan

SEKTOR	RUPIAH
Konstruksi	180.106.712
Perdagangan dan Reparasi	814.794.544
Jasa Lainnya	19.700.684.250
Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	40.146.758.860
Pertambangan	664.268.343.970

Seperti tahun sebelumnya Investasi di Kabupaten Balangan masih dominan pada sektor pertambangan yang menyumbang sebesar 664,268 Milyar atau lebih dari 91% diikuti sektor perumahan, kawasan industri dan perkantoran sebesar 5,6%. Sementara sektor yang potensi menyerap tenaga kerja yaitu pertanian masih belum ada investasi yang masuk.

b. *Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Tahun 2023 dan 2022.*

Jika kita melihat realisasi kinerja tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023 dan 2022 maka realisasi kinerja ini mengalami kecenderungan naik. Realisasi Investasi Daerah Tahun 2022 sebesar 404.601.380.621, Tahun 2023 realisasi Investasi Daerah sebesar 471.226.861.079 sedangkan total Realisasi Investasi tahun 2024 berjumlah 719.226.207.247.

Grafik Nilai Realisasi Investasi di Kabupaten Balangan Tahun 2021 s.d 2024.



Tren realisasi investasi selama 4 (empat) tahun terakhir selalu meningkat. Pencapaian kinerja tahun 2024 didapat berdasarkan data yang didapat dari rilis LKPM oleh Kementerian Investasi/BKPM RI sampai dengan triwulan 4 Tahun 2024 adalah sebesar Rp.719.226.207.247 (Tujuh Ratus Sembilan Belas Milyar Dua Ratus Dua Puluh Enam Juta Dua Ratus Tujuh Ribu Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah). Sedangkan untuk tahun 2023 realisasi investasinya sebesar Rp.471.226.861.079 (Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Milyar Dua Ratus Dua Pulu Enam Juta Delapan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Tujuh Puluh Sembilan Rupiah). Nilai realisasi investasi mengalami peningkatan sebesar Rp. 247.959.346.168 atau 52,63 persen.

c. *Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun ini Dengan Target Jangka Menengah Dalam RPJMD*

Realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dibandingkan dengan target jangka menengah dalam RPJMD adalah berada pada angka 52,63 persen dan capaian 102,93 persen. Jika dibandingkan dengan target Akhir RPJMD sebesar 75 persen maka Persentase Peningkatan Investasi Daerah tahun 2024 mencapai 70,17 persen, dan belum melampaui target Akhir RPJMD.

d. *Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Dengan Standar Nasional*

Perbandingan Realisasi Investasi dengan Realisasi Provinsi dan Nasional

Perbandingan	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Persentase Peningkatan
Nasional	1.418,9 T	1.418,9 T	17,53%
Provinsi	19.762,24 M	24.850,71 M	25,74%
Balangan	471,226 M	719.226 M	52,63%

Pada tabel dapat kita lihat besarnya capaian realisasi investasi Provinsi Kalimantan Selatan mencapai Rp. 24.850,71 Miliar. Pada besarnya realisasi tersebut Kabupaten Balangan mengambil bagian sebesar Rp. 719.226.207.247 atau sebesar 2,38% dari realisasi Provinsi Kalimantan Selatan. Sedangkan realisasi investasi nasional mampu mencapai Rp. 1.418,9 Triliun dimana Kabupaten Balangan mengambil bagian sebesar Rp. 719.226.207.247 atau sebesar 0,033% dari realisasi Nasional. Sedangkan perbandingan peningkatan investasi dari tahun sebelumnya untuk peningkatan investasi Provinsi adalah yang paling signifikan yaitu sebanyak 25,74% dan Nasional sebanyak 17,53%, sementara untuk Kabupaten Balangan sebanyak 52,63%.

e. *Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan*

Adapun beberapa faktor yang mendorong keberhasilan Peningkatan Investasi Daerah sebagai berikut :

1. Semua pelaku usaha yang memiliki kewajiban untuk melaporkan LKPM melaporkan LKPM tepat waktu dan sesuai dengan realisasi kegiatan usaha di lapangan.
2. OSS tidak mengalami gangguan pada saat masa pelaporan.
3. Adanya koordinasi yang intensif antara pelaku usaha dan pembina dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu apabila ada kesulitan dalam melaporkan LKPM.
4. Selalu mengadakan pertemuan (Bimtek LKPM, rapat koordinasi secara berkala untuk membahas permasalahan dan kendala yang dihadapi pada saat pelaporan LKPM).
5. Adanya penyusunan draft Peraturan Bupati tentang Kemudahan Berusaha di Kabupaten Balangan yang akan diusulkan pada tahun 2025 sebagai turunan dari aturan yang lebih tinggi.
6. Adanya peningkatan akses jalan dan sarana infrastruktur lainnya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan dengan kondisi jalan mantap saat ini adalah sudah mencapai 369,655 (65,186%) kilometer.
7. Adanya perluasan cakupan layanan internet ke desa-desa di Kabupaten Balangan sejumlah 60 desa dari 154 desa. Layanan akses internet akan sangat membantu dalam hal penyebaran informasi kemudahan izin berusaha di Kabupaten Balangan.
8. Adanya kegiatan pengamanan gangguan keamanan dan ketertiban umum oleh Badan Kesbangpol berkolaborasi dengan Satpol PP Pemerintah Kabupaten Balangan sehingga memberikan jaminan rasa aman bagi para investor untuk menanamkan usahanya di Kabupaten Balangan.

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk Peningkatan Investasi Daerah kedepan antara lain:

1. Meningkatkan koordinasi kepada pelaku usaha besar yang memungkinkan akan menyumbang nilai investasi besar.

2. Memaksimalkan pendampingan pelaporan LKPM pada saat masa pelaporan.
3. Melakukan pertemuan secara berkala untuk membahas permasalahan dan kendala yang dihadapi pelaku usaha.
4. Melakukan eksplorasi sumber investasi diluar pertambangan dan melakukan berbagai cara ekstensifikasinya.
5. Melakukan *crosscutting* kinerja dengan beberapa SKPD terkait dan beberapa pemangku kepentingan untuk melakukan peningkatan investasi antara lain adalah :
 - a. peningkatan kepastian hukum atau regulasi dan jaminan kemudahan berinvestasi di Kabupaten Balangan (Bagian Hukum dan Dinas PMPTSP).
 - b. pemangkasan birokrasi yang terlalu panjang dalam pemberian pelayanan perizinan berinvestasi (Bagian Organisasi).
 - c. keadaan politik dan keamanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan harus dalam kondisi yang stabil dan kondusif (kolaborasi Badan Kesbangpol dan Satpol PP).
 - d. kondisi sarana dan prasarana yang tersedia harus dalam kondisi yang semakin baik sehingga menarik minat investor untuk menyuntikkan dana ke pihak penyedia sarana dan prasarana (Dinas PUPRPERKIM).
 - e. rapat teknis dengan Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup terkait pengembangan infrastruktur yang mendukung ke arah pengembangan investasi seperti pengelolaan limbah, penyediaan ruang terbuka hijau dan pengembangan sistem *drainage* yang baik.

f. *Analisis Atas Efiseinsi Penggunaan Sumber Daya*

Upaya percepatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Balangan dalam rangka melakukan peningkatan nilai investasi antara lain adalah melakukan simplifikasi perizinan, meningkatkan kualitas jalan transportasi, listrik, dan jaringan telekomunikasi untuk menarik investasi, mengembangkan kawasan industri yang terintegrasi dengan fasilitas pendukung sehingga mempermudah kegiatan investasi, mempromosikan potensi sumber daya alam, budaya, dan pariwisata daerah melalui seminar, pameran, dan media sosial untuk menarik perhatian investor, menciptakan identitas yang kuat dan unik untuk kabupaten sebagai lokasi investasi yang menarik, menyediakan pelatihan keterampilan dan pendidikan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja. Investor lebih tertarik pada daerah yang memiliki tenaga kerja yang terampil dan kompeten, meningkatkan kualitas akses internet dan teknologi informasi untuk mendukung bisnis *modern*, seperti *e-commerce* dan industri berbasis teknologi, mengadakan forum atau dialog dengan investor untuk mendengarkan kebutuhan dan harapan mereka, mendorong perusahaan untuk melaksanakan program CSR yang bermanfaat bagi masyarakat setempat, meningkatkan citra perusahaan, dan menarik minat investasi serta melakukan kunjungan ke negara-negara lain atau daerah lain yang berpotensi untuk menarik investor.

Selain itu juga telah disusun rancangan matrik resiko sasaran strategis Pemerintah Daerah sebagaimana tabulasi data berikut :

Sasaran Strategis	Uraian Resiko	Rencana Tindak Pengendalian
Meningkatnya Pertumbuhan Investasi	Kecenderungan investor masih bergerak di sektor pertambangan	1. Melakukan update data pemetaan potensi investasi di Kabupaten Balangan. 2. Melakukan <i>review</i> kebijakan investasi dan kemudahan investasi yang ada saat ini dengan menyampaikan Propemperda ke Bagian Hukum. 3. Melakukan penataan infrastruktur keterkaitan dengan RTRW dan IKLH.

Sasaran Strategis	Uraian Resiko	Rencana Tindak Pengendalian
		4. Melakukan pengembangan aplikasi <i>geospasial</i> terkait pemetaan titik-titik investasi.

Selain upaya yang dilakukan di atas ada beberapa inovasi lain yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk meningkatkan pertumbuhan investasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan yaitu:

1. Layanan Aplikasi OSS (Aplikasi Kementerian Investasi/BKPM).

Manfaat dari layanan OSS ini yaitu:

- Untuk memantau Realisasi investasi melalui Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).
- Untuk melaksanakan kegiatan pengawasan perizinan (Inspeksi Lapangan).

2. Ladang Porang Paman Linbat (Layanan Pendampingan Pelaporan Kegiatan Penanaman Modal Tanpa Batas Waktu/Bukan Aplikasi).

Manfaat dari Ladang Porang Paman Linbat untuk membantu Para Pelaku Usaha yang mengalami kesulitan atau ada kendala dalam pelaporan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal). Keunggulan dari inovasi ini yaitu:

- Pelayanan pendampingan pelaporan dilakukan nonstop 24 jam.
- Pelayanan dapat dilakukan dihari kerja maupun diluar hari kerja.

3. Terasa Singkat (Pertemuan Rutin per Triwulan/Bukan Aplikasi).

Manfaat dari layanan ini untuk mengevaluasi permasalahan dan kendala yang dihadapi para pelaku usaha pada saat pelaporan LKPM.

4. Awas Nasa Jebol (Inspeksi Lapangan dalam rangka Pembinaan kepada Pelaku Usaha/Bukan Aplikasi).

Manfaat dari layanan inovasi ini untuk mengetahui perkembangan usaha, Perkembangan Permodalan, Perkembangan Jumlah Tenaga Kerja, Permasalah dan Kendala yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan usaha serta memantau pemenuhan perizinan yang dipersyaratkan.

5. Penentuan peta potensi investasi melalui aplikasi *geospasial*.



- g. Analisis Atas Program atau Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.

Capaian Kinerja Program Tahun 2024

No	Uraian Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Keuangan	% Realisasi Kinerja	Efektifitas Program
1.	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	320.622.000	297.355.274	92,74	100	Ya
2.	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	661.209.000	520.409.038	78,71	102,92	Ya
3.	Promosi Penanaman Modal	521.783.700	454.057.546	87,02	4470	Ya
4.	Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	147.695.000	137.658.053	93,20	100	Ya
5.	Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	45.606.020.271	31.110.186.498	68,22	101,30	Ya

No	Uraian Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Keuangan	% Realisasi Kinerja	Efektifitas Program
6.	Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	165.705.719.700	143.001.465.464	86,30	100	Ya
7.	Penataan Bangunan Gedung	241.194.974.600	208.829.526.371	86,58	100,66	Ya
8.	Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	6.829.269.500	5 403 114 926	79,12	100	Ya
9.	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	10.210.533.240	9.906.605.673	97,02	100	Ya
10.	Pengelolaan Pendapatan Daerah	5.499.730.200	4.061.505.010	73,85	104,44	Ya

Sumber Data Laporan SKPD dan Rekonsiliasi Data LKPJ Tahun 2024, data diolah

Berikut analisa program penunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian Sasaran Strategis Meningkatkan Pertumbuhan Investasi (Indikator Kinerja Persentase Peningkatan Investasi Daerah):

No	Program	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Tindaklanjut
1.	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Dukungan anggaran penyusunan kajian pengembangan IKLIM, serta Perda kemudahan berusaha yang hampir rampung	Kurangnya aktifnya SDM Pelaksana Kegiatan/Tidak Tersedianya JF Penata Kelola Penanaman Modal.	Evaluasi terhadap Kinerja SDM yang ada.
2.	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Dukungan semua pihak dan aktifnya Tim Pengawas Penanaman Modal.	Kecenderungan Pelaku Usaha yang menyampaikan LKPM pada waktu akhir periode pelaporan.	Rapat koordinasi secara periodic.
3.	Promosi Penanaman Modal	Adanya IPRO yang dapat dipromosikan saat Pameran Penanaman Modal.	Minat investasi sektor non pertambangan masih rendah.	Menyusun IPRO
4.	Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Pelaksanaan perizinan sudah menggunakan sistem (OSS, Si Cantil, SimBG, MPP Digital).	Sering terjadi gangguan server Pusat.	Menginfokan ke masyarakat jika terjadi trouble.
5.	Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Komitmen bersama antara Pimpinan dan Anggota DPRD serta Sekretariat DPRD dalam penyelesaian administrasi keuangan akhir tahun, serta pendanaan yang masih cukup tersedia untuk memfasilitasi pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD.	1. Perubahan Perbup Perjalanan Dinas untuk Pimpinan dan Anggota DPRD berdampak pada saldo lebih pada biaya perjalanan dinas. 2. Masa orientasi Anggota DPRD periode 2024 - 2029, sehingga alat kelengkapan DPRD baru belum terbentuk.	Monitoring capaian kinerja dan anggaran per sub kegiatan untuk bahan evaluasi anggaran dan kinerja di tahun berikutnya.
6.	Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	-	-	-
7.	Penataan Bangunan Gedung	Masuk dalam program prioritas atau visi dan misi Bapak Bupati.	Ada sebagian pihak ketiga melakukan pekerjaan tidak sesuai dengan target.	Putus Kontrak
8.	Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Tersedianya anggaran dan komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung pelaksanaan program di Bidang Wawasan Nasional.	Terbatasnya SDM berkompeten yang tersedia pada Bidang Wawasan Nasional.	Penambahan SDM yang kompeten di Bidang Wawasan Nasional, Pelatihan dan bimbingan teknis terkait dengan kegiatan di Bidang Wawasan Nasional.
9.	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Tersedianya peta rawan kegiatan penanganan trantibum berjalan dengan lancar dan tepat sasaran, Jumlah anggota Satpol PP yang memadai dalam pelaksanaan penanganan Trantibum.	Adanya perlawanan dari masyarakat dalam pelaksanaan penanganan Trantibum.	Mengutamakan penanganan gangguan Trantibum dengan deteksi dini, cegah dini serta pendekatan yang humanis melalui pembinaan dan penyuluhan, sebelum masuk ke Penindakan.

No	Program	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Tindaklanjut
10.	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Ketersediaan anggaran, dukungan pemerintah daerah dan kerjasama dengan <i>stakeholder</i> terkait	Kurangnya kesadaran masyarakat, birokrasi keterbatasan SDM dan kesalahpahaman tentang pajak	Meningkatkan kualitas SDM, meningkatkan kerjasama dengan <i>stakeholder</i> dan meningkatkan teknologi informasi.

3. Sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Tabel 3.4
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 3
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

No	Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2023	Kinerja 2024			Target Akhir RPJMD	Capaian Terhadap Akhir RPJMD	Realisas/ Capaian Terhadap Kab/ Kota	Realisasi /Capaian Terhadap RPJMD Provinsi	Realisasi /Capaian Terhadap RPJMN
			Target	Realisasi	Capaian					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Usia Harapan Hidup	73,69	73,89	73,87	99,97	74,49	99,17	-	74,18	-

Sumber Data Pemerintah Kabupaten Balangan Tahun 2024, data diolah

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Usia Harapan Hidup pada tahun 2024 adalah 73,87. Hal ini belum mencapai target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Indikator kinerja ini memiliki capaian 99,97 persen. Angka harapan hidup ini memiliki korelasi yang positif dengan faktor-faktor kesehatan masyarakat yang baik, seperti rendahnya AKI, rendahnya angka kematian bayi, dan rendahnya angka kesakitan. Dengan meningkatnya kualitas dan akses layanan Kesehatan, mendidik masyarakat dan memperbaiki kondisi lingkungan, Pemerintah Kabupaten Balangan akan dapat secara signifikan meningkatkan AHH serta kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

Realisasi 73,87 pada tahun 2024 selain dipengaruhi oleh faktor akses layanan kesehatan juga dipengaruhi oleh beberapa faktor pengungkit lainnya yakni tingkat pendidikan yang baik, keluarga dengan pendapatan yang lebih tinggi biasanya memiliki akses yang lebih baik ke makanan bergizi, perumahan yang layak dan layanan kesehatan, faktor lingkungan yang bersih dan aman dapat mengurangi resiko penyakit infeksi dan meningkatkan kualitas hidup, pola makan yang sehat berpengaruh pada kesehatan jangka panjang, gaya hidup dan aktivitas fisik yang cukup dapat meningkatkan kesehatan secara keseluruhan, program perlindungan sosial yang baik seperti yang berlaku di balangan UHC, pensiun dan bantuan pemerintah kepada yang membutuhkan dapat mengurangi beban finansial ketika terjadi masalah kesehatan, kebijakan yang mendukung akses publik ke layanan kesehatan, program pencegahan penyakit dan pendidikan kesehatan masyarakat juga dapat meningkatkan AHH secara signifikan seperti kebijakan atau perda rokok, perda sampah. Disamping itu juga pembangunan infrastruktur yang mendukung seperti aksesibilitas transportasi, perumahan yang layak, dan fasilitas kesehatan dapat meningkatkan kondisi yang mendukung kesehatan masyarakat seperti halnya pembangunan jalan mantap di Kabupaten Balangan yang sudah hampir menyeluruh pada 154 desa.

b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Tahun 2023 dan 2022.

Jika kita melihat realisasi kinerja tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023 dan 2022 maka realisasi kinerja ini mengalami peningkatan sebesar 0,18 poin. Secara perlahan terjadi peningkatan selama kurun waktu 5 tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Namun, angka ini masih lebih rendah dibanding umur harapan hidup Provinsi Kalimantan

Selatan yang pada tahun 2024 yang mencapai 74,18 tahun. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir posisi Usia Harapan Hidup Kabupaten Balangan selalu dibawah usia harapan hidup Provinsi Kalimantan Selatan.

Jika dilihat keterbandingan antar kabupaten, maka Balangan menempati urutan ke-8 dari 13 kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan. Pemerintah Kabupaten Balangan sudah melakukan upaya optimal terkait kesehatan. Hal tersebut perlu dipertahankan dan masih banyak upaya yang perlu dilakukan Pemerintah Kabupaten Balangan agar mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

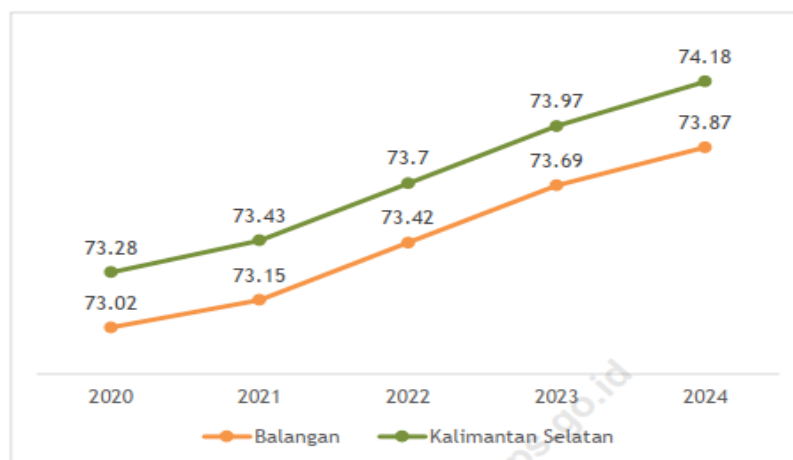
c. *Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun ini Dengan Target Jangka Menengah Dalam RPJMD*

Realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dibandingkan dengan target jangka menengah dalam RPJMD adalah berada pada angka 73,87 tahun dan capaian 99,17 persen. Target Akhir RPJMD akan dilakukan rasionalisasi karena target akhir RPJMD 68,92 sudah tercapai pada tahun 2023 dan tahun 2024 di angka 70 lebih dan bahkan berdasarkan data BPS target ini sudah terlampaui sejak tahun 2020 (Berita acara perbaikan target akan menjadi lampiran dalam LKIP ini).

d. *Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Dengan Standar Nasional*

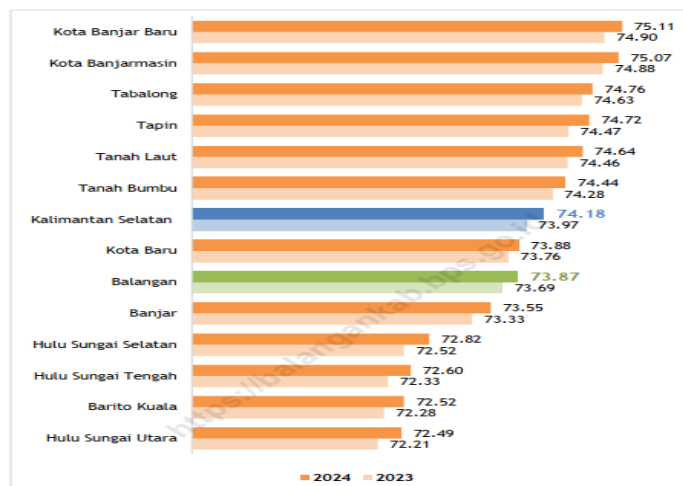
Kualitas sumber daya manusia secara keseluruhan dapat dipandang dari aspek fisik dan non fisik yang tentunya saling berkaitan. Kualitas fisik penduduk dapat dilihat dari derajat kesehatan penduduk. Salah satu indikator utama dalam mengukur derajat kesehatan penduduk secara *makro* adalah umur harapan hidup saat lahir (UHH).

UHH merupakan derajat kesehatan suatu masyarakat, karena dapat dipandang sebagai suatu bentuk akhir dari hasil upaya peningkatan taraf kesehatan secara *makro*. Perkembangan Umur Harapan Hidup Saat Lahir (Tahun), 2020-2024 dapat dilihat pada gambar grafik di bawah ini:



Sumber: BRS Indeks Pembangunan Manusia BPS Provinsi Kalimantan Selatan 2024

Secara umum, UHH Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan pada tahun 2024 dapat dikatakan cukup bervariasi. UHH tertinggi dicapai oleh Kota Banjarbaru, mencapai 75,11 tahun. Sedangkan UHH paling rendah dicapai oleh Hulu Sungai Utara, mencapai 72,49 tahun. Sementara Kabupaten/Kota lainnya berkisar antara 72,52 hingga 75,07 tahun. UHH Kalimantan Selatan sendiri berada di tengah-tengah, yakni sebesar 74,18 tahun. Dibandingkan dengan Kabupaten/Kota, terdapat 6 Kabupaten/Kota yang memiliki UHH lebih tinggi daripada UHH Provinsi. Umur Harapan Hidup Saat Lahir (Tahun) menurut Kabupaten dan Provinsi Kalimantan Selatan, 2023-2024 sebagaimana diagram di bawah ini:



Sumber: BRS Indeks Pembangunan Manusia BPS Provinsi Kalimantan Selatan 2024

e. *Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan*

Salah satu faktor yang mempengaruhi berhasilnya meningkatkan UHH adalah Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi, pada tahun 2023 AKI di Kabupaten Balangan sebesar 207/100.000 Kelahiran Hidup dan pada tahun 2024 menjadi 119/100.000 Kelahiran Hidup. Adapun AKB tahun 2024 sebesar 14,9/1.000 Kelahiran Hidup (KH) dari 15,541.000 KH ditahun 2023. Upaya yang dilakukan Dinas Kesehatan dalam meningkatkan UHH Kabupaten Balangan yakni melaksanakan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia (Lansia) di Puskesmas dan jaringannya seperti Posyandu Lansia serta kegiatan lansia di kabupaten. Pelayanan kesehatan lansia yang diberikan antara lain pemeriksaan kesehatan dan pengobatan lansia dengan gratis, senam lansia dan siraman rohani.

Dengan pemeriksaan kesehatan terhadap lansia maka dapat meningkatkan derajat kesehatan lansia agar tetap sehat, mandiri dan berdaya guna sehingga tidak menjadi beban bagi dirinya sendiri, keluarga maupun masyarakat. Selain memberikan pelayanan kesehatan terhadap lansia dalam rangka meningkatkan UHH upaya yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Balangan adalah pemeriksaan kesehatan untuk mendeteksi dini dan melakukan kontrol ulang terhadap Penyakit Tidak Menular (PTM) melalui Posbindu (Pos Pembinaan Terpadu), Pustu maupun Puskesmas, dengan terdeteksinya secara dini PTM maka diharapkan penyakit yang dapat menyebabkan kesakitan dan kematian karena PTM seperti jantung, kolesterol, kanker, diabetes melitus dan lainnya dapat ditanggulangi. Berbagai upaya lainnya untuk meningkatkan UHH adalah dengan pengadaan sarana dan prasarana baik di rumah sakit maupun puskesmas dan jaringannya serta Dinas Kesehatan Kabupaten Balangan melalui program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan memberikan jaminan kesehatan kepada seluruh masyarakat Balangan terutama untuk masyarakat yang keterbatasan finansialnya apabila berobat di pelayanan dasar bahkan di rumah sakit.

Usia harapan hidup juga dipegaruhi oleh faktor-faktor lain diluar faktor kesehatan antara lain adalah masyarakat dengan pendapatan yang lebih tinggi cenderung memiliki akses yang lebih baik ke layanan kesehatan dan nutrisi yang baik. Hal ini lah juga yang menjadi sasaran Pemerintah Kabupaten Balangan untuk menaikkan nilai perkapita Kabupaten Balangan dan pada tahun 2024 nilai perkapita Kabupaten Balangan mencapai angka 12.325.000 (per tahun). Sehingga untuk menuju masyarakat yang berpendidikan, banyak hal yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Balangan dalam membangun budaya belajar menuju masyarakat yang inklusif dan berpendidikan antara lain kartu balangan pintar, program beasiswa masyarakat miskin, program beasiswa berprestasi, program beasiswa seribu sarjana dengan cara membebaskan biaya UKT bagi yang berkuliah di dalam negeri, nasional maupun di luar negeri

serta inovasi PULPENDACIL yang telah lolos pada Top 45 Lomba Inovasi Pelayanan Publik Kemenpan RB. Disamping itu juga faktor yang mempengaruhi UHH lainnya adalah kualitas lingkungan seperti polusi udara dan air, akses ke sanitasi yang baik, serta faktor gaya hidup antara lain adalah penggunaan alkohol dan rokok. Untuk itu Satpol PP dapat melakukan tugas penertiban area yang diperbolehkan untuk merokok dan area yang dilarang sesuai Peraturan Daerah yang telah dibuat yakni Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 15 tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok (KTR) dan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2018 tentang Larangan Penyelenggaraan Reklame Rokok dan Produk Tembakau pada Media Luar Ruangan dan Jalan Protokol.

f. *Analisis Atas Efiseinsi Penggunaan Sumber Daya*

Upaya percepatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Balangan dalam rangka mencapai target kinerja ini adalah pelayanan kesehatan pada ibu hamil dengan risiko tinggi, pelayanan kesehatan bayi dengan BBLR, pemenuhan gedung fasilitas pelayanan kesehatan yang layak, Penanganan Balita Wasting, desa yang mencapai ODF, Pencapaian Indeks SPM Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Pelayanan Imunisasi dalam mencapai Desa UCI, deteksi dini dan respon penyakit potensial KLB/Wabah. Disamping itu juga diberikannya Kesejahteraan/Insentif Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sesuai dengan beban kerja dan penempatan tenaga tersebut (terpencil dan tidak terpencil), adanya ketersediaan sarana operasional bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan, tersusunnya perencanaan kebutuhan untuk pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan tiap tahunnya, ketersediaan akses ke fasilitas kesehatan dan jaminan kesehatan yang sudah menyeluruh (*Universal Health Coverage*), regulasi dan sarana yang mendukung penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat melalui SKPD terkait. Disamping itu juga adanya dukungan terhadap ketersediaan akses informasi kesehatan di berbagai media dan *platform digital* yang menjangkau sasaran lebih banyak dan lebih luas, dukungan pemerintah baik Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Desa dalam hal menyediakan anggaran dana terkait kesehatan.

Penyusunan matrik resiko strategis terhadap sasaran strategis ini adalah

Sasaran Strategis	Uraian Resiko	Rencana Tindak Pengendalian
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Kematian Ibu Hamil, Bersalin dan Nifas	1. Survelans kematian ibu nifas ke Puskesmas Paringin. 2. Pembinaan terhadap bidan di wilayah kerja Puskesmas Paringin oleh Seksi Kesehatan Keluarga dan Ketua Ikatan Bidan Indonesia (IBI). 3. Pendampingan Tim Ahli (dokter Spesialis Kandungan dan Penyakit Dalam) untuk ibu hamil resiko tinggi. 4. Penguatan pengisian buku KIA dan formulir nifas. 5. Pelatihan APN untuk bidan. 6. Pengadaan perlengkapan alat kesehatan di Poskesdes (oksigen konsentrat, dopler, bidan kit, sterilisator). 7. Pelaksanaan kelas ibu hamil. 8. Pengadaan KIE ibu hamil. 9. Pelatihan Tim PONED. 10. Kemitraan bidan dan dukun. 11. Pengadaan perlengkapan persalinan. 12. Orientasi ANC sesuai standar dan penguatan skring layak hamil untuk bidan. 13. Gerakan ibu hamil sehat.

Upaya percepatan juga dilakukan melalui berbagi inovasi antara lain adalah sebagai berikut :

IKU	Nama Inovasi	Manfaat
Usia Harapan Hidup	SIBALANG (Sistem Informasi Ibu Hamil dan Balita Tanah Habang)	Penurunan stunting pada wilayah Tanah Habang
	TIDAK KUMAT (Tindakan Kunjungan Rumah Memantau Minum Obat)	Tidak ditemukannya lagi pasien jiwa yang kambuh karena putus minum obat dan keluarga dan masyarakat mendapatkan pelayanan yang berkualitas dan rasa aman.
	BURAS (Bumil Resti Dengan USG)	Banyak upaya yang dilakukan dalam upaya menurunkan angka kematian ibu (AKI), pemeriksaan kehamilan sesuai standar, skrining deteksi risiko oleh bidan atau tenaga kesehatan, kelas ibu hamil. Upaya yang dilakukan pada saat ini adalah, skrining deteksi risiko oleh spesialis <i>obgyn</i> sebagai upaya mendeteksi komplikasi maternal sedini mungkin, dengan menghadirkan dokter spesialis <i>obgyn</i> ke puskesmas-puskesmas, dengan tujuan mendekatkan akses dan meningkatkan kualitas pelayanan, kegiatan yang dilakukan adalah mendeteksi ibu hamil dengan USG oleh dokter spesialis, diskusi kasus maternal dengan bidan di wilayah kerja puskesmas. 1. Terdeteksi Ibu Hamil berisiko sedini mungkin. 2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan. 3. Mendekatkan Akses pada sasaran atau ibu hamil berisiko. 4. Meningkatkan pengetahuan bidan dan dokter puskesmas. Menjalin komunikasi antara dokter spesialis, dokter umum dan bidan di wilayah kerja puskesmas.
	PASTI BALITA (Pantau Resiko Tinggi Bayi Balita)	1. Terdeteksi bayi balita serta tumbuh kembang. 2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan. 3. Mendekatkan Akses pada sasaran atau bayi dan balita berisiko. 4. Meningkatkan pengetahuan bidan dan dokter puskesmas sehubungan dengan bayi, balita stunting. 5. Menjalin komunikasi antara dokter spesialis, dokter umum dan bidan di wilayah kerja puskesmas.
	SAPA MAMA (Saringan Air dari Paralon, Menuju Air Minum Aman)	1. Akses sumber air minum aman masyarakat meningkat. 2. Menurunkan angka kejadian penyakit yang bersumber dari air. 3. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
	HEMOCARE SANGGAM	Homecare Sanggam membangun citra positif pelayanan kesehatan masyarakat karena <i>coverage</i> pelayanan kesehatan semakin luas dan menjangkau kelompok masyarakat yang memiliki akses rendah ke Faskes (terpencil,

IKU	Nama Inovasi	Manfaat
		lansia dan penderita penyakit berat). Hal tersebut menjadikan kepercayaan masyarakat Kabupaten Balangan semakin meningkat. Kepercayaan Masyarakat tercermin hasil survei kepuasan (SKM) Dinas Kesehatan tahun 2022 yakni 86,12 meningkat menjadi 88,84 (tahun 2023).

g. *Analisis Atas Program atau Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja*

Capaian Kinerja Program Tahun 2024

No	Uraian Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Keuangan	% Realisasi Kinerja	Efektifitas Program
1.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	23.318.050.000	19.157.148.025	82,16	101,62	Ya
2.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	32.171.292.200	24.682.473.842	76,72	98,85	Ya
3.	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	229.667.623.192	201.285.541.650	87,64	100	Ya
4.	Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	1.097.827.400	861.215,750	78,45	76,45	Ya
5.	Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1.526.762.390	1.449.099.636	94,91	100	Ya
6.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	14.981.795.000	12.365.801.694	82,54	110	Ya
7.	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	12.218.112.608	11.771.572.147	96,35	104,61	Ya
8.	Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	3.314.814.600	3.201.335.262	96,58	106,5	Ya
9.	Pengendalian Penduduk	7.026.285.800	6.510.427.895	92,66	104,37	Ya
10.	Peningkatan Kualitas Keluarga	1.090.621.200	1.079.289.378	98,96	38,57	
11.	Pemenuhan Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	3.451.591.950	3.356.039.344	97,23	103,28	Ya

Sumber Data Laporan SKPD dan Rekonsiliasi Data LKPJ Tahun 2024, data diolah

Berikut analisa program penunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian Sasaran Strategis Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat (Indikator Kinerja Usia Harapan Hidup):

No	Program	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Tindaklanjut
1.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Masuk dalam standar pelayanan minimal.	Belum meratanya akses air minum bagi warga pedesaan dan perkotaan karena beberapa sebab diantaranya adanya perbedaan kondisi topografi kabupaten.	Perlu adanya koordinasi antara dinas teknis dengan aparat kecamatan dan desa mengenai data masyarakat yang MBR yang menerima bantuan air bersih dan penambahan akses air bersih berupa volume air bersih.
2.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Masuk dalam standar pelayanan minimal.	Belum meratanya akses air limbah bagi warga pedesaan dan perkotaan karena beberapa sebab diantaranya adanya perbedaan kondisi topografi kabupaten.	Perlu adanya koordinasi antara dinas teknis dengan aparat kecamatan dan desa mengenai data masyarakat MBR yang menerima bantuan sanitasi serta penambahan akses sanitasi baik volume maupun lahan untuk akses sanitasi.
3.	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan	Realisasi capain melebihi target, upaya untuk	Pengetahuan masyarakat dan ibu hamil tentang	Kelas ibu hamil peningkatan kapasitas

No	Program	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Tindaklanjut
	dan Upaya Kesehatan Masyarakat	menekan dampak tersebut, <i>Skrining</i> pada ibu hamil, kelas ibu hamil, pendampingan Tim Ahli baik Spesialis Obgyn, maupun spesialis penyakit dalam. Peningkatan kapasitas dokter dan bidan, ambulan desa di setiap desa. Realisasi melebihi target, pendampingan ibu hamil oleh bidan dan dokter spesialis Obgyn dan penyakit dalam, ketersediaan anggaran yang sangat memadai, dukungan dari legislatif untuk perbaikan kualitas pelayanan kesehatan, dukungan pemerintah desa dalam pembangunan dan rehab sarana fasyankes. Presentasi Wasting, upaya untuk menekan angka tersebut dengan deteksi awal pada balita <i>wealfetering</i> dan pemberian makanan tambahan pangan lokal untuk balita gizi kurang dan BB kurang. Tersedianya regulasi dan kebijakan dalam rangka penyusunan perencanaan dan penaganggaran yang sehingga dapat terarah, tepat sasaran, efisien dan efektif. Tersedianya SDM yang cukup dalam rangka pemenuhan mutu pelayanan dasar, tersedianya fasilitas dan barang/bahan yang mendukung penyelenggaraan pelayanan dasar yang memenuhi standar, kualitas serta mutu barang itu sendiri. Terselenggaranya sistem monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala dan berjenjang oleh Tim Penerapan SPM baik dari Tim Dinas Kesehatan maupun Tim dari Sekretariat Daerah Bagian Tata Pemerintahan. Adanya dukungan serta komitmen penuh oleh Pemerintah Pusat, Daerah maupun swasta, LSM serta masyarakat dalam penerapan SPM.	risiko pada ibu hamil, kapasitas bidan dalam deteksi risiko pada ibu hamil, peran serta masyarakat. Masih ada kawin muda, belum semua ibu hamil diperiksa darah lengkap dan uren lengkap di puskesmas, tidak ada SDM dalam bidang konstruksi seperti teknik sipil/arsitektur/rancang bangun, keterbatasan lahan eksisting untuk pengembangan fasyankes. Adanya penyakit penyerta, tidak semua balita menyukai menu PMT lokal yang di sajikan. Inisiasi masyarakat masih kurang untuk melakukan pemeriksaan/deteksi dini faktor risiko terhadap penyakit menular maupun menular seperti, Hipertensi, Diabetes, TBC, HIV. Masih terdapat adanya keluarga yang kurang mendukung terhadap pasien pengobatan pasien ODGJ. Menurunnya keinginan masyarakat untuk melakukan kontrol tekanan darah ke Posbindu dengan alasan tidak ada pelayanan pengobatan. Masih kurangnya kader terlatih yang terlibat dalam memberikan pelayanan dasar. Posbindu PTM masih ada yang belum terbentuk di setiap Desa. Upaya deteksi dini pada pelayanan dasar seperti pada kelompok berisiko penyakit, HT, Diabetes, TBC maupun HIV lebih banyak bersifat aktif.	dokter dan bidan dalam deteksi risiko pada ibu hamil, pemberdayaan masyarakat melalui Tokoh Agama dan Masyarakat. Kerja sama dengan lintas sektor untuk peningkatan usia perkawinan, kelas ibu hamil peningkatan kapasitas dokter dan bidan dalam deteksi risiko pada ibu hamil, pemberdayaan masyarakat melalui Tokoh Agama dan Masyarakat. Pengusulan formasi ASN dengan spesifikasi S1 Teknik Sipil/Arsitektur/Rancang Bangun untuk penempatan di Dinas Kesehatan, Konsultasi ke Dokter umum serta melakukan rujukan untuk balita dengan penyakit penyerta, menyajikan PMT lokal dengan menu bervariasi. Meningkatkan upaya promosi Kesehatan dalam rangka memberikan pemahaman terhadap masyarakat akan pentingnya deteksi dini penyakit menular maupun tidak menular (HT, Diabetes, TBC, HIV maupun kesehatan Jiwa), Penguatan dukungan keluarga terhadap pasien ODGJ dengan mempercayakan keluarga sebagai pengawas obat. Mengupayakan pembentukan posbindu PTM di setiap Desa. Menyediakan fasilitas dan barang dalam pemberian pelayanan dasar yang memenuhi kualitas dan mutu. Meningkatkan kapasitas petugas kesehatan maupun kader dalam memberikan pelayanan dasar. Melakukan monitoring dan evaluasi dalam penyelenggaraan pelayanan dasar secara berkala. Penguatan koordinasi dan integrasi dalam penyelenggaraan standar pelayanan minimal pada penerima layanan.
4.	Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Ketersediaan akses informasi kesehatan di berbagai media dan <i>platform</i> digital yang menjangkau sasaran lebih banyak dan lebih luas. Dukungan pemerintah baik Pemerintah Daerah	Faktor Internal kurangnya pengetahuan tentang PHBS. Sikap dan perilaku yang tidak mendukung PHBS (Contohnya perilaku merokok dan membuang sampah tidak pada tempatnya dll.).	Untuk mengatasi faktor-faktor penghambat penerapan PHBS di rumah tangga, perlu dilakukan Langkah / upaya sebagai berikut : Edukasi dan komunikasi yang efektif. Perubahan perilaku dan sikap. Peningkatan akses

No	Program	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Tindaklanjut
		maupun pemerintah desa dalam hal menyediakan anggaran dana terkait kesehatan. Ketersediaan akses ke fasilitas kesehatan dan jaminan kesehatan yang sudah menyeluruh (<i>Universal Health Coverage</i>). Regulasi dan sarana yang mendukung penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat melalui SKPD terkait.	Kurangnya kesadaran akan pentingnya PHBS (Contohnya pada kemasan rokok sudah ada peringatan bahaya merokok tapi hanya sebatas tulisan saja). Keterbatasan sumber daya (finansial, waktu, tenaga). Kurangnya dukungan dari anggota keluarga. Faktor Eksternal keterbatasan akses ke fasilitas kesehatan, sarana air bersih dan sarana sanitasi lainnya. Kondisi lingkungan yang tidak mendukung (pencemaran, kekurangan tempat pembuangan sampah). Kurangnya dukungan dari masyarakat dan pemerintah (kebijakan dan regulasi contohnya setiap membangun rumah baru wajib disertai membangun sarana MCK pribadi yang layak). Keterbatasan sumber daya alam (air, tanah). Bencana alam dan krisis ekonomi. Faktor Sosial norma dan nilai sosial yang tidak mendukung PHBS. Kurangnya komunikasi dan edukasi tentang PHBS. Pengaruh media sosial yang tidak seimbang. (Iklan rokok yang semakin masif hingga mempengaruhi perilaku seseorang). Kurangnya partisipasi Masyarakat dalam kegiatan PHBS. (Masih banyak ditemukan perilaku merokok di Rumah tangga). Konflik antar anggota keluarga (Contohnya terkait vaksinasi/imunisasi). Faktor Ekonomi Keterbatasan biaya untuk membeli makanan sehat. Biaya pengobatan yang mahal. Keterbatasan akses ke fasilitas kesehatan. Pengeluaran yang tidak terkontrol. Ketergantungan pada subsidi atau bantuan. Faktor Budaya Tradisi dan kebiasaan yang tidak sehat. Nilai dan norma yang tidak mendukung PHBS. Kurangnya kesadaran akan pentingnya PHBS dalam budaya. Pengaruh agama dan kepercayaan. Keterbatasan akses ke informasi Kesehatan.	ke fasilitas kesehatan. Dukungan dari pemerintah dan masyarakat. Perencanaan dan pengelolaan sumber daya yang baik.
5.	Pengendalian Pencemaran dan/atau	Tersedianya Anggaran sesuai kebutuhan.	Terbatasnya SDM yang berkompeten	- Penambahan SDM di setiap sub kegiatan di

No	Program	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Tindaklanjut
	Kerusakan Lingkungan Hidup	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi kegiatan secara berkala.	tersedia pada setiap sub kegiatan di bidang pengendalian, pencemaran pengelolaan limbah dan kerusakan LH.	bidang pengendalian, pencemaran pengelolaan limbah dan kerusakan LH. - Pelatihan dan sosialisasi yang terkait dengan kegiatan di bidang pengendalian, pencemaran pengelolaan limbah dan kerusakan LH.
6.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dilaksanakannya perencanaan, pengadaan, serta pendayagunaan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sesuai dengan kebutuhan setiap fasilitas pelayanan kesehatan dan masyarakat. Diberikannya Kesejahteraan/Insentif Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sesuai dengan beban kerja dan penempatan tenaga tersebut (terpencil dan tidak terpencil). Adanya ketersediaan sarana operasional bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan. Tersusunnya perencanaan kebutuhan untuk pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan tiap tahunnya.	Dalam penyusunan perencanaan kebutuhan yang dilakukan oleh setiap fasilitas kesehatan masih belum maksimal. Masih ada perhitungan yang tidak disesuaikan dengan kebutuhan sesuai kondisi wilayahnya ada perhitungan kebutuhan tenaga yang terlalu berlebih dan ada juga yang kurang sehingga penempatan tenaga kesehatan masih belum merata. Dalam hal penempatan masih ada ditemui beberapa tenaga kesehatan yang tidak bersedia ditempatkan sesuai dengan wilayah yang telah ditentukan.	Dalam melaksanakan perencanaan pemenuhan sumber daya manusia kesehatan, penyusunan formasi seleksi dan penempatan lebih memperhatikan kerja sama dan sinergisme antar pemangku kepentingan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Kesehatan. Memberikan ketegasan dalam hal penempatan tenaga sehingga tidak ada tenaga menolak penempatan sesuai Surat Keputusan.
7.	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Semakin tinggi nya skor PPH konsumsi, maka semakin beragam dan seimbang konsumsi pangan masyarakat, nilai tersebut menunjukkan kualitas konsumsi pangan penduduk untuk mendukung hal tersebut melalui kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal, antara lain sosialisasi konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA), kepada ibu-ibu PKK Kecamatan se Kabupaten Balangan serta kader pangan, kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada pelajar dari tingkat SD hingga SMA melalui kegiatan B2SA Goes to School, sehingga pola konsumsi pangan B2SA diharapkan dapat di terapkan sejak dini dimulai dari tingkat keluarga. Tercapainya skor PPH ketersediaan karena ada beberapa kelompok bahan pangan (padi-padian, gula, minyak dan lemak) sudah mencapai skor maksimal PPH ketersediaan.	Promosi peningkatan konsumsi pangan harus terus dilakukan untuk peningkatan wawasan masyarakat untuk mempertahankan kualitas konsumsi pangan, pemantauan ketersediaan seluruh bahan pangan harus terjaga sesuai minimal sesuai kebutuhan masyarakat.	Memperkuat advokasi edukasi dan sosialisasi diversifikasi pangan untuk mencapai pola konsumsi pangan bergizi seimbang dan aman (B2SA). Melaksanakan pertemuan, sosialisasi dan pelatihan pengembangan pangan lokal, perkuat koordinasi untuk peningkatan ketersediaan dan akses fisik terhadap pangan ke setiap rumah tangga dan individu dalam keluarga.

No	Program	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Tindaklanjut
8.	Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Formasi dan konseling remaja yang aktif di sekolah dan semua kader PIKR sekolah sudah mendapatkan workshop tentang Kita (modul dasar 3 ancaman remaja).	Pusat Informasi dan Konseling Remaja di desa masih perlu pembinaan lebih intensif agar mampu aktif lagi.	Melaksanakan pembinaan di PIKR desa dan pembentukan kembali untuk PIKR desa yang nonaktif.
9.	Pengendalian Penduduk	Dukungan Anggaran dan 785 Kader IMP di Setiap Desa dan RT.	Kurangnya Pelatihan Bagi Kader dalam Peningkatan Kapasitas Kader IMP.	Mengusulkan Peningkatan Kapasitas Kader IMP dalam Pengelolaan Pelaporan dan Tupoksi di 157 Kampung KB.
10.	Peningkatan Kualitas Keluarga	Komitmen Pemerintah Daerah berupa anggaran kegiatan untuk menunjang program peningkatan kualitas keluarga.	Perlunya peningkatan peran dan kerjasama lintas sektor dan masyarakat dalam upaya pencegahan perkawinan usia anak, penyediaan data riil tentang perkawinan anak terutama yang nikah tidak secara resmi dan peningkatan sarana prasarana layanan puspaga dalam upaya perlindungan anak dan peningkatan kualitas keluarga.	Perlunya meningkatkan advokasi dan koordinasi lintas program dan lintas sektor.
11.	Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Penguatan pergerakan pelayanan KB MKJP melalui penyediaan dukungan dana pergerakan yang di dalamnya sudah termasuk komponen jasa medis pelayanan KB dengan sumber dana APBN dan APBD.	Keterbatasan dalam penggunaan IT untuk sistem pelaporan online pada New SIGA yang seharusnya selalu update setiap saat. Khususnya untuk pelaporan pelayanan KB oleh pemberi layanan (faskes, jaringan dan jejaringnya).	Bekerjasama dengan pengelola data SIGA untuk bimbingan entry.

4. Sasaran Meningkatnya Kualitas Pendidikan

Tabel 3.5
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 4
Meningkatnya Kualitas Pendidikan

No	Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2023	Kinerja 2024			Target Akhir RPJMD	Capaian Terhadap Akhir RPJMD	Realisasi / Capaian Terhadap Kab/Kota	Realisasi / Capaian Terhadap RPJMD Provinsi	Realisasi / Capaian Terhadap RPJMN
			Target	Realisasi	Capaian					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Angka Harapan Lama Sekolah	12,82	12,98	13,09	100,85	13,24	98,87	12,92	12,87	-
8.	Angka Rata-rata Lama Sekolah	8,03	8,63	8,13	94,21	9,17	88,66	9,15	8,62	-

Sumber Data Pemerintah Kabupaten Balangan Tahun 2024, data diolah

4.1 Angka Harapan Lama Sekolah

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

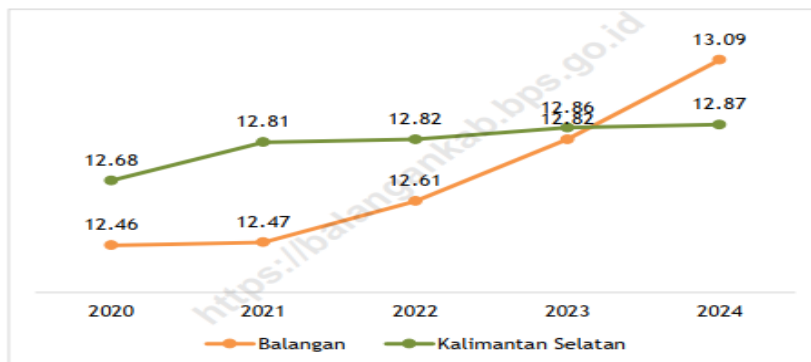
Angka Harapan Lama Sekolah pada tahun 2024 adalah 13,09. Hal ini melampaui target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Sehingga indikator kinerja ini memiliki capaian 100,85 persen. Angka Harapan Lama Sekolah merupakan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Dengan angka harapan lama sekolah, dapat diketahui

kondisi pembangunan sistem pendidikan diberbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Pada tahun 2024, angka harapan lama sekolah Kabupaten Balangan mencapai 13,09. Ini berarti secara rata-rata penduduk usia 7 tahun akan mampu mengenyam pendidikan formal selama kurang lebih 13,09 tahun (atau setara tingkat 1 Perguruan Tinggi). Angka ini menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2023) yang hanya mencapai 12,82 tahun (atau setara kelas 3 SLTA hingga setara tingkat 1 Perguruan Tinggi).

Angka Harapan lama Sekolah ini sangat identik hubungannya dengan APM dan APK. Ketika APM dan APK meningkat, lebih banyak anak dan remaja yang terdaftar di sekolah, yang menunjukkan adanya peningkatan akses dan partisipasi dalam pendidikan. Jika lebih banyak anak bersekolah hal ini cenderung akan meningkatkan AHLIS karena lebih banyak individu akan memenuhi syarat untuk menyelesaikan jenjang Pendidikan tertentu. Meskipun APM dan APK menunjukkan partisipasi, jika kualitas pendidikan di jenjang tersebut rendah maka hasil lulusan mungkin tidak optimal. Hal ini dapat mempengaruhi AHLIS, karena meskipun siswa bersekolah, mereka mungkin tidak menyelesaikan dengan baik. APM yang tinggi menunjukkan bahwa semakin banyak anak bersekolah dan jika diarahkan dengan kebijakan yang baik, hal ini akan dapat menjamin bahwa mereka akan berada di sistem pendidikan lebih lama, yang pada gilirannya akan berdampak pada peningkatan AHLIS. Untuk itu dalam sajian analisa keberhasilan kami juga akan menyajikan berbagai kebijakan Pemerintah Kabupaten Balangan untuk meningkatkan APM dan APK seperti bantuan pendidikan, perbaikan infrastruktur sekolah, program beasiswa biasanya juga berdampak positif terhadap AHLIS. Dengan lebih banyaknya siswa yang terserap dalam sistem pendidikan, rata-rata lama pendidikan diharapkan akan meningkat.

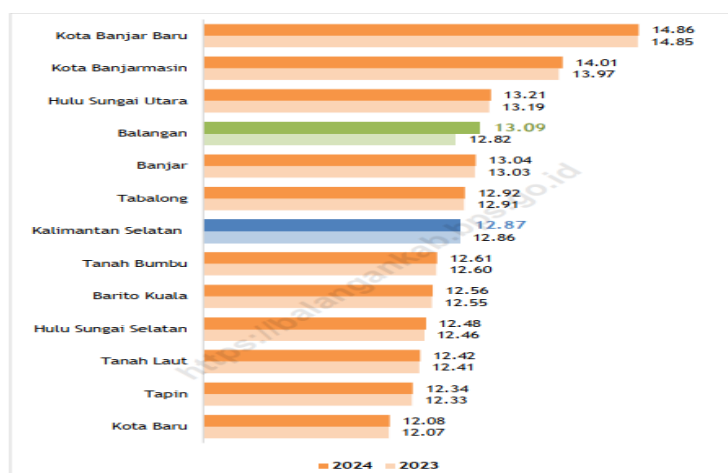
Perkembangan Harapan Lama Sekolah (Tahun), 2020-2024 dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Sumber: BRS Indeks Pembangunan Manusia BPS Provinsi Kalimantan Selatan 2024

b. *Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Tahun 2023 dan 2022.*

Dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2023 yaitu 12,82. Angka Harapan Lama Sekolah tahun 2024 mengalami kenaikan realisasi sebesar 0,27 poin. Angka Harapan Lama Sekolah Balangan jika dibandingkan dengan Kalimantan Selatan tergolong cukup baik. Pada tahun 2024, pencapaian angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Balangan meningkat cukup pesat dengan kenaikan sebesar 0,27 tahun (2,10 persen) dari tahun sebelumnya. Angka ini berada di atas Angka Harapan Lama Sekolah Provinsi Kalimantan Selatan yang sebesar 12,87 persen. Dalam rentang waktu tahun 2020 hingga 2023, terlihat bahwa Angka Harapan Lama Sekolah Balangan cenderung mendekati Angka Harapan Lama Sekolah Provinsi Kalimantan Selatan yang cenderung kurang berfluktuatif selama tiga tahun terakhir. Namun, pada tahun 2024 Angka Harapan Lama Sekolah Balangan meningkat hingga berada di atas Angka Harapan Lama Sekolah Provinsi Kalimantan Selatan. Harapan Lama Sekolah (Tahun) menurut Kabupaten dan Provinsi Kalimantan Selatan, tahun 2023-2024 sebagaimana gambar di bawah ini:



Sumber: BRS Indeks Pembangunan Manusia BPS Provinsi Kalimantan Selatan 2024

c. *Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun ini Dengan Target Jangka Menengah Dalam RPJMD*

Jika dibandingkan dengan target Akhir RPJMD sebesar 13,24 tahun Angka Harapan Lama Sekolah tahun 2024 belum mencapai target dan masih kurang sebesar 0,15 poin dengan persentase capaian sebesar 98,87 persen. RPJMD Tahun 2025-2029 akan diarahkan bagaimana menentukan target yang pas sesuai dengan kinerja dan indikator kinerja yang SMART.

d. *Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Dengan Standar Nasional*

Dari capaian HLS, Kota Banjarbaru dan Kota Banjarmasin sudah melesat lebih dahulu meninggalkan kabupaten lainnya. Pada tahun 2024, kedua kota ini telah mencapai HLS masing-masing sebesar 14,86 dan 14,01 tahun. Lebih lanjut, Kota Baru dan Hulu Sungai Tengah menempati jajaran bawah dengan capaian masing-masing 12,08 dan 12,31 tahun. Sementara itu, HLS Kabupaten Balangan adalah sebesar 13,09. Angka tersebut jika dikonversikan ke jenjang pendidikan maka telah mencapai level yang setara dengan setara Perguruan Tinggi. Artinya partisipasi sekolah di Kabupaten Balangan sudah melewati target program wajib belajar 12 tahun yang dicanangkan pada tahun 2015 silam.

Jika dilihat keterbandingan antar kabupaten, maka Balangan menempati urutan ke-4 teratas dari 13 kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan. Pemerintah Kabupaten Balangan sudah melakukan upaya optimal terkait dengan pendidikan. Hal tersebut perlu dipertahankan dan masih banyak upaya yang perlu dilakukan Pemerintah Kabupaten Balangan agar mampu meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat.

e. *Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan*

Terwujudnya realisasi kinerja tahun 2024 dipengaruhi oleh beberapa kunci sukses keberhasilan antara lain kebijakan pemberian beasiswa 1.000 sarjana kepada warga masyarakat Balangan yang memenuhi syarat, kebijakan pemberian beasiswa prestasi mulai dari Tingkat PAUD sampai dengan Tingkat SMP sesuai kewenangan kabupaten dari urusan pendidikan, pembangunan sarana prasarana pendukung pendidikan tetap berlanjut, pemberian kartu balangan pintar, adanya gerakan budaya belajar untuk membangun masyarakat Balangan yang inklusif.

Pemberian bantuan beasiswa seribu sarjana merupakan salah satu kegiatan unggulan di Pemerintah Kabupaten Balangan. Meskipun dalam implementasinya, Pemerintah Kabupaten Balangan menemukan kendala antara lain penganggaran beasiswa tidak bisa dipusatkan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengingat UU Nomor 23 Tahun 2014 membatasi kewenangan daerah kabupaten untuk menangani Pengelolaan Pendidikan Menengah (SMA) dan Pendidikan Tinggi. Namun setelah dilakukan rapat

pembahasan intensif antara Tim Pemerintah Kabupaten Balangan, Pemerintah Propinsi dan BPK Perwakilan Kalimantan Selatan, maka penganggaran beasiswa ini dipusatkan di Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan. Sejumlah regulasi telah disusun keterkaitan dengan pencapaian target seribu sarjana ini. Karena diharapkan ke depannya tidak ada lagi masyarakat Kabupaten Balangan yang putus sekolah dan tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Pemerintah Kabupaten Balangan juga melakukan peningkatan kapasitas pendidik atau guru antara lain kompetensi berbahasa inggris dan berhasil mengirim ratusan guru keluar negeri melalui MoU dengan Briton English Education.

Bahkan demi mewujudkan pemerataan terhadap pendidikan, Pemerintah Kabupaten Balangan telah melakukan layanan perluasan pendidikan ke daerah terpencil dan mengintegrasikan pendidikan inklusif pada semua jenjang sekolah di Kabupaten Balangan yakni 176 SD, 26 SMP dan 245 Lembaga PAUD (TK, KB, TPA, SPS).

Pada tahun 2023-2024 Pemerintah Kabupaten Balangan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah melakukan berbagai hal berikut :

- Peningkatan kualitas dan kuantitas fasilitas dan prasarana pendidikan, pada tahun 2024 ada 350 paket pekerjaan rehabilitasi dan pembangunan sarana dan prasarana sekolah dari jenjang PAUD, SD dan SMP.
- Penyediaan fasilitas sarana dan prasarana kegiatan belajar mengajar .
- Peningkatan program beasiswa prestasi melalui beasiswa bagi Siswa Nilai Tertinggi Kelulusan Peringkat 1 s.d. 3 Jenjang SD/MI dan Jenjang SMP/MTS.
- Pelaksanaan program Kartu Balangan Pintar yaitu memberikan bantuan operasional kepada 1.580 siswa SD/MI dan SMP/MTS yang tergolong dalam siswa kurang mampu dalam bentuk barang kebutuhan dasar sekolah seperti sepatu, tas dan buku tulis yang diharapkan meringankan beban untuk sekolah.
- Peningkatan kemampuan kompetensi guru.
- Pemerataan sebaran guru pada sekolah-sekolah di daerah.
- Aktif menjaring minat bakat siswa melalui lomba-lomba di daerah dan di provinsi.
- Bantuan CSR Adaro ke beberapa sekolah di Kabupaten Balangan dengan tema satu seragam untuk sejuta harapan.

f. Analisis Atas Efiseinsi Penggunaan Sumber Daya

Serangkaian upaya percepatan pencapaian target kinerja telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Balangan yakni salah satunya adalah melakukan penyusunan matrik resiko SPIP pada sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Balangan dan SKPD pemangku indikator kinerja ini. Gambaran matrik resiko strategis Pemda antara lain adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Uraian Resiko	Rencana Tindak Pengendalian
Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Tidak melanjutkan sekolah kejar paket pada usia diatas 25 tahun	1. Sosialisasi kepada aparat desa dan masyarakat pentingnya untuk melanjutkan sekolah kejar paket pada usia diatas 25 tahun keatas (integrasi SIAP PD). 2. Verifikasi masyarakat yang ingin sekolah kejar paket usia diatas 25 tahun keatas oleh 12 PKBM. 3. Membuka kelas baru untuk pelaksanaan kejar pak.

Rancangan Matrik Resiko Dinas Pendidikan dan Kebudayaan selaku pemangku sasaran startegis ini adalah

REGISTER RISIKO STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2024												
No	Sub Kegiatan	Indikator Keluaran	Tujuan	Risiko				Sebab ^{*)}		CUC	Dampak ^{**)}	
				Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	c1	d	e	f	g	h	i	j	k	l
1	Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personal Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar Yang menerima Beasiswa Berprestasi	Meningkatkan Indeks Pendidikan	Pelaksanaan	Peningkatan Angka rata-rata lama sekolah belum optimal	RSO.24.01.01	Bidang Pembinaan Sekolah Dasar	Adanya Siswa SDMI Yang Putus sekolah, Adanya beberapa siswa yang sekolah ke luar daerah dan adanya beberapa siswa yang melanjutkan pendidikan ke sekolah berasrama (Ponpes)	eksternal	C	Indeks Pembangunan Manusia Belum Optimal	Kab. Balangan
		Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar Yang menerima Kartu Balangan Pintar	Meningkatkan Indeks Pendidikan	Pelaksanaan	Peningkatan Angka harapan lama sekolah belum optimal	RSO.24.01.02	Bidang Pembinaan Sekolah Dasar	Adanya Siswa SDMI Yang Putus sekolah, Adanya beberapa siswa yang sekolah ke luar daerah dan adanya beberapa siswa yang melanjutkan pendidikan ke sekolah berasrama (Ponpes)	eksternal	C	Indeks Pembangunan Manusia Belum Optimal	Kab. Balangan
2	Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personal Peserta Didik Sekolah Pertama	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Yang menerima Beasiswa Berprestasi	Meningkatkan Indeks Pendidikan	Pelaksanaan	Peningkatan Angka rata-rata lama sekolah belum optimal	RSO.24.01.03	Bidang Pembinaan Sekolah Dasar	Adanya Siswa Menengah Pertama Yang Putus sekolah, Adanya beberapa siswa yang sekolah ke luar daerah dan adanya beberapa siswa yang melanjutkan pendidikan ke sekolah berasrama (Ponpes)	Eksternal	C	Indeks Pembangunan Manusia Belum Optimal	Kab. Balangan
		Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Yang menerima Kartu Balangan Pintar	Meningkatkan Indeks Pendidikan	Pelaksanaan	Peningkatan Angka harapan lama sekolah belum optimal	RSO.24.01.04	Bidang Pembinaan Sekolah Dasar	Adanya Siswa Menengah Pertama Yang Putus sekolah, Adanya beberapa siswa yang sekolah ke luar daerah dan adanya beberapa siswa yang melanjutkan pendidikan ke sekolah berasrama (Ponpes)	Eksternal	C	Indeks Pembangunan Manusia Belum Optimal	Kab. Balangan

Upaya percepatan yang dilakukan pada tahun 2024 dalam rangka meningkatkan capaian AHLS sebagaimana tabulasi data berikut :

IKU	Nama Inovasi	Manfaat
AHLS dan ARLS	Program Beasiswa seribu sarjana	Mengurangi angka putus sekolah sehingga akan berpengaruh pada ARLS.
	KBP (Kartu Balangan Pintar)	Mencegah anak putus sekolah bagi siswa jenjang SD dan MI, serta SMP dan MTs dari keluarga tidak mampu sehingga berdampak positif pada peningkatan rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah

g. Analisis Atas Program atau Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Capaian Kinerja Program Tahun 2024

No	Uraian Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Keuangan	% Realisasi Kinerja	Efektifitas Program
1.	Pengelolaan Pendidikan	117.524.112.800	100.359.246.362	85,39	127,73	Ya
2.	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	8.843.030.000	7.612.225.001	86,08	86	Ya
3.	Pembinaan Perpustakaan	4.873.079.300	4.337.859.118	89,02	89,02	Ya

Sumber Data Laporan SKPD dan Rekonsiliasi Data LKPJ Tahun 2024, data diolah

Berikut analisa program penunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Pendidikan (Indikator Kinerja Angka Harapan Lama Sekolah):

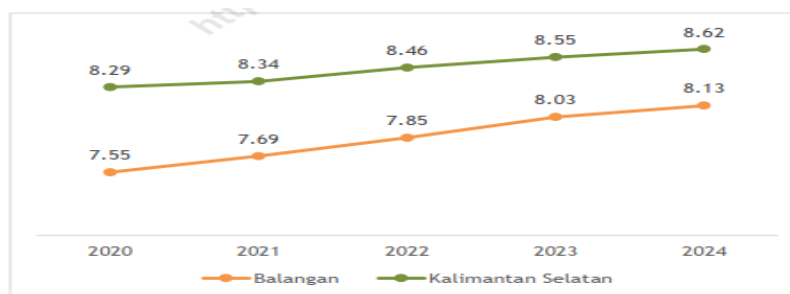
No	Program	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Tindakanjnut
1.	Pengelolaan Pendidikan	Kesadaran Orang Tua dan Masyarakat tentang pentingnya pendidikan anak usia dini (PAUD), kualitas layanan pendidikan di lembaga PAUD, baik dalam hal kurikulum, metode pengajaran, serta kompetensi tenaga pendidik. Adanya bantuan	Masih ada peserta didik/penduduk usia 5-6 tahun yang bersekolah di kabupaten tetangga dan ikut orang tua bekerja di kabupaten lain. Masih ada penduduk/orang tua yang belum memahami pentingnya pendidikan anak usia dini, kurangnya minat baca peserta didik.	Melakukan pendataan penduduk desa / kecamatan yang masih belum 100%. Mengadakan sosialisasi kepada orang tua / penduduk ke Kecamatan/Desa yang masih belum 100%. Memberikan bantuan alat tulis dan

No	Program	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Tindakanlanjut
		yang diberikan oleh pemerintah melalui BOP PAUD, penyediaan buku, media digital, dan materi pembelajaran yang berkualitas.		gambar untuk peserta didik PAUD. Meningkatkan sarana prasarana PAUD. Peningkatan Kebiasaan Membaca melalui : Membaca secara rutin, fasilitasi akses bacaan seperti buku, majalah yang sesuai dengan berbagai tingkat usia dan minat. Mengadakan program membaca di sekolah atau komunitas yang melibatkan semua orang, dari anak-anak hingga orang dewasa. Ini bisa termasuk lomba baca atau kegiatan diskusi buku.
2.	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Berkelanjutan	Tidak ada kendala signifikan hanya saja berkurangnya penerima dari target dikarenakan beberapa alasan seperti lulus P3K, sertifikasi, atau pindah karena alasan pribadi.	Pembaharuan data PTK menjadi keharusan untuk penyusunan rencana dan target kinerja tahun anggaran mendatang.
3.	Pembinaan Perpustakaan	Tersedianya Perpustakaan yang sesuai dengan SNP	NPP yang belum terbit dari Perpunas	Koordinasi

4.2 Angka Rata-rata Lama Sekolah

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Angka Rata-rata Lama Sekolah pada tahun 2024 adalah 8,13. Hal ini belum melampaui target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Indikator kinerja ini memiliki capaian 94,21 persen. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa rata-rata lama sekolah digunakan untuk mengidentifikasi jenjang kelulusan pendidikan penduduk suatu daerah, yaitu rata-rata yang telah dihabiskan oleh penduduk di seluruh jenjang pendidikan formal yang telah dijalani. Rata-rata lama sekolah dihitung berdasarkan tiga variabel secara simultan yaitu partisipasi sekolah, tingkat/kelas yang sedang/pernah diduduki, dan jenjang pendidikan yang ditamatkan. Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) 2020-2024 sebagaimana gambar grafik di bawah ini:



Sumber: BRS Indeks Pembangunan Manusia BPS Provinsi Kalimantan Selatan 2024

Angka rata-rata lama sekolah ini sesuai penjelasan diatas merupakan waktu yang dihabiskan oleh individu disuatu populasi dalam berbagai jenjang pendidikan formal dan ini dihitung berdasarkan jumlah tahun pendidikan yang diselesaikan oleh penduduk usia tertentu, sebagai contoh jika individu memiliki Pendidikan SD selama 6 tahun, SMP selama 4 tahun, dan SMA selama 3 tahun maka total rata-rata lama sekolah individu tersebut adalah 12 tahun. Angka rata-rata lama sekolah juga dipengaruhi oleh APK dan APM, ketika APK dan APM meningkat, lebih banyak anak terdaftar dalam sistem pendidikan, termasuk di

tingkat dasar, menengah dan tinggi. Ini akan berkontribusi pada peningkatan ARLS karena lebih banyak anak yang mendapatkan Pendidikan formal dan tidak putus sekolah. Peningkatan APM APK juga seringkali mencerminkan adanya peningkatan fasilitas Pendidikan dan dukungan sosial yang meningkatkan retensi siswa hingga mereka menyelesaikan jenjang pendidikan tertentu. Jika partisipasi meningkat tetapi kualitas pendidikan tidak memadai, siswa mungkin tidak menyelesaikan pendidikan dengan baik, yang dapat berdampak negatif pada ARLS. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Balangan juga melakukan upaya peningkatan kualitas Pendidikan.

Adapun tabulasi APM dan APK di Kabupaten Balangan tersaji dalam data berikut:

Jenjang Pendidikan Educational Level	Angka Partisipasi Murni (APM) Net Enrollment Rate		Angka Partisipasi Kasar (APK) Gross Enrollment Ratio	
	2023	2024	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
SD/MI/Sederajat Primary School	98,90	98,52	105,29	106,20
SMP/MTs/ Sederajat Lower Secondary School	78,35	79,55	86,38	97,39
SMA/SMK/MA/Sederajat Upper Secondary School	72,25	67,93	99,25	96,66

Catatan/Note: ...
Sumber/Source: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)/BPS—Statistics Indonesia, National Socioeconomic Survey

Dari data diatas menunjukkan kenaikan APK dan APM dari tahun 2023 ke 2024 baik di jenjang SD/MI , SMP/MTS maupun SMA /SMK. Hal ini menunjukkan korelasi kenaikan pada ARLS.

b. *Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Tahun 2023 dan 2022.*

Dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2023 yaitu 8,03 dengan capaian 96,05% Angka Rata-rata Lama Sekolah tahun 2024 mengalami kenaikan realisasi sebesar 0,10 poin, tetapi jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2023 sebesar 96,05% capaian kinerja tahun 2024 lebih rendah sebesar 1,84%.

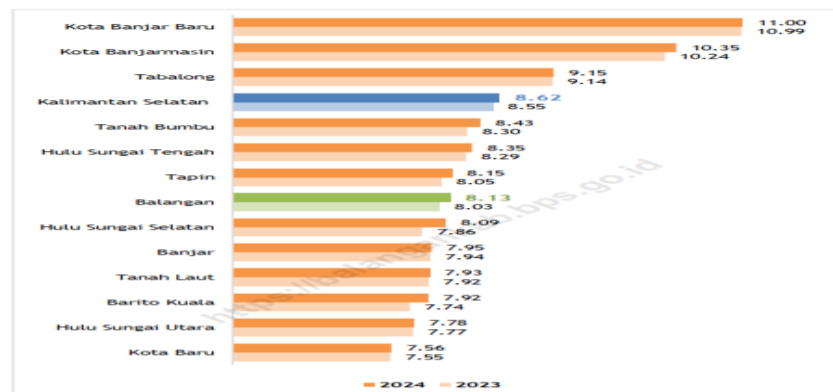
c. *Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun ini Dengan Target Jangka Menengah Dalam RPJMD*

Jika dibandingkan dengan target Akhir RPJMD sebesar 9,17 Angka Rata-rata Lama Sekolah tahun 2024 belum mencapai target dan masih kurang sebesar 1,04 poin dengan persentase capaian sebesar 88,66 persen.

d. *Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Dengan Standar Nasional*

Angka Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Balangan tahun 2024 sebesar 8,13 tahun. Artinya, rata-rata penduduk di Kabupaten Balangan yang berusia 25 tahun ke atas telah mengenyam pendidikan hingga Kelas 2 SMP/ sederajat atau masih belum bisa menikmati program wajib belajar (WAJAR) 9 tahun. Sama kondisinya dengan capaian umur harapan hidup dan angka harapan lama sekolah, angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Balangan masih lebih rendah dibandingkan angka rata-rata lama sekolah provinsi sebesar 8,62 tahun. Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Balangan sudah cukup meningkat dari tahun sebelumnya, yakni dengan peningkatan sebesar 0,10 tahun (1,25 persen) dan Balangan menempati urutan ke-7 dari 13 kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan. Melihat kondisi ini, setidaknya sudah ada perkembangan ke arah yang lebih baik dari bidang pendidikan di Kabupaten Balangan namun masih tetap perlu mendapat perhatian lebih lanjut.

Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) menurut Kabupaten dan Provinsi Kalimantan Selatan, 2023-2024 dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Sumber: BRS Indeks Pembangunan Manusia BPS Provinsi Kalimantan Selatan 2024

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Pada tahun 2023 dan 2024 program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka meningkatkan capaian ARLS antara lain adalah :

1. Peningkatan kualitas dan kuantitas fasilitas dan prasarana pendidikan, pada tahun 2023 ada 192 paket pekerjaan rehabilitasi dan pembangunan sarana dan prasarana sekolah dari jenjang PAUD, SD dan SMP.
2. Peningkatan pelaksanaan SKD dengan cara membuat kelas dan pelatihan pengembangan kreatifitas warga belajar, bukan hanya melaksanakan ditempat bahkan sampai ke kecamatan dan sekolah keagamaan/pesantren non formal.
3. Peningkatan pelayanan pendidikan kesetaraan : pemberian dan dukungan dana dari Pemerintah Daerah dan APBN untuk operasional pendidikan kesetaraan dengan jumlah PKBM sebanyak 12 lembaga dan kelompok belajar yang tersebar hampir pada setiap desa di kecamatan sebanyak (Paket A 3 Pokjar, Paket B 21 Pokjar, dan Paket C 33 Pokjar).
4. Peningkatan program beasiswa, prestasi dan tidak mampu sampai pada tingkat perguruan tinggi untuk memberikan motivasi kepada putra dan putri Balangan untuk melanjutkan pendidikan sampai ke jenjang perguruan tinggi (program yang telah berjalan dari tahun 2016 ini, telah banyak meluluskan mahasiswa/i beasiswa dari perguruan tinggi yang kemudian ada beberapa bekerja pada perusahaan ternama diluar Kalimantan.
5. Pelaksanaan program Balangan pintar yaitu memberikan bantuan operasional kepada kurang lebih 1.580 siswa SD dan SMP yang tergolong dalam siswa kurang mampu dalam bentuk barang kebutuhan dasar sekolah seperti sepatu, tas dan buku tulis yang diharapkan meringankan beban untuk sekolah.
6. Adanya dukungan program dan anggaran dari Kepala Daerah dan juga adanya dukungan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat melalui Balai Penjamin Mutu Pendidikan Propinsi Kalimantan Selatan yang sering berkoordinasi melaksanakan perpanjangan program Kementerian Pendidikan yang dilaksanakan oleh daerah seperti program sekolah penggerak, program kurikulum merdeka yang telah dilaksanakan di Kabupaten Balangan.
7. Peningkatan kualitas dan kuantitas fasilitas dan prasarana pendidikan, pada tahun 2024 ada 350 paket pekerjaan rehabilitasi dan pembangunan sarana dan prasarana sekolah dari jenjang PAUD, SD dan SMP.
8. Peningkatan pelayanan pendidikan kesetaraan : pemberian dan dukungan dana dari Pemerintah Daerah dan APBN untuk Operasional Pendidikan Kesetaraan dengan jumlah PKBM sebanyak 12 lembaga dan Kelompok Belajar yang tersebar hampir pada setiap Desa di Kecamatan sebanyak (Paket A, 6 Pokjar, Paket B ,12 Pokjar dan Paket C ada 12 Pokjar).

9. Peningkatan program beasiswa prestasi melalui beasiswa bagi siswa Nilai Tertinggi Kelulusan Peringkat 1 s.d. 3 Jenjang SD/MI dan Jenjang SMP/MTS.
10. Pelaksanaan program Kartu Balangan Pintar yaitu memberikan bantuan operasional kepada 1.580 siswa SD/MI dan SMP/MTS yang tergolong dalam siswa kurang mampu dalam bentuk barang kebutuhan dasar sekolah seperti sepatu, tas dan buku tulis yang diharapkan meringankan beban untuk sekolah.

Disamping upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan, juga terdapat beberapa faktor lain di luar akses dan layanan pendidikan yang dapat mempengaruhi angka rata-rata lama sekolah, beberapa di antaranya:

1. Stabilitas ekonomi keluarga mempengaruhi kemampuan untuk melanjutkan pendidikan. Keluarga dengan pendapatan yang cukup cenderung lebih mampu menyekolahkan anak-anak mereka sampai tingkat yang lebih tinggi.
2. Nilai budaya dan persepsi terhadap pendidikan di dalam keluarga dapat berperan besar. Di masyarakat yang menghargai pendidikan, anak-anak cenderung didorong untuk menyelesaikan pendidikan formal dengan lebih baik.
3. Selain akses, ketersediaan sumber daya seperti buku, teknologi, dan bimbingan belajar juga memengaruhi kualitas pendidikan yang diterima siswa. Sumber daya yang memadai dapat meningkatkan motivasi dan kinerja akademis. Balangan melalui Kartu Balangan Pintar juga memberikan bantuan sumber daya lain baik melalui APBD maupun dana CSR Perusahaan tambang seperti ADARO.
4. Kualitas guru sangat penting. Guru yang terlatih dengan baik dan memiliki metode pengajaran yang efektif dapat memengaruhi minat dan prestasi siswa, sehingga berkontribusi pada kelanjutan pendidikan. Berbagai upaya peningkatan kapasitas guru telah dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan baik pelatihan dalam negeri maupun luar negeri antara lain Kerjasama peningkatan kompetensi guru Bahasa Inggris dengan *Briton English Education dan Cambridge Assesment*.
5. Lingkungan tempat tinggal yang mendukung, seperti komunitas yang aman dan stabil, dapat memberikan rasa aman dan motivasi bagi siswa untuk melanjutkan pendidikan. Hal ini juga menjadi salah satu kinerja SPM bidang Pendidikan.
6. Program pendidikan non-formal atau informal seperti kursus, pelatihan vokasi, dan program belajar mandiri dapat menawarkan alternatif pendidikan bagi mereka yang kurang mampu mengakses pendidikan formal. Budaya belajar ini telah diterapkan di Balangan melalui pembentukan kelompok belajar.
7. Kebijakan pemerintah yang mendukung pendidikan, seperti subsidi bagi siswa kurang mampu atau program beasiswa, bisa meningkatkan partisipasi dan penyelesaian pendidikan. Program beasiswa ini sudah dilakukan sejak lama oleh Pemerintah Kabupaten Balangan baik beasiswa tidak mampu atau beasiswa berprestasi dan juga tahun 2024 yang akan dilanjutkan tahun 2025 yakni program beasiswa seribu sarjana.
8. Kesehatan fisik dan mental siswa juga berperan. Anak-anak yang sehat cenderung lebih mampu untuk bersekolah dengan baik dibandingkan yang mengalami masalah kesehatan. Adanya crosscutting kinerja dengan Dinas Kesehatan dalam inovasi PUBERTAS dan PULPENDACII (Dimana inovasi ini memperluas akses layanan Kesehatan sampai daerah terpencil dan tidak terjangkau dan menerapkan Pendidikan inklusif).
9. Upaya untuk menghilangkan diskriminasi gender dalam pendidikan dapat meningkatkan angka lama sekolah, terutama untuk perempuan. Menekankan bahwa Perempuan dan disabilitas juga memiliki hak yang sama dalam memperoleh layanan Pendidikan.

f. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Upaya percepatan pencapaian target kinerja dilakukan salah satunya dengan membuat matrik resiko strategis Pemerintah Kabupaten Balangan yang dapat digambarkan dalam tabulasi data sebagaimana berikut ini :

Sasaran Strategis	Uraian Resiko	Rencana Tindak Pengendalian
Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Terjadinya putus sekolah	1. Sosialisasi pencegahan perkawinan usia anak di 8 desa dan 8 sekolah di delapan kecamatan . 2. Sosialisasi pola asuh anak dan remaja di Sekretariat PKK Kabupaten Balangan 3. Rapat Tim pencegahan perkawinan usia anak tingkat Kabupaten Balangan dan sekaligus Sosialisasi Puspaga. 4. Memberikan beasiswa untuk SD, MI, SMP dan MTS yang tidak mampu dan berprestasi. 5. Menaikkan nominal beasiswa untuk siswi tidak mampu (Balangan Pintar) dari Rp 750.000,- menjadi 1.500.000,- (SMP/MTS), dari Rp 500.000,- menjadi Rp 1.100.000,- (SD/MI)

Rancangan matrik resiko strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana tabulasi data berikut:

REGISTER RISIKO STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2024													
No	Sub Kegiatan	Indikator Keluaran	Tujuan	Risiko				Sebab*)			CUC	Dampak**)	
				Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	Uraian		Pihak yang Terkena	
a	b	c	c1	d	e	f	g	h	i	j	k	l	
1	Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personel Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar Yang menerima Beasiswa Berprestasi	Meningkatkan Indeks Pendidikan	Pelaksanaan	Peningkatan Angka rata-rata lama sekolah belum optimal	RSO.24.01.01	Bidang Pembinaan Sekolah Dasar	Adanya Siswa SD/MI Yang Putus sekolah. Adanya beberapa siswa yang sekolah ke luar daerah dan adanya beberapa siswa yang melanjutkan pendidikan ke sekolah berasrama (Ponpes)	eksternal	C	Indeks Pembangunan Manusia Belum Optimal	Kab. Balangan	
		Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar Yang menerima Kartu Balangan Pintar	Meningkatkan Indeks Pendidikan	Pelaksanaan	Peningkatan Angka harapan lama sekolah belum optimal	RSO.24.01.02	Bidang Pembinaan Sekolah Dasar	Adanya Siswa SD/MI Yang Putus sekolah. Adanya beberapa siswa yang sekolah ke luar daerah dan adanya beberapa siswa yang melanjutkan pendidikan ke sekolah berasrama (Ponpes)	eksternal	C	Indeks Pembangunan Manusia Belum Optimal	Kab. Balangan	
2	Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personel Peserta Didik Sekolah Pertama	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Yang menerima Beasiswa Berprestasi	Meningkatkan Indeks Pendidikan	Pelaksanaan	Peningkatan Angka rata-rata lama sekolah belum optimal	RSO.24.01.03	Bidang Pembinaan Sekolah Dasar	Adanya Siswa Menengah Pertama Yang Putus sekolah. Adanya beberapa siswa yang sekolah ke luar daerah dan adanya beberapa siswa yang melanjutkan pendidikan ke sekolah berasrama (Ponpes)	Eksternal	C	Indeks Pembangunan Manusia Belum Optimal	Kab. Balangan	
		Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Yang menerima Kartu Balangan Pintar	Meningkatkan Indeks Pendidikan	Pelaksanaan	Peningkatan Angka harapan lama sekolah belum optimal	RSO.24.01.04	Bidang Pembinaan Sekolah Dasar	Adanya Siswa Menengah Pertama Yang Putus sekolah. Adanya beberapa siswa yang sekolah ke luar daerah dan adanya beberapa siswa yang melanjutkan pendidikan ke sekolah berasrama (Ponpes)	Eksternal	C	Indeks Pembangunan Manusia Belum Optimal	Kab. Balangan	

Inovasi yang dilakukan identik dengan angka harapan lama sekolah yang sudah tersaji dalam tabulasi dibawah ini :

IKU	Nama Inovasi	Manfaat
AHLS dan ARLS	Program Beasiswa Seribu Sarjana	Mengurangi angka putus sekolah sehingga akan berpengaruh pada ARLS.
	KBP (Kartu Balangan Pintar)	Mencegah anak putus sekolah bagi siswa jenjang SD dan MI, serta SMP dan MTs dari keluarga tidak mampu sehingga berdampak positif pada peningkatan rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah.

g. Analisis Atas Program atau Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Capaian Kinerja Program Tahun 2024

No	Uraian Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Keuangan	% Realisasi Kinerja	Efektifitas Program
1.	Pengelolaan Pendidikan	117.524.112.800	100.359.246.362	85,39	127,73	Ya
2.	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	8.843.030.000	7.612.225.001	86,08	86	Ya
3.	Pembinaan Perpustakaan	4.873.079.300	4.337.859.118	89,02	89,02	Ya

Sumber Data Laporan SKPD dan Rekonsiliasi Data LKPJ Tahun 2024, data diolah

Berikut analisa program penunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Pendidikan (Indikator Kinerja Angka Rata-rata Lama Sekolah):

No	Program	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Tindakanjutt
1.	Pengelolaan Pendidikan	Kesadaran Orang Tua dan Masyarakat tentang pentingnya pendidikan anak usia dini (PAUD), kualitas layanan pendidikan di lembaga PAUD, baik dalam hal kurikulum, metode pengajaran, serta kompetensi tenaga pendidik. Adanya bantuan yang diberikan oleh pemerintah melalui BOP PAUD, penyediaan buku, media digital, dan materi pembelajaran yang berkualitas.	Masih ada peserta didik/penduduk usia 5-6 tahun yang bersekolah di kabupaten tetangga dan ikut orang tua bekerja di kabupaten lain. Masih ada penduduk/orang tua yang belum memahami pentingnya pendidikan anak usia dini, kurangnya minat baca peserta didik.	Melakukan pendataan penduduk desa / kecamatan yang masih belum 100%. Mengadakan sosialisasi kepada orang tua / penduduk ke Kecamatan/Desa yang masih belum 100%. Memberikan bantuan alat tulis dan gambar untuk peserta didik PAUD. Meningkatkan sarana prasarana PAUD. Peningkatan Kebiasaan Membaca melalui : Membaca secara rutin, fasilitasi akses bacaan seperti buku, majalah yang sesuai dengan berbagai tingkat usia dan minat. Mengadakan program membaca di sekolah atau komunitas yang melibatkan semua orang, dari anak-anak hingga orang dewasa. Ini bisa termasuk lomba baca atau kegiatan diskusi buku.
2.	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Berkelanjutan	Tidak ada kendala signifikan hanya saja berkurangnya penerima dari target dikarenakan beberapa alasan seperti lulus P3K, sertifikasi, atau pindah karena alasan pribadi.	Pembaharuan data PTK menjadi keharusan untuk penyusunan rencana dan target kinerja tahun anggaran mendatang.
3.	Pembinaan Perpustakaan	Tersedianya Perpustakaan yang sesuai dengan SNP	NPP yang belum terbit dari Perpunas	Koordinasi

5. Sasaran Meningkatnya Pengeluaran Perkapita

Tabel 3.6
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 5
Meningkatnya Pengeluaran Perkapita

No	Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2023	Kinerja 2024			Target Akhir RPJMD	Capaian Terhadap Akhir RPJMD	Realisasi/ Capaian Terhadap Kab/Kota	Realisasi / Capaian Terhadap RPJMD Provinsi	Realisasi/ Capaian Terhadap RPJMN
			Target	Realisasi	Capaian					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.	Pengeluaran Perkapita	990.667	1.109.546	1.027.083	92,57	1.409.168	72,89	-	-	-

Sumber Data Pemerintah Kabupaten Balangan Tahun 2024, data diolah

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Berdasarkan data pada tabel di atas realisasi dari target 1.109.546 indikator Pengeluaran Perkapita Pemerintah Kabupaten Balangan tahun 2024 adalah 1.027.083 (hasil ini diperoleh dari 12.325.000 dibagi 12 bulan = 1.027.083), dengan capaian 92,57 persen. Dari data tersebut diketahui bahwa capaian dari indikator ini belum mencapai target yang ditetapkan yaitu 1.109.546, dan masuk dalam kategori sangat tinggi.

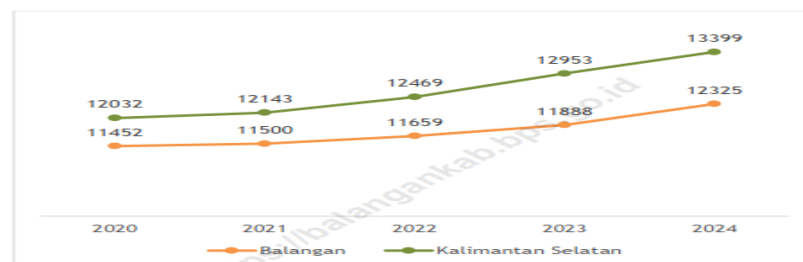
Indikator pengeluaran diproksi dengan pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Nilai dari pengeluaran per kapita yang disesuaikan ini ditentukan dari nilai pengeluaran perkapita dan paritas daya beli (*Purchasing Power Parity-PPP*).

Data rata-rata pengeluaran per kapita setahun bersumber dari BPS, kemudian data ini akan dibuat konstan/rill dengan tahun dasar 2010=100. Paritas daya beli/dikenal sebagai komponen kemampuan daya beli atau standar hidup layak menunjukkan seberapa besar jumlah barang/jasa yang mampu dibeli oleh masyarakat yang disesuaikan dengan pendapatan yang diterima/dimiliki.

Pengeluaran per kapita yang tinggi biasanya menunjukkan bahwa pendapatan rata-rata individu di daerah tersebut meningkat. Hal ini bisa menjadi tanda bahwa masyarakat memiliki akses lebih baik terhadap barang dan jasa, yang berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup. Daerah dengan pengeluaran per kapita yang tinggi biasanya memiliki lebih banyak investasi dalam infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan, yang semuanya berkontribusi pada pembangunan sosial dan ekonomi. Pengeluaran per kapita yang meningkat sering kali mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang kuat, yang bisa menarik lebih banyak investasi dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja.

Pemerintah Kabupaten Balangan juga harus memperhatikan beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan untuk menghubungkan keselarasan indikator kinerja ini dengan beberapa indikator kinerja yang lainnya yakni jika pengeluaran per kapita meningkat tetapi terdapat ketimpangan yang tinggi dalam distribusi pendapatan, maka tidak semua individu akan merasakan dampak positifnya. Ini dapat menciptakan kesenjangan sosial yang dapat menghambat perkembangan jangka panjang. Disamping itu pengeluaran per kapita juga bisa dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti inflasi atau perubahan dalam kebijakan ekonomi.

Perkembangan pengeluaran per kapita yang disesuaikan (Ribu Rupiah), 2020-2024 seperti diagram berikut:



Sumber: BRS Indeks Pembangunan Manusia BPS Provinsi Kalimantan Selatan 2024

b. *Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Tahun 2023 dan 2022.*

Dibandingkan dengan realisasi kinerja dan capaian tahun 2023 Pengeluaran Perkapita tahun 2024 mengalami kenaikan realisasi sebesar 1.026.092 dengan persentase capaian sebesar 16,86%. Dari hasil penghitungan, diperoleh gambaran rata-rata pengeluaran perkapita per tahun yang disesuaikan penduduk Kabupaten Balangan pada tahun 2024 yaitu sekitar 12,33 juta rupiah. Angka ini lebih tinggi dari keadaan tahun sebelumnya yang sudah mencapai 11,89 juta rupiah di tahun 2023. Dibanding dengan capaian pengeluaran riil Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2024 sebesar 13,40 juta rupiah, dapat dikatakan bahwa kemampuan daya beli penduduk Kabupaten Balangan dalam rangka memenuhi penghidupan yang layak selalu lebih rendah daripada penduduk Kalimantan Selatan umumnya selama kurun waktu tahun 2020-2024.

Pengeluaran per kapita dan daya beli masyarakat adalah dua konsep ekonomi yang saling terkait, tetapi memiliki makna dan implikasi yang berbeda. Pengeluaran per kapita mengacu pada total pengeluaran di suatu daerah atau negara dibagi dengan jumlah penduduknya. Ini memberikan gambaran tentang rata-rata pengeluaran individu di masyarakat. Sebagai indikator ekonomi, pengeluaran per kapita sering digunakan untuk menilai tingkat kesejahteraan masyarakat dan kemakmuran suatu daerah atau negara. Angka pengeluaran ini bisa bervariasi tergantung pada faktor seperti inflasi, struktur ekonomi, dan tingkat pendapatan. Sementara Daya beli masyarakat mengacu pada kemampuan individu atau kelompok untuk membeli barang dan jasa dengan pendapatan yang mereka miliki. Daya beli dipengaruhi oleh pendapatan, harga barang dan jasa, serta inflasi.

Mengingat daya beli masyarakat bisa menurun walaupun pendapatan meningkat jika inflasi lebih tinggi daripada pertumbuhan pendapatan atau dengan kata lain, meskipun pengeluaran per kapita meningkat, daya beli bisa stagnan atau bahkan menurun jika harga barang dan jasa naik terlalu cepat. Daya beli yang tinggi sering kali berhubungan dengan kualitas hidup yang lebih baik karena masyarakat dapat mengakses lebih banyak barang dan jasa yang meningkatkan kesejahteraan mereka.

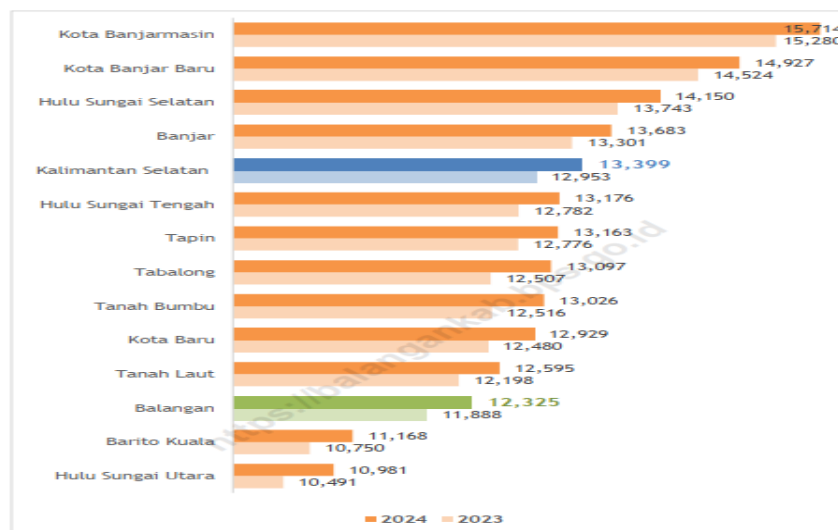
Peningkatan pengeluaran per kapita biasanya mengindikasikan bahwa individu memiliki lebih banyak uang untuk dibelanjakan. Ini dapat meningkatkan daya beli, asalkan tidak ada kenaikan harga yang signifikan pada barang dan jasa yang dibutuhkan. Jika pengeluaran per kapita meningkat tetapi tidak diiringi oleh peningkatan daya beli (misalnya karena inflasi yang tinggi), maka masyarakat mungkin tidak merasakan dampak positif dari kenaikan pengeluaran tersebut. Untuk itu dalam penyusunan dokumen perencanaan RPJMD 2025-2029 Pemerintah Kabupaten Balangan perlu memperhatikan hal-hal yang mempengaruhi pengeluaran perkapita agar kinerja yang disusun sudah menunjukkan keterkaitan antara pengeluaran perkapita dan ketimpangan serta inflasi.

c. *Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun ini Dengan Target Jangka Menengah Dalam RPJMD*

Jika dibandingkan dengan capaian Akhir RPJMD Pengeluaran Perkapita tahun 2024 belum mencapai target akhir RPJMD dengan persentase capaian 72,89% dan masih kekurangan sebesar 299.262.

d. *Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Dengan Standar Nasional*

Pengeluaran per kapita yang disesuaikan (Ribu Rupiah) menurut Kabupaten dan Provinsi Kalimantan Selatan, 2023-2024 sebagaimana grafik di bawah ini:



Sumber: BRS Indeks Pembangunan Manusia BPS Provinsi Kalimantan Selatan 2024

Variasi komponen penyusun IPM antar kabupaten/kota di Kalimantan Selatan juga terjadi pada indikator pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Bahkan rentang yang terjadi cukup lebar, yakni dari 10.981 hingga 15.714 ribu rupiah per kapita selama tahun 2024. Pengeluaran per kapita yang disesuaikan terendah tercatat di Hulu Sungai Utara, sementara tertinggi tercatat di Kota Banjarmasin. Semakin besar pengeluaran per kapita yang disesuaikan maka menunjukkan tingginya tingkat kemampuan penduduk dalam melakukan aktivitas konsumsi. Tingginya aktivitas konsumsi salah satu pendorong utamanya adalah pendapatan yang juga tinggi. Oleh karena itu, pengeluaran per kapita yang disesuaikan dapat menjadi pendekatan dalam melihat tingkat kesejahteraan penduduknya. Dengan demikian, Kota Banjarmasin dan Kota Banjarbaru relatif lebih unggul pada aspek ekonominya dibandingkan kabupaten/kota lain di Kalimantan Selatan. Sementara itu, Kabupaten Balangan juga menempati urutan ke-11 dari 13 kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan dalam hal pengeluaran per kapita yang disesuaikan dengan nominal 12.325 ribu rupiah.

e. *Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan*

1. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Balangan dapat dikatakan berada dalam kondisi baik dan dengan pertumbuhan ekonomi yang baik biasanya meningkatkan pendapatan masyarakat, yang pada gilirannya dapat meningkatkan pengeluaran. Namun perlu adanya upaya untuk kemandirian ekonomi ke depan dengan mengandalkan sumber daya alam yang tersedia.
2. Pemerintah Kabupaten Balangan melalui beberapa perusahaan yang ada di Kabupaten Balangan baik sektor tambang, sektor IKM lainnya telah membuka berbagai peluang kesempatan tenaga kerja bagi warga masyarakat Kabupaten Balangan. Dengan lebih banyak lapangan kerja yang tersedia, orang memiliki lebih banyak pendapatan untuk dibelanjakan.
3. Inflasi sebenarnya dapat menyebabkan biaya hidup meningkat, sehingga pengeluaran per kapita juga meningkat meskipun kuantitas barang yang dibeli tetap sama. Inflasi yang terlalu tinggi juga akan berakibat buruk bagi masyarakat, dan terkait inflasi ini, Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam setiap pekan selalu melakukan monitoring dan evaluasi dengan Kementerian Dalam Negeri, hasil monev ini nantinya akan menjadi bahan pembinaan kepada masyarakat melalui implementasi tupoksi beberapa SKPD yang terlibat seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan.

4. Meningkatnya variasi dan kualitas barang serta layanan yang tersedia dapat mendorong individu untuk berbelanja lebih banyak. Terlebih lagi dengan munculnya *platform e-commerce* memudahkan individu untuk berbelanja dan dapat meningkatkan pengeluaran mereka secara signifikan. Dengan semakin terhubungnya ekonomi global, orang dapat mengakses produk dari luar negeri yang sebelumnya tidak tersedia, yang dapat meningkatkan pengeluaran.
5. Dengan lebih banyaknya pilihan pembiayaan dan pinjaman, orang cenderung untuk berbelanja lebih tanpa terlalu memikirkan kemampuan membayar. Seperti akses mudah melakukan pinjaman ke Bank Kalsel dan Bank-Bank lain yang menawarkan suku bunga rendah. Semuanya akan tetapi memiliki sisi negatif, masyarakat harus bijak menentukan kapan mereka akan melakukan pinjaman dan kapan memutuskan tidak. Memang banyak inovasi yang diberikan bagi pelaku IKM seperti pinjaman tanpa bunga, akan tetapi mereka tetap memiliki kewajiban pengembalian harga pokok sehingga usaha IKM mereka harus benar-benar dijalankan dengan baik.

Upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah kabupaten Balangan dalam rangka meningkatkan pengeluaran perkapita dan menyeimbangkan dengan kemampuan daya beli antara lain adalah :

- a. Meningkatkan nilai produksi barang dan jasa serta meningkatkan nilai investasi dari dalam dan luar negeri dapat meningkatkan pendapatan dan pengeluaran, terutama membuka peluang investor dengan berbagai kebijakan kemudahan berusaha.
- b. Melakukan pemetaan potensi dan perkembangan sektor-sektor unggulan seperti industri, pariwisata, atau teknologi dapat menyumbang pada pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Hal ini akan menjadi bahan penyusunan dokumen perencanaan RPJMD 2025-2029.
- c. Membuka akses pertumbuhan lapangan kerja dengan gaji yang lebih tinggi akan meningkatkan pendapatan individu, sehingga meningkatkan daya beli dan pengeluaran per kapita.
- d. Memberikan upah minimum yang tinggi dan insentif untuk pekerja dapat berkontribusi pada peningkatan pendapatan keseluruhan masyarakat. Insentif disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Membangun infrastruktur yang baik, seperti jalan, transportasi publik, dan layanan dasar (air bersih, listrik).
- f. meningkatkan efisiensi ekonomi, yang pada gilirannya berkontribusi pada pengeluaran Masyarakat.
- g. memanfaatkan SDA yang ada seperti hasil pertanian dan sumber daya alam yang menonjol lainnya akan menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi, yang berdampak pada pengeluaran per kapita.
- h. Menyusun beberapa regulasi atau kebijakan pemerintah yang berorientasi pada pembangunan dan investasi sosial, seperti program infrastruktur yang besar atau subsidi, dapat merangsang pertumbuhan pengeluaran misalnya pembangunan balai latihan kerja yang bertaraf internasional.
- i. Program-program yang mendukung pendidikan dan perlindungan sosial juga bisa meningkatkan daya beli masyarakat seperti hanya bantuan beasiswa dan bansos karena masyarakat dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung memiliki peluang pekerjaan yang lebih baik, gaji yang lebih tinggi, dan kemampuan untuk mengelola keuangan lebih baik.
- j. Melaksanakan program pelatihan yang meningkatkan keterampilan angkatan kerja dapat memperbesar peluang untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik.
- k. Memfasilitasi dan mendorong masyarakat untuk melakukan inovasi teknologi dalam produksi dan distribusi barang dan jasa dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas, berkontribusi pada peningkatan pendapatan dan pengeluaran.
- l. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi digital juga berpotensi meningkatkan pengeluaran per kapita melalui peningkatan akses ke barang dan jasa. membangun *start up* - *start up* potensial di Kabupaten Balangan

- m. Pemerintah Kabupaten Balangan juga melakukan upaya peningkatan kualitas hidup yang baik, seperti keamanan, kesehatan, dan lingkungan yang bersih, cenderung lebih menarik bagi penduduk baru dan investasi, yang pada gilirannya dapat meningkatkan pengeluaran.
- n. Memberdayakan populasi muda dan produktif yang memiliki potensi lebih tinggi untuk meningkatkan pengeluaran dan pertumbuhan ekonomi.
- o. Mengidentifikasi dan memahami faktor-faktor sebagaimana huruf a sampai n sangat penting untuk menyusun kebijakan pembangunan yang efektif dan berkelanjutan yang akan menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan tahun-tahun mendatang.

f. *Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya*

Upaya yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja ini antara lain adalah melakukan inovasi sebagaimana tabulasi data berikut :

IKU	Inovasi	Manfaat
Pengeluaran Perkapita	SP2KP	Salah satu aplikasi atau sistem dalam pelaporan harga barang kebutuhan pokok dan penting pada suatu pasar pantau yang dilaporkan setiap hari kerja.

Disamping itu juga Pemerintah Kabupaten Balangan telah menyusun rancangan matrik resiko strategis Pemerintah Daerah terkait hal ini sebagaimana tabulasi data berikut:

Sasaran Strategis	Uraian Resiko	Rencana Tindak Pengendalian
Meningkatnya Pengeluaran Perkapita	Tingkat inflasi tinggi	1. Sidak harga jelang hari besar keagamaan nasional 2. Monitoring harga barang di pasar 3. Pelaksanaan pasar murah

g. *Analisis Atas Program atau Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja*

Capaian Kinerja Program Tahun 2024

No	Uraian Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Keuangan	% Realisasi Kinerja	Efektifitas Program
1.	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	124.507.018.281	94.306.921.491	75,74	845,74	Ya
2.	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	87.035.446.495	71.733.442.000	82,42	90,63	Ya
3.	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	23.730.181.050	20.672.238.151	87,11	92,37	Ya
4.	Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	1.523.934.700	1.210.931.833	79,46	103,95	Ya
5.	Penyuluhan Pertanian	13.845.871.000	12.631.368.200	91,23	100	Ya
6.	Pengelolaan Perikanan Budidaya	42.889.294.194	37.653.082.084	87,79	110,34	Ya
7.	Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	69.848.887.750	68.357.473.142	97,86	100	Ya
8.	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	689.944.100	666.504.275	96,60	100	Ya
9.	Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	2.400.539.662	2.300.491.836	95,83	100	Ya
10.	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	12.218.112.608	11.771.572.147	96,35	104,61	Ya

No	Uraian Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Keuangan	% Realisasi Kinerja	Efektifitas Program
11.	Pengawasan Keamanan Pangan	78.747.200	63.744.000	80,95	122,71	Ya
12.	Perencanaan dan Pembangunan Industri	7.270.306.500	5.776.525.086	79,45	101,26	Ya
13.	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	66.330.000	65.883.500	99,33	52,78	Ya
14.	Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	1.457.909.800	1.427.967.086	97,95	114,75	Ya
15.	Pengembangan UMKM	2.760.930.000	2.730.386.827	98,89	426,79	Ya
16.	Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	1.154.410.500	1.027.453.479	89	99,97	Ya
17.	Pengendalian Izin Usaha Industri	106.805.200	104.770.171	98,09	100,13	Ya

Sumber Data Laporan SKPD dan Rekonsiliasi Data LKPJ Tahun 2024, data diolah

Berikut analisa program penunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian Sasaran Strategis Meningkatkan Pengeluaran Perkapita (Indikator Kinerja Pengeluaran Perkapita):

No	Program	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Tindakanlanjut
1.	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Ada tambahan jumlah kelahiran dan pengadaan semen beku. Adanya tambahan petugas Inseminator sebanyak 4 orang yang berada di Kecamatan Batumandi sebanyak 1 orang dan 1 orang di Kecamatan Tebing Tinggi serta 2 orang dari Dinas. Adanya penganggaran untuk saprodi pertanian seperti Herbisida, NPK, PHC, Pestisida baik hibah maupun barang persediaan. Tingginya minat petani untuk meningkatkan pendapatan melalui berkebun hortikultura.	Tidak terealisasinya pengadaan bibit ternak pada DPA Bidang Peternakan. Kurangnya ketersediaan N2 cair dikarenakan belum adanya tempat penyimpanan khusus N2 sehingga menyebabkan susutnya N2 tersebut dikarenakan penguapan. Keterlambatan dalam penyaluran barang. Masih ada beberapa petani yang belum mendapatkan bantuan karena anggaran tidak mencukupi.	Mempercepat realisasi pengadaan bibit ternak pada awal tahun. Perlu dibangunnya tempat khusus penyimpanan N2 untuk mengurangi resiko penguapan. Menyampaikan kepada penyedia untuk mendistribusikan sesuai dengan surat pesanan. Meminta anggaran tambahan kepada Pemerintah Daerah untuk mencukupi permohonan petani.
2.	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Mahalnya harga pakan ternak, tidak ada petugas yang bertugas untuk mendata produksi daging, kurangnya atau rendahnya prasarana pertanian yang memadai.	Meningkatnya populasi ternak, transisi pengadaan barang/jasa dari manual menjadi online sehingga pengadaan barang/jasa terlaksana, keterbatasan SDM, titik lokasi belum fix.	Penambahan petugas yang bertugas untuk mendata produksi daging, pengadaan barang dan jasa dilaksanakan sesuai dengan jadwal perencanaan.
3.	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Adanya stok ketersediaan obat-obatan.	Adanya keterlambatan dalam mengetahui adanya serangan sehingga serangan sudah menyebar luas.	Petugas Lapangan harus mampu menganalisa kondisi di lapangan sehingga serangan dapat dilakukan pencegahan.
4.	Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Tersedianya sarana prasarana pendukung (obat-obatan dan vaksin hewan) untuk pelayanan kesehatan hewan.	Keterbatasan keterampilan petugas kesehatan hewan untuk menangani kasus penyakit hewan tertentu.	Pengembangan kompetensi dan keterampilan bagi petugas kesehatan hewan.
5.	Penyuluhan Pertanian	-	-	-
6.	Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pemberian sarana budidaya ikan, Pelatihan.	Monev/pengawasan pemberian bantuan sarana budidaya masih kurang.	Meningkatkan monev / pengawasan pemberian bantuan sarana budidaya ikan.
7.	Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Komitmen pimpinan untuk meningkatkan sarana prasarana irigasi untuk menunjang ketahanan pangan, serta pengamanan	Perubahan iklim yang ekstrem dan tidak terprediksi.	Perlu adanya koordinasi dan manajemen antar instansi dalam peningkatan sarana prasarana ketahanan

No	Program	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Tindakanlanjut
		tebing sungai untuk menghindari longsor.		pangan serta pengamanan tebing Sungai.
8.	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Pelatihan diversifikasi olahan hasil perikanan. Pemberian bantuan alat-alat pengolahan. Pengembangan wawasan (demo memasak).	Keterbatasan modal dan bahan baku untuk menciptakan produk olahan baru.	Menganggarkan kegiatan sosialisasi mengenai permodalan usaha.
9.	Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Banyak pengusul penyediaan infrastruktur dan pendukung kemandirian pangan.	Koordinasi kurang optimal, pemenuhan kelengkapan dan kesesuaian penerima bantuan masih perlu di evaluasi.	Penambahan anggaran dan koordinasi sinergitas antar pihak yang terlibat.
10.	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Semakin tinggi nya skor PPH konsumsi, maka semakin beragam dan seimbang konsumsi pangan masyarakat, nilai tersebut menunjukkan kualitas konsumsi pangan penduduk. Untuk mendukung hal tersebut melalui kegiatan. Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal, antara lain sosialisasi konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA), kepada ibu-ibu PKK/Kecamatan se Kabupaten Balangan serta kader pangan, kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada pelajar dari tingkat SD hingga SMA melalui kegiatan B2SA Goes to School, sehingga pola konsumsi pangan B2SA diharapkan dapat di terapkan sejak dini dimulai dari tingkat keluarga. Tercapainya skor PPH ketersediaan karena ada beberapa kelompok bahan pangan (padi-padian, gula, minyak dan lemak) sudah mencapai skor maksimal PPH Ketersediaan.	Promosi peningkatan konsumsi pangan harus terus dilakukan untuk peningkatan wawasan masyarakat untuk mempertahankan kualitas konsumsi pangan, Pemantauan Ketersediaan seluruh bahan pangan harus terjaga sesuai minimal sesuai kebutuhan masyarakat	Memperkuat advokasi edukasi dan sosialisasi Diversifikasi pangan untuk mencapai pola konsumsi pangan bergizi seimbang dan aman (B2SA), Melaksanakan pertemuan, sosialisasi dan pelatihan pengembangan pangan lokal, Perkuat koordinasi untuk peningkatan ketersediaan dan akses fisik terhadap pangan ke setiap rumah tangga dan individu dalam keluarga
11.	Pengawasan Keamanan Pangan	Alat dan Uji Pestisida sudah tersedia.	Belum adanya Petugas Pengambil Sampel PSAT yang bersertifikat.	Mengikuti Pelatihan Petugas Pengambil Sampel PSAT.
12.	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Tingginya antusiasme pelaku usaha dalam mengikuti kegiatan pelatihan. Tersedianya anggaran untuk mendukung pemberian bantuan peralatan dan mesin produksi bagi IKM.	Pelaku usaha industri sudah mendapat pelatihan enggan mengembangkan produk baru mereka dengan alasan sulit pemasaran sehingga produk yang dibuat adalah produk yang biasa di produksi. Belum adanya pemilihan bahan baku dalam kegiatan produksi sehingga kualitas antar produk bisa berbeda-beda.	Bekerjasama dengan dinas terkait tentang potensi industri agar dapat dibantu pemasaran produknya. Melakukan pendampingan kepada pelaku usaha dalam membuat standar bahan baku produksi, sehingga menghasilkan kualitas produk yang serup.
13.	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Program pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh dinas berjalan dengan baik. Penugasan SDM koperasi untuk mengikuti diklat di Balatkop Provinsi	Tidak semua koperasi mengirimkan SDM-nya untuk mengikuti pelatihan. Keterbatasan anggaran yang menghambat skala	Menyelenggarakan lebih banyak pelatihan di tingkat lokal untuk menjangkau koperasi yang belum terlibat. Melakukan evaluasi efektivitas pelatihan

No	Program	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Tindakanlanjut
		Kalimantan Selatan. Adanya sinergi antara dinas dan instansi lain dalam pelatihan koperasi.	pelaksanaan program pelatihan lebih luas.	dan dampaknya terhadap kinerja koperasi. Melanjutkan dan meningkatkan kerja sama dengan Balatkop Prov. Kalsel dan institusi pendidikan lainnya untuk mengadakan program pelatihan yang lebih terintegrasi.
14.	Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Didukung anggaran yang cukup besar untuk membiayai kegiatan, SDM yang mumpuni dalam melaksanakan kegiatan, minat masyarakat yang tinggi untuk mengikuti beberapa kegiatan peningkatan SDM berupa pelatihan berbasis kompetensi terlebih khusus kejuruan las. Adanya kerjasama yang dijalin dengan PT. Dian Pandu, untuk menampung beberapa lulusan alumni BLK khusus kejuruan las yang lulus syarat dan ketentuan.	Kurangnya minat masyarakat di beberapa kejuruan yang disediakan oleh BLK Balangan, keterbatasan jumlah SDM ASN di BLK Balangan, peserta yang kurang termotifasi atau tidak memiliki pemahaman dasar yang di perlukan.	Memberikan fasilitasi bantuan sarana prasarana bagi pelaku UMKM sesuai dengan usaha yang dijalankan.
15.	Pengembangan UMKM	Perhatian dari Pemerintah Daerah dengan adanya anggaran yang diberikan untuk menunjang pelaksanaan pelatihan dan fasilitasi bantuan sarana dan prasarana penunjang usaha bagi pelaku UMKM. Pelaku UMKM di Balangan masih banyak yang perlu diberikan fasilitasi pelatihan untuk meningkatkan SDM sehingga perlu dilaksanakan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan pelaku UMKM.	Tidak semua pelaku UMKM yang dapat terfasilitasi baik berupa pelatihan maupun bantuan sarana prasarana karena jumlah UMKM yang cukup banyak dibandingkan dengan fasilitasi yang bisa dilaksanakan.	Lebih meningkatkan pelaksanaan pelatihan bagi pelaku UMKM yang belum pernah mengikuti pelatihan dan pelatihan dengan materi yang berbeda dari pelatihan sebelumnya.
16.	Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Para IKM antusias ingin produknya mendapatkan sertifikat baik itu sertifikat halal maupun sertifikat merek, setelah dilakukan sosialisasi mengenai kewajiban memiliki akun SIINas, para IKM antusias agar mendapatkan akun SIINas.	Para IKM umumnya belum bisa membuat dokumen halal maupun pendaftaran merek secara mandiri, para IKM masih kesulitan melakukan registrasi SIINas.	Melakukan fasilitasi pembuatan dokumen halal dan pendaftaran merek, melakukan pendampingan registrasi SIINas hingga mendapatkan akun.
17.	Pengendalian Izin Usaha Industri	Pelaku usaha yang belum memiliki izin, di fasilitasi mendapatkan izin berupa NIB sehingga pelaku usaha kooperatif saat di data. Petugas pendata kurang mengenal area yang di data, namun karena ada pelaku usaha industri binaan di desa tersebut sehingga petugas mendapat pendampingan dalam pendataan.	Adanya miskomunikasi antar aparat desa, sehingga target pendataan di desa tersebut tidak tercapai, ketika petugas pendata mengunjungi tempat usaha, terkadang pelaku usaha sedang tidak berada di tempat produksi.	Meminta nomor kontak pelaku usaha ketika pelaku usaha yang di kunjungi tidak ada di tempat kepada pihak desa dan melakukan pendataan via telepon, ketika melakukan pendataan selalu berkoordinasi dengan aparat setempat maupun pelaku usaha binaan serta melakukan follow up terkait kegiatan pendataan yang akan dilaksanakan

6. Sasaran Menurunnya Ketimpangan Pendapatan

Tabel 3.7
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 6
Menurunnya Ketimpangan Pendapatan

No	Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2023	Kinerja 2024			Target Akhir RPJMD	Capaian Terhadap Akhir RPJMD	Realisas/ Capaian Terhadap Kab/ Kota	Realisasi /Capaian Terhadap RPJMD Provinsi	Realisasi /Capaian Terhadap RPJMN
			Target	Realisasi	Capaian					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.	Indeks Gini Rasio	0,258	0,258	0,218	115,50	0.224	102,68	-	-	-

Sumber Data Pemerintah Kabupaten Balangan Tahun 2024, data diolah

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Indeks Gini Ratio tahun 2024 adalah 0,218. Distribusi konsumsi per kapita di suatu daerah dihubungkan dengan distribusi jumlah penduduk dapat menghasilkan sebuah indikator yang dapat menggambarkan tingkat ketimpangan kesejahteraan antar penduduk di suatu daerah. Indikator tersebut dikenal dengan Koefisien Gini. Koefisien Gini (Gini Ratio) adalah ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan agregat (secara keseluruhan) yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan yang sempurna). Dikatakan rendah jika nilai koefisien gini kurang dari 0,30. Kemudian dikatakan sedang atau cukup merata jika gini rasio berkisar antara 0,30 sampai 0,49. Sementara itu, jika nilai koefisien gini 0,50 atau lebih maka ketimpangan dinilai tinggi dan cukup serius.

Indeks Gini sendiri adalah ukuran yang digunakan untuk menilai distribusi pendapatan atau kekayaan dalam suatu populasi. Nilai indeks Gini berkisar antara 0 hingga 1, di mana 0 mencerminkan distribusi pendapatan yang sempurna (semua orang memiliki pendapatan yang sama) dan 1 mencerminkan distribusi yang sangat tidak merata (satu orang memiliki semua pendapatan).

Keberhasilan dalam mengelola dan menurunkan Indeks Gini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain:

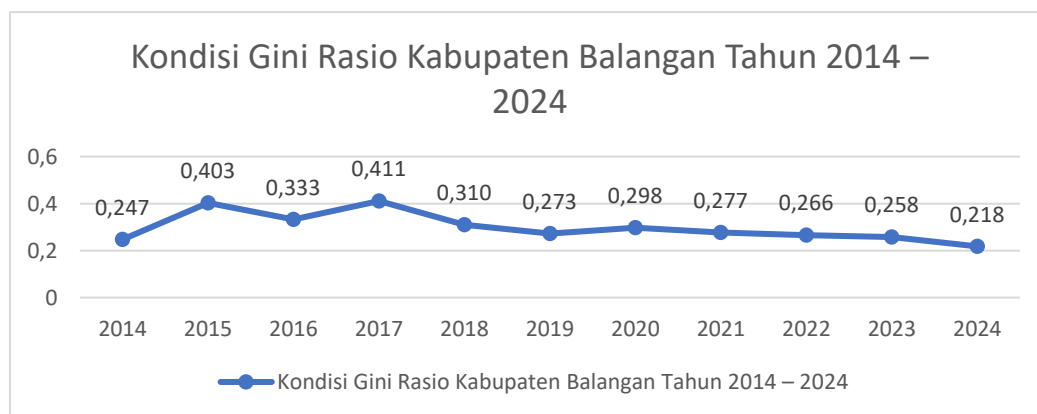
- Kebijakan redistribusi pendapatan yakni kebijakan pajak progresif, subsidi, dan transfer sosial dapat membantu mengurangi ketimpangan pendapatan.
- Pemerintah Kabupaten Balangan telah berinvestasi dalam pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang nantinya akan berkontribusi pada peningkatan taraf hidup dan pendapatan bagi masyarakat berpendapatan rendah.
- Pertumbuhan ekonomi yang inklusif juga telah diimplemetasikan di Kabupaten Balangan dan dengan metode ini akan meningkatkan pendapatan berbagai lapisan masyarakat, terutama kelas menengah dan masyarakat miskin.
- Kesempatan ekonomi yang merata, seperti akses ke lapangan kerja yang berkualitas, dapat mengurangi kesenjangan pendapatan, inovasi dan beasiswa pendidikan menuju ke kualitas pendidikan yang lebih baik juga akan dapat meningkatkan keterampilan dan kemampuan individu, yang berkontribusi pada peningkatan pendapatan.
- Program pelatihan bagi masyarakat dapat meningkatkan akses mereka ke pekerjaan yang lebih baik dan meningkatkan daya saing di pasar kerja terlebih dengan adanya inisiasi membuka kerjasama dengan Australia dan Jepang terkait BLK bertaraf internasional.
- Distribusi umur populasi dapat memengaruhi pendapatan dan kekayaan. Populasi dengan proporsi besar dari usia kerja dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, urbanisasi dapat meningkatkan akses ke peluang kerja dan pendidikan, tetapi juga dapat memperburuk ketimpangan jika tidak dikelola dengan baik. Untuk itu peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sangat diperlukan dalam upaya mencegah terjadinya ledakan penduduk dan menghadapi bonus demografi.

- g. Ekonomi yang terdiversifikasi dapat menciptakan lebih banyak peluang kerja dan pendapatan dari berbagai sektor, sehingga mendistribusikan kekayaan secara lebih merata.
- h. Masyarakat dengan akses terbatas terhadap modal (seperti pinjaman, investasi, dan pembiayaan) akan kesulitan untuk meningkatkan pendapatan. Untuk itu banyak upaya yang sudah dilakukan dalam rangka mempermudah akses permodalan ini baik oleh pemerintah sendiri maupun dana CSR dan kerjasama dengan pihak perbankan.
- i. Masyarakat yang aktif terlibat dalam proses politik cenderung memiliki lebih banyak pengaruh dalam kebijakan yang mempengaruhi redistribusi pendapatan. Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sangat diperlukan untuk menciptakan kondisi yang anti SARA dan anti diskriminasi.
- j. Pemerintahan yang transparan dan akuntabel lebih mampu melaksanakan kebijakan redistributif yang efektif. Peran seluruh SKPD pemangku tata kelola kebijakan baik dari sisi regulasi maupun tata kelola layanan digital harus lebih ditingkatkan lagi.
- k. Masyarakat yang memiliki mobilitas sosial yang tinggi cenderung memiliki ketimpangan pendapatan yang lebih rendah.

Intinya keberhasilan Pemda Balangan dalam mengelola Indeks Gini dan menurunkan ketimpangan pendapatan bergantung pada gabungan berbagai faktor yang saling berinteraksi. Terpenting adalah kebijakan yang berorientasi pada redistribusi pendapatan dan pertumbuhan yang inklusif, pendidikan dan keterampilan yang memadai, serta akses yang merata terhadap sumber daya dan peluang ekonomi. Mengintegrasikan berbagai pendekatan dan melibatkan masyarakat adalah langkah penting untuk mengurangi ketimpangan dan mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Hal ini harus menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Balangan dalam menyusun dokumen perencanaan RPJMD 2025-2029.

b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Tahun 2023 dan 2022.

Nilai koefisien gini rasio Kabupaten Balangan pada tahun 2023 adalah 0,258, yang artinya ketimpangan pendapatan di wilayah Kabupaten Balangan tergolong dalam kelompok ketimpangan rendah. Dan pada tahun 2024 indeks gini ratio Balangan berada pada angka 0,218. Selama kurun waktu 10 tahun terakhir, yaitu periode 2014 – 2023, kondisi gini rasio Kabupaten Balangan cenderung cukup fluktuatif. Dinamika angka gini rasio mengindikasikan adanya perubahan distribusi pendapatan yang didekati dengan pengeluaran penduduk. Gini rasio juga digunakan untuk melihat apakah pemerataan pengeluaran penduduk semakin baik atau buruk. Dibandingkan tahun sebelumnya, gini rasio Kabupaten Balangan mengalami penurunan sebesar 0,008 poin, atau dari 0,266 pada tahun 2022 menjadi 0,258 pada tahun 2023 dan tahun 2024 kembali turun pada angka 0,218. Hal ini mengindikasikan bahwa distribusi pengeluaran penduduk di Kabupaten Balangan semakin membaik di tahun 2024. Kondisi Gini Rasio Kabupaten Balangan Tahun 2014 – 2024 sebagaimana grafik di bawah ini:



c. *Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun ini Dengan Target Jangka Menengah Dalam RPJMD*

Realisasi kinerja tahun 2024 merupakan prestasi yang membanggakan dimana indeks gini ratio Balangan merupakan yang terendah se Kalimantan Selatan, jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam RPJMD adalah berada pada angka 0,224 maka capaiannya adalah 102,68.

d. *Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Dengan Standar Nasional*

Gini Rasio Kalsel				
Kabupaten/Kota	2021	2022	2023	2024
Tanah Laut	0,232	0,263	0,259	0,257
Kotabaru	0,306	0,331	0,316	0,296
Banjar	0,344	0,300	0,297	0,258
Barito Kuala	0,284	0,289	0,312	0,272
Tapin	0,289	0,291	0,281	0,260
Hulu Sungai Selatan	0,275	0,260	0,293	0,288
Hulu Sungai Tengah	0,331	0,228	0,225	0,251
Hulu Sungai Utara	0,378	0,301	0,271	0,276
Tabalong	0,288	0,337	0,284	0,300
Tanah Bumbu	0,281	0,292	0,280	0,309
Balangan	0,277	0,266	0,258	0,218
Banjarmasin	0,350	0,330	0,370	0,347
Banjarbaru	0,361	0,341	0,321	0,300
Kalimantan Selatan	0,330	0,317	0,313	0,302

Gini Ratio merupakan derajat ketidakmerataan distribusi pengeluaran penduduk. Nilai Gini Ratio berada diantara nilai 0 dan 1.

- Nilai 0 menunjukkan ketimpangan pendapatan merata sempurna.
- Nilai 1, ketimpangan pendapatan timpang sempurna

Semakin tinggi gini ratio, artinya semakin tinggi ketimpangan. Pada tahun 2023 Balangan adalah kabupaten yang gini rasionya terendah ke-2 se-Provinsi Kalimantan Selatan. Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Gini Ratio Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 dapat di lihat pada data tabel disamping.

e. *Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan*

Dinamika angka gini ratio mengindikasikan adanya perubahan distribusi pengeluaran penduduk, Gini Rasio juga digunakan untuk melihat apakah pemerataan pengeluaran penduduk semakin baik atau buruk. Dibandingkan tahun 2022, gini ratio Kabupaten Balangan mengalami penurunan dari 0,2666 pada tahun 2022 menjadi 0,258 pada tahun 2023 dan pada tahun 2024 turun lagi menjadi 0,218. Hal ini mengindikasikan bahwa distribusi pengeluaran penduduk pada periode tersebut semakin membaik, dalam ketimpangan rendah. Dibandingkan dengan indeks gini ratio Propinsi Kalimantan Selatan, indeks gini ratio Kabupaten Balangan jauh lebih baik Dimana Kalimantan Selatan berada pada angka 0,302 pada tahun 2024.

Hal-hal yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja tahun 2023-2024 antara lain adalah mudahnya akses permodalan bagi pengusaha pemula, adanya bantuan sosial dari Pemerintah Pusat dan Daerah diantaranya bantuan uang tunai, per makanan, peralatan kerja, bedah rumah dan sebagainya, peningkatan pertumbuhan ekonomi khususnya pada sektor UMKM dan ekonomi kreatif serta pertanian yang menyerap banyak tenaga kerja, peningkatan IPM Kabupaten Balangan yang sudah masuk kategori tinggi diangka 72,97 (2023) dan 73,83 (2024) sehingga mampu menekan ketimpangan angka indeks gini yang semakin merata, semakin meningkatnya tenaga kerja yang berkualitas dan berorientasi pasar kerja dengan adanya pelatihan-pelatihan kerja oleh instansi terkait, pertumbuhan investasi daerah yang terus tumbuh.

Adapun solusi yang harus dilakukan kedepan mengatasi sejumlah hambatan terkait peningkatan jumlah penduduk dari tahun ke tahun yang belum dibarengi dengan peningkatan kualitas hidup secara optimal adalah melakukan pembinaan intensif arti penting hidup sehat dan produktif dan menghindari adanya booming jumlah penduduk dengan cara pengaturan jarak kehamilan dan lain-lain. Disamping itu pertumbuhan ekonomi yang cenderung fluktuatif karena kontribusi ekonomi daerah yang terbesar masih berada pada sektor pertambangan sehingga perlu adanya diversifikasi ekonomi dan mendorong kontribusi

yang lebih besar dari sektor pertanian, perdagangan, jasa dan pariwisata dalam rangka mengatasi ketergantungan terhadap sektor pertambangan.

Menurutnya ketimpangan pendapatan ini juga dikarenakan peran dari beberapa SKPD teknis yang bergerak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban dalam Peraturan Bupati :

1. Pemerintah Kabupaten Balangan juga melakukan upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif antara lain peningkatan lapangan kerja, meningkatkan keterampilan dan pendidikan masyarakat dapat membantu mereka mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan meningkatkan pendapatan. Peran ini dilakukan oleh Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Kabupaten Balangan juga telah melakukan peningkatan akses terhadap pendidikan dan kesehatan seperti program-program yang memastikan akses ke pendidikan berkualitas dan layanan kesehatan dapat mengurangi ketimpangan (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan Dinas Kesehatan)
3. Pemerintah Kabupaten juga memberikan perlindungan sosial, seperti bantuan tunai dan subsidi untuk kebutuhan dasar, dapat membantu meningkatkan taraf hidup populasi berpendapatan rendah.
4. Pemerintah Kabupaten Balangan bekerjasama dengan Bank Kalsel dan BPR dalam aspek layanan perbankan yang inklusif juga meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan, seperti pinjaman dan tabungan tanpa bunga melalui inovasi Babungas dan Bakabun, sehingga dapat memberi kesempatan bagi individu untuk memulai usaha atau berinvestasi dalam pendidikan.
5. Pemerintah Kabupaten Balangan bekerjasama dengan Adaro melalui konsep CSR telah melakukan program *microlending* yang mendukung usaha kecil dapat membantu mengurangi ketimpangan dengan menciptakan peluang bagi pengusaha kecil misalnya memberikan bantuan usaha dan pendampingan marketing hasil olahan.
6. Pemerintah Kabupaten Balangan juga telah melakukan pembangunan infrastruktur, seperti jalan, transportasi, dan teknologi informasi, dapat meningkatkan akses ke pasar dan peluang ekonomi bagi daerah yang kurang terpenuhi. Dan saat ini hampir seluruh desa sudah terjangkau internet.
7. Pemerintah Kabupaten Balangan juga menerapkan kebijakan pembangunan yang berbasis keadilan kebijakan yang memprioritaskan daerah tertinggal antara lain dengan program yang dirancang untuk membantu daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi dan ketimpangan pendapatan yang lebih besar sangat penting untuk mencapai kesetaraan melalui beberapa aplikasi inovasi antara lain (SIAP PD, dan Layar Sibalang GEN II.
8. Pemerintah Kabupaten Balangan juga mengajak semua *stakeholder* yang terlibat dan memberdayakan komunitas *pentahelix* yang tergabung dalam FEDEP (*Forum for Economic Development and Empowering People*) sehingga mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pengembangan kebijakan dapat menghasilkan hasil yang lebih adil. FEDEP bergerak pada fasilitasi kegiatan IKM dan rencana pembangunan industri di Kabupaten Balangan.
9. Pemerintah Kabupaten Balangan juga telah melakukan upaya perubahan dalam struktur ekonomi seperti diversifikasi ekonomi diluar sektor pertambangan. Mendorong diversifikasi dalam sektor ekonomi dapat menciptakan lebih banyak peluang dan mengurangi ketimpangan, misalnya, melalui pengembangan sektor industri dan pertanian. Terkait hal ini akan dituangkan dalam dokumen perencanaan RPJMD 2025-2029.
10. Pemerintah Kabupaten Balangan juga memperhatikan kesetaraan gender dalam kebijakan sosial dan ekonomi dapat meningkatkan pendapatan keluarga secara keseluruhan, mengurangi ketimpangan. Disamping itu juga adanya upaya meningkatkan kesadaran tentang pentingnya keadilan sosial dan pengurangan ketimpangan pendapatan dapat mendorong tindakan kolektif.
11. Kepala Daerah memiliki komitmen yang kuat dan jelas terhadap pengurangan ketimpangan dan implementasi kebijakan yang tepat dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan sumber daya publik membantu mencegah korupsi dan memastikan sumber daya digunakan untuk kepentingan masyarakat.

f. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Inovasi yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja Indeks Gini Ratio antara lain adalah sebagaimana data berikut :

IKU	Inovasi	Manfaat
Indeks Gini Rasio	Bindamku Bolang (Pembinaan dan Pendampingan Koperasi Secara Jemput Bola di Balangan)	Keunggulan/kebaharuan dari inovasi ini adalah Dinas akan lebih proaktif dalam memetakan permasalahan yang terjadi di koperasi di Balangan. Data yang diperoleh akan menjadi dasar untuk penyusunan kebijakan dan rencana kerja kedepan guna mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh koperasi di Kabupaten Balangan. Selain itu, melalui implementasi inovasi ini, koperasi yang mengalami kesulitan dalam penyusunan laporan keuangan akan mendapatkan pendampingan langsung dari Dinas.

Upaya percepatan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Balangan dalam rangka menuju pada timbangan yang rendah antara lain adalah melakukan pemantapan dan peningkatan terhadap nilai IPM Pemda Balangan, membuka kesempatan pelatihan yang luas melalui BLK, pertumbuhan investasi dan menemukan sumber investasi lain diluar pertambangan. Disamping itu juga melakukan penyusunan rencana tindak pengendalian atas beberapa uraian resiko strategis Pemerintah Daerah sebagaimana tabulasi data dibawah ini :

Sasaran Strategis	Uraian Resiko	Rencana Tindak Pengendalian
Menurunnya Ketimpangan Pendapatan	Meningkatnya Pengangguran	1. Peningkatan akses terhadap lapangan kerja formal. 2. Penyediaan tenaga kerja dengan talenta terampil dan berpengalaman antara lain melalui <i>up-skilling</i> dan <i>re-skilling</i> sesuai kebutuhan kegiatan ekonomi masa depan yang dikembangkan melalui skema <i>education to employment</i> . 3. Pengembangan kewirausahaan, koperasi yang berkualitas dan modern, dan UMKM yang produktif.
	Tidak Meratanya Pendidikan	Peningkatan akses pendidikan melalui beasiswa, kejar paket serta pembangunan sekolah di daerah terpencil.

g. Analisis Atas Program atau Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Capaian Kinerja Program Tahun 2024

No	Uraian Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Keuangan	% Realisasi Kinerja	Efektifitas Program
1.	Pengelolaan Pendidikan	117.524.112.800	100.359.246.362	85,39	127,73	Ya
2.	Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	165.705.719.700	143.001.465.464	86,30	100	Ya
3.	Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	23.974.668.200	23.076.924.610	96,26	135,73	Ya
4.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	23.318.050.000	19.157.148.025	82,16	101,62	Ya
5.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	32.171.292.200	24.682.473.842	76,72	98,85	Ya

No	Uraian Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Keuangan	% Realisasi Kinerja	Efektifitas Program
6.	Penyelenggaraan Jalan	248.931.396.600	194.061.801.069	77,96	92,66	Ya
7.	Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	41.017.418.328	40.526.566.526	98,80	182,4	Ya
8.	Penempatan Tenaga Kerja	1.092.719.700	1.014.157.245	92,81	70,10	Ya
9.	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	66.330.000	65.883.500	99,33	52,78	Ya
10.	Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	1.457.909.800	1.427.967.086	97,95	114,75	Ya
11.	Pengembangan UMKM	2.760.930.000	2.730.386.827	98,89	426,79	Ya
12.	Administrasi Pemerintahan Desa	16.721.392.000	14.398.183.992	86,11	100	Ya
13.	Pemberdayaan Sosial	7.785.258.400	7.562.103.589	97,13	96,65	Ya
14.	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	124.507.018.281	94.306.921.491	75,74	845,74	Ya
15.	Penyuluhan Pertanian	12.631.368.200	13.845.871.600	91,23	100	Ya
16.	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	689.944.100	666.504.275	96,60	100	Ya
17.	Perlindungan dan Jaminan Sosial	15.121.159.100	11.887.922.698	78,62	100	Ya
18.	Peningkatan Kualitas Keluarga	1.090.621.200	1.079.289.378	98,96	38,57	-
19.	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Universal Coverage Health	229.667.623.192	201.285.541.650	87,64	100	Ya
20.	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	12.218.112.608	11.771.572.147	96,35	104,61	Ya
21.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	13.419.728.200	12.574.029.355	93,70	48,4	Ya
22.	Rehabilitasi Sosial	3.062.286.500	2.216.323.405	72,37	100	Ya
23.	Penanganan Bencana	1.607.329.800	1.451.641.444	90,31	100	Ya
24.	Penanggulangan Bencana	13.933.888.460	12.782.196.024	92	93	Ya
25.	Perekonomian dan Pembangunan	4.705.464.400	3.442.809.438	73,18	100	Ya

Sumber Data Laporan SKPD dan Rekonsiliasi Data LKPJ Tahun 2024, data diolah

Berikut analisa program penunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian Sasaran Strategis Menurunnya Ketimpangan Pendapatan (Indikator Kinerja Indeks Gini Ratio):

No	Program	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Tindakanjutt
1.	Pengelolaan Pendidikan	Kesadaran Orang Tua dan Masyarakat tentang pentingnya pendidikan anak usia dini (PAUD), kualitas layanan pendidikan di lembaga PAUD, baik dalam hal kurikulum, metode pengajaran, serta kompetensi tenaga pendidik, adanya bantuan yang diberikan oleh pemerintah melalui BOP PAUD, penyediaan buku, media digital, dan materi pembelajaran yang berkualitas.	Masih ada peserta didik/penduduk usia 5-6 tahun yang bersekolah di kabupaten tetangga dan ikut orang tua bekerja di kabupaten lain, masih ada penduduk/orang tua yang belum memahami pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini, kurangnya minat baca peserta didik.	Melakukan pendataan penduduk desa/kecamatan yang masih belum 100%. Mengadakan sosialisasi kepada orang tua/penduduk ke Kecamatan/Desa yang masih belum 100%. Memberikan bantuan alat tulis dan gambar untuk peserta didik PAUD. Meningkatkan sarana prasarana PAUD. Peningkatan kebiasaan membaca melalui : Membaca secara rutin, Fasilitas akses bacaan seperti buku, majalah yang sesuai dengan berbagai tingkat usia dan minat, Mengadakan program membaca di sekolah atau komunitas yang melibatkan semua orang, dari anak-anak hingga orang dewasa. Ini bisa termasuk lomba baca atau kegiatan diskusi buku.

No	Program	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Tindaklanjut
2.	Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Dukungan dari Pimpinan Daerah dalam memajukan Pendidikan dan kualitas SDM Kabupaten Balangan, dukungan anggaran untuk kebutuhann penunjang SKPD	Tidak terealisasinya dana anggaran beasiswa dikarenakan peminat sebagian tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan program ini. Tidak terealisasinya dana hibah dikarenakan proses kelengkapan dokumen permohonan hibah yang lambat dipenuhi oleh pihak terkait. Tidak terlaksananya sebagian kegiatan meeting paket karena padatnya jadwal SKPD. Tidak terlaksananya kegiatan monitoring dalam kabupaten, sehingga honor tim monitoring tidak terbayar.	Perlunya pemberitahuan lebih jelas terkait syarat penerima beasiswa dan koordinasi lebih optimal dengan pihak terkait dalam mensosialisasikan program beasiswa kepada masyarakat khususnya pelajar. Perlunya pemberitahuan lebih jelas kepada pihak terkait mengenai kelengkapan dokumen hibah, dan kecepatan perbaikan berkas agar pencairan dapat tepat waktu. Melakukan koordinasi terkait penjadwalan kegiatan pada SKPD dan koordinasi kegiatan monitoring dalam kabupaten.
3.	Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Dukungan dari Pimpinan Daerah dalam penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Balangan.	Masih banyaknya RTLH di Kabupaten Balangan dan yang berada di bantaran Sungai.	Melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dalam Pengawasan dan Pelaksanaan Pembangunan.
4.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Masuk dalam standar pelayanan minimal.	Belum meratanya akses air minum bagi warga pedesaan dan perkotaan karena beberapa sebab diantaranya adanya perbedaan kondisi topografi kabupaten.	Perlu adanya koordinasi antara dinas teknis dengan aparat kecamatan dan desa mengenai data masyarakat yang MBR yang menerima bantuan air bersih dan penambahan akses air bersih berupa volume air bersih.
5.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Masuk dalam standar pelayanan minimal.	Belum meratanya akses air limbah bagi warga pedesaan dan perkotaan karena beberapa sebab diantaranya adanya perbedaan kondisi topografi kabupaten.	Perlu adanya koordinasi antara dinas teknis dengan aparat kecamatan dan desa mengenai data masyarakat MBR yang menerima bantuan sanitasi serta penambahan akses sanitasi baik volume maupun lahan untuk akses sanitasi.
6.	Penyelenggaraan Jalan	Masuk dalam program prioritas atau visi dan misi Bapak Bupati.	Masalah pembebasan lahan yang kadang sulit di realisasikan di lapangan.	Melakukan koordinasi lebih intensif dengan berbagai pihak yang terlibat.
7.	Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Didukung anggaran yang cukup besar untuk membiayai kegiatan. SDM yang mumpuni dalam melaksanakan kegiatan. Minat masyarakat yang tinggi untuk mengikuti beberapa kegiatan peningkatan SDM berupa pelatihan berbasis kompetensi terlebih khusus kejuruan las. Adanya kerjasama yang dijalin dengan PT Dian pandu ,untuk menampung beberapa lulusan alumni BLK khusus kejuruan las yang lulus syarat dan ketentuan.	Kurangnya minat masyarakat dibebberapa kejuruan yang disediakan oleh BLK Balangan. Keterbatasan jumlah SDM ASN di BLK Balangan. Peserta yang kurang termotifasi atau tidak memiliki pemahaman dasar yang di perlukan.	Mensosialisasikan kegiatan yang kurang diminati masyarakat seperti manfaat ikut pelatihan tersebut dll. Menyesuaikan materi pelatihan dengan kebutuhan dan minat masyarakat lokal. Melibatkan tokoh masyarakat atau organisasi setempat untuk membangun kepercayaan dan ketertarikan. Melakukan survei untuk memahami kebutuhan masyarakat dan perbaiki program pelatihan berdasarkan masukan tersebut. Mengusulkan tambahan staf tu di BLK Balangan. Lebih banyak melakukan kerjasama dengan pihak-pihak yang bergerak dibidang kejuruan yang dilatihkan
8.	Penempatan Tenaga Kerja	Perusahaan untuk menyediakan kebutuhan kerja. Ketersediaan sumber daya: anggaran, fasilitas yang	Minimnya ketersediaan tenaga kerja yang memenuhi kualifikasi atas kebutuhan tenaga kerja yang dibutuhkan perusahaan sehingga	Melakukan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Calon Pencari Kerja. Melakukan sosialisasi peraturan pelayanan perantaraan kerja dan kewajiban pencari kerja. Koordinasi dan

No	Program	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Tindaklanjut
		memadai untuk Informasi Pasar Kerja, pencari kerja yang kompeten dan terampil.	menyebabkan tidak terserapnya tenaga kerja. Kurangnya keaktifan pencari kerja untuk melaporkan penempatan kerjanya.	konsultasi ke perusahaan untuk melaporkan penempatan diperusahaannya.
9.	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Program pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh dinas berjalan dengan baik. Penugasan SDM koperasi untuk mengikuti diklat di Balatkop Provinsi Kalimantan Selatan. Adanya sinergi antara dinas dan instansi lain dalam pelatihan koperasi.	Tidak semua koperasi mengirimkan SDM-nya untuk mengikuti pelatihan. Keterbatasan anggaran yang menghambat skala pelaksanaan program pelatihan lebih luas.	Menyelenggarakan lebih banyak pelatihan di tingkat lokal untuk menjangkau koperasi yang belum terlibat. Melakukan evaluasi efektivitas pelatihan dan dampaknya terhadap kinerja koperasi. Melanjutkan dan meningkatkan kerja sama dengan Balatkop Prov. Kalsel dan institusi pendidikan lainnya untuk mengadakan program pelatihan yang lebih terintegrasi.
10.	Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Didukung anggaran yang cukup besar untuk membiayai kegiatan, SDM yang mumpuni dalam melaksanakan kegiatan. Minat masyarakat yang tinggi untuk mengikuti beberapa kegiatan peningkatan SDM berupa pelatihan berbasis kompetensi terlebih khusus kejuruan las. Adanya kerjasama yang dijalin dengan PT. Dian Pandu untuk menampung beberapa lulusan alumni BLK khusus kejuruan las yang lulus syarat dan ketentuan.	Kurangnya minat masyarakat dibebepa kejuruan yang disediakan oleh BLK Balangan. Keterbatasan jumlah SDM ASN di BLK Balangan. Peserta yang kurang termotifasi atau tidak memiliki pemahaman dasar yang di perlukan.	Memberikan fasilitasi bantuan sarana prasarana bagi pelaku UMKM sesuai dengan usaha yang dijalankan.
11.	Pengembangan UMKM	Perhatian dari Pemerintah Daerah dengan adanya anggaran yang diberikan untuk menunjang pelaksanaan pelatihan dan fasilitasi bantuan sarana dan prasarana penunjang usaha bagi pelaku UMKM. Pelaku UMKM di Balangan masih banyak yang perlu diberikan fasilitasi pelatihan untuk meningkatkan SDM sehingga perlu dilaksanakan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan pelaku UMKM.	Tidak semua pelaku UMKM yang dapat terfasilitasi baik berupa pelatihan maupun bantuan sarana prasarana karena jumlah UMKM yang cukup banyak dibandingkan dengan fasilitasi yang bisa dilaksanakan.	Lebih meningkatkan pelaksanaan pelatihan bagi pelaku UMKM yang belum pernah mengikuti pelatihan dan pelatihan dengan materi yang berbeda dari pelatihan sebelumnya.
12.	Administrasi Pemerintahan Desa	Sudah ada regulasi yang mengatur sehingga desa di tuntut untuk tepat waktu.	Belum optimalnya kapasitas SDM perangkat desa.	Peningkatan Kapasitas SDM.
13.	Pemberdayaan Sosial	-	-	-

No	Program	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Tindaklanjut
14.	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Ada tambahan jumlah kelahiran dan pengadaan semen beku. Adanya tambahan petugas Inseminator sebanyak 4 orang yang berada di Kecamatan Batumandi sebanyak 1 orang dan 1 orang di Kecamatan Tebing Tinggi serta 2 orang dari Dinas. Adanya penganggaran untuk saprodi pertanian seperti Herbisida, NPK, PHC, Pestisida baik hibah maupun barang persediaan. Tingginya minat petani untuk meningkatkan pendapatan melalui berkebun hortikultura.	Tidak terealisasinya pengadaan bibit ternak pada DPA Bidang Peternakan. Kurangnya ketersediaan N2 cair dikarenakan belum adanya tempat penyimpanan khusus N2 sehingga menyebabkan susutnya N2 tersebut dikarenakan penguapan. Keterlambatan dalam penyaluran barang. Masih ada beberapa petani yang belum mendapatkan bantuan karena anggaran tidak mencukupi.	Mempercepat realisasi pengadaan bibit ternak pada awal tahun. Perlu dibangunnya tempat khusus penyimpanan N2 untuk mengurangi resiko penguapan. Menyampaikan kepada penyedia untuk mendistribusikan sesuai dengan surat pesanan. Meminta anggaran tambahan kepada Pemerintah Daerah untuk mencukupi permohonan petani.
15.	Penyuluhan Pertanian	Keberhasilan penyuluhan pertanian tidak lepas dari ketersediaan tenaga penyuluh baik secara kuantitas maupun kualitas. Sejak Tahun 2023 dilaksanakan program Bupati Balangan yaitu 1 (satu) Desa 1 (satu) orang Penyuluh untuk pendamping pertanian di Desa, yang dulunya hanya 1 (satu) Penyuluh 1 (satu) Wilayah Binaan (wilbin). Wilayah Binaan terdiri dari beberapa desa antara 2-5 Desa dengan jumlah kelompk Tani 10-25 Kelompok Tani. Besarnya dukungan pemerintah terhadap operasional penyuluhan. Pada Tahun 2024 telah di serahkan kepada penyuluh pertanian lapangan kendaraan roda 2 sebagai operasional penyuluh sebanyak 78 unit yang disebar untuk 8 Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan. Difasilitasinya penyuluh pertanian dilapangan dengan alat mesin pertanian (Alsintan) antara lain handsprayer, cultivator, handtraktor dan alat pengukur pH tanah sebagai sarana penyuluh	Tingkat Pendidikan penyuluh belum sesuai dengan spesifikasi kebutuhan teknis untuk pertanian di lapangan, yang sebagian hanya lulusan SMA sederajat, sehingga peran penting penyuluh sebagai penyedia dan penyebaran informasi teknologi yang dilakukan oleh penyuluh pertanian belum optimal yang disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan keterampilan tenaga penyuluh pertanian di lapangan dalam hal penguasaan teknologi informasi, sehingga mempengaruhi kemampuan dalam mengakses informasi. Hal ini ditandai dengan minimnya informasi teknologi pertanian yang diberikan penyuluh pertanian kepada petani. Penggunaan metode penyuluhan maupun media penyuluhan yang digunakan penyuluh pertanian juga masih terbatas. Peran penyuluh pertanian untuk memfasilitasi penumbuhan dan pengembangan kelompok tani/gapoktan masih belum optimal. Belum optimalnya kinerja penyuluh pertanian dalam memberikan motivasi kepada petani untuk melaksanakan kegiatan usaha tani.	Perlu meningkatkan secara berkesinambungan kinerja penyuluh pertanian melalui peningkatan kapasitas penyuluh pertanian berupa kompetensi komunikasi, komunikasi andragogi, pengembangan kelompok sosial, kebijakan penyuluhan pertanian, struktur organisasi dan pengembangan inovasi tepat guna. Tindakan tersebut diimplementasikan dalam rangka merubah perilaku penyuluh pertanian dan petani kearah yang lebih baik. Pengembangan kapasitas kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yg ditunjang dengan biaya operasional dan sarana prasarana untuk mendukung penyuluhan pertanian. Peningkatan kelas Kelompok Tani yang di fasilitasi oleh penyuluh pertanian.

No	Program	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Tindaklanjut
		melaksanakan demonstrasi cara pertanian modern. Ketersediaan sarana dan prasarana serta informasi yang cukup berpengaruh terhadap kinerja penyuluh dalam hal penyampaian teknologi informasi dan inovasi. Dilaksanakannya Bimbingan Teknis bagi penyuluh pertanian se Kabupaten Balangan.		
16.	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Pelatihan diversifikasi olahan hasil perikanan. Pemberian bantuan alat-alat pengolahan. Pengembangan wawasan (demo memasak).	Keterbatasan modal dan bahan baku untuk menciptakan produk olahan baru.	Menganggarkan kegiatan sosialisasi mengenai permodalan usaha.
17.	Perlindungan dan Jaminan Sosial	Adanya usulan masyarakat untuk membutuhkan, adanya updating data DTKS.	Ketidaksiapan pihak ke-3 dalam mempercepat realisasi bantuan (BLT APBD), dan survey lokasi yang memakan waktu dalam pemberian intervensi lainnya.	MoU dengan pihak ke-3 untuk memitigasi overload penyaluran bantuan non tunai.
18.	Peningkatan Kualitas Keluarga	Komitmen Pemerintah Daerah berupa anggaran kegiatan untuk menunjang program peningkatan kualitas keluarga.	Perlunya peningkatan peran dan kerjasama lintas sektor dan masyarakat dalam upaya pencegahan perkawinan usia anak, penyediaan data riil tentang perkawinan anak terutama yang nikah tidak secara resmi dan peningkatan sarana prasarana layanan Puspaga dalam upaya perlindungan anak dan peningkatan kualitas keluarga	Perlunya meningkatkan advokasi dan koordinasi lintas program dan lintas sektor.
19.	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Universal Coverage Health	Realisasi capaian melebihi target, upaya untuk menekan dampak tersebut, <i>skrining</i> pada ibu hamil, kelas ibu hamil, pendampingan Tim Ahli baik Spesialis Obgyn, maupun spesialis Penyakit Dalam. Peningkatan kapasitas dokter dan bidan, ambulan desa di setiap desa. Realisasi melebihi target, pendampingan ibu hamil oleh bidan dan dokter spesialis Obgyn dan Penyakit Dalam, ketersediaan anggaran yang sangat memadai, dukungan dari legislatif untuk perbaikan kualitas pelayanan kesehatan, dukungan	Pengetahuan masyarakat dan ibu hamil tentang risiko pada ibu hamil, kapasitas bidan dalam deteksi risiko pada ibu hamil, peran serta masyarakat. Masih ada kawin muda, belum semua ibu hamil diperiksa darah lengkap dan uren lengkap di puskesmas, tidak ada SDM dalam bidang konstruksi seperti teknik sipil/arsitektur/rancang bangun, keterbatasan lahan eksisting untuk pengembangan fasyankes. Adanya penyakit penyerta, tidak semua balita menyukai menu PMT Lokal yang di sajikan. Inisiasi masyarakat masih kurang untuk melakukan pemeriksaan/deteksi dini faktor risiko terhadap penyakit menular maupun menular seperti, Hipertensi, Diabetes, TBC, HIV. Masih terdapat adanya keluarga yang kurang	Kelas ibu hamil peningkatan kapasitas dokter dan bidan dalam deteksi risiko pada ibu hamil, pemberdayaan masyarakat melalui Tokoh Agama dan Masyarakat. Kerja sama dengan lintas sektor untuk peningkatan usia perkawinan, Kelas ibu hamil peningkatan kapasitas dokter dan bidan dalam deteksi risiko pada ibu hamil, pemberdayaan masyarakat melalui Tokoh Agama dan Masyarakat. Pengusulan formasi ASN dengan spesifikasi S1 Teknik Sipil / Arsitektur / Rancang Bangun untuk penempatan di Dinas Kesehatan. Konsultasi ke Dokter umum serta melakukan rujukan untuk balita dengan penyakit penyerta, menyajikan PMT lokal dengan menu bervariasi. Meningkatkan upaya promosi kesehatan dalam rangka memberikan pemahaman terhadap masyarakat akan pentingnya deteksi dini penyakit menular maupun tidak menular (HT, Diabetes, TBC, HIV maupun kesehatan Jiwa). Penguatan dukungan keluarga terhadap

No	Program	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Tindaklanjut
		pemerintah desa dalam pembangunan dan rehab sarana fasyankes. Presentasi Wasting, upaya untuk menekan angka tersebut dengan deteksi awal pada balita <i>wealfetering</i> dan pemberian makanan tambahan pangan lokal untuk balita gizi kurang dan BB kurang. Tersedianya regulasi dan kebijakan dalam rangka penyusunan perencanaan dan penaganggaran yang sehingga dapat terarah, tepat sasaran, efisien dan efektif. Tersedianya SDM yang cukup dalam rangka pemenuhan mutu pelayanan dasar. Tersedianya fasilitas dan barang/bahan yang mendukung penyelenggaraan pelayanan dasar yang memenuhi standar, kualitas serta mutu barang itu sendiri. Terselenggaranya sistem monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala dan berjenjang oleh Tim Penerapan SPM baik dari Tim Dinas Kesehatan maupun Tim dari Sekretariat Daerah Bagian Tata Pemerintahan. Adanya dukungan serta komitmen penuh oleh Pemerintah Pusat, Daerah maupun swasta, LSM serta Masyarakat dalam penerapan SPM.	mendukung terhadap pasien pengobatan pasien ODGJ, Menurunnya keinginan masyarakat untuk melakukan kontrol tekanan darah ke Posbindu dengan alasan tidak ada pelayanan pengobatan. Masih kurangnya kader terlatih yang terlibat dalam memberikan pelayanan dasar. Posbindu PTM masih ada yang belum terbentuk di setiap Desa. Upaya deteksi dini pada pelayanan dasar seperti pada kelompok berisiko penyakit, HT, Diabetes, TBC maupun HIV lebih banyak bersifat aktif.	pasien ODGJ dengan mempercayakan keluarga sebagai pengawas minum obat. Mengupayakan pembentukan posbindu PTM di setiap Desa. Menyediakan fasilitas dan barang dalam pemberian pelayanan dasar yang memenuhi kualitas dan mutu. Meningkatkan kapasitas petugas kesehatan maupun kader dalam memberikan pelayanan dasar. Melakukan monitoring dan evaluasi dalam penyelenggaraan pelayanan dasar secara berkala. Penguatan koordinasi dan integrasi dalam penyelenggaraan standar pelayanan minimal pada penerima layanan.
20.	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Semakin tinggi nya skor PPH konsumsi, maka semakin beragam dan seimbang konsumsi pangan masyarakat, nilai tersebut menunjukkan kualitas konsumsi pangan penduduk. Untuk mendukung hal tersebut melalui kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal, antara lain sosialisasi konsumsi pangan	Promosi peningkatan konsumsi pangan harus terus dilakukan untuk peningkatan wawasan masyarakat untuk mempertahankan kualitas konsumsi pangan. Pemantauan ketersediaan seluruh bahan pangan harus terjaga sesuai minimal sesuai kebutuhan masyarakat.	Memperkuat advokasi edukasi dan sosialisasi diversifikasi pangan untuk mencapai pola konsumsi pangan bergizi seimbang dan aman (B2SA). Melaksanakan pertemuan, sosialisasi dan pelatihan pengembangan pangan lokal. Perkuat koordinasi untuk peningkatan ketersediaan dan akses fisik terhadap pangan ke setiap rumah tangga dan individu dalam keluarga.

No	Program	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Tindaklanjut
		beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA), kepada ibu - ibu PKK Kecamatan se Kabupaten Balangan serta kader pangan, kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada pelajar dari tingkat SD hingga SMA melalui kegiatan B2SA Goes to School, sehingga pola konsumsi pangan B2SA diharapkan dapat di terapkan sejak dini dimulai dari tingkat keluarga. Tercapainya skor PPH ketersediaan karena ada beberapa kelompok bahan pangan (padi-padian, gula, minyak dan lemak) sudah mencapai skor maksimal PPH ketersediaan.		
21.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Keterlibatan SKPD atau instansi terkait dalam pemberdayaan masyarakat adat.	Legalitas terhadap kelembagaan adat dan belum maksimalnya peran OPD	Memberikan sosialisasi dan Bimbingan Teknis
22.	Rehabilitasi Sosial	-	-	-
23.	Penanganan Bencana	Adanya koordinasi yang baik dengan OPD yang berkaitan dengan penanganan bencana.	-	-
24.	Penanggulangan Bencana	Kegiatan mitigasi bencana melalui sosialisasi, simulasi, komunikasi, informasi dan edukasi telah terlaksanana dengan ketersediaan anggaran dan SDM Narasumber yang telah disiapkan.	Tidak ditemukan hambatan yang signifikan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut karena partisipasi masyarakat yang menjadi sasaran kegiatan tersebut sangat positif.	-
25.	Perekonomian dan Pembangunan	Adanya anggaran untuk kebutuhan penunjang SKPD	1. Kegiatan Sosialisasi BLUD tidak terlaksana karena terkendala tidak adanya panjer uang honor Nara sumber dan paket meeting. 2. Penjadwalan rekrutmen direktur Utama PT. BPR Sanggam Balangan yang diundur sampai Januari 2025, sehingga paket meeting dan honor Narasumber pada kegiatan ini tidak dapat terealisasi. 3. Tidak adanya undangan untuk melaksanakan kegiatan pameran, sehingga anggaran sarana dan dekorasi tidak terealisasi .	Melakukan koordinasi terkait penjadwalan kegiatan, dan aktif dalam koordinasi antar dinas dalam mendapatkan informasi kegiatan pameran baik dalam daerah maupun luar daerah.

7. Sasaran Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka

Tabel 3.8
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 7
Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka

No	Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2023	Kinerja 2024			Target Akhir RPJMD	Capaian Terhadap Akhir RPJMD	Realisasi / Capaian Terhadap Kab / Kota	Realisasi / Capaian Terhadap RPJMD Provinsi	Realisasi / Capaian Terhadap RPJMN
			Target	Realisasi	Capaian					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2
11.	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,70	2,37	2,69	86,50	2,30	83,04	-	-	-

Sumber Data Pemerintah Kabupaten Balangan Tahun 2024, data diolah

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2024 adalah 2,69 dengan persentase capaian kinerja 86,50 persen. Berdasarkan realisasi tahun 2024 target kinerja penurunan tingkat pengangguran terbuka belum tercapai sesuai target yaitu 2,37.

Jumlah penduduk kabupaten balangan adalah sebagai berikut :

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tanah Laut	352,47	356,76	360,93	364,98	368,91
Kotabaru	329,56	334,34	339,06	343,68	348,25
Banjar	572,86	582,25	591,51	600,64	609,64
Barito Kuala	316,69	321,51	326,28	330,99	335,65
Tapin	191,51	194,02	196,47	198,87	201,20
HSS	230,28	233,15	235,98	238,78	241,53
HST	260,91	263,58	266,20	268,75	271,23
HSU	229,10	231,85	234,51	237,11	239,64
Tabalong	256,20	259,84	263,40	266,89	270,30
Tanah Bumbu	326,89	332,18	337,33	342,36	347,26
Balangan	132,01	134,08	136,12	138,12	140,09
Banjarmasin	661,07	663,87	666,44	668,76	670,84
Banjarbaru	257,37	262,74	268,11	273,47	278,80
Kalimantan Selatan	4.116,89	4.170,17	4.222,33	4.273,40	4.323,33

Sumber/Source: Badan Pusat Statistik, Proyeksi Penduduk Indonesia 2020–2050 Hasil Sensus Penduduk 2020 (Pertengahan tahun/ Juni)/ BPS–Statistics Indonesia, 2020–2050 Indonesia population projection result of 2020 Population Census (mid year/ June)

Jumlah penduduk dan angka pengangguran saling terkait melalui kompleksitas dinamika pasar kerja, pertumbuhan ekonomi, dan faktor sosial lainnya. Menjaga keseimbangan antara pertumbuhan penduduk dan penciptaan lapangan kerja adalah kunci untuk mengurangi angka pengangguran. Kebijakan yang berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, cinta terhadap inovasi dan investasi, serta penciptaan lingkungan bisnis yang kondusif perlu diterapkan untuk mengelola hubungan ini dengan baik.

Hubungan antara jumlah penduduk dengan angka pengangguran adalah kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Jika jumlah penduduk meningkat, angkatan kerja pun cenderung meningkat, sehingga lebih banyak individu yang mencari pekerjaan. Jika pertumbuhan lapangan kerja tidak sebanding dengan pertumbuhan angkatan kerja, angka pengangguran dapat meningkat. Peningkatan jumlah penduduk yang memasuki usia kerja dapat menyebabkan lonjakan dalam jumlah pencari kerja. Dalam kondisi dimana jumlah pekerjaan yang tersedia tidak cukup, ini dapat meningkatkan angka pengangguran. Jumlah penduduk yang besar tidak selalu berarti bahwa ada cukup lapangan kerja untuk menampung semua individu yang ingin bekerja. Ketidakcocokan antara ketersediaan pekerjaan dan jumlah pekerja yang mencarinya bisa menyebabkan pengangguran. Jika perekonomian tumbuh dan lapangan kerja baru diciptakan dengan cukup cepat untuk menyerap tambahan angkatan kerja, angka pengangguran bisa tetap rendah meskipun jumlah penduduk meningkat. Jumlah penduduk dengan keterampilan dan pendidikan yang lebih tinggi dapat meningkatkan kemungkinan mereka untuk mendapatkan pekerjaan, meskipun angkatan kerja meningkat. Jika lebih banyak orang memiliki

keterampilan yang dibutuhkan di pasar kerja, ini dapat membantu mengurangi angka pengangguran. Sebaliknya, jika jumlah penduduk tidak memiliki keterampilan yang diperlukan untuk pekerjaan yang tersedia, maka meskipun jumlah lapangan kerja ada, angka pengangguran tetap tinggi. Struktur demografi penduduk, termasuk proporsi orang muda dan tua, dapat mempengaruhi angka pengangguran. Populasi yang lebih muda cenderung memiliki tingkat pengangguran yang lebih tinggi, terutama di negara-negara dengan banyak lulusan baru yang memasuki pasar kerja. Migrasi internal dan internasional juga dapat mempengaruhi dinamika angka pengangguran, karena penduduk yang pindah ke daerah dengan lebih banyak peluang pekerjaan dapat mengurangi tekanan pada pasar kerja di daerah asal. Kebijakan pemerintah yang efektif dalam menciptakan lapangan kerja, pelatihan keterampilan, dan pendidikan dapat membantu menyerap jumlah penduduk yang terus meningkat dalam angkatan kerja. Dukungan usaha kecil dan menengah juga dapat menciptakan lebih banyak peluang pekerjaan, yang sangat penting dalam konteks pertumbuhan populasi. Dalam situasi tertentu, seperti krisis ekonomi, angka pengangguran dapat meningkat meskipun jumlah penduduk tidak tumbuh pesat karena perusahaan mengurangi tenaga kerja atau menutup usaha. Stabilitas ekonomi yang baik dapat mendukung penciptaan lapangan kerja, sedangkan ketidakstabilan dapat menyebabkan pengangguran yang tinggi.

Berdasarkan analisa diatas realisasi pengangguran terbuka di Kabupaten Balangan 2,69 yang hanya bergeser sedikit dari tahun sebelumnya yakni 2,70 haruslah menjadikan isu strategis diatas sebagai bahan perbaikan perumusan kebijakan ke depan meskipun saat ini ada beberapa program yang memang sudah dilakukan dan masih bisa dilanjutkan di Kabupaten Balangan. Peran semua stakeholder harus seimbang dan masing masing memberikan kontribusi. Output pada satu unit akan menjadi input pada unit yang lainnya.

b. *Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Tahun 2023 dan 2022.*

Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Balangan tahun 2023 adalah 2,70 persen, artinya 2 hingga 3 dari 100 orang angkatan kerja di Kabupaten Balangan termasuk kategori pengangguran. Angka ini menunjukkan penurunan bila dibandingkan tahun 2022 lalu yang berkisar di 3,98 persen.

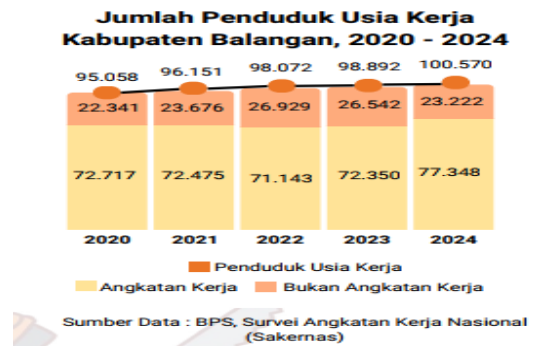
c. *Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun ini Dengan Target Jangka Menengah Dalam RPJMD*

Realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam RPJMD adalah berada pada angka target 2,30 dengan capaian 83,04 persen. Berdasarkan data tersebut Tingkat Pengangguran Terbuka masih kurang 0,39 poin untuk mencapai target 2,30.

Jumlah penduduk usia kerja (penduduk usia 15 tahun keatas) di Kabupaten Balangan Tahun 2024 sebanyak 100.570 jiwa dimana yang termasuk dalam kategori angkatan kerja yaitu sebesar 77.348 jiwa dan bukan angkatan kerja sebanyak 23.222 jiwa. Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran, sedangkan Bukan Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi.



Jika dilihat dari beberapa tahun sebelumnya hingga tahun 2024, penduduk usia kerja Kabupaten Balangan selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2024, jumlah penduduk angkatan kerja di Kabupaten Balangan sebanyak 100.570 jiwa, mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2023 sebesar 98.892 jiwa yang juga mengalami peningkatan dari tahun 2022 dengan jumlah sebesar 98.072 jiwa.



d. *Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Dengan Standar Nasional*



Pada tahun 2024 nilai Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Balangan selama 2 tahun terakhir mengalami peningkatan. Pada tahun 2024, nilai TPAK Kabupaten Balangan adalah sebesar 76,91 persen mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2023 dengan nilai sebesar 73,16 persen. Artinya persentase jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja mengalami peningkatan.

Sementara itu, besarnya nilai Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) selama dua tahun terakhir mengalami penurunan. Pada tahun 2024, nilai TPT Kabupaten Balangan adalah sebesar 2,69 persen, mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023 sebesar 2,70 persen yang sempat mengalami penurunan signifikan dari tahun 2022 dengan nilai sebesar 3,98 persen.

e. *Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan*

Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja angka pengangguran terbuka adalah :

1. Dilihat dari jumlah penduduk angkatan kerja mengalami kenaikan yang semula pada tahun 2022 sebanyak 71.143 orang menjadi 72.350 orang pada tahun 2023 mengalami peningkatan 1.207 orang. Peningkatan jumlah angkatan kerja sejalan dengan jumlah penduduk usia kerja yang terus naik. Meningkatnya angkatan kerja ini akibat beralihnya bukan angkatan kerja menjadi angkatan kerja ini terlihat dengan menurunnya jumlah bukan angkatan kerja yang semula pada tahun 2022 sebanyak 26.929 orang menjadi 26.542 orang pada tahun 2023. Hal ini merupakan indikasi pada akses pekerjaan penduduk khususnya perempuan yang pada awalnya tidak bekerja menjadi bekerja, akibat kondisi ekonomi yang kian membaik dan pandemi yang telah berakhir.
2. Meningkatnya kesempatan bagi para pencari kerja, ini dapat dilihat dari jumlah lowongan kerja yang tersedia baik melalui kegiatan bursa kerja online ataupun lowongan yang dilaporkan perusahaan pemberi kerja serta lowongan PPPK dan tenaga kontrak di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan tahun 2023.
3. Jumlah laporan penempatan tenaga kerja di sektor swasta yang terdaftar pada bursa kerja atau informasi pasar kerja sebanyak 1.056 orang.

4. Meningkatnya kualitas pencari kerja yang memiliki pendidikan dan keterampilan sehingga mampu untuk bersaing di dunia kerja ataupun berusaha mandiri dengan keterampilan yang telah dimiliki.
5. Tersedianya LPK swasta yang berkualitas dan melaksanakan pelatihan kerja sesuai kebutuhan dunia kerja.
6. Adanya MoU antara Pemkab Balangan dengan tiga perusahaan yaitu PT. Vista Utama, PT. Jelasena Cakra Perkasa dan PT. Dian Pandu Pratama Tabalong dalam perekrutan pekerja hasil dari program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja pada Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja.
7. Kebijakan padat karya pada setiap proyek pekerjaan di desa-desa yang melibatkan masyarakat setempat yang mengakibatkan serapan tenaga kerja tinggi.
8. Selain itu juga warga masyarakat Balangan banyak menggeluti pekerjaan pada sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan usaha kecil dan menengah serta pertambangan.
9. Berkembangnya teknologi dan informasi yang bisa dimanfaatkan dalam mempermudah penjualan dan pemasaran produk dan menciptakan peluang kerja baru.

Adapun masalah yang masih dihadapi sampai saat ini adalah :

- a. Masih adanya kualitas tenaga kerja yang tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.
- b. Masih banyaknya ibu rumah tangga yang bekerja sebagai pekerja keluarga tidak dibayar.
- c. Belum maksimalnya peran bursa kerja khusus dalam menyalurkan atau menyampaikan informasi pasar kerja.
- d. Mayoritas tenaga kerja enggan ataupun tidak berani untuk berwirausaha mandiri.
- e. *Mindset* pekerja lokal masih belum siap bila ditempatkan jauh dari domisili.
- f. Masih belum maksimalnya peran perusahaan penyalur tenaga kerja atau lembaga penempatan tenaga kerja swasta di Kabupaten Balangan sehingga mengurangi kesempatan pekerja lokal.
- g. Potensi pekerjaan non formal sektor jasa kurang dilirik oleh angkatan kerja misalnya *barbershop*.
- h. Para pencari kerja yang mempunyai kartu pencari kerja yang tidak melaporkan setelah mendapatkan pekerjaan.

Adapun upaya yang dilakukan untuk menghadapi masalah dan/atau meminimalisir permasalahan diatas adalah :

- a. Pendidikan dan Pelatihan antara lain pendidikan formal dengan cara meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, terutama di daerah yang kurang terlayani. Dan juga mengadakan pelatihan kejuruan dengan cara menyediakan kursus keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja, baik secara formal maupun non-formal.
- b. Program magang yakni kerjasama antara perusahaan dan institusi pendidikan untuk memberikan pengalaman kerja kepada siswa.
- c. Penciptaan Lapangan Kerja dengan cara mendorong investasi, memfasilitasi investasi dalam sektor-sektor yang berpotensi menciptakan lapangan kerja, seperti industri kreatif, teknologi informasi, dan sektor hijau.
- d. Dukungan kepada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dengan cara memberikan bantuan modal, pelatihan manajemen, dan akses pasar untuk mengembangkan UKM.
- e. Promosi kewirausahaan yakni menyediakan program pendampingan bagi calon wirausahawan, termasuk pelatihan dan akses ke pembiayaan.
- f. Kebijakan Tenaga Kerja seperti menerapkan kebijakan yang mendukung penciptaan pekerjaan, seperti perlindungan pekerja, pengupahan yang adil, dan kondisi kerja yang baik.
- g. Sistem Jaminan Sosial yakni memperkuat jaminan sosial untuk pekerja yang terancam pengangguran, termasuk program tunjangan pengangguran atau pelatihan kembali.
- h. Pembangunan Infrastruktur seperti investasi dalam infrastruktur untuk mendukung aktivitas ekonomi dan mempercepat pertumbuhan di daerah-daerah yang kurang berkembang.

- i. Kolaborasi dengan sektor swasta dengan cara mendorong kolaborasi antara pemerintah, pendidikan, dan sektor swasta untuk memahami kebutuhan keterampilan yang diperlukan di industri.
- j. Program CSR untuk mendorong perusahaan untuk memberdayakan masyarakat melalui program tanggung jawab sosial perusahaan yang fokus pada pelatihan dan pemberdayaan.
- k. Portal Informasi Karir dengan cara membangun *platform* yang menyediakan informasi tentang lowongan pekerjaan, pelatihan yang tersedia, dan perkembangan industri.

Hal yang perlu dicermati kedepannya adalah bagaimana agar penurunan angka pengangguran terbuka di Kabupaten Balangan dapat mencapai angka yang cukup signifikan dan menunjukkan tanda positif karena jika dibandingkan angka pengangguran terbuka, Pemerintah Kabupaten Balangan telah berhasil menurunkan pada angka 2,44 pada tahun 2021. Hal yang harus diantisipasi adalah sebagai berikut :

- a. Jika pertumbuhan ekonomi suatu negara atau daerah tidak cukup kuat, maka penciptaan lapangan kerja baru pun terbatas, sehingga angka pengangguran tidak turun signifikan. Ini harus menjadi perhatian dalam penyusunan dokumen perencanaan RPJMD 2025-2029.
- b. Peristiwa seperti resesi atau krisis finansial dapat mempengaruhi investasi dan konsumsi, yang langsung berdampak pada penciptaan lapangan kerja. Krisis finansial terjadi pada masa covid-19 yang lewat untuk itu Pemerintah Kabupaten harus siaga menghadapi krisis kesehatan atau pun sektor lainnya yang melanda dunia.
- c. Terkadang, ada ketidakcocokan antara keterampilan yang dimiliki oleh pencari kerja dan keterampilan yang dibutuhkan oleh industri. Hal ini dapat membuat sulit bagi individu untuk mendapatkan pekerjaan meskipun ada lapangan kerja yang tersedia. Hal ini harus menjadi perhatian SKPD teknis dalam menyusun kinerja yang diharapkan.
- d. Kurangnya akses atau kualitas pendidikan dan pelatihan yang baik dapat menghambat kemampuan individu untuk bersaing di pasar kerja. Untuk itu seluruh program dan kegiatan terkait peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan harus dilakukan *monev* atau *feedback* berdasarkan laporan kegiatan atau LKIP SKPD tahun sebelumnya
- e. Jika jumlah penduduk yang memasuki angkatan kerja lebih cepat dibandingkan dengan jumlah lapangan kerja yang diciptakan, angka pengangguran dapat tetap tinggi meskipun ada upaya untuk menurunkannya. Untuk itu peran dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil harus bisa melakukan rekonsiliasi data mobilitas penduduk dengan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Tenaga Kerja secara berkala.
- f. Migrasi dari desa ke kota untuk mencari pekerjaan dapat meningkatkan angka pengangguran sementara di kota-kota, terutama jika sistem perkotaan tidak siap untuk menampung arus migrasi tersebut. Seluruh kebijakan terkait kependudukan, migrasi dan lain-lain agar perlu dilakukan pemantauan ke depannya dan *monev* terintegrasi.
- g. Peraturan ketenagakerjaan yang ketat dapat membuat pemanfaatan tenaga kerja menjadi mahal dan sulit bagi perusahaan untuk merekrut pegawai baru. Memang terkadang hal ini membawa dampak positif bagi sebuah perusahaan namun ternyata jika sebaran kualitas SDM penduduk masih belum merata pendidikannya akan menjadi sebuah hambatan tersendiri bagi jumlah pengangguran terbuka. Harus ada konsep kebijakan pengaturan ketenagakerjaan di Kabupaten Balangan.
- h. Ketergantungan pada sektor ekonomi tertentu (misalnya, pertambangan atau industri berat) dapat menjadi masalah jika sektor tersebut mengalami penurunan. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Balangan melakukan diversifikasi perekonomian sehingga tidak terlalu bergantung pada pertambangan dan menjadi salah satu kinerja yang akan dibahas dalam dokumen perencanaan RPJMD 2025-2029.
- i. Usaha kecil yang biasanya menyerap tenaga kerja baru sering kali menghadapi kekurangan modal, sehingga sulit untuk memperluas bisnis dan menciptakan lapangan kerja baru. Pemerintah

Kabupaten Balangan melakukan pendampingan dan pembinaan serta fasilitasi pemberian modal usaha kepada pelaku usaha kecil dan UMKM.

- j. Infrastruktur yang kurang memadai (seperti transportasi dan teknologi informasi) dapat menghambat pertumbuhan usaha dan penciptaan lapangan kerja. Harus dipastikan infrastuktur sudah menunjukkan konektivitas yang bagus dan efektif.
- k. Ada kalanya stigma sosial terhadap individu yang menganggur dapat menghalangi mereka dari mendapatkan pekerjaan, meskipun mereka memiliki keterampilan yang dibutuhkan. Untuk itu perlu dibentuk karakter dan mental SDM yang percaya diri dan berwirausaha mandiri dan meyakinkan bahwa mereka siap atau bersedia untuk kembali ke tenaga kerja, yang dapat memengaruhi angka pengangguran.
- l. Kurangnya kebijakan dan program yang efektif untuk mendukung penciptaan lapangan kerja dapat memperlambat penurunan angka pengangguran. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Tenaga Kerja harus lebih menginisiasi lagi Kerjasama penyediaan dan penempatan tenaga kerja dengan beberpaa perusahaan dan menarik minat investor baru masuk ke Balangan.
- m. Menggabungkan pendekatan yang berbeda dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan adalah kunci untuk mencapai perbaikan yang signifikan dalam pasar kerja (membuat proses bisnis penanganan pengangguran terbuka dan matrik resiko strategis IKU dalam dokumen perencanaan RPJMD 2025-2029).

f. *Analisis Atas Efiseinsi Penggunaan Sumber Daya*

Upaya percepatan yang dilakukan dalam rangka mencapai target kinerja ke depan adalah memperhatikan rancangan matrik resiko strategis Pemerintah Daerah sebagaimana tabulasi data berikut :

Sasaran Strategis	Uraian Resiko	Rencana Tindak Pengendalian
Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka	Terbatasnya Pekerjaan Sektor Formal	Melakukan <i>job canvassing</i> /koordinasi dengan perusahaan-perusahaan untuk penyampaian lowongan atau kesempatan kerja serta sosialisasi dan pemberlakuan wajib lapor lowongan bagi setiap perusahaan khususnya perusahaan di Kabupaten Balangan, selain itu melakukan koordinasi lintas sektor untuk penyediaan dan peningkatan lapangan usaha informal.

Disamping itu juga melakukan beberapa inovasi sebagaimana tabulasi data berikut :

IKU	Nama Inovasi	Manfaat
Angka Pengangguran Terbuka	Smart Kerja (Sistem Aplikasi dan Informasi Ketenagakerjaan Balangan)	Pelayanan perantaraan kerja/pembuatan kartu pencari kerja dapat dilakukan secara online.
	Lamar Bagawi (Labor Market Balangan dengan Informasi Wawasan dan Kompetensi)	Terdatanya pencari kerja yang bersertifikat keahlian dan menjadi <i>database</i> market pasar tenaga kerja ke perusahaan-perusahaan.
	Lakasi (Layanan Informasi Latihan Kerja dan Sertifikasi)	Masyarakat lebih mudah mendapatkan infromasi jenis-jenis pelatihan dan sertifikasi yang ada di Kabupaten Balangan sesuai kebutuhannya sehingga bisa meningkatkan keterserapan tenaga kerja di industri, dunia usaha dan dunia kerja (IDUKA).

g. Analisis Atas Program atau Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Capaian Kinerja Program Tahun 2024

No	Uraian Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Keuangan	% Realisasi Kinerja	Efektifitas Program
1.	Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	41.017.418.328	40.526.566.526	98,80	182,4	Ya
2.	Penempatan Tenaga Kerja	1.092.719.700	1.014.157.245	92,81	70,10	Ya
3.	Perencanaan Tenaga Kerja	32.718.000	31.999.612	97,80	58,72	Ya
4.	Hubungan Industrial	10.648.154.900	9.306.113.800	87,40	111,11	Ya

Sumber Data Laporan SKPD dan Rekonsiliasi Data LKPJ Tahun 2024, data diolah

Berikut analisa program penunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian Sasaran Strategis Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka (Indikator Kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka):

No	Program	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Tindakan lanjut
1.	Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Didukung anggaran yang cukup besar untuk membiayai kegiatan, SDM yang mumpuni dalam melaksanakan kegiatan, Minat masyarakat yang tinggi untuk mengikuti beberapa kegiatan peningkatan SDM berupa pelatihan berbasis kompetensi terlebih khusus kejuruan las, Adanya kerjasama yang dijalin dengan PT. Dian Pandu, untuk menampung beberapa lulusan alumni BLK khusus kejuruan las yang lulus syarat dan ketentuan.	Kurangnya minat masyarakat beberapa kejuruan yang disediakan oleh BLK Balangan. Keterbatasan jumlah SDM ASN di BLK Balangan. Peserta yang kurang termotifasi atau tidak memiliki pemahaman dasar yang diperlukan.	Mensosialisasikan kegiatan yang kurang diminati masyarakat seperti manfaat ikut pelatihan tersebut dll. Menyesuaikan materi pelatihan dengan kebutuhan dan minat masyarakat lokal. Melibatkan tokoh masyarakat atau organisasi setempat untuk membangun kepercayaan dan ketertarikan. Melakukan survei untuk memahami kebutuhan masyarakat dan perbaikan program pelatihan berdasarkan masukan tersebut. Mengusulkan tambahan Staf TU di BLK Balangan. Lebih banyak melakukan kerjasama dengan pihak-pihak yang bergerak dibidang kejuruan yang dilatihkan.
2.	Penempatan Tenaga Kerja	Perusahaan untuk menyediakan kebutuhan kerja. Ketersediaan sumber daya: anggaran, fasilitas yang memadai untuk Informasi Pasar Kerja. Pencari Kerja yang kompeten dan terampil.	Minimnya Ketersediaan Tenaga Kerja yang memenuhi kualifikasi atas kebutuhan Tenaga Kerja yang dibutuhkan perusahaan sehingga menyebabkan tidak terserapnya tenaga kerja. Kurangnya keaktifan Pencari Kerja untuk melaporkan penempatan kerjanya.	Melakukan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Calon Pencari Kerja. Melakukan sosialisasi peraturan pelayanan perantaraan kerja dan kewajiban pencari kerja. Koordinasi dan konsultasi ke perusahaan untuk melaporkan penempatan diperusahaannya.
3.	Perencanaan Tenaga Kerja	Ketersediaan sumber daya: anggaran yang memadai, fasilitas yang memadai. Dukungan SKPD/OPT terkait dan perusahaan untuk mendorong terlaksananya penyusunan RTKMakro dan Mikro.	Kurangnya dukungan dan partisipasi perusahaan yang menyebabkan kurangnya SDM perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro.	Melaksanakan Sosialisasi dan Pembinaan Penyusunan RTK Mikro.
4.	Hubungan Industrial	Tingginya minat masyarakat untuk mengikuti pelatihan dan sertifikasi.	-	-

8. Sasaran Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi

Tabel 3.9
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 8
Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi

No	Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2023	Kinerja 2024			Target Akhir RPJMD	Capaian Terhadap Akhir RPJMD	Realisasi / Capaian Terhadap Kab / Kota	Realisasi / Capaian Terhadap RPJMD Provinsi	Realisasi / Capaian Terhadap RPJMN
			Target	Realisasi	Capaian					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.	Nilai SAKIP	70,17	74,40	72,09	96,90	78,20	92,19	-	-	-
13.	Nilai Opini BPK	WTP	WTP	WTP	100	WTP	100	-	-	-
14.	Nilai EKPPD	3,3047	3,593	3,3047*	91,98	3,6	91,80	-	-	-
15.	Nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP)	4,01	4,51	4,29	95,12	4,91	87,37	-	-	-
16.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,07	86	87,07	101,24	90	96,74	-	-	-

Sumber Data Pemerintah Kabupaten Balangan Tahun 2024, data diolah

8.1 Nilai SAKIP

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Kabupaten Balangan tahun 2024 berdasarkan Surat Nomor : B/411/AA.05/2024 hal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024 tanggal 3 September 2024 adalah 72,09 (Kategori BB). Hasil capaian realisasi target nilai SAKIP 72,09 ini memang belum mencapai target nilai SAKIP yang diperjanjikan yaitu 74,40 (Kategori BB), akan tetapi hasil evaluasi nilai SAKIP tahun 2024 yaitu 96,90% dibandingkan dengan hasil evaluasi nilai SAKIP tahun 2023 yaitu 70,17 (Kategori BB) dengan capaian sebesar 96,92% mengalami kenaikan capaian sebesar 1,92%. Dan telah memenuhi kategori penilaian (BB). Dibandingkan dengan target akhir RPJMD capaian nilai SAKIP ini masih belum mencapai target dan masih kekurangan nilai sebesar 6 poin.

b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Tahun 2023 dan 2022.

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Balangan menunjukkan bahwa nilai SAKIP Balangan yakni 72,09 dengan predikat BB bernilai sangat baik dimana Pemda Balangan sudah mengimplementasikan SAKIP sudah sangat baik pada Pemerintah Daerah dan sebagian besar unit kerja, ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, serta memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi. Adapun rincian hasil evaluasi adalah sebagai berikut :

Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai		
		2022	2023	2024
A. Perencanaan Kinerja	30	22,16	23,19	23,71
B. Pengukuran Kinerja	30	19,35	20,21	21,04
C. Pelaporan Kinerja	15	10,73	10,99	11,09
D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	14,80	15,78	16,25
Nilai Hasil Evaluasi	100	67,04	70,17	72,09
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B	BB	BB

c. *Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun ini Dengan Target Jangka Menengah Dalam RPJMD*

Realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dibandingkan dengan target jangka menengah dalam RPJMD adalah berada pada capaian 92,19. Berdasarkan realisasi Nilai SAKIP pada tahun 2024 sebesar 72,09 dibandingkan dengan target akhir RPJMD 78,20 masih kurang sebesar 6,11 poin. Banyak hal pembenahan yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Balangan terkait implementasi SAKIP ini dan hal detail mengenai langkah konkret yang harus dilakukan akan dibahas di analisa keberhasilan dan upaya.

d. *Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Dengan Standar Nasional/ Kabupaten Kota lain*

Peringkat SAKIP se-Kalsel Tahun 2024 terlihat dalam matrik dibawah ini:

No	Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP 2024
1	Pemerintah Kabupaten HSS	84,07
2	Pemerintah Propinsi Kalimantan Selatan	82,04
3	Pemerintah Kabupaten Balangan	72,09
4	Pemerintah Kabupaten Tapin	71
5	Pemerintah Kota Banjarmasin	70,7
6	Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah	70,2
7	Pemerintah Kabupaten Tanah Laut	70,16
8	Pemerintah Kabupaten Barito Kuala	68,01
9	Pemerintah Kabupaten Tabalong	67,10
10	Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	67,09
11	Pemerintah Kabupaten Banjar	67,06
12	Pemerintah Kota Banjarbaru	66,83
13	Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara	64,82
14	Pemerintah Kabupaten Kotabaru	61,78

e. *Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan*

Penyebab keberhasilan peningkatan Nilai SAKIP ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu:

1. Kerjasama antar Tim SAKIP Kabupaten dalam memperbaiki dokumen perencanaan Pemda dan SKPD berdasarkan Pohon Kinerja dan Cascading Kinerja, meskipun belum dituangkan dalam dokumen RPJMD mengingat waktu perubahan RPJMD sudah diatur berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Dan menyikapi hal ini Pemerintah Kabupaten Balangan membuat berita acara kesepakatan hasil pembahasan asistensi perbaikan cascading kinerja Kabupaten dan SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Balangan mengacu pada Permenpan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah pada tanggal 05 Mei 2023. Berita acara akan dilampirkan dalam dokumen LKIP ini.
2. Memperbaiki Pohon Kinerja dan Cascading Pemda dan SKPD berdasarkan isu strategis dengan metode CSF dan menuangkan dalam dokumen perencanaan. Pohon kinerja dan cascading hasil *review* terakhir pada bulan Desember tahun 2024 akan dipergunakan dalam penyusunan dokumen RPJMD 2025-2029.
3. Melakukan revisi beberapa target akhir RPJMD 2021-2026 yang dianggap tidak *valid* karena ada beberapa target akhir yang sudah teralisasi pada tahun-tahun sebelumnya. Sehingga kami melakukan perubahan target akhir dengan membuat berita acara perubahan target, berita acara akan kami lampirkan dalam dokumen LKIP ini.

4. Melakukan pengembangan aplikasi SAKIP yang terintegrasi mulai dari perencanaan, pengukuran dan pelaporan.
5. Melakukan monev terhadap capaian kinerja SKPD per triwulan, saat ini masih menggunakan EKINO dan SIMBA dan akan melakukan pengembangan kedepannya sesuai dengan point nomor 4 (empat).

Saat ini Pemerintah Kabupaten Balangan sedang melakukan persiapan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029. RPJMD mengacu pada isu strategis daerah melalui gambaran visi misi Kepala Daerah yang dituangkan dalam pohon kinerja level Pemerintah Daerah. Dan pada masa penyusunan ini, Tim SAKIP dan Tim RPJMD juga melibatkan beberapa *stakeholder* untuk memberi saran masukan terhadap batang tubuh rancangan RPJMD Kabupaten Balangan sesuai aturan dan mekanisme yang diatur dalam Permendagri tentang Tata Cara Penyusunan RPJMD.

Berdasarkan penjelasan di atas, upaya atau alternatif solusi untuk mencapai target kinerja Nilai SAKIP yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Balangan antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan pengembangan menu sampai pada tahapan pengukuran kinerja individu atau SKP individu dan pengisian matrik resiko strategis dan operasional.
2. Melakukan penajaman indikator kinerja lebih SMART terutama di beberapa kinerja *final outcome* *intermediet* dan *immediate*.
3. Melakukan pengawalan beberapa indikator makro daerah agar jangan sampai turun realisasinya.
4. Melaksanakan monev pengukuran kinerja Triwulan SKPD melalui aplikasi E-Sakip dan/atau EKINO dan SIMBA.
5. Melakukan pembinaan dengan mengadakan rapat antara Tim SAKIP Kabupaten dengan SKPD, *coaching clinic* Sakip dan pembinaan pendampingan dengan Kementerian PAN RB terkait penilaian kinerja organisasi.
6. Melaksanakan asistensi penyusunan LKIP tahun 2024 yang disusun pada tahun 2025 dan memperhatikan faktor-faktor yang menjadi hambatan untuk menjadi bahan masukan perbaikan dokumen perencanaan ke depan baik di level Pemda dan level SKPD.
7. Melakukan inovasi terkait pencapaian kinerja makro daerah.
8. Melakukan pengukuran kinerja SAKIP SKPD dan melakukan monev kinerja terhadap rencana aksi tindaklanjut hasil LHE Sakip tahun sebelumnya.
9. Upaya tindaklanjut yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Balangan sesuai saran dan rekomendasi Kemenpan RB berdasarkan Surat Menpan RB Nomor B/411/AA.05/2024 hal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024 adalah sebagai berikut:
 - a. Perencanaan, melakukan penyusunan pohon kinerja dan memastikan kinerja yang diukur harus *outcome*, pohon kinerja dituangkan dalam dokumen perencanaan dan menjadi dasar dalam penyusunan SKP.
 - b. Pengukuran, pengukuran kinerja dilakukan secara elektronik secara bulanan, dilakukan pemantauan, hasil pengukuran kinerja dapat menjadi *feedback* perbaikan kinerja.
 - c. Pelaporan, pelaporan kinerja disusun mengacu pada aturan yang berlaku dan harus dapat menjadi *feedback* perbaikan kinerja, disusun tepat waktu.
 - d. Evaluasi, dilakukan evaluasi kinerja secara berkala dan ada lampiran monev berkala, serta dipantau hasil evaluasi apakah sudah ditindaklanjuti oleh SKPD atau Pemda.
 - e. Matrik tindaklanjut LHE Pemda sebagaimana lampiran LKIP ini yang tertuang dalam Bab III.

f. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Upaya percepatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Balangan dalam rangka perbaikan kinerja akuntabilitas adalah melakukan beberapa inovasi antara lain adalah :

IKU	Inovasi	Manfaat
Nilai SAKIP	Aplikasi E-Kino	Hasil dari dibangunnya aplikasi e-Kino adalah untuk mempermudah pengawasan data realisasi dan capaian kinerja SKPD pada beberapa area perubahan Reformasi Birokrasi yakni Akuntabilitas, Dokumen SAKIP, Reformasi Birokrasi, Manajemen Perubahan / Budaya Kerja, Penataan Organisasi, Tata Laksana, Diregulasi Kebijakan dan Pelayanan Publik dan kontrol hasil SKM SKPD setiap bulan.
	Aplikasi Replikasi E-SAKIP Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan/atau Revisi SIMBA	Terintegrasinya perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi serta pengendalian resiko strategis dan operasional. Pengukuran kinerja organisasi dan pengukuran kinerja individu PK dan atau SKP.
	E-Kinerja BKN	Pengukuran kinerja individu mulai JPT sampai Jabatan Pelaksana dan sebagai dasar pemberian TPP. E-Kinerja ini berdasarkan pada PK dan SKP individu.

g. Analisis Atas Program atau Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Capaian Kinerja Program Tahun 2024

No	Uraian Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Keuangan	% Realisasi Kinerja	Efektifitas Program
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	142.799.186.565	131.085.370.598	91,80	100	Ya
2.	Penyelenggaraan Pengawasan	3.108.355.000	1.911.696.995	61,62	163,64	Ya
3.	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	3.881.460.400	3.668.684.815	94,52	99,04	Ya
4.	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	4.364.356.400	4.148.970.551	95,06	106	Ya
5.	Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	2.816.002.600	2.287.883.371	81	182	Ya

Sumber Data Laporan SKPD dan Rekonsiliasi Data LKPJ Tahun 2024, data diolah

Berikut analisa program penunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi (Indikator Kinerja Nilai SAKIP):

No	Program	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Tindakanlanjut
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Adanya Kerja sama dengan Kabupaten HSS dalam pengembangan aplikasi esakip. Penguploadan seluruh dokumen SAKIP pada <i>website</i> Kementerian PANRB. Pada Laporan Pengukuran Kinerja triwulan yang disusun dapat menginformasikan target, perhitungan dan realiasi capaian kinerja baik capaian kinerja utama ataupun capaian kinerja individu. Upaya perbaikan atau rencana aksi atas faktor hambatan kinerja pada	Masih terjadinya gangguan di server. Penguploadan seluruh dokumen SAKIP pada <i>website</i> Kementerian PANRB. Pada Laporan pengukuran kinerja triwulan yang disusun dapat menginformasikan target, perhitungan dan realiasi capaian kinerja baik capaian kinerja utama ataupun capaian kinerja individu. Upaya perbaikan atau	Akan menyiapkan server baru untuk Aplikasi e-Sakip baik kerja sama dengan HSS ataupun mandiri. Untuk tahun selanjutnya akan melakukan upload dokumen Sakip sebelum batas akhir pengumpulan. Membuat Laporan Pengukuran Kinerja triwulan yang dapat menginformasikan target, perhitungan dan realiasi capaian

No	Program	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Tindaklanjut
		monev yang disusun untuk dapat dilaksanakan sehingga terjadi peningkatan realisasi target setiap triwulan ataupun capaian sasaran dan target tahunan.	rencana aksi atas faktor hambatan kinerja pada monev yang disusun untuk dapat dilaksanakan sehingga terjadi peningkatan realisasi target setiap triwulan ataupun capaian sasaran dan target tahunan.	kinerja baik capaian kinerja utama ataupun capaian kinerja individu. Menyampaikan kepada pemegang PK terkait renaksi yang sudah disusun agar segera ditindaklanjuti demi peningkatan capaian kinerja.
2.	Penyelenggaraan Pengawasan	Dibentuknya Tim Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan baik internal maupun eksternal.	Data dukung yang disampaikan oleh SKPD belum sepenuhnya menjawab rekomendasi yang diberikan, pemantauan dan tindaklanjut atas rekomendasi belum terlaksana secara optimal.	-
3.	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Semakin massifnya koordinasi dan intervensi berbagai pihak dalam perencanaan seperti Kemenpan, BPKP, BPK yang memberikan arahan dan masukan serta perbaikan dalam mendukung efektivitas dan efisiensi perencanaan.	Tidaknnya konsistennya program di RPJMD dengan RKPD.	Perlunya komitmen bersama antara semua SKPD agar menggunakan program yang telah di sepakati di awal penyusunan RPJMD 2025-2029.
4.	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi dengan SKPD teknis telah terlaksananya dengan baik, terlaksananya monev untuk mengetahui progres dan kendala permasalahan.	Masih ada SKPD yang belum menyesuaikan target saat perubahan anggaran, kurang konsistennya program di Renja dengan RKPD.	Perlunya komitmen bersama antar semua SKPD Gakor PEI agar menyesuaikan target saat perubahan anggaran dan menggunakan program yang telah disepakati dalam RKPD.
5.	Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	SKPD yang diusulkan pembangunan ZI menuju WBK berperan aktif dalam pemenuhan data dukung, TPI melakukan pendampingan secara intensif dalam proses penilaian ZI.	Tidak semua SKPD yang memenuhi kriteria untuk diusulkan PMPZI sehingga kedepannya perlu dilakukan pembinaan secara intensif.	-

8.2 Nilai Opini BPK

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Opini BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yaitu :

1. Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan
2. Kecukupan pengungkapan
3. Kepatuhan terhadap perundang-undangan
4. Efektivitas sistem pengendalian internal

Pada tahun 2024, opini BPK atas laporan keuangan daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 hasilnya adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Capaian opini adalah opini yang ke-11 (sebelas) kali secara berturut-turut dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Balangan.

b. *Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Tahun 2023 dan 2022.*

Jika kita melihat realisasi kinerja tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023 dan 2022 maka realisasi kinerja ini konstan dan alhamdulillah Pemerintah Kabupaten Balangan berhasil mempertahankan predikat WTP selama sebelas kali sejak tahun 2013 sampai dengan 2023.

c. *Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun ini Dengan Target Jangka Menengah Dalam RPJMD*

Realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dibandingkan dengan target jangka menengah dalam RPJMD juga berada pada angka yang konstan yakni Pemerintah Kabupaten Balangan mendapatkan predikat WTP .

d. *Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Dengan Standar Nasional*

Predikat WTP ini juga disupport dengan adanya berbagai penghargaan yang diraih oleh Pemerintah Kabupaten Balangan dalam aspek laporan keuangan yakni Pemerintah Kabupaten Balangan menerima penghargaan APBD Award tahun 2023 dan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah tahun 2023 yang keluar di bulan Desember 2024 berada pada angka 80,688.

e. *Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan*

Perolehan opini BPK dari tahun ke tahun tidak lepas dari peran Kepala Daerah dan Komitmen Kepala Daerah dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai basis KUA PPAS. Hal-hal lain yang mempengaruhi antara lain adalah :

1. Faktor yang mendukung baiknya kualitas laporan keuangan SKPD di Lingkup Pemerintah Kabupaten Balangan adalah pelaksanaan rekonsiliasi yang rutin di setiap SKPD. Rekonsiliasi merupakan salah satu kunci dalam upaya penyusunan laporan keuangan yang kredibel. Hal ini disebabkan oleh perannya yang cukup penting dalam rangka meminimalisasi terjadinya perbedaan pencatatan yang berdampak pada validitas dan akurasi data yang disajikan dalam laporan keuangan. Agar data akuntansi yang dihasilkan dapat diandalkan perlu dilakukan prosedur rekonsiliasi untuk ketelitian dan akurasi pencatatan data akuntansi. Dengan adanya rekonsiliasi baik itu internal SKPD maupun rekonsiliasi antara SKPD dengan Bidang Akuntansi dan Pertanggungjawaban untuk komponen belanja dan bidang pengelolaan barang milik daerah untuk komponen aset serta bidang penagihan dan pelaporan untuk komponen pendapatan, maka dapat dihasilkan data yang akurat sehingga turut meningkatkan kualitas laporan keuangan.
2. Telah dilakukan pengelolaan aset dengan baik. Informasi aset tetap telah disajikan sesuai standar yang ditetapkan, didukung oleh penatausahaan yang memadai serta telah dilakukan pengamanan terhadap aset tetap yang meliputi pencatatan dan pengamanan secara fisik, sehingga nilai laporan aset yang disajikan dalam LKPD dapat menggambarkan kekayaan Pemerintah Daerah yang sesungguhnya.
3. Telah dilakukan pengelolaan keuangan yang taat asas berdasarkan asas tertib taat peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat sehingga potensi timbulnya kerugian keuangan negara serta penyimpanan keuangan dapat dieliminasi.
4. Sistem Pengendalian Internal (SPI) terkait dengan perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan dan pengelolaan aset daerah telah dilaksanakan dengan baik.
5. Telah dilakukan tindak lanjut terhadap temuan hasil pemeriksaan BPK.

Adapun hambatan yang masih sering muncul dalam penyusunan laporan keuangan SKPD di Lingkup Pemerintah Kabupaten Balangan antara lain adalah masih kurangnya tenaga di bidang keuangan yang

berkompeten dalam bidang keuangan, namun hal ini sudah disikapi dengan mengadakan FGD atau bimtek bagi pengelola keuangan bahkan sampai level pelaksana. Hambatan lain adalah belum optimalnya implementasi sistem pengendalian internal, namun tahun 2024 ini SPI sudah mengarah pada upaya peningkatan nilai yang menunjukkan adanya upaya dari Pemda untuk menginternalisasikan SPI kepada seluruh SKPD.

Adapun upaya perbaikan ke depan yang harus dilakukan antara lain adalah :

1. Pengoptimalan rekonsiliasi internal SKPD yang melibatkan semua bidang atau unit terkait (PPK-SKPD), Bendahara pengeluaran/penerimaan, bendahara pengeluaran/penerimaan pembantu, verifikasi keuangan, pengurus barang, staf penyusun laporan, dan sebagainya.
2. Melakukan rekonsiliasi antara SKPD dengan bidang teknis terkait penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Balangan secara periodik dan sesuai ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Balangan tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.
3. Melaksanakan peningkatan kompetensi pejabat pengelola aset dan keuangan melalui pendidikan dan pelatihan sehingga mampu melaksanakan tugasnya dengan baik dan bertanggung jawab.
4. Menerapkan penggunaan teknologi informasi yang mendukung penerapan akuntansi berbasis aktual seperti aplikasi FMIS, SIPD-RI, SIPANDA BMD, SICAPER (sistem pencatatan persediaan), sistem PBB dan BPHTB serta SP2D online.
5. Membangun aplikasi pengelolaan kas daerah (sistem integrasi penerimaan keuangan pendapatan daerah).
6. Menyusun kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah berdasarkan standar akuntansi pemerintah.
7. Menyusun dan menyajikan laporan keuangan sesuai standar akuntansi yang berlaku.

f. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Upaya percepatan yang dilakukan dalam rangka peningkatan realisasi kinerja ini antara lain adalah melakukan inovasi sebagaimana tabulasi data dibawah ini :

IKU	Nama Inovasi	Manfaat
Opini BPK	Ditetapkannya Peraturan Bupati Balangan Nomor 65 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Balangan Nomor 130 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dan Peraturan Bupati Balangan Nomor 66 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Balangan Nomor 131 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.	Meningkatnya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) dan penguatan sistem pengendalian akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.
	Penggunaan Sistem Aplikasi Pengelolaan Barang Milik Daerah berdasarkan Peraturan Bupati Balangan Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Berbasis Aplikasi yang terdiri atas : a. Sipanda BMD; b. Sicaper; dan c. Simandor BMD	Proses pencatatan dan pelaporan nilai aset tetap dan aset lancar yang tercatat dalam neraca pada Laporan Keuangan Daerah (LKPD) memenuhi prasyarat secara efisien, transparan dan akuntabel.

g. Analisis Atas Program atau Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Capaian Kinerja Program Tahun 2024

No	Uraian Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Keuangan	% Realisasi Kinerja	Efektifitas Program
1.	Pengelolaan Keuangan Daerah	517.236.357.461	500.359.557.772	96,74	91,69	Ya
2.	Pengelolaan Barang Milik Daerah	11.389.027.600	10.111.332.173	88,78	98,7	Ya

Sumber Data Laporan SKPD dan Rekonsiliasi Data LKPD Tahun 2024, data diolah

Berikut analisa program penunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi (Indikator Kinerja Nilai Opini BPK):

No	Program	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Tindakanlanjut
1.	Pengelolaan Keuangan Daerah	Adanya kesadaran dan komitmen tinggi antara Kepala Daerah dan DPRD baik dalam pelaksanaan APBD 2024 maupun perencanaan APBD 2025. Adanya Aplikasi CMSP yang memudahkan para bendahara dalam melakukan pencairan Belanja yang ada pada SKPD dan juga mempermudah dalam pencairan SP2D Adanya Program Kartu Kredit Pemerintah Daerah yang memudahkan Bendahara dalam melakukan pembayaran. Penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual dalam Penyusunan Laporan Keuangan Daerah (LKPD) Kabupaten Balangan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 sebagai pedoman. Kemudian sebagai tindak lanjut Peraturan tersebut, Pemerintah Kabupaten Balangan mengeluarkan Peraturan Bupati Balangan Nomor 65 tahun 2024 sebagai pelaksanaan peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013.	Keluarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD mengalami keterlambatan. Kesalahan pada saat penginputan ID Biling untuk belanja yang melalui Bendahara maupun SP2D yang menyebabkan kegagalan pada saat pencairan, belum terbitnya Kartu Kredit Indonesia yang di akomodir oleh Bank Kalsel yang menyebabkan kegiatan yang menggunakan KKPD belum bisa terlaksana dan masih lemahnya pemahaman OPD selaku entitas akuntansi dalam memahami penerapan berbasis akuntansi berbasis akrual dalam penyusunan laporan keuangan perangkat daerah.	Melakukan pembinaan melalui sosialisasi dan pendampingan dalam penyusunan dokumen penganggaran. Melakukan himbawan, monitoring dan evaluasi dalam penginputan ID Biling agar belanja yang di input sudah sesuai dan bisa dicairkan, ditahun 2025 Bank Kalsel sudah menyiapkan Kartu Kredit Indonesia dengan menggunakan QRIS agar kegiatan yang menggunakan KKPD bisa terlaksana, melakukan sosialisasi penggunaan KKPD kepada semua SKPD agar kegiatan yang menggunakan KKPD bisa berjalan sesuai dengan ekspektasi dan melakukan pembinaan melalui sosialisasi dan pendampingan dalam penyusunan laporan keuangan perangkat daerah.
2.	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Melakukan pengembangan aplikasi penatausahaan BMD (Sipanda BMD) sekaligus pendampingannya dalam rangka penyesuaian format laporan BMD sesuai dengan Permendagri Nomor 47 Tahun 2021. Peningkatan kompetensi SDM petugas aset melalui kegiatan workshop pengelolaan BMD. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan pengguna barang agar proses penyusunan kebijakan daerah terkait pengelolaan BMD agar dapat selesai tepat waktu dan	Belum optimalnya tindak lanjut Pengguna Barang pada proses-proses dalam penatausahaan BMD sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama dari yang seharusnya, belum optimalnya dukungan Pengguna Barang terhadap kelengkapan sarana tugas Pengurus Barang maupun Pembantu Pengurus Barang, SDM Petugas Aset pada SKPD juga mendapat beban tambahan	SDM petugas pengelola aset tidak mudah untuk berganti terlebih di tengah atau akhir tahun anggaran berjalan dan difokuskan tugas utamanya yaitu hanya untuk mengelola BMD, dukungan Pengguna Barang agar lebih optimal, utamanya terkait akses Pengurus Barang mendapatkan dokumen yang diperlukan untuk kegiatan penatausahaan BMD. Selain itu pula agar

No	Program	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Tindakan lanjut
		menyusun laporan BMD semesteran dan kegiatan rekonsiliasi secara tepat waktu.	pekerjaan diluar tugas utamanya sebagai Pengurus Barang maupun Pembantu Pengurus Barang dan adanya pergantian SDM Petugas Aset pada tahun berjalan sehingga perlu waktu untuk beradaptasi menyesuaikan pelaksanaan tugas mengelola BMD.	melengkapi sarana yang refresentatif untuk alat kerja sebagai petugas pengelola aset.

8.3 Nilai EKPPD

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Nilai EKPPD tahun 2024 atas LPPD 2023 belum rilis dari Kementerian Dalam Negeri. Pada tahun 2023 nilai EKPPD atas LPPD 2022 Pemerintah Kabupaten Balangan adalah 3,3047 dengan kategori sedang.

b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Tahun 2023 dan 2022.

1. Pada tahun 2022 peringkat 56 Nasional dan 5 se-Kalsel nilai 3,3047 dengan status sedang (Kepmendagri Nomor 100.2.1.7-6646 Tahun 2023 tentang Hasil EKPPD Tahun 2023 berdasarkan LPPD Tahun 2022).
2. Pada tahun 2021 peringkat 48 Nasional dan peringkat 3 se-Kalsel nilai 2,86 dengan status sedang (Kepmendagri Nomor 100.2.1.3-1109 Tahun 2023 tentang Hasil EKPPD Tahun 2022 berdasarkan LPPD Tahun 2021).
3. Nilai EKPPD 2024 berdasarkan LPPD Tahun 2023 belum rilis.
4. Tidak dibandingkan antara LPPD 2021 dan 2022 karena perbedaan rujukan Permendagri.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun ini Dengan Target Jangka Menengah Dalam RPJMD

Capaian kinerja sampai dengan tahun 2023 dibandingkan dengan target jangka menengah dalam RPJMD sebesar 3,6 adalah 91,80 persen, dan belum mencapai target akhir RPJMD.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Dengan Standar Nasional

Peringkat Nilai EKPPD se Kalimantan Selatan tahun 2023 adalah sebagaimana tabulais data berikut :

No	Kabupaten/ Kota	Nilai EKPPD Tahun 2023 atas LPPD 2022	Kategori	Nilai EKPPD Tahun 2022 atas LPPD 2021	Kategori
1	Kabupaten Hulu Sungai Selatan	3,5027	Tinggi	3,56	Tinggi
2	Kabupaten Banjar	3,4959	Tinggi	2,69	Sedang
3	Kabupaten Tapin	3,4575	Tinggi	2,76	Sedang
4	Kabupaten Tanah Bumbu	3,3150	Sedang	2,72	Sedang
5	Kabupaten Balangan	3,3047	Sedang	2,86	Sedang
6	Kabupaten Kotabaru	3,2250	Sedang	2,38	Rendah
7	Kota Banjarbaru	3,2090	Sedang	2,42	Rendah
8	Kabupaten Tabalong	3,2060	Sedang	2,91	Sedang
9	Kabupaten Barito Kuala	3,1443	Sedang	2,46	Rendah
10	Kabupaten Hulu Sungai Tengah	3,0887	Sedang	1,46	Sangat Rendah
11	Kabupaten Hulu Sungai Utara	3,0138	Sedang	1,30	Sangat Rendah
12	Kota Banjarmasin	2,9752	Sedang	2,63	Sedang
13	Kabupaten Tanah Laut	2,9275	Sedang	2,43	Rendah

e. *Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan*

Tidak maksimalnya nilai EKPPD tahun 2023 disebabkan oleh beberapa kendala antara lain adalah

1. Ketidaksesuaian data dukung yang disampaikan dengan nilai capaian kinerja atau tidak adanya data dukung yang menguatkan nilai capaian kinerja pelaksanaan urusan, sehingga sebagian besar SKPD hanya menunjukkan surat keterangan untuk menyatakan bahwa indikator kinerja kunci pada EKPPD tersebut telah dilaksanakan atau tidak dilaksanakan. Sementara surat keterangan ini nilainya tidak maksimal.
2. Belum maksimalnya pelaksanaan program dan kegiatan pada masing-masing urusan, terutama terkait anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan tersebut.
3. Nilai tahun 2021 dan tahun 2022 tidak dapat diperbandingkan karena berbeda aturan yang mendasarinya, dan saat ini sudah mengacu pada Permendagri Nomor 18 tahun 2020.

Hal yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Balangan pada tahun 2023 dan 2024 ini adalah :

1. Melakukan rapat teknis dengan SKPD dan Kemendagri selaku Pembina untuk verifikasi data dukung LPPD.
2. Melakukan FGD sekaligus desk evaluasi dengan Tim Kemendagri selaku verifikator untuk melakukan pengecekan terhadap data dukung IKK dalam LPPD.
3. Memberikan pemahaman kepada SKPD makna atau definisi operasional IKK.
4. Memberikan penjelasan bahwa mekanisme penentuan scoring sangat dipengaruhi oleh data dukung SKPD.

Upaya yang harus dilakukan ke depan oleh Pemerintah Kabupaten Balangan atau strategi untuk mencapai target kinerja adalah

1. Penguatan pemahaman dan definisi operasional IKK baik kepada Tim Reviu maupun kepada pengelola data di masing-masing perangkat daerah.
2. Penguatan koordinasi lintas sektoral untuk pengisian IKK khususnya terhadap pemenuhan data sekunder. Bagian Pemerintahan berfungsi menjembatani koordinasi lintas sektoral.
3. Perlunya dilakukan reviu oleh APIP terhadap kesesuaian capaian kinerja dengan dokumen pendukung.
4. Bapperida bisa menjembatani terhadap permasalahan yang dihadapi oleh perangkat daerah dalam pemenuhan dan pencapaian target kinerja.
5. Tim penyusun perlu melakukan ekspose yang melibatkan *stakeholder* dan Kepala Perangkat Daerah terkait proses penyusunan LPPD.
6. Perlunya komitmen yang kuat dari kepala SKPD selaku pemangku IKK.

f. *Analisis Atas Efiseinsi Penggunaan Sumber Daya*

Upaya percepatan peningkatan kinerja EKPPD adalah dengan melakukan inovasi sebagaimana tabulais data berikut :

IKU	Nama Inovasi	Manfaat
Nilai EKPPD	<i>Coaching Clinic</i> LPPD	1. Penyelesaian penyusunan LPPD tepat waktu sesuai dengan jadwal dan tahapan yang telah dibuat dan disepakati. 2. Perbaikan data dukung baik secara administratif maupun substansif sesuai dengan petunjuk teknis penyusunan LPPD.

		3. Menyamakan persepsi dan pengertian terhadap indikator kinerja kunci sehingga penyusunan data dukung sesuai dengan definisi operasional pada setiap indikator kinerja kunci yang akan meningkatkan capaian keseluruhan dari LPPD.
--	--	---

g. *Analisis Atas Program atau Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja*

Capaian Kinerja Program Tahun 2024

No	Uraian Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Keuangan	% Realisasi Kinerja	Efektifitas Program
1.	Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	165.705.719.700	143.001.465.464	86,30	100	Ya

Sumber Data Laporan SKPD dan Rekonsiliasi Data LKPJ Tahun 2024, data diolah

Berikut analisa program penunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi (Indikator Kinerja Nilai EKPPD):

No	Program	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Tindakanjnt
1.	Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Dukungan dari Pimpinan Daerah dalam memajukan pendidikan dan kualitas SDM Kabupaten Balangan dan dukungan anggaran untuk kebutuhan penunjang SKPD.	Tidak terealisasinya dana anggaran beasiswa dikarenakan peminat sebagian tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan program ini. Tidak terealisasinya dana hibah dikarenakan proses kelengkapan dokumen permohonan hibah yang lambat dipenuhi oleh pihak terkait. Tidak terlaksananya sebagian kegiatan meeting paket karena padatnya jadwal SKPD dan tidak terlaksananya kegiatan monitoring dalam kabupaten, sehingga honor tim monitoring tidak terbayar.	Perlunya pemberitahuan lebih jelas terkait syarat penerima beasiswa dan koordinasi lebih optimal dengan pihak terkait dalam mensosialisasikan program beasiswa kepada masyarakat khususnya pelajar, perlunya pemberitahuan lebih jelas kepada pihak terkait mengenai kelengkapan dokumen hibah, dan kecepatan perbaikan berkas agar pencairan dapat tepat waktu. Melakukan koordinasi terkait penjadwalan kegiatan pada SKPD dan koordinasi kegiatan monitoring dalam kabupaten.

8.4 Indeks Pelayanan Publik (IPP)

a. *Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024*

Nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP) Pemerintah Kabupaten Balangan tahun 2024 adalah 4,29 dengan capaian sebesar 95,12 persen dan belum mencapai target yang diperjanjikan dalam perjanjian kinerja.

Metode yang digunakan untuk mendapatkan hasil penilaian pelayanan publik diperoleh melalui kuesioner yang dibangun berdasarkan hasil persilangan antara sejumlah prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam memberikan pelayanan publik dan aspek yang harus dipenuhi oleh unit penyelenggara pelayanan publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Realisasi indeks pelayanan publik 4,29 dihitung berdasarkan jumlah akumulasi SKPD yang menjadi lokus penilaian pelayanan publik. Hampir setiap tahun lokus penilaian mengalami perubahan yang sudah ditentukan oleh Kementerian PAN RB. Mungkin memiliki makna bahwa seluruh SKPD yang melaksanakan

urusan pemerintahan konkuren wajib menjadi standar unit pelayanan sehingga siapapun yang ditetapkan menjadi lokus, haruslah siap memenuhi data dukung yang ditetapkan dalam juknis penilaian. Pada tahun 2024 telah dilakukan pembinaan dan pendampingan kepada SKPD Lokus mulai dari pemenuhan dokumen 14 Standar pelayanan sampai pada pemenuhan video pelayanan publik yang akan disajikan saat penilaian atau desk dengan tim penilai pusat. Tahun 2024 yang menjadi lokus adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Sosial dan RSUD.

Berbanding lurus dengan penilaian ombudsman RI akan kepatuhan pelayanan publik Pemerintah Kabupaten Balangan juga berada pada zona hijau atau sangat tinggi dengan nilai 92. Penilaian kepatuhan ini juga terhadap sampel lokus yang sudah ditentukan oleh Ombudsman RI. Terkadang ada unit kerja yang menjadi lokus IPP juga menjadi lokus kepatuhan ombudsman. Untuk itu pada tahun 2025 ini kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Balangan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik adalah dengan cara melatih dan membina SDM pelaksana pengaduan yang akan dijadikan pioneer pembinaan kepada SKPD lain dan mengikutsertakan dalam TFT pelayanan publik. Perwakilan SDM itu terdiri atas narahubung, petugas front office dan petugas pengelola pengaduan. Sedangkan SKPD yang ditunjuk sebagai sampel pioneer adalah RSUD, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Sosial, Dinas PMPTSP dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Sementara itu disamping SDM, meningkatkan indeks pelayanan publik ada beberapa strategi dan langkah yang dapat diambil untuk mencapai tujuan tersebut:

- a. Meningkatkan Infrastruktur Pelayanan seperti kantor layanan publik, aksesibilitas, dan alat teknologi informasi, tersedia dan memenuhi standar.
- b. Manfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi pelayanan. Sistem informasi yang baik dapat mempercepat proses dan memudahkan akses informasi bagi Masyarakat.
- c. Mengimplementasikan Standardisasi Proses Pelayanan dan menerapkan SOP yang jelas untuk setiap aspek pelayanan publik agar proses layanan menjadi lebih transparan dan konsisten.
- d. melakukan evaluasi secara berkala terhadap kinerja pegawai dan prosedur pelayanan untuk memastikan standar tetap terpenuhi.
- e. Membangun Sistem Umpan Balik dengan cara melakukan Survei Kepuasan Pelanggan untuk mendapatkan masukan dari masyarakat tentang kualitas pelayanan yang diterima. Ini dapat membantu dalam mengenali area yang perlu diperbaiki.
- f. Membuat saluran komunikasi yang mudah diakses bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan dan saran yang berkaitan dengan pelayanan publik.
- g. Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas melalui penyusunan pelaporan publik dan menyediakan informasi jelas mengenai berbagai layanan publik dan hasil pelayanannya. Laporan keterbukaan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat.
- h. Melakukan pengawasan secara independen untuk memastikan bahwa pelayanan publik dilakukan dengan baik dan akuntabel.
- i. Membawa layanan lebih dekat kepada masyarakat dengan membuka kantor layanan di berbagai lokasi strategis, termasuk daerah terpencil (melakukan inovasi layanan) dan konsep Layanan Berbasis Digital dalam rangka meningkatkan akses dengan menyediakan layanan secara online, yang memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan layanan tanpa harus datang langsung ke kantor.
- j. Melibatkan dan mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam forum atau rapat yang membahas kebijakan dan layanan publik. Keterlibatan ini dapat meningkatkan rasa kepemilikan dan kepuasan. Berkolaborasi dengan organisasi non-pemerintah (LSM) dan komunitas untuk merancang dan mengimplementasikan program pelayanan publik yang lebih baik. Dan dalam pelayanan publik dikenal dengan istilah FKP.
- k. Melakukan pengembangan Kebijakan yang Komprehensif.

1. *End-to-End Service Policies* yakni kembangkan kebijakan yang berorientasi pada hasil, yang mencakup semua tahapan dalam proses pelayanan sehingga mengedepankan efisiensi dan efektivitas.
2. Inklusi Sosial yakni pastikan kebijakan pelayanan publik mencakup semua lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan, untuk memastikan akses yang adil.
1. Melakukan Pengukuran dan Evaluasi dan menetapkan KPI yang jelas untuk mengukur efektivitas dan kualitas pelayanan. Pemantauan dan analisis berkala terhadap KPI dapat memberikan gambaran tentang progres yang dicapai dan membuat laporan secara periodik untuk mengevaluasi kemajuan dan tantangan dalam meningkatkan pelayanan publik.

b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Tahun 2023 dan 2022.

Dibandingkan dengan realisasi kinerja 4,01 Nilai Indeks Pelayanan Publik tahun 2024 mengalami kenaikan realisasi sebesar 0,28 poin.

Hasil penilaian evaluasi kinerja penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) tahun 2021-2023 SKPD lokus Pemerintah Kabupaten Balangan sebagai berikut:

**HASIL PENILAIAN EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK (PEKPPP)
TAHUN 2021-2024**

NO	TAHUN PENILAIAN	UNIT PENYELENGGARA PELAYANAN	NILAI INDEKS	KATEGORI
1.	2021	1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (DPMPTSP)	3,75	B
		2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil)	3,36	B (dengan catatan)
		Nilai Rata-Rata Pemda	3,56	B
2.	2022	1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (DPMPTSP)	3,56	B
		2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil)	3,47	B-
		Nilai Rata-Rata Pemda	3,52	B
3.	2023	1. Kecamatan Juai	3,96	B
		2. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Anak	3,72	B
		3. RSUD Kabupaten Balangan	4,35	A-
		Nilai Rata-Rata Pemda	4,01	A-
4.	2024	1. Disdukcapil	4,21	
		2. Dinas Sosial	4,12	
		3. RSUD Kabupaten Balangan	4,53	
		Nilai Rata-Rata Pemda	4,29	A-

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun ini Dengan Target Jangka Menengah Dalam RPJMD

Jika dibandingkan dengan capaian Akhir RPJMD Nilai Indeks Pelayanan Publik tahun 2024 belum mencapai target akhir RPJMD dengan persentase capaian 87,37% dan masih kekurangan sebesar 0,62 poin. Pada dasarnya kekurangan ini adalah target minimal kinerja yang harus direalisasikan dan tentunya membutuhkan berbagai upaya dan inovasi yang komprehensif.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Dengan Standar Nasional/Propinsi

Nilai tertinggi PEKPPP diraih oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan jumlah nilai 4,55 dengan kategori Pelayanan Prima. Untuk Pemerintah Kabupaten Balangan berada di nomor urut 8 (delapan) dengan total nilai 4,29 dengan kategori Sangat Baik. Sedangkan Kabupaten yang menduduki nomor terakhir atau peringkat ke 13 (tiga belas) dari 13 Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan adalah Pemerintah Kabupaten Kotabaru dengan jumlah nilai 2,55 dengan kategori Cukup. Adapun hasil keseluruhan nilai Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

NILAI PEKPPP SE KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2024

No	Instansi	Nilai
1.	Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah	4,55
2.	Pemerintah Kota Banjarmasin	4,54
3.	Pemerintah Kabupaten Tapin	4,54
4.	Pemerintah Kabupaten Banjar	4,52
5.	Pemerintah Kota Banjarbaru	4,50
6.	Pemerintah Kabupaten Tabalong	4,49
7.	Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	4,46
8.	Pemerintah Kabupaten Balangan	4,29
9.	Pemerintah Kabupaten Barito Kuala	4,28
10.	Pemerintah Kabupaten Tanah Laut	4,23
11.	Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	3,79
12.	Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara	3,69
13.	Pemerintah Kabupaten Kotabaru	2,55

e. *Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan*

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan realisasi IPP tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Tersedia standar pelayanan yang memenuhi 14 komponen dan melibatkan masyarakat dalam melakukan penyusunan SP.
- b. Monev SP telah dilakukan, adanya publikasi SP dan ada review terhadap SP.
- c. Maklumat Pelayanan telah tersedia.
- d. Telah melaksanakan SKM sesuai dengan Permenpan RB yang berlaku dan telah dipublikasikan pada media elektronik dan non elektronik serta hasil SKM ditindaklanjuti.
- e. Memiliki kebijakan jam pelayanan dan aturan kode etik perilaku pelaksana pelayanan, serta adanya pemberian penghargaan petugas layanan dan menerapkan budaya pelayanan.
- f. Tersedia sarana prasarana parkir, fasilitas wajib layanan, fasilitas untuk penyandang disabilitas dan fasilitas penunjang lainnya hampir pada semua lokus namun ada beberapa yang masih belum sesuai aturan.
- g. Tersedianya sistem informasi pelayanan publik online dan adanya sistem pendukung operasional layanan dengan pemutakhiran data secara berkala.
- h. Tersedianya sarana pengaduan SP4N LAPOR dan mediasi pengaduan lainnya.
- i. Tersedianya sistem antrian yang memadai dan berfungsi dengan baik.

Namun dalam implementasinya, SKPD yang menjadi lokus UPP masih memiliki beberapa hambatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat antara lain :

- a. Sarana prasarana masih ada yang kurang optimal dan harus melalui proses pengadaan tahun berikutnya seperti kelayakan fasilitas ruang tunggu, fasilitas sarana *front office* harus lebih *comfort*.
- b. SKPD lokus telah memiliki tempat parkir namun belum semua menggunakan pelindung atau kanopi.
- c. Pemutakhiran data layanan harus dilakukan update per hari sementara yang existing saat ini hanya mingguan.
- d. Terkadang *website* layanan SKPD lokus tidak bisa dibuka aksesnya karena adanya gangguan keamanan internet.
- e. Ada beberapa dokumen SP yang belum dipisahkan antara komponen *service delivery* dan komponen *manufacturing*..

- f. Ada maklumat pelayanan pada SKPD lokus yang belum memuat unsur sesuai aturan, yakni belum memuat pernyataan memberikan pelayanan sesuai kewajiban dan akan melakukan perbaikan terus menerus.

Upaya yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Balangan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik adalah

1. Melakukan pembinaan secara menyeluruh terhadap SKPD pemangku pelayanan publik secara umum dan khususnya pada lokus penilaian PEKPP. Rapat juga dilakukan untuk memonitor saran perbaikan dari hasil penilaian tahun sebelumnya serta pemenuhan terhadap unsur yang dipersyaratkan.
2. Melakukan *coaching klinik* pembinaan dokumen layanan terutama pada *service delivery* dan *manufacturing* terhadap semua lokus dan calon lokus mengingat lokus setiap tahun berganti sampel.
3. Melakukan rapat koordinasi teknis dengan SKPD lokus dengan melibatkan Kementerian PAN RB dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Biro Organisasi) sebagai narasumber atau pendamping.
4. Melakukan monitoring tindaklanjut pelayanan publik melalui aplikasi elektronik kinerja organisasi atau e-Kino.
5. Monitoring dilakukan secara berkala yakni triwulan.
6. Rapat koordinasi teknis dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah terkait prioritas penganggaran SKPD lokus dalam hal pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan publik.

f. *Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya*

Upaya percepatan pencapaian target kinerja ini antara lain adalah dengan melakukan inovasi sebagaimana tabulasi data berikut :

IKU	Nama Inovasi	Manfaat
Indeks Pelayanan Publik	Coaching Klinik Pelayanan Publik	Merupakan inovasi pendampingan dan pembinaan pada SKPD dan Lokus yang menjadi Unit penyelenggara pelayanan publik terhadap 14 elemen layanan publik (<i>Manufactory dan Delivery Service</i>).

g. *Analisis Atas Program atau Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja*

Capaian Kinerja Program Tahun 2024

No	Uraian Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Keuangan	% Realisasi Kinerja	Efektifitas Program
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	142.799.186.565	131.085.370.598	91,80	100	Ya

Sumber Data Laporan SKPD dan Rekonsiliasi Data LKPJ Tahun 2024, data diolah

Berikut analisa program penunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi (Indikator Kinerja Nilai Indeks Pelayanan Publik):

No	Program	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Tindaklanjut
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Adanya regulasi pelayanan publik, adanya standar penilaian yang jelas.	Lokus setiap tahun berubah-ubah.	Pembinaan intensif pada SKPD lokus dan calon lokus.

8.5 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Realisasi dari target 86 indikator Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemerintah Kabupaten Balangan tahun 2024 adalah 87,07 dengan capaian 101,24 persen. Dari data tersebut diketahui bahwa capaian indikator Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) ini telah mencapai target yang ditetapkan dan masuk dalam kategori sangat tinggi.

NILAI SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT SKPD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2024

No	SKPD	Tahun 2024
1.	Sekretariat Daerah	89,73
2.	Sekretariat DPRD	85,94
3.	Inspektorat	84,25
4.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	88,84
5.	Dinas Kesehatan	85,27
6.	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	85,51
7.	Satuan Polisi Pamong Praja	82,23
8.	Dinas Sosial	85,34
9.	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup	83,96
10.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	86,62
11.	Dinas Perhubungan	84,75
12.	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	81,83
13.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	90,98
14.	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	92,53
15.	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	87,95
16.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	82,73
17.	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	92,99
18.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	90,24
19.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja	86,15
20.	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	85,04
21.	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	85,82
22.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	90,21
23.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	84,29
24.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	88,49
25.	Kecamatan Paringin	85,25
26.	Kecamatan Paringin Selatan	84,54
27.	Kecamatan Lampihong	90,56
28.	Kecamatan Baturandi	88,28
29.	Kecamatan Awayan	88,00
30.	Kecamatan Tebing Tinggi	84,24
31.	Kecamatan Juai	87,67
32.	Kecamatan Halong	88,06
33.	RSUD	88,43

No	SKPD	Tahun 2024
34.	Puskesmas Awayan	80,76
35.	Puskesmas Batumandi	83,48
36.	Puskesmas Paringin	87,52
37.	Puskesmas Parsel	89,19
38.	Puskesmas Tebing Tinggi	85,32
39.	Puskesmas Juai	84,41
40.	Puskesmas Halong	84,22
41.	Puskesmas Lokbatu	86,99
42.	Puskesmas Tanah Habang	81,42
43.	Puskesmas Uren	86,35
44.	Puskesmas Pirsus	80,37
45.	Puskesmas Lampihong	83,40
NILAI IKM Kabupaten		87,07

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa Nilai IKM Kabupaten Balangan pada tahun 2024 adalah 87,07. Pada tahun 2024 ini SKM dilakukan oleh seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan baik UPP ataupun non UPP. Dibandingkan dengan hasil Nilai IKM tahun 2023 sebesar 85,07 Nilai IKM tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 2 poin. Sebagai bentuk evaluasi SKPD pelaku SKM harus melakukan input data kinerja dan data realisasi kinerja atas janji perbaikan layanan yang mereka lakukan melalui E-Kino (Aplikasi Kinerja Organisasi) yang memuat *feedback* hasil perbaikan janji layanan atas laporan IKM tahun sebelumnya dan janji perbaikan tersebut dilakukan pemantauan oleh Bagian Organisasi secara *online*.

b. *Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Tahun 2023 dan 2022.*

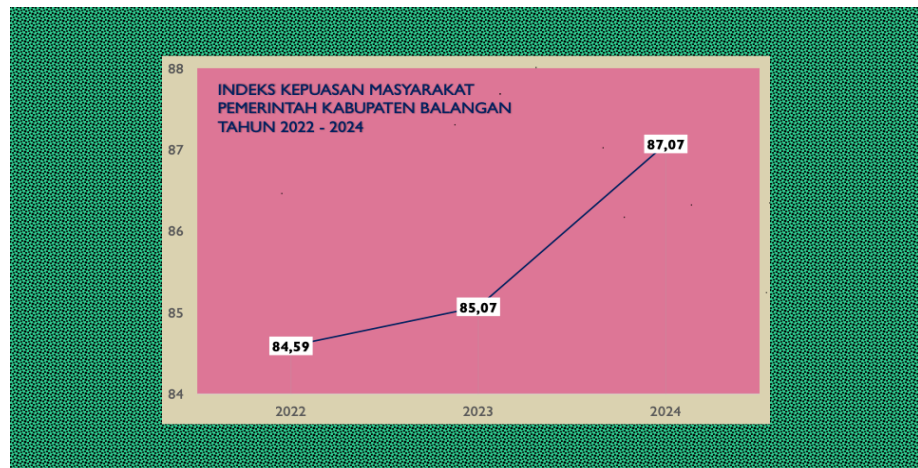
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2024 mengalami kenaikan realisasi sebesar 2 poin dengan kenaikan capaian sebesar 1,16 persen. Tabel hasil Survei Kepuasan Masyarakat SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan dari Tahun 2022, Tahun 2023 dan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel Hasil SKM Tahun 2022, 2023 dan 2024

NO	SKPD DAN UPP	NILAI SKM 2022	NILAI SKM 2023	NILAI SKM 2024
1.	Sekretariat Daerah	87,82	89,27	89,73
2.	Sekretariat DPRD	84,39	83,92	85,94
3.	Inspektorat	87,86	86,15	84,25
4.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	84,19	83,88	88,84
5.	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	88,84	86,12	Perubahan SKPD
6.	Dinas Kesehatan	Belum SKPD Baru	Belum SKPD Baru	85,27
7.	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	81,58	82,75	85,51
8.	Satuan Polisi Pamong Praja	76,88	81,77	82,23

NO	SKPD DAN UPP	NILAI SKM 2022	NILAI SKM 2023	NILAI SKM 2024
9.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pemberdayaan Masyarakat Desa	83,84	84,77	Perubahan SKPD
10.	Dinas Sosial	Belum SKPD Baru	Belum SKPD baru	85,34
11.	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup	73,46	78,60	83,96
12.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	84,51	86,94	86,62
13.	Dinas Perhubungan	83,53	84,50	84,75
14.	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	86,57	91,31	81,83
15.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	84,61	86,21	Perubahan SKPD
16.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Belum SKPD Baru	Belum SKPD Baru	90,98
17.	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	88,50	93,71	Perubahan SKPD
18.	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Belum SKPD Baru	Belum SKPD Baru	92,53
19.	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	88,87	85,49	87,95
20.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	82,60	82,66	82,73
21.	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	77,63	86,74	92,99
22.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Belum SKPD Baru	Belum SKPD Baru	90,24
23.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja	Belum SKPD Baru	Belum SKPD Baru	86,15
24.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pembangunan Daerah	86,71	86,20	Perubahan SKPD
25.	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	Belum SKPD Baru	Belum SKPD Baru	85,04
26.	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	81,61	86,01	85,82
27.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	90,01	88,75	90,21
28.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	81,41	86,21	84,29
29.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	87,21	86,47	88,49
30.	Kecamatan Paringin	82,80	85,12	85,25
31.	Kecamatan Paringin Selatan	85,31	87,55	84,54
32.	Kecamatan Lampihong	91,91	93,80	90,56
33.	Kecamatan Batumandi	87,61	86,96	88,28
34.	Kecamatan Awayan	87,26	87,77	88,00
35.	Kecamatan Tebing Tinggi	91,72	85,64	84,24
36.	Kecamatan Juai	87,59	87,62	87,67

NO	SKPD DAN UPP	NILAI SKM 2022	NILAI SKM 2023	NILAI SKM 2024
37.	Kecamatan Halong	86,24	85,85	88,06
38.	RSUD	81,88	86,16	88,43
39.	Puskesmas Awayan	83,75	79,46	80,76
40.	Puskesmas Batumandi	82,33	83,39	83,48
41.	Puskesmas Paringin	85,13	86,22	87,52
42.	Puskesmas Paringin Selatan	83,50	86,61	89,19
43.	Puskesmas Tebing Tinggi	80,50	86,37	85,32
44.	Puskesmas Juai	86,33	84,21	84,41
45.	Puskesmas Halong	81,89	84,50	84,22
46.	Puskesmas Lokbatu	86,27	87,35	86,99
47.	Puskesmas Tanah Habang	83,94	82,28	81,42
48.	Puskesmas Uren	88,81	85,77	86,35
49.	Puskesmas Pirsus	80,64	80,30	80,37
50.	Puskesmas Lampihong	84,54	84,25	83,40
	NILAI IKM Kabupaten	84,59	85,07	87,07



Data tabel rekap SKM diatas ada yang masih kosong karena masa peralihan status kelembagaan dari Perda SOTK tahun 2021 sejumlah 30 SKPD menjadi 32 SKPD dan ada SKPD yang mengalami pemisahan urusan. Kemudian ada SKPD non UPP yang melakukan SKM hanya sekali setahun. Sedangkan SKPD UPP dua kali setahun yakni per semester.

- c. *Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun ini Dengan Target Jangka Menengah Dalam RPJMD*
- Jika dibandingkan dengan capaian Akhir RPJMD Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2024 belum mencapai target akhir RPJMD dan masih kekurangan sebesar 2,93 poin.

d. *Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Dengan Standar Nasional/Propinsi*

Nilai SKM Kabupaten Kota se Kalimantan Selatan Tahun 2024

No	Instansi	Nilai
1.	Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah	86,18
2.	Pemerintah Kota Banjarmasin	88,73
3.	Pemerintah Kabupaten Tapin	87,05
4.	Pemerintah Kabupaten Banjar	86,67
5.	Pemerintah Kota Banjarbaru	88,70
6.	Pemerintah Kabupaten Tabalong	85,43
7.	Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	98,08
8.	Pemerintah Kabupaten Balangan	87,07
9.	Pemerintah Kabupaten Barito Kuala	88,00
10.	Pemerintah Kabupaten Tanah Laut	87,81
11.	Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	85,52
12.	Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara	84,76
13.	Pemerintah Kabupaten Kotabaru	86,01

e. *Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan*

Adapun faktor-faktor keberhasilan pencapaian kinerja ini antara lain adalah :

1. Adanya beberapa kebijakan daerah dalam bentuk Perda dan Perbup terkait pelayanan publik sebagai tindaklanjut UU Nomor 25 Tahun 2009.
2. Adanya Roadmap Reformasi Birokrasi Pemda Balangan dimana pelayanan publik merupakan salah satu dari 8 area RB General.
3. Adanya komitmen SKPD UPP untuk melakukan Survei Kepuasan Masyarakat, sebagai bentuk komitmen meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
4. Pada anggaran tahun 2023 telah dianggarkan pembangunan Mall Pelayanan Publik dan berlanjut di tahun 2024.
5. Adanya SOP Pelayanan Publik sebagai turunan dari Proses Bisnis.
6. Adanya komitmen untuk pemenuhan data kepatuhan pelayanan publik dari Ombudsman, karena terkadang SKPD lokus IPP juga menjadi SKPD lokus Ombudsman RI.

Adapun kendala yang masih dihadapi dalam implementasi SKM ini antara lain adalah :

1. Masih ada SKPD yang belum aktif melaporkan tindak lanjut SKM khususnya pada area atau unsur layanan yang rendah.
2. Masih ada SKPD yang keliru penentuan sampel dan perhitungan belum mengacu pada Permenpan Nomor 14 Tahun 2017, hal ini disebabkan SDM yang menangani sebelumnya dimutasi ke SKPD lain. Upaya perbaikan peningkatan kinerja pelayanan publik ke depan antara lain adalah :
 1. Inovasi SKM (SKM berbasis android) layanan dapat dihitung per hari.
 2. Melakukan pendampingan kepada beberapa SKPD yang menjadi catatan sesuai hambatan diatas untuk melaksanakan SKM sesuai aturan yang berlaku.

3. Mengadakan sosialisasi atau *coaching klinik* ataupun FGD terkait penyusunan SKM baik *online* maupun *offline*.
4. Melakukan monev SKM melalui Aplikasi E-Kino.
5. Melaksanakan monev *feedback* tindak lanjut SKM sebagai upaya perbaikan janji layanan (data SKM tahun n-1 dan tahun berjalan).
6. Melaksanakan peningkatan kapasitas ASN melalui peningkatan kompetensi aplikasi tindak lanjut SKM basis IT (*work at office* atau kunjungan).

f. *Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya*

Upaya percepatan pencapaian target kinerja adalah melakukan inovasi sebagaimana tabulasi data berikut :

IKU	Nama Inovasi	Manfaat
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Aplikasi E-Kino	Hasil dari dibangunnya aplikasi e-Kino adalah untuk mempermudah pengawasan data realisasi dan capaian kinerja SKPD pada beberapa area perubahan Reformasi Birokrasi yakni Akuntabilitas, Dokumen SAKIP, Reformasi Birokrasi, Manajemen Perubahan / Budaya Kerja, Penataan Organisasi, Tata Laksana, Diregulasi Kebijakan dan Pelayanan Publik dan kontrol hasil SKM SKPD setiap bulan.

g. *Analisis Atas Program atau Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja*

Capaian Kinerja Program Tahun 2024

No	Uraian Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Keuangan	% Realisasi Kinerja	Efektifitas Program
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	142.799.186.565	131.085.370.598	91,80	100	Ya

Sumber Data Laporan SKPD dan Rekonsiliasi Data LKPD Tahun 2024, data diolah

Berikut analisa program penunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi (Indikator Kinerja Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat):

No	Program	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Tindakan lanjut
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Adanya regulasi SKM, adanya aplikasi monev tindak lanjut skm,	SKM masih banyak yang manual dan masih banyak SKPD yang tidak menindaklanjuti hasil IKM.	Inovasi SKM android harian dan pembinnan berkala SKM serta monev hasil IKM.

Terkait sasaran strategis meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Balangan, Pemerintah Kabupaten Balangan telah melakukan penyusunan rancangan matrik resiko strategis daerah terkait indikator kinerja sasaran sebagaimana tabulasi dibawah ini :

Sasaran Strategis	Uraian Resiko	Rencana Tindak Pengendalian
Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi	Belum optimalnya rumusan sasaran strategis dan indikator kinerja pada perencanaan Instansi Pemerintah yang memenuhi kriteria SMART (<i>Specific</i> ,	Perbaikan dokumen Perubahan Renstra dan Penyusunan Teknokratik RPJMD

Sasaran Strategis	Uraian Resiko	Rencana Tindak Pengendalian
	<i>Measurable, Achievable, Relevant, and Time-Bound</i>	
	Belum optimalnya penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Daerah (LKPD) sesuai dengan standar akuntansi pemerintah, pengendalian intern dan pengendalian akuntansi serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan	Memperbaharui Kebijakan Akuntansi dan Melakukan Monev Sistem Pengendalian Intern dan Sistem Pengendalian Akuntansi. Realisasinya Bulan Desember 2024.

9. Sasaran Meningkatnya Status Desa Kabupaten Balangan

Tabel 3.10
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 9
Meningkatnya Kualitas SDG's Desa

No	Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2023	Kinerja 2024			Target Akhir RPJMD	Capaian Terhadap Akhir RPJMD	Realisasi / Capaian Terhadap Kab/Kota	Realisasi / Capaian Terhadap RPJMD Provinsi	Realisasi / Capaian Terhadap RPJMN
			Target	Realisasi	Capaian					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	Indeks Desa Membangun	0,7527	0,7997	0,8049	100,65	0,8459	95,15	-	-	-

Sumber Data Pemerintah Kabupaten Balangan Tahun 2024, data diolah

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Indeks Desa Membangun pada tahun 2024 adalah 0,8049. Hal ini melampaui target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Sehingga indikator kinerja ini memiliki capaian 100,65 persen. Dari data tersebut diketahui bahwa capaian indikator Indeks Desa Membangun masuk dalam kategori sangat tinggi.

Berdasarkan hasil perhitungan indikator IDM, di tahun 2024 dari 153 Desa yang ada di Kabupaten Balangan dibandingkan dengan di tahun 2023 adalah sebagai berikut :

	2023		2024	
MANDIRI	22	14,29%	67	43,79%
MAJU	103	66,88%	84	54,90%
BERKEMBANG	28	18,18%	2	1,31%
TERTINGGAL	0	0,00%	0	0,00%
SANGAT TERTINGGAL	1	0,65%	0	0,00%

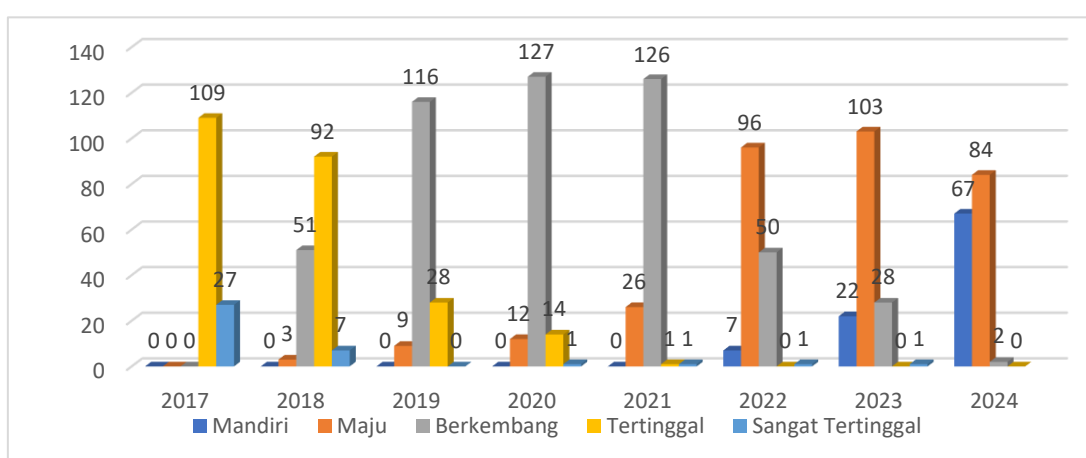
Sumber : idm.kemendesa.go.id

b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Tahun 2023 dan 2022.

Indeks Desa Membangun (IDM) mengklasifikasi desa menjadi lima status yakni: Desa Mandiri, Desa Maju, Desa Berkembang, Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal.

Data Jumlah Desa Berdasarkan Klasifikasi Status Desa IDM Tahun 2017-2024

Tahun	MANDIRI	MAJU	BERKEMBANG	TERTINGGAL	SANGAT TERTINGGAL	JUMLAH
2017	0	0	18	109	27	154
2018	0	3	51	92	7	154
2019	0	9	116	28	0	154
2020	0	12	127	14	1	154
2021	0	26	126	1	1	154
2022	7	96	50	0	1	154
2023	22	103	28	0	1	154
2024	67	84	2	0	0	153



Berdasarkan tabel dan grafik yang telah disajikan diatas bahwa pada Tahun 2023 jumlah desa yang ada di Kabupaten Balangan sebanyak 154 Desa, sedangkan untuk tahun 2024 jumlah desa yang ada di Kabupaten Balangan sebanyak 153 Desa, hal ini dikarenakan adanya pemekaran Desa Wonorejo ke Desa Sumber Rejeki Kecamatan Juai Kabupaten Balangan sesuai dengan Permendagri Nomor 01 Tahun 2017 tentang Penataan Desa. Pada tahun 2024 desa dengan klasifikasi Maju berjumlah 84 berkurang dari tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan terdapat 19 desa yang naik klasifikasi nya menjadi Desa Mandiri sehingga desa dengan klasifikasi Desa Mandiri meningkat dari tahun sebelumnya yaitu sebanyak 67 desa pada tahun 2024. Untuk desa dengan klasifikasi berkembang pada tahun 2024 berkurang menjadi 2 desa yaitu Desa Ajung dan Desa Kambiyaian Kecamatan Tebing Tinggi.

Selanjutnya, dapat diketahui pada saat ini jumlah desa dengan klasifikasi minimal maju di Kabupaten Balangan sebanyak 84 desa dan untuk Desa Mandiri sebanyak 67 Desa. Dalam menghitung realisasi terhadap indikator tersebut adalah jumlah desa dengan klasifikasi Maju ditambah dengan klasifikasi desa yang berstatus Mandiri dibagi jumlah desa di Kabupaten Balangan dikali dengan seratus.

Selanjutnya dengan adanya peningkatan dari status desa yang telah mengalami peningkatan menunjukkan data bahwa upaya pengentasan desa tertinggal dan sangat tertinggal juga dapat dikatakan sangat berhasil pencapaiannya sampai tahun 2024, hal ini bisa dilihat dari data jumlah desa tertinggal dan desa sangat tertinggal sudah tidak ada lagi.

c. *Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun ini Dengan Target Jangka Menengah Dalam RPJMD*

Realisasi kinerja Indeks Desa Membangun 0,8049 tahun 2024 jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam RPJMD adalah berada pada angka 0,8459 dan capaian kinerja sebesar 95,15 persen. Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa realisasi tahun 2024 Indeks Desa Membangun belum melampaui target Akhir RPJMD.

d. *Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Dengan Standar Nasional*

Realisasi kinerja tahun 2024 sebesar 0,8049 dan jika dibandingkan dengan realisasi kinerja secara Nasional sebesar 0,7034 maka progres keberhasilan kinerja yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Balangan meningkat secara signifikan.

Nilai IDM kabupaten Kota se Kalimantan Selatan tahun 2024

No	Instansi	Nilai
1.	Kabupaten Balangan	0,8049
2.	Kabupaten Banjar	0,7743
3.	Kabupaten Barito Kuala	0,7912
4.	Kabupaten Hulu Sungai Selatan	0,7799
5.	Kabupaten Hulu Sungai Tengah	0,8181
6.	Kabupaten Hulu Sungai Utara	0,7867
7.	Kabupaten Kotabaru	0,74
8.	Kabupaten Tabalong	0,8349
9.	Kabupaten Tanah Bumbu	0,8099
10.	Kabupaten Tanah Laut	0,7938
11.	Kabupaten Tapin	0,797
12.	Kota Banjarbaru	Tidak dinilai
13.	Kota Banjarmasin	Tidak dinilai

e. *Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan*

Permasalahan terkait indikator kinerja ini diantaranya :

1. Pemahaman terhadap status desa yang masih kurang, sehingga aparatur desa dan masyarakatnya salah mempersepsikan Status Desa Maju bahkan Status Desa Mandiri. Mereka beranggapan bahwa apabila desa sudah berstatus Maju bahkan Mandiri, desa tersebut tidak akan mendapat stimulus bantuan dari pemerintah lagi. Inilah salah satu penyebab yang membuat mereka enggan berpacu menjadikan desanya menjadi desa yang berstatus Maju ataupun Mandiri.
2. Letak geografis desa yang jauh dari kabupaten, sehingga akses jalan kurang memadai, dan sinyal internet pun tidak ada.
3. Kurang optimalnya sinergitas SKPD terkait dalam upaya memenuhi kriteria Indeks Desa Membangun.
4. Kurangnya SDM di Pemerintah Desa.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kenaikan IDM dapat dilihat dari Indeks Ketahanan Sosial (IKS), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKEI) dan Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL) yakni diuraikan sebagai berikut:

1. Indeks Ketahanan Sosial terdiri dari Dimensi Modal Sosial (indikator solidaritas sosial, memiliki toleransi, rasa aman penduduk, kesejahteraan sosial), Dimensi Kesehatan (indikator pelayanan kesehatan, keberdayaan masyarakat, dan jaminan kesehatan); Dimensi Pendidikan (indikator akses ke pendidikan dasar dan menengah, akses ke pendidikan non formal dan akses ke pengetahuan); dan Dimensi Permukiman (indikator akses ke air bersih, akses ke sanitasi, akses ke listrik, dan akses ke informasi dan komunikasi).

2. Indeks Ketahanan Ekonomi terdiri dari Dimensi Ekonomi (indikator keragaman produksi masyarakat desa, tersedia pusat pelayanan perdagangan, akses distribusi/logistik, akses ke Lembaga Keuangan dan Perkreditan, Lembaga Ekonomi, dan Keterbukaan Wilayah).
3. Indeks Ketahanan Lingkungan/Ekologi terdiri dari Dimensi Ekologi (indikator kualitas lingkungan dan potensi rawan bencana dan tanggap bencana).

Adapun salah satu sampel desa aspek ketahanan sosial dan desa tersebut meningkat status desanya adalah Desa Baruh Panyambaran Kecamatan Halong ditandai dengan beberapa kriteria kenaikan antara lain adanya peningkatan terhadap layanan kesehatan masyarakat, adanya kemudahan akses terhadap layanan masyarakat dan dalam peningkatan ekonomi, adanya layanan air bersih membaik dan murah serta jaringan komunikasi lancar dikarenakan Pemdes memfasilitasi penyediaan wifi.

Adapun upaya perbaikan yang harus dilakukan untuk pencapaian kinerja indikator ini adalah:

1. Memberikan pemahaman kepada pemerintah desa dan perangkat desa makna dan definisi operasional desa maju, desa mandiri dan kriteria desa lainnya. Demikian juga apa yang harus pemerintah desa lakukan untuk menuju ke desa yang maju dan mandiri dan bagaimana mempertahankan. Indikator-indikator masing-masing kriteria harus dijelaskan secara rinci agar dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan di desa dapat selaras dengan konsep kriteria desa yang akan dituju.
2. Melakukan rapat koordinasi teknis lintas sektoral yang digawangi oleh Dinas PPPAPKBPMMD terkait dengan akses sarana prasarana, akses layanan internet dan akses infrastruktur publik di desa. Adanya rekonsiliasi data infrastruktur desa dan layanan internet agar proses penganggaran dalam APBDesa tidak tumpang tindih dengan APBD.
3. Evaluasi dan monitoring beberapa kebijakan penempatan tenaga pendamping desa yang berasal dari dana dekonsentrasi seperti Tenaga Ahli Pendamping Kabupaten (TA Kabupaten), Pendamping Desa Kecamatan (PD), dan Pendamping Lokal Desa.
4. Penekanan sasaran yang lebih *outcome* pada beberapa program dan kegiatan strategis yang menjawab sasaran yaitu Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dengan Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah kabupaten/kota didukung dengan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa, Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa, Pembinaan Teknologi Tepat Guna, Pembinaan PKK dan Program Administrasi Pemerintahan Desa dengan kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa didukung dengan Pembinaan Penyelenggaraan Administrasi Desa, Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa, Pengelolaan Keuangan Desa, Pembinaan Pengelolaan Aset Desa, Penyusunan Produk Hukum Desa dan Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan.
5. Peningkatan dan sinergi dukungan Pemerintah Pusat yang sangat peduli dan konsentrasi melalui kebijakan pengucuran dana desa secara umum, baik regulasi maupun kebijakan lainnya sehingga dapat mendukung dalam pembangunan desa.
6. Peningkatan dan sinergi dukungan dan semangat yang tinggi dari jajaran Pemerintah Desa dalam menggerakkan pembangunan di desa dengan memanfaatkan secara optimal sumber daya yang dimiliki.
7. Inisiasi pengembangan desa digital, desa anti mal administrasi dan desa anti korupsi.

f. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Upaya percepatan pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan cara melakukan inovasi sebagaimana tabulasi data berikut :

IKU	Nama Inovasi	Manfaat
Indeks Desa Membangun	Kerjasama Desa melalui SID Sistem Informasi Desa dan IDM	Sebelum Kerjasama Desa ada : 3. Petugas pendata di desa belum melaksanakan secara maksimal, sehingga masih banyak data yang belum terisi. 4. Peran <i>stakeholder</i> belum maksimal. 5. Di bidang ekonomi desa ragu membentuk BUMDes. 6. Di bidang IDM masih banyak desa yang status Desa nya berkembang, bahkan masih ada 1 Desa yang statusnya Desa Tertinggal. Setelah Kerjasama Desa ada : 1. Meningkatnya kapasitas dan SDM petugas pendata di Desa. 2. Meningkatnya peran serta <i>stakeholder</i>. 3. BUMDes dan BUMDESMA mulai bermunculan terbentuk dan bergerak, sehingga memungkinkan usaha ekonomi desa lebih maju. Berdasarkan data IDM Tahun 2024, terlihat adanya perkembangan yang cukup signifikan. Beberapa desa menunjukkan kemajuan yang pesat. Di tahun 2023 desa yang berstatus Mandiri hanya 22 desa dari 153 desa yang ada di Kabupaten Balangan, dan di Tahun 2024 desa yang berstatus Mandiri sudah mencapai 67 Desa. Dan desa dengan klasifikasi status Desa Maju sudah mencapai 84 Desa. Sementara di Tahun 2024 ini desa dengan klasifikasi status Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal tidak ada lagi, yang semula di Tahun 2023 ada 1 desa yang berstatus Desa Sangat Tertinggal.

Disamping itu juga telah dilakukan penyusunan matrik resiko strategis operasioanl Pemerintah Daerah sebagaimana tabulasi data dibawah ini :

Sasaran Strategis	Uraian Resiko	Rencana Tindak Pengendalian
Meningkatnya Status Desa Kabupaten Balangan	Belum optimalnya percepatan pembangunan kawasan perdesaan	Optimalisasi pemenuhan komponen IDM pada status desa yang menjadi prioritas sesuai dengan Komponen IDM diantaranya Indikator Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan sebagai berikut : 1. Pemenuhan nakes dan fasilitas kesehatan terdekat;

		2. Pemenuhan fasilitas sektor pendidikan baik formal maupun non formal; 3. Pemberdayaan sektor ekonomi desa; 4. Pemenuhan fasilitas sosial kemasyarakatan, dan pemberdayaan LKD; 5. Pemenuhan terhadap indikator ketahanan bencana dan lingkungan.
--	--	---

g. *Analisis Atas Program atau Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja*

Capaian Kinerja Program Tahun 2024

No	Uraian Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Keuangan	% Realisasi Kinerja	Efektifitas Program
1.	Administrasi Pemerintahan Desa	16.721.392.000	14.398.183.992	86,11	100	Ya
2.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	13.419.728.200	12.574.029.355	93,70	48,40	-
3.	Peningkatan Kerjasama Desa	36.313.953.300	36.252.277.588	99,83	100	Ya

Sumber Data Laporan SKPD dan Rekonsiliasi Data LKPJ Tahun 2024, data diolah

Berikut analisa program penunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas SDG's Desa (Indikator Kinerja Indeks Desa Membangun):

No	Program	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Tindakanlanjut
1.	Administrasi Pemerintahan Desa	Sudah ada regulasi yang mengatur sehingga desa di tuntut untuk tepat waktu	Belum optimalnya kapasitas SDM perangkat desa	Peningkatan Kapasitas SDM
2.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Keterlibatan SKPD atau instansi terkait dalam pemberdayaan masyarakat adat.	Legalitas terhadap kelembagaan adat dan belum maksimalnya peran OPD.	Memberikan sosialisasi dan Bimbingan Teknis.
3.	Peningkatan Kerjasama Desa	Kemitraan dan kolaborasi antar SKPD dalam peningkatan kerjasama desa.	Belum optimalnya peran OPD terkait peningkatan kerjasama antardesa.	Memberikan sosialisasi dan Bimbingan Teknis.

D. REALISASI ANGGARAN

Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 4.320.998.847.341,91 atau mencapai 103,26% dari target yang telah ditetapkan. Pendapatan Daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 175.901.734.166,91 atau mencapai 183,30% dari target yang telah ditetapkan; Pendapatan Transfer sebesar Rp. 4.136.739.777.128,00 atau mencapai 101,38% dari target yang telah ditetapkan, dan Lain-Lain. Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp. 8.357.336.047,00 atau mencapai 103,16% dari target yang telah ditetapkan. Berdasarkan hal tersebut kontribusi tertinggi dari Pendapatan Daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah. Secara umum anggaran yang dialokasikan dalam APBD Kabupaten Balangan merupakan satuan pagu tertinggi guna pelaksanaan kegiatan. Sehingga apabila dalam pengeluaran tertentu tidak mencapai catatan target belanja dapat diartikan adanya efisiensi. Dengan pengeluaran tetap mengedepankan asas manfaat dan target kinerja masing-masing kegiatan yang telah direncanakan. Pada tahun 2024 anggaran Belanja Daerah Kabupaten Balangan dialokasikan sebesar Rp. 4.075.272.429.234,00 dengan rincian alokasi anggaran Belanja Operasional sejumlah Rp. 2.360.217.003.884,00 sedangkan untuk alokasi anggaran Belanja Modal sebesar Rp. 1.209.255.227.809, Belanja Tak Terduga dianggarkan Rp. 7.316.334.100,00 dan Belanja Transfer dianggarkan sebesar Rp. 498.483.863.441,00. Dari alokasi Belanja Daerah tersebut telah direalisasikan sebesar

Rp. 3.573.806.297.337,39 atau sebesar 87,69% dari alokasi anggaran yang ditetapkan yang terdiri dari Belanja Operasional 85,73%, Belanja Modal 87,01%, Belanja Tak Terduga 18,55%, serta belanja transfer sebesar 99,67%.

Pembiayaan Daerah yang termuat dalam APBD Kabupaten Balangan terdiri atas Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah. Pada sisi Penerimaan Pembiayaan Daerah terdiri dari SilPA tahun lalu, Penerimaan Kembali Penyertaan Modal, Penerimaan Kembali Piutang dan Penerimaan Utang. Sedangkan sisi pengeluaran pembiayaan terdiri dari Pembentukan Dana Cadangan dan Penyertaan Modal/Investasi. Selisih antara Penerimaan Pembiayaan dengan Pengeluaran Pembiayaan merupakan Pembiayaan Netto dan selisih antara Penerimaan Daerah dengan Belanja Daerah merupakan surplus/defisit belanja. Dari sisi Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2024. Anggaran Penyertaan Modal (Investasi) Daerah ditargetkan sebesar Rp. 750.000.000.000,00 terealisasi 100%. Sehingga Pembiayaan Netto Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp. 109.227.386.380,67. Dengan demikian diketahui bahwa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenaan adalah sebesar Rp. 637.965.163.623,85.

Adapun Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan 2023 sebagaimana tabulasi data berikut :

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
Untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%	REALISASI 2023 (Rp.)
4	PENDAPATAN DAERAH	4.184.500.893.232,00	4.321.010.007.341,91	103,26	2.760543.725.654,01
4.1	PEDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	95.965.787.433,00	175.901.734.166,91	183,30	137.007.405.232,01
4.1.01	Pajak Daerah	13.722.500.000,00	17.931.267.653,50	130,67	13.907.676.851,00
4.1.02	Retribusi Daerah	2.222.820.000,00	2.551.421.071,00	114,78	2.366.139.331,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	21.117.190.767,00	18.345.765.305,00	86,88	14.874.367.772,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	58.903.276.666,00	137.073.280.137,41	232,71	105.859.221.278,01
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	4.080.433.708.441,00	4.136.750.937.128,00	101,38	2.622.936.320.422,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.985.933.708.441,00	4.029.220.927.814,00	101,09	2.509.925.057.280,00
4.2.01.01	Dana Perimbangan	3.856.423.775.441,00	3.894.309.089.224,00	100,98	2.380.860.170.980,00
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	0,00	0	16.166.958.000,00
4.2.01.05	Dana Desa	114.421.503.000,00	114.314.789.590,00	99,91	112.897.928.300,00
4.2.01.06	Insentif Fiskal	15.088.430.000,00	20.597.049.000,00	136,51	0,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	94.500.000.000,00	107.530.009.314,00	113,79	113.011.263.142,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	94.500.000.000,00	107.530.009.314,00	113,79	113.011.263.142,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	8.101.397.358,00	8.357.336.047,00	103,16	600.000.000,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	0,00	421.917.285,00	0	600.000.000,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	8.101.397.358,00	7.935.418.762,00	97,95	0
5	BELANJA DAERAH	4.075.272.429.234,00	3.573.874.203.960,39	87,70	2.292.344.562.265,65
5.1	BELANJA OPERASI	2.360.217.003.884,00	2.023.478.452.733,35	85,73	1.403.981.021.061,62
5.1.01	Belanja Pegawai	614.502.877.115,00	528.346.491.670,00	85,98	437.938.657.742,00
5.1.02	Balanza Barang dan Jasa	1.506.803.774.658,00	1.292.777.509.260,70	85,80	795.194.098.965,62
5.1.05	Belanja Hibah	227.281.970.711,00	193.340.529.302,65	85,07	165.622.074.354,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	11.628.381.400,00	9.013.922.500,00	77,52	5.226.190.000,00
5.2	BELANJA MODAL	1.209.255.809,00	1.052.174.676.702,04	87,01	580.674.088.157,03
5.2.01	Belanja ModalTanah	26.035.500.000,00	8.119.274.250,00	31,19	0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	387.542.617.012,00	370.854.449.606,00	95,69	161.050.737.928,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	337.350.155.747,00	274.000.297.829,17	81,22	99.741.722.125,39
5.2.04	Belanja Modal Jalan,Jaringan dan Irigasi	454.867.342.450,00	396.492.146.916,87	87,17	313.533.424.903,64
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	785.885.500,00	778.523.500,00	99,06	5.354.696.000,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	2.673.727.100,00	1.929.984.600,00	72,18	993.507.200,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	7.316.334.100,00	1.357.500.000,00	18,55	1.602.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%	REALISASI 2023 (Rp.)
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	7.316.334.100,00	1.357.500.000,00	18,55	1.602.500.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	498.483.863.441,00	496.863.574.525,00	99,67	306.086.953.047,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	1.734.701.284,00	1.730.148.884,00	99,74	1.825.260.947,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	496.749.162.157,00	495.133.425.641,00	99,67	304.261.692.100,00
	SURPLUS/DEFISIT	109.228.463.998,00	747.135.803.381,52	684,01	468.199.163.388,36
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	640.771.536.002,00	640.772.613.619,33	100	222.572.372.613,97
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	640.771.536.002,00	640.772.613.619,33	100	222.572.372.613,97
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman daerah	0	1.000.000,00	0	0
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	750.000.000.000,00	750.000.000.000,00	100	50.000.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	750.000.000.000,00	750.000.000.000,00	100	50.000.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	(109.228.463.998,00)	(109.227.386.380,67)	0	172.572.372.613,97
	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAN	0	637.908.417.000,85	0	640.771.536.002,33

E. Hasil Evaluasi SAKIP Pemda, Rekomendasi Menpan RB dan Rencana Aksi Pemda

Berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Balangan Tahun 2024 yang mengacu pada Surat Nomor : B/411/AA.05/2024 hal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024 tanggal 3 September 2024, tabulasi hasil evaluasi, rekomendasi implementasi SAKIP dari Kemenpan RB dan Rencana Aksi Pemda terlihat dalam tabulasi dibawah ini :

NO	HASIL EVALUASI MENPAN	REKOMENDASI MENPAN	RENCANA AKSI PEMDA BALANGAN
A	Perencanaan Kinerja		
1.	Pemerintah Kabupaten Balangan telah berupaya melakukan perbaikan dan penyusunan penjenjangan kinerja level Kabupaten dan PD. Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan kinerja, diantaranya sebagai berikut:		
	a. Rencana Aksi pada level PD belum sepenuhnya disusun dengan memperhatikan keterkaitan antara sasaran strategis/kinerja yang ingin dicapai dengan program/kegiatan/sub kegiatan yang dimiliki. Hal ini terlihat dengan adanya kinerja pada program/kegiatan/sub kegiatan belum relevan dan cukup untuk menunjang kinerja strategis/sasaran perangkat daerah;	1. Mendorong adanya peningkatan kualitas rencana aksi pada level PD dengan memastikan bahwa kinerja program / kegiatan / sub kegiatan yang dituangkan benar-benar memiliki keterkaitan secara langsung dan cukup untuk mempengaruhi pencapaian sasaran strategis/kinerja PD;	Telah melakukan penyusunan pohon kinerja dan cascading kinerja dengan difasilitasi oleh Kemenpan RB di Banjarmasin baik pohon kinerja Pemda dan SKPD dan telah menuangkan pohon kinerja ke dalam dokumen perencanaan.
	b. Pohon kinerja telah disusun berdasarkan isu-isu strategis yang dihadapi pada level Pemerintah Daerah dan juga telah diturunkan sampai level terkecil, namun dalam penjenjangan kinerja antar level masih ditemukan beberapa kondisi kinerja yang sama antar level kinerja, khususnya pada level kinerja	2. Mereviu kembali pohon kinerja yang telah dimiliki dengan cara memastikan penjenjangan antar level kinerja, khususnya pada level kinerja taktikal ke bawah dibangun secara logis, yaitu memiliki hubungan kausalitas antar level kinerja sehingga pencapaian kondisi kinerja dapat optimal tercapai;	Telah dilakukan <i>review</i> pohon kinerja dan cascading kinerja baik oleh internal Tim Sakip maupun Tim Sakip SKPD dan difasilitasi oleh Kemenpan RB.

NO	HASIL EVALUASI MENPAN	REKOMENDASI MENPAN	RENCANA AKSI PEMDA BALANGAN
	taktikal ke bawah sehingga hubungan sebab akibat untuk mempengaruhi pencapaian kinerja belum optimal terjadi;		
	c. Identifikasi crosscutting kinerja lintas PD sebagai bagian dari proses kolaborasi kinerja lintas sektor dalam mewujudkan kinerja strategis belum tergambar dengan baik sehingga pola kolaborasi kinerja lintas PD maupun terhadap stakeholder lainnya belum dapat dipastikan keandalannya dalam mendukung kinerja yang bersifat makro maupun isu strategis dari PD;	3. Menyempurnakan crosscutting kinerja yang menggambarkan sharing outcome antar lintas tugas dan fungsi PD disusun dengan memperhatikan identifikasi dari keterlibatan setiap PD yang ada untuk mengawal kinerja lintas sektoral yang bersifat makro dan yang menjadi isu strategis. kemudian ditindaklanjuti ke dalam perencanaan kinerja masing-masing PD sesuai dengan kontribusi yang dibutuhkan pada crosscutting tersebut;	Telah dilakukan penyusunan crosscutting kinerja mengacu pada isu strategis pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, IPM dan tata kelola pemerintahan dan kinerja strategis lainnya dan sedang dalam masa penyempurnaan untuk menuangkan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah dan SKPD.
B	Pengukuran Kinerja		
2.	Pemerintah Kabupaten Balangan telah melakukan pengembangan aplikasi e-SAKIP Kabupaten Balangan untuk monitoring dan evaluasi kinerja serta sudah membuat SOP pengumpulan dan pengukuran data kinerja. Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam pengukuran kinerja, diantaranya sebagai berikut:		
	a. Dokumen IKU formal sebagian PD belum sepenuhnya memiliki definisi operasional yang andal. Hal ini dapat dilihat dari adanya beberapa formulasi perhitungan indikator kinerja tidak relevan dengan ukuran kinerja yang akan diwujudkan, contohnya :	4. Melakukan reviu pada sebagian IKU PD agar memiliki definisi operasional yang andal dengan memastikan formulasi perhitungan indikator kinerja relevan dengan ukuran kinerja yang akan diwujudkan;	Telah dilakukan reviu pada IKU SKPD berdasarkan hasil koreksi Kemenpan RB dalam LHE SAKIP tahun sebelumnya dan memastikan rumus yang dipakai terutama pada level taktikal adalah benar dan tepat.
	- Pada indikator kinerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yaitu "persentase Puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar" namun formulasinya adalah "jumlah Puskesmas dengan tenaga kesehatan sesuai standar dibagi jumlah tenaga kesehatan dikalikan seratus persen";		
	- Pada indikator kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, yaitu "Persentase Data Sektoral yang Termanfaatkan", namun formulasi mengukur "persentase		

NO	HASIL EVALUASI MENPAN	REKOMENDASI MENPAN	RENCANA AKSI PEMDA BALANGAN
	OPD yang memanfaatkan data sektoral; - Pada indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, yaitu "Tingkat partisipasi masyarakat, namun formulasinya adalah "jumlah masyarakat yang sudah diberikan wawasan politik dibagi jumlah pemilih (DPT) dikalikan seratus persen.		
	b. Aplikasi-SAKIP Kabupaten Balangan belum sepenuhnya efektif untuk dimanfaatkan sebagai sistem monitoring dan evaluasi kinerja. Hal ini disebabkan masih ditemukannya penetapan target kinerja berjenjang (program, kegiatan dan sub kegiatan) yang tidak sesuai dengan kebutuhan, misalnya ada beberapa target yang tidak ditetapkan, namun memiliki realisasi pencapaian. Namun juga ada beberapa target yang ditetapkan, namun realisasi pencapaian belum dilaporkan;	5. Mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi e-SAKIP Kabupaten Balangan sebagai sarana monitoring dan evaluasi kinerja dengan cara memastikan penetapan target kinerja berjenjang (program, kegiatan dan sub kegiatan) agar sesuai dengan kebutuhan, yaitu menetapkan target berkala sesuai dengan kondisi real di lapangan dan juga menyampaikan realisasi pencapaian kinerja tepat waktu;	Saat ini telah dilakukan penyempurnaan terhadap aplikasi SAKIP replikasi Sakip HSS dan sudah memuat menu pengukuran kinerja organisasi dan individu melalui pengukuran PK dan SKP. Disamping itu juga melakukan penambahan menu pengendalian resiko strategis dan operasional.
	c. Hasil pengukuran kinerja berjenjang yang telah dilakukan belum sepenuhnya digunakan sebagai dasar perbaikan strategi, kebijakan, aktivitas dan anggaran guna mencapai kinerja yang telah ditetapkan.	6. Mengoptimalkan pemanfaatan hasil pengukuran kinerja berjenjang untuk dijadikan sebagai dasar perbaikan strategi, kebijakan, aktivitas dan anggaran guna mencapai kinerja yang telah ditetapkan;	Hasil pengukuran kinerja dan temuan-temuan dalam pelaporan kinerja terutama pada pencapaian target kinerja yang tidak sesuai dan program strategis yang tidak terlaksana akan menjadi bahan masukan dalam dialog kinerja penyusunan dokren SKPD dan dokren Pemda.
C	Pelaporan Kinerja		
3.	Pemerintah Kabupaten Balangan telah berupaya meningkatkan kualitas penyajian informasi dalam LPPD dan LAKIP seluruh PD melalui sosialisasi pengerjaan laporan kinerja. Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam pelaporan kinerja, diantaranya sebagai berikut:		
	a. Laporan kinerja pada level Pemerintah Daerah dan PD sudah menyajikan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja, namun analisis yang disajikan belum mengarah ke dampak pencapaian kinerja program/kegiatan sehingga tidak didapatkan informasi yang jelas terkait sejauh mana program/kegiatan tersebut	7. Meningkatkan kualitas laporan kinerja pada level Pemerintah Daerah dan PD dengan cara memastikan penyajian analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja untuk dapat menggambarkan dampak sejauh mana pencapaian kinerja program/kegiatan tersebut	Telah dilakukan asistensi penyusunan laporan kinerja SKPD oleh Tim Bagian Organisasi dan sebelumnya melakukan zoom dengan Kemenpan RB terkait mekanisme penyusunan laporan yang benar dan sesuai aturan. Telah dikeluarkan surat edaran penyusunan LKIP ke SKPD berdasarkan pada Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 dan juga

NO	HASIL EVALUASI MENPAN	REKOMENDASI MENPAN	RENCANA AKSI PEMDA BALANGAN
	menunjang kinerja strategis atau tidak;	menunjang kinerja strategis yang ingin diwujudkan;	asistensi terhadap SKPD yang difasilitasi oleh Kemenpan RB di Banjarmasin pada tanggal 3 dan 4 Pebruari 2025.
	b. Belum maksimalnya pemanfaatan laporan kinerja, khususnya pada level PD untuk dijadikan dasar penetapan strategi atau aktivitas dan penetapan target kinerja pada perencanaan kinerja tahun depan.	8. Mengoptimalkan pemanfaatan laporan kinerja, khususnya pada level PD untuk dijadikan dasar penetapan strategi atau aktivitas dan penetapan target kinerja pada perencanaan kinerja tahun depan;	Catatan-catatan temuan dalam LKIP tahun 2024 akan dijadikan bahan masukan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahun 2025 dan menjadi objek dalam dialog kinerja SKPD untuk melakukan review terhadap target di dokren yang akan datang RPJMD dan Renstra 2025-2029.
D	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal		
4.	Pemerintah Kabupaten Balangan telah melakukan evaluasi AKIP internal pada seluruh PD. Sudah dilakukan upaya peningkatan kualitas evaluator internal dengan melakukan bimbingan teknis bagi seluruh evaluator internal. Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, diantaranya sebagai berikut:		
	a. Laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang disusun belum sepenuhnya berkualitas. Hal ini disebabkan masih ditemukannya laporan hasil evaluasi yang standar isinya berbeda-beda antar PD sehingga perbaikan SAKIP di lingkungan antar PD tidak sama dan merata;	9. Mendorong adanya peningkatan kualitas laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal dengan muatan isi laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang terstandar, sehingga perbaikan implimentasi SAKIP akibat tindaklanjut laporan tersebut dapat merata pada setiap PD yang dievaluasi;	Melakukan monev LHE secara berkala dan melakukan review terhadap LKJ Pemda dan dialog dengan SKPD.
	b. Belum optimalnya upaya pemantauan dan reviu oleh Inspektorat atas tindaklanjut hasil evaluasi internal yang dilakukan kepada seluruh PD yang dievaluasi. Hal ini terlihat dari masih belum seluruh PD melakukan tindaklanjut yang optimal terhadap rekomendasi yang ada dalam LHE AKIP Internal.	10. Mendorong pelaksanaan pemantauan secara berkala rekomendasi yang diberikan kepada PD melalui LHE AKIP internal guna memastikan bahwa tindaklanjut yang dilakukan dalam menjawab rekomendasi tersebut telah sesuai dengan yang diinginkan oleh evaluator internal dan dapat dimanfaatkan sebagai umpan balik perbaikan manajemen kinerja secara berkelanjutan.	Melakukan monev kepada SKPD secara berkala untuk memantau tindaklanjut hasil temuan berdasarkan LHE tahun sebelumnya baik melalui aplikasi ataupun manual.

F. Piagam Penghargaan

Pada Tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Balangan banyak menerima penghargaan, penghargaan adalah suatu bentuk dari pengakuan tertulis dari orang lain baik secara kelembagaan instansi pemerintah maupun swasta. Penghargaan yang diberikan merupakan sebuah motivasi bagi Pemerintah Kabupaten Balangan untuk melakukan perbaikan terus menerus dan berkelanjutan demi Balangan yang lebih baik dan lebih maju serta lebih sejahtera.

Adapun Penghargaan yang diterima pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

No.	Tanggal	Tempat	Penghargaan	Oleh	Foto Kegiatan
1.	17 Januari 2024	Di Gedung Mahligai Pancasila, Kota Banjarmasin	Pemerintah Kabupaten Balangan Menerima Hasil Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2023 Diberikan Oleh OMBUSMAN RI	Ketua Ombudsman Mokhammad Najih, S.H., M. HUM., PH.D	
2.	25 Januari 2024	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM , Banjarbaru	Piagam Predikat Kabupaten/ Kota Peduli Hak Asasi Manusia Sedunia Ke-75 Tahun 2023 Diberikan Oleh Kementerian Hukum Dan HAM Provinsi Kalimantan Selatan	Kepala kantor Wilayah kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan, Faisol Ali	
3.	29 Februari 2024	Hotel Bidakara, Jakarta	Piagam Penghargaan Kepala Daerah Pendukung Pengelolaan Zakat Terbaik Diberikan Oleh Badan Amil Zakat Nasional	Ketua Badan Amil Zakat Nasional, Prof. Dr. KH. Noor Achmad, MA	
4.	4 Maret 2024	Ruang Rapat Bupati	Piagam Penghargaan Kabupaten Balangan Terbaik III Response Rate Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintahan Wilayah Kalimantan Selatan Tahun 2023 Diberikan Oleh Kantor Wilayah Direktorat Jendral Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan Syafriadi, S.E., M.Ec., Ph.D	
5.	7 Mei 2024	Aula BPK Kal Sel	Piagam Penghargaan Atas Pencapaian Opini wajar tanpa pengecualian 11X Berturut- turut Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Diberikan Oleh BPK	Kepala Perwakilan BPK Kalsel, Rahmadi, S.E., M.M., CA, CSFA	
6.	'28 Juni 2024	Gedung Gradhika Bhakti Paraja, Semarang	Penganugerahan Tanda Penghargaan Bidang pembangunan Keluarga, kependudukan dan Keluarga Berencana	Kepala BKKBN RI, Hasto Wardoyo	

No.	Tanggal	Tempat	Penghargaan	Oleh	Foto Kegiatan
			(Bangga Kencana) Tahun 2024 Diberikan Oleh Kementerian BKKBN RI		
7.	'26 Juli 2024	Hotel Madani, Medan	Penghargaan PGM Award Diberikan Oleh PGM Indonesia	Ketua Umum PGM Indonesia Ir. Yaya Ropandi, S. Pd.I., M. Si	
8.	'8 Agustus 2024	Krakatau Grand Ballroom, TMI, Jakarta Timur	Penghargaan Universal Health Coverage Award 2024 Diberikan Oleh BPJS	Wakil Presiden RI, Prof. Dr (HC) K.H Ma'ruf Amin	
9.	'14 Agustus 2024	Titik 0 KM Banjarmasin	Piagam Penghargaan Lencana Bakti Desa Pertama Diberikan Oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Indonesia	Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Indonesia Prof. (H.C) Dr. (H.C) Abdul Halim Iskandar, M.Pd	
10.	'14 Agustus 2024	Titik 0 KM Banjarmasin	Penghargaan Prestisius "Satu Wasaka Award" Diberikan Oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan	Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor	
11.	'23 Agustus 2024	Lapangan Polri KM. 21 Banjarbaru	Penghargaan Sinergitas "Polda kalsel Apresiasi Kolaborasi pemerintahan Kabupaten Balangan dengan masyarakat" Diberikan Oleh Polda Kalsel	Kapolda kalsel, Irjen Pol Winarto, S.H.M.H	
12.	'2 Oktober 2024	Grand Ballroom Birawa Hotel Bidakara Jakarta	Pemnghargaan Sistem Akuntabilitas kinerja Instansi pemerintahan (SAKIP) Award Tahun 2024 Diberikan Oleh Kementerian PANRB	Mentri PANRB, Abdullah Azwar Anas	
13.	'12 September 2024	Ballroom Plaza BP Jamsostek, Jakarta Selatan	Paritrana Award Diberikan Oleh BPJS Ketenagakerjaan	Wakil Presiden RI Prof. Dr (HC) K.H Ma'ruf Amin	
14.	'07 September 2024	Ballroom JIExpo Kemayoran Jakarta	Piagam Penghargaan Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Sistem Transportasi Perkotaan Tahun 2024 Kemenhub	Menteri Perhubungan RI Ir. Budi Karya Sumadi	

No.	Tanggal	Tempat	Penghargaan	Oleh	Foto Kegiatan
15.	'21 September 2024	Auditorium ULM Banjarbaru, Kalimantan Selatan	Penghargaan Program Studi di Luar Kampus Utama ULM Diberikan Oleh ULM	Rektor ULM, Prof. Dr Ahmad, SE., M.Si	
16.	'05 Desember 2024	Hotel Mercure Surabaya	Penghargaan Innovative Government Award (IGA) Diberikan Oleh Kemendagri RI	Kemendagri RI Muhammad Tito Karnavian	
17.	'11 Desember 2024	Ballroom Swissbel Hotel Borneo, Banjarmasin	Penghargaan Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Tahun 2024 Publik Dari Ombudsman RI	Plt Gubernur KalSel H. Muhidin	
18.	'12 Desember 2024	JW Mrriot, Jakarta	Penghargaan Apresiasi Kinerja Pemerintah Daerah Terbaik dalam Aspek Pemenuhan Kesejahteraan Masyarakat dan Pengelolaan Pemerintah yang Efektif Diberikan Oleh Kemendagri RI	Kemendagri RI Muhammad Tito Karnavian	
19.	'18 Desember 2024	Hotel Grand Sahid, Jakarta	Penghargaan APBD Award Diberikan Oleh Kemendagri RI	Wakil Menteri Dalam Negeri, Dr. Bima Arya Sugiarto, S.I.P., M.A	
20.	'04 Januari 2024	Jakarta	Piagam Penghargaan Sistem Merit Dalam Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Tahun 2023 Diberikan Oleh BKN	Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, Agus Pramusinto	
21.	'17 September 2024	Palembang	Penghargaan Penanggulangan AIDS Tuberkolosis-Malaria (ATM) Tahun 2024 Diberikan Oleh Asosiasi Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia (ADINKES)	Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan RI, dr. M. Subuh	



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

BAB IV PENUTUP KESIMPULAN



- A. CAPAIAN KINERJA TUJUAN
- B. CAPAIAN KINERJA PADA PERJANJIAN KINERJA
- C. UPAYA PERBAIKAN DAN RENCANA AKSI

BAB IV PENUTUP

KESIMPULAN

A. Capaian Kinerja pada Tujuan

Realisasi dan Capaian Kinerja pada Indikator Tujuan Tahun 2024 sebagaimana tabulasi data berikut:

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024	Target Akhir RPJMD	Keterangan
1.	Meningkatnya Infrastruktur Wilayah Perdesaan dan Perkotaan	Indeks Infrastruktur Wilayah	77,79			85,82	
2.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	68,48			69,38	
3.	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan	Pertumbuhan Ekonomi	3,3 – 3,5			4 – 4,5	
4.	Menurunnya Angka Pengangguran Terbuka	Angka Pengangguran Terbuka	2,37			2,3	
5	Meningkatnya Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Yang Berkualitas	Angka Rata-rata Lama Sekolah	8,63			9,17	
		Angka Harapan Lama Sekolah	12,98			13,24	
		Usia Harapan Hidup	68,52			68,92	
6	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	61,80			65,80	
7	Meningkatnya Kualitas Kehidupan Sosial, Budaya, dan Agama serta Pemerintahan Yang Harmonis dan Kondusif	Angka Kemiskinan	5,1 – 4,9			4,9- 4,7	
		Angka Konflik Sosial Bernuansa SARA	0			0	
		Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum	100			100	
		Persentase Pengembangan Seni dan Budaya	81			100	

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024	Target Akhir RPJMD	Keterangan
8	Meningkatnya Nilai Indeks Desa Membangun	Indeks Desa Membangun	0,6795			0,9595	

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024	Target Akhir RPJMD	Keterangan
1.	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi	3,3-3,5	4,17*	126,36	4-4,5	Realisasi belum melampaui target akhir
2.	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia	70,61	73,83	104,56	71,50	Realisasi melampaui target akhir
3.	Menurunnya Kemiskinan	Angka Kemiskinan	5,1 - 4,9	4,87	104,51	4,9-4,7	Realisasi belum melampaui target akhir
4.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Indeks Reformasi Birokrasi	61,80	70,01*	113,28	65,80	Realisasi melampaui target akhir

B. Capaian Kinerja pada Perjanjian Kinerja

Realisasi Indikator Kinerja Sasaran pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebagaimana tabel berikut:

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024	Kategori
1.1 Sasaran : Meningkatkan Kontribusi Ekonomi Sektor Unggulan Non Pertambangan						
1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Industri Pengolahan	Angka	4,49	4,01*	89,31	Tinggi
2.	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan	Angka	17,40	15,54*	89,31	Tinggi
3.	Laju Pertumbuhan Ekonomi Pertanian dan Perikanan	Angka	9,79	8,74*	89,27	Tinggi
4.	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pariwisata	Angka	11,03	9,85*	89,30	Tinggi
1.2 Sasaran : Meningkatkan Pertumbuhan Investasi						
5.	Persentase Peningkatan Investasi Daerah	Persentase	51,13	52,63	102,93	Sangat Tinggi

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024	Kategori
2.1 Sasaran : Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat						
6.	Usia Harapan Hidup	Usia	73,89	73,87	99,97	Sangat Tinggi
2.2 Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pendidikan						
7.	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Angka	8,63	8,13	94,21	Sangat Tinggi
8.	Angka Harapan Lama Sekolah	Angka	12,98	13,09	100,85	Sangat Tinggi
2.3 Sasaran : Meningkatnya Pengeluaran Perkapita						
9.	Pengeluaran Perkapita	Angka	1.109.546	1.027.083	92,57	Sangat Tinggi
3.1 Sasaran : Meningkatnya Ketimpangan Pendapatan						
10.	Indeks Gini Rasio	Indeks	0,258	0,258	100	Sangat Tinggi
3.2 Sasaran : Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka						
11.	Tingkat Pengangguran Terbuka	Angka	2,37	2,69	86,50	Tinggi
4.1 Sasaran : Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi						
12.	Nilai Sakip	Angka	74,40 (BB)	72,09 (BB)	96,90	Sangat Tinggi
13.	Nilai Opini BPK	Predikat	WTP	WTP	100	Sangat Tinggi
14.	Nilai EKPPD	Angka	3,593	3,3047*	91,98	Sangat Tinggi
15.	Nilai IPP	Indeks	4,51 (A)	4,29 (A)	95,12	Sangat Tinggi
16.	Nilai IKM	Indeks	86	87,07	101,24	Sangat Tinggi
4.2 Sasaran : Meningkatnya Kualitas SDGs Desa						
17.	Indeks Desa Membangun	Indeks	0,7997	0,8049	100,65	Sangat Tinggi

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada tabel di atas dapat diketahui:

1. Target dengan capaian realisasi di atas 100% sebanyak 4 target.
2. Target dengan capaian realisasi tepat 100% sebanyak 2 target.
3. Target dengan capaian realisasi di bawah 100% sebanyak 11 target; dan
4. Target yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak 0 target.

C. Upaya Perbaikan dan Rencana Aksi

Pemerintah Kabupaten Balangan telah melakukan Penyusunan Rencana Aksi Perbaikan Implementasi SAKIP berdasarkan LHE Kemenpan RB Nomor : B/411/AA.05/2024 hal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024 tanggal 3 September 2024 dimana hasil evaluasi menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Balangan memperoleh nilai 72,09 atau predikat BB. Adapun beberapa rencana aksi atas perbaikan hasil evaluasi yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Balangan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

A. Upaya Perbaikan yang Telah Dilakukan pada Tahun 2024

1. Dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah:
 - Pemerintah Daerah telah menyusun Rancangan Awal RPJPD Kabupaten Balangan Tahun 2025-2045.
 - Pemerintah Daerah akan menyusun rancangan teknokratik RPJMD Kabupaten Balangan tahun 2025 – 2029.
 - Penyusunan dokumen perencanaan pemerintah daerah Kabupaten Balangan (RPJPD dan RPJMD) disusun dengan memperhatikan tujuan dan sasaran strategis berorientasi hasil (result oriented), serta memastikan kualitas indikator kinerja agar memenuhi kriteria yang SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-Bound) terutama pada kriteria spesifik, relevan dan terukur.
 - Pohon kinerja hasil asistensi dengan Kemenpanrb dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan pemerintah daerah.
2. Dokumen Perencanaan SKPD : SKPD telah melakukan penyesuaian renstra berdasarkan cascading hasil asistensi dengan Kemen PANRB.
3. Sebanyak 30 (Tiga Puluh) SKPD telah dilakukan Asistensi Pohon Kinerja dan Cascading bersama Kementerian PAN RB dan telah memastikan penjabaran hubungan sebab akibat antar jenjang kinerja sedari level strategis hingga ke operasional, sehingga bisa menggambarkan bagaimana keterlibatan setiap individu dalam mendukung kinerja organisasi.
4. Ada beberapa SKPD yang perlu dilakukan reviu kembali pohon kinerja dan cascadingnya dengan Kementerian PANRB seperti Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian, dan Dinas Sosial, PPPAPMD.
5. Dokumen Perencanaan SKPD :
SKPD telah melakukan penyesuaian renstra berdasarkan cascading hasil asistensi dengan Kemen PANRB.
6. Melaksanakan asistensi dan monitoring evaluasi atas rencana aksi SKPD sebagai implementasi pencapaian target kinerja pada Perjanjian Kinerja dan LHE SAKIP melalui aplikasi e-kino dan manual.
7. Melakukan penjajakan kerjasama dengan Pemerintah Kota Surabaya terkait implementasi integrasi Aplikasi (Replikasi Inovasi Aplikasi SAKIP) melalui zoommeeting dan studi lapangan replikasi ke Pemerintah Kota Surabaya.
8. Melakukan Asistensi dan monitoring evaluasi capaian Pengukuran Kinerja yang telah dilaksanakan dengan data yang relevan.
9. Melaksanakan coaching klinik penyusunan SKP berbasis pada Perjanjian Kinerja Individu dan asistensi kesesuaian antara kinerja organisasi dengan kinerja individu.
10. Telah dilaksanakan Asistensi dengan Kementerian PANRB Atas Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Balangan sehingga Laporan Kinerja SKPD memberikan informasi deskriptif program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau mengakibatkan kegagalan dalam pencapaian kinerja
11. Memanfaatkan Informasi kinerja yang ada dalam laporan kinerja terutamapencapaian realisasi kinerja rendah sebagai dasar pertimbangan dalam menentukan target, strategi serta aktivitas ke depan.
12. LKIP dijadikan dasar penyusunan renja SKPD dan adanya kegiatan khusus tentang AKB menjawab permasalahan yang telah dikemukakan dalam LKIP Kabupaten dan SKPD.
13. Telah Melakukan Monitoring Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP Triwulan III tahun 2023.
14. Melakukan Monitoring Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP triwulan IV 2023.

15. Membuat Perbup Evaluasi AKIP.
16. Melakukan Evaluasi AKIP Perangkat Daerah.
17. Membuat SOP Evaluasi AKIP.
18. Telah dilaksanakan penyempurnaan pohon kinerja kemiskinan pada program strategi pengurangan beban pengeluaran sesuai fokus utama dalam pengentasan kemiskinan.
19. Melaksanakan rapat koordinasi TKPKD yang berfokus pada upaya kolaborasi pensasaran masyarakat miskin ekstrem dan miskin yang berdasarkan pada data P3KE dan dapat menghasilkan data sektoral SKPD khususnya Dinas Sosial, adanya inovasi SIAP PD sebagai alat yang mempermudah dalam intervensi dan berkoordinasi penanggulangan kemiskinan ekstrem.
20. Melaksanakan rapat koordinasi TKPKD (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah) terkait akselerasi Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem dengan monitoring evaluasi hasil intervensi per triwulan yang mengacu pada RAT Penanggulangan kemiskinan (Rencana Aksi Tahunan)
21. Optimalisasi monitoring dan evaluasi setiap triwulan pelaporan kemiskinan ekstrem dengan memberi kolom belanja spesifik sehingga terlihat jumlah belanja spesifik sebagai bahan analisa percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem ditahun berikutnya.

B. Rencana Aksi yang Akan Dilakukan pada Tahun 2025

1. Telah melakukan penyusunan pohon kinerja dan cascading kinerja dengan difasilitasi oleh Kemenpan RB di Banjarmasin baik pohon kinerja Pemda dan SKPD dan telah menuangkan pohon kinerja ke dalam dokumen perencanaan.
2. Telah dilakukan *review* pohon kinerja dan cascading kinerja baik oleh internal Tim Sakip maupun Tim Sakip SKPD dan difasilitasi oleh Kemenpan RB.
3. Telah dilakukan penyusunan crosscutting kinerja mengacu pada isu strategis pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, IPM dan tata kelola pemerintahan dan kinerja strategis lainnya dan sedang dalam masa penyempurnaan untuk menuangkan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah dan SKPD.
4. Telah dilakukan reviu pada IKU SKPD berdasarkan hasil koreksi Kemenpan RB dalam LHE SAKIP tahun sebelumnya dan memastikan rumus yang dipakai terutama pada level taktikal adalah benar dan tepat.
5. Saat ini telah dilakukan penyempurnaan terhadap aplikasi SAKIP replikasi Sakip HSS dan sudah memuat menu pengukuran kinerja organisasi dan individu melalui pengukuran PK dan SKP. Disamping itu juga melakukan penambahan menu pengendalian resiko strategis dan operasional.
6. Hasil pengukuran kinerja dan temuan-temuan dalam pelaporan kinerja terutama pada pencapaian target kinerja yang tidak sesuai dan program strategis yang tidak terlaksana akan menjadi bahan masukan dalam dialog kinerja penyusunan dokren SKPD dan dokren Pemda.
7. Telah dilakukan asistensi penyusunan laporan kinerja SKPD oleh Tim Bagian Organisasi dan sebelumnya melakukan zoom dengan Kemenpan RB terkait mekanisme penyusunan laporan yang benar dan sesuai aturan. Telah dikeluarkan surat edaran penyusunan LKIP ke SKPD berdasarkan pada Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 dan juga asistensi terhadap SKPD yang difasilitasi oleh Kemenpan RB di Banjarmasin pada tanggal 3 dan 4 Pebruari 2025.
8. Catatan-catatan temuan dalam LKIP tahun 2024 akan dijadikan bahan masukan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahun 2025 dan menjadi objek dalam dialog kinerja SKPD untuk melakukan review terhadap target di dokren yang akan datang RPJMD dan Renstra 2025-2029.
9. Melakukan monev LHE secara berkala dan melakukan review terhadap LKJ Pemda dan dialog dengan SKPD.
10. Melakukan monev kepada SKPD secara berkala untuk memantau tindaklanjut hasil temuan berdasarkan LHE tahun sebelumnya baik melalui aplikasi ataupun manual.

C. Tabulasi Hasil Evaluasi SAKIP Pemda, Rekomendasi Menpan RB dan Rencana Aksi Pemda

Berdasarkan LHE SAKIP Pemda Kabupaten Balangan Tahun 2024 mengacu surat Nomor : B/411/AA.05/2024 tanggal 3 September 2024, tabulasi hasil evaluasi, rekomendasi implementasi SAKIP dari Kemenpan RB dan Rencana Aksi Pemda terlihat dalam tabulasi dibawah ini :

NO	HASIL EVALUASI MENPAN	REKOMENDASI MENPAN	RENCANA AKSI PEMDA BALANGAN
A	Perencanaan Kinerja		
1.	Pemerintah Kabupaten Balangan telah berupaya melakukan perbaikan dan penyusunan penjenjangan kinerja level Kabupaten dan PD. Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan kinerja, diantaranya sebagai berikut:		
	d. Rencana Aksi pada level PD belum sepenuhnya disusun dengan memperhatikan keterkaitan antara sasaran strategis/kinerja yang ingin dicapai dengan program/kegiatan/sub kegiatan yang dimiliki. Hal ini terlihat dengan adanya kinerja pada program/kegiatan/sub kegiatan belum relevan dan cukup untuk menunjang kinerja strategis/sasaran perangkat daerah;	11. Mendorong adanya peningkatan kualitas rencana aksi pada level PD dengan memastikan bahwa kinerja program / kegiatan / sub kegiatan yang dituangkan benar-benar memiliki keterkaitan secara langsung dan cukup untuk mempengaruhi pencapaian sasaran strategis/kinerja PD;	Telah melakukan penyusunan pohon kinerja dan cascading kinerja dengan difasilitasi oleh Kemenpan RB di Banjarmasin baik pohon kinerja Pemda dan SKPD dan telah menuangkan pohon kinerja ke dalam dokumen perencanaan.
	e. Pohon kinerja telah disusun berdasarkan isu-isu strategis yang dihadapi pada level Pemerintah Daerah dan juga telah diturunkan sampai level terkecil, namun dalam penjenjangan kinerja antar level masih ditemukan beberapa kondisi kinerja yang sama antar level kinerja, khususnya pada level kinerja taktikal ke bawah sehingga hubungan sebab akibat untuk mempengaruhi pencapaian kinerja belum optimal terjadi;	12. Mereviu kembali pohon kinerja yang telah dimiliki dengan cara memastikan penjenjangan antar level kinerja, khususnya pada level kinerja taktikal ke bawah dibangun secara logis, yaitu memiliki hubungan kausalitas antar level kinerja sehingga pencapaian kondisi kinerja dapat optimal tercapai;	Telah dilakukan <i>review</i> pohon kinerja dan cascading kinerja baik oleh internal Tim Sakip maupun Tim Sakip SKPD dan difasilitasi oleh Kemenpan RB.
	f. Identifikasi crosscutting kinerja lintas PD sebagai bagian dari proses kolaborasi kinerja lintas sektor dalam mewujudkan kinerja strategis belum tergambar dengan baik sehingga pola kolaborasi kinerja lintas PD maupun terhadap stakeholder lainnya belum dapat dipastikan keandalannya dalam mendukung kinerja yang bersifat makro maupun isu strategis dari PD;	13. Menyempurnakan crosscutting kinerja yang menggambarkan sharing outcome antar lintas tugas dan fungsi PD disusun dengan memperhatikan identifikasi dari keterlibatan setiap PD yang ada untuk mengawal kinerja lintas sektoral yang bersifat makro dan yang menjadi isu strategis. kemudian ditindaklanjuti ke dalam perencanaan kinerja masing-masing PD sesuai dengan kontribusi yang dibutuhkan pada crosscutting tersebut;	Telah dilakukan penyusunan crosscutting kinerja mengacu pada isu strategis pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, IPM dan tata kelola pemerintahan dan kinerja strategis lainnya dan sedang dalam masa penyempurnaan untuk menuangkan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah dan SKPD.
B	Pengukuran Kinerja		

NO	HASIL EVALUASI MENPAN	REKOMENDASI MENPAN	RENCANA AKSI PEMDA BALANGAN
2.	Pemerintah Kabupaten Balangan telah melakukan pengembangan aplikasi e-SAKIP Kabupaten Balangan untuk monitoring dan evaluasi kinerja serta sudah membuat SOP pengumpulan dan pengukuran data kinerja. Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam pengukuran kinerja, diantaranya sebagai berikut:		
	d. Dokumen IKU formal sebagian PD belum sepenuhnya memiliki definisi operasional yang andal. Hal ini dapat dilihat dari adanya beberapa formulasi perhitungan indikator kinerja tidak relevan dengan ukuran kinerja yang akan diwujudkan, contohnya :	14. Melakukan reviu pada sebagian IKU PD agar memiliki definisi operasional yang andal dengan memastikan formulasi perhitungan indikator kinerja relevan dengan ukuran kinerja yang akan diwujudkan;	Telah dilakukan reviu pada IKU SKPD berdasarkan hasil koreksi Kemenpan RB dalam LHE SAKIP tahun sebelumnya dan memastikan rumus yang dipakai terutama pada level taktikal adalah benar dan tepat.
	- Pada indikator kinerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yaitu "persentase Puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar" namun formulasinya adalah "jumlah Puskesmas dengan tenaga kesehatan sesuai standar dibagi jumlah tenaga kesehatan dikalikan seratus persen";		
	- Pada indikator kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, yaitu "Persentase Data Sektoral yang Termanfaatkan", namun formulasi mengukur "persentase OPD yang memanfaatkan data sektoral;		
	- Pada indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, yaitu "Tingkat partisipasi masyarakat, namun formulasinya adalah "jumlah masyarakat yang sudah diberikan wawasan politik dibagi jumlah pemilih (DPT) dikalikan seratus persen.		
	e. Aplikasi e-SAKIP Kabupaten Balangan belum sepenuhnya efektif untuk dimanfaatkan sebagai sistem monitoring dan evaluasi kinerja. Hal ini disebabkan masih ditemukannya penetapan target kinerja berjenjang (program, kegiatan dan sub kegiatan) yang tidak sesuai dengan kebutuhan, misalnya ada beberapa target yang tidak ditetapkan, namun memiliki realisasi pencapaian. Namun, juga ada beberapa target yang ditetapkan, namun	15. Mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi e-SAKIP Kabupaten Balangan sebagai sarana monitoring dan evaluasi kinerja dengan cara memastikan penetapan target kinerja berjenjang (program, kegiatan dan sub kegiatan) agar sesuai dengan kebutuhan, yaitu menetapkan target berkala sesuai dengan kondisi real di lapangan dan juga menyampaikan realisasi	Saat ini telah dilakukan penyempurnaan terhadap aplikasi SAKIP replikasi Sakip HSS dan sudah memuat menu pengukuran kinerja organisasi dan individu melalui pengukuran PK dan SKP. Disamping itu juga melakukan penambahan menu pengendalian resiko strategis dan operasional.

NO	HASIL EVALUASI MENPAN	REKOMENDASI MENPAN	RENCANA AKSI PEMDA BALANGAN
	realisasi pencapaian belum dilaporkan;	pencapaian kinerja tepat waktu;	
	f. Hasil pengukuran kinerja berjenjang yang telah dilakukan belum sepenuhnya digunakan sebagai dasar perbaikan strategi, kebijakan, aktivitas dan anggaran guna mencapai kinerja yang telah ditetapkan.	16. Mengoptimalkan pemanfaatan hasil pengukuran kinerja berjenjang untuk dijadikan sebagai dasar perbaikan strategi, kebijakan, aktivitas dan anggaran guna mencapai kinerja yang telah ditetapkan;	Hasil pengukuran kinerja dan temuan-temuan dalam pelaporan kinerja terutama pada pencapaian target kinerja yang tidak sesuai dan program strategis yang tidak terlaksana akan menjadi bahan masukan dalam dialog kinerja penyusunan dokren SKPD dan dokren Pemda.
C	Pelaporan Kinerja		
3.	Pemerintah Kabupaten Balangan telah berupaya meningkatkan kualitas penyajian informasi dalam LPPD dan LAKIP seluruh PD melalui sosialisasi pengerjaan laporan kinerja. Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam pelaporan kinerja, diantaranya sebagai berikut:		
	c. Laporan kinerja pada level Pemerintah Daerah dan PD sudah menyajikan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja, namun analisis yang disajikan belum mengarah ke dampak pencapaian kinerja program/kegiatan sehingga tidak didapatkan informasi yang jelas terkait sejauh mana program/kegiatan tersebut menunjang kinerja strategis atau tidak;	17. Meningkatkan kualitas laporan kinerja pada level Pemerintah Daerah dan PD dengan cara memastikan penyajian analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja untuk dapat menggambarkan dampak sejauh mana pencapaian kinerja program/kegiatan tersebut menunjang kinerja strategis yang ingin diwujudkan;	Telah dilakukan asistensi penyusunan laporan kinerja SKPD oleh Tim Bagian Organisasi dan sebelumnya melakukan zoom dengan Kemenpan RB terkait mekanisme penyusunan laporan yang benar dan sesuai aturan. Telah dikeluarkan surat edaran penyusunan LKIP ke SKPD berdasarkan pada Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 dan juga asistensi terhadap SKPD yang difasilitasi oleh Kemenpan RB di Banjarmasin pada tanggal 3 dan 4 Februari 2025.
	d. Belum maksimalnya pemanfaatan laporan kinerja, khususnya pada level PD untuk dijadikan dasar penetapan strategi atau aktivitas dan penetapan target kinerja pada perencanaan kinerja tahun depan.	18. Mengoptimalkan pemanfaatan laporan kinerja, khususnya pada level PD untuk dijadikan dasar penetapan strategi atau aktivitas dan penetapan target kinerja pada perencanaan kinerja tahun depan;	Catatan-catatan temuan dalam LKIP tahun 2024 akan dijadikan bahan masukan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahun 2025 dan menjadi objek dalam dialog kinerja SKPD untuk melakukan review terhadap target di dokren yang akan datang RPJMD dan Renstra 2025-2029.
D	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal		
4.	Pemerintah Kabupaten Balangan telah melakukan evaluasi AKIP internal pada seluruh PD. Sudah dilakukan upaya peningkatan kualitas evaluator internal dengan melakukan bimbingan teknis bagi seluruh evaluator internal. Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, diantaranya sebagai berikut:		

NO	HASIL EVALUASI MENPAN	REKOMENDASI MENPAN	RENCANA AKSI PEMDA BALANGAN
	c. Laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang disusun belum sepenuhnya berkualitas. Hal ini disebabkan masih ditemukannya laporan hasil evaluasi yang standar isinya berbeda-beda antar PD sehingga perbaikan SAKIP di lingkungan antar PD tidak sama dan merata;	19. Mendorong adanya peningkatan kualitas laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal dengan muatan isi laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang terstandar, sehingga perbaikan implimentasi SAKIP akibat tindaklanjut laporan tersebut dapat merata pada setiap PD yang dievaluasi;	Melakukan monev LHE secara berkala dan melakukan review terhadap LKJ Pemda dan dialog dengan SKPD.
	d. Belum optimalnya upaya pemantauan dan reviu oleh Inspektorat atas tindaklanjut hasil evaluasi internal yang dilakukan kepada seluruh PD yang dievaluasi. Hal ini terlihat dari masih belum seluruh PD melakukan tindaklanjut yang optimal terhadap rekomendasi yang ada dalam LHE AKIP Internal.	20. Mendorong pelaksanaan pemantauan secara berkala rekomendasi yang diberikan kepada PD melalui LHE AKIP internal guna memastikan bahwa tindaklanjut yang dilakukan dalam menjawab rekomendasi tersebut telah sesuai dengan yang diinginkan oleh evaluator internal dan dapat dimanfaatkan sebagai umpan balik perbaikan manajemen kinerja secara berkelanjutan.	Melakukan monev kepada SKPD secara berkala untuk memantau tindaklanjut hasil temuan berdasarkan LHE tahun sebelumnya baik melalui aplikasi ataupun manual.

DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
- LAMPIRAN 2 SURAT KEPUTUSAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
- LAMPIRAN 3 BERITA ACARA PENAJAMAN TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
- LAMPIRAN 4 BERITA ACARA KESEPAKATAN PERBAIKAN CASCADING

LAMPIRAN I

PERJANJIAN KINERJA
PERUBAHAN TAHUN 2024



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BALANGAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **H. ABDUL HADI, S.Ag, M.I.Kom**

Jabatan : **BUPATI BALANGAN**

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Paringin, 18 September 2024


BUPATI BALANGAN,
H. ABDUL HADI, S.Ag, M.I.Kom

**LAMPIRAN : PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN**

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Penanggung Jawab
1.	Meningkatnya Kontribusi Ekonomi Sektor Unggulan Non Pertambangan	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Industri Pengolahan	6,57	4,49	Dinas Perindustrian dan Perdagangan; Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan; Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja; Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata; Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
		Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan	7,53	17,40	
		Laju Pertumbuhan Ekonomi Pertanian dan Perikanan	2,35	9,79	
		Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pariwisata	7,45	11,03	
2.	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi	Persentase Peningkatan Investasi Daerah	53,61	51,13	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Sekretariat DPRD; Sekretariat Daerah; Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; Satuan Polisi Pamong Praja; Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.
3.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup	73,89	73,89	Dinas Kesehatan; Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup; Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan; Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
4.	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	8,63	8,63	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
		Angka Harapan Lama Sekolah	12,98	12,98	
5.	Meningkatnya Pengeluaran Perkapita	PengeluaranPerkapita	1.341.267	1.109.546	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan; Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Penanggung Jawab
					Rakyat dan Kawasan Permukiman; Dinas Perindustrian dan Perdagangan; Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja.
6.	Menurunnya Ketimpangan Pendapatan	Indeks Gini Rasio	0,285	0,258	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja; Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Dinas Sosial; Dinas Kesehatan; Sekretariat Daerah; Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
7.	Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka	Angka Pengangguran Terbuka	2,37	2,37	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja.
8.	Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi	Nilai SAKIP	74,40 (BB)	74,40 (BB)	Sekretariat Daerah, Inspektorat dan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi; dan Seluruh SKPD
		Nilai Opini BPK	WTP	WTP	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah; Inspektorat.
		Nilai EKPPD	3,593	3,593	Sekretariat Daerah dan Seluruh SKPD
		Nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP)	4.51 (A)	4.51 (A)	Sekretariat Daerah dan UPP
		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86	86	Sekretariat Daerah dan UPP
9.	Meningkatnya Kualitas SDGS Desa	Indeks Desa Membangun	0,6795	0,7997	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

No	Program	Anggaran
1.	Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Rp. 1.154.410.500
2.	Pengendalian Izin Usaha Industri	Rp. 106.805.200
3.	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Rp. 7.270.306.500
4.	Pengembangan UMKM	Rp. 2.760.930.000
5.	Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp. 13.836.978.700
6.	Pengembangan Ekspor	Rp. 2.569.134.000
7.	Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Rp. 51.500.000
8.	Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Rp. 276.750.000
9.	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Rp. 1.172.019.100
10.	Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Rp. 744.252.700
11.	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rp. 124.507.018.281
12.	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Rp. 23.730.181.050
13.	Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Rp. 1.523.934.700
14.	Penyuluhan Pertanian	Rp. 12.631.368.200
15.	Pengelolaan Perikanan Budidaya	Rp. 42.889.294.194
16.	Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rp. 69.848.887.750
17.	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Rp. 87.035.446.495
18.	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Rp. 689.944.100
19.	Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Rp. 2.400.539.662
20.	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp. 12.218.112.608
21.	Pengawasan Keamanan Pangan	Rp. 78.747.200
22.	Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Rp. 4.843.407.300
23.	Pemasaran Pariwisata	Rp. 2.048.458.900
24.	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Rp. 2.172.982.300
25.	Pengembangan Kebudayaan	Rp. 396.500.000
26.	Pengembangan Kesenian Tradisional	Rp. 2.070.955.000
27.	Pembinaan Sejarah	Rp. 4.873682.000
28.	Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Rp. 644.941.000
29.	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp. 320.622.000
30.	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp. 661.209.000
31.	Promosi Penanaman Modal	Rp. 521.783.700
32.	Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp. 147.695.000
33.	Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Rp. 45.606.020.271
34.	Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Rp. 165.705.719.700
35.	Penataan Bangunan Gedung	Rp. 241.194.974.600
36.	Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Rp. 6.829.269.500
37.	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 10.210.533.240
38.	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp. 5.499.730.200
39.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp. 23.318.050.000
40.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rp. 32.171.292.200
41.	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp. 229.667.623.192
42.	Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Rp. 1.097.827.400

No	Program	Anggaran
43.	Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp. 1.526.762.390
44.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp. 14.981.795.000
45.	Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Rp. 3.314.814.600
46.	Pengendalian Penduduk	Rp. 7.026.285.800
47.	Peningkatan Kualitas Keluarga	Rp. 1.090.621.200
48.	Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rp. 3.451.592.950
49.	Pengelolaan Pendidikan	Rp. 117.524.112.800
50.	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rp. 4.496.361.400
51.	Pembinaan Perpustakaan	Rp. 4.873.079.300
52.	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Rp. 66.330.000
53.	Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Rp. 1.457.909.800
54.	Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Rp. 23.974.668.200
55.	Penyelenggaraan Jalan	Rp. 248.931.396.600
56.	Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp. 41.017.418.328
57.	Penempatan Tenaga Kerja	Rp. 1.092.719.700
58.	Administrasi Pemerintahan Desa	Rp. 16.721.392.000
59.	Pemberdayaan Sosial	Rp. 7.785.258.400
60.	Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp. 15.121.159.100
61.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Rp. 13.419.728.200
62.	Rehabilitasi Sosial	Rp. 3.062.286.500
63.	Penanganan Bencana	Rp. 1.607.329.800
64.	Penanggulangan Bencana	Rp. 13.933.888.460
65.	Perekonomian dan Pembangunan	Rp. 4.705.464.400
66.	Perencanaan Tenaga Kerja	Rp. 32.718.000
67.	Hubungan Industrial	Rp. 10.648.154.900
68.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 142.799.186.565
69.	Penyelenggaraan Pengawasan	Rp. 3.108.355.000
70.	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp. 3.881.460.400
71.	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 4.364.356.400
72.	Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp. 2.816.002.600
73.	Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp. 517.236.357.461
74.	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp. 11.389.027.600
75.	Peningkatan Kerjasama Desa	Rp. 36.313.953.300
	JUMLAH	Rp. 2.471.271.784.597

Paringin, 18 September 2024

BUPATI BALANGAN,

H. ABDUL HADI, S.Ag, M.I.Kom



LAMPIRAN II

SURAT KEPUTUSAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 188.45/ 890 /Kum TAHUN 2023
TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta untuk lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan, perlu adanya Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Balangan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/2027 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Balangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Balangan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1464);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2027 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan nInstansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN.

KESATU : Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Balangan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud diktum KESATU sebagai berikut ::

- a. merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian tujuan serta sasaran Pemerintah Kabupaten Balangan dan sasaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan melalui indikator kinerja yang memberikan penjelasan baik sebagai acuan kuantitatif maupun kualitatif mengenai apa yang dilakukan untuk menentukan apakah tujuan sasaran sudah tercapai;

- b. sebagai acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Unit Kerja, Unut Kerja Mandiri, dalam menentukan kinerja utama yg akan diwujudkan, dan;
- c. untuk memperoleh informasi kinerja yang diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja dan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis rencana pembangunan daerah dan SKPD yang akan digunakan untuk perbaikan kinerja dan akuntabilitas kinerja;

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 29 Desember 2023

BUPATI BALANGAN,



H. ABDUL HADI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN
NOMOR : 188.45/ 890 /KUM TAHUN 2023
TENTANG : 29 Desember 2023
INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN 2021-2026

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PENJELASAN (MAKNA, ALASAN PEMILIHAN DAN CARA PERHITUNGAN)	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	1 Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	1 Meningkatnya Kontribusi Ekonomi Sektor Unggulan Non Pertambangan	1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Industri Pengolahan	Makna : Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Industri Pengolahan merupakan indikator untuk menggambarkan peran sektor industri pengolahan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Alasan Pemilihan : Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Industri Pengolahan memberikan gambaran dan informasi yang sangat penting untuk mengetahui output pada sektor ekonomi dan melihat pertumbuhan di suatu wilayah tertentu. Dengan bantuan data Industri pengolahan, maka dapat ditentukan sektor unggulan (leading sector) di suatu daerah/wilayah. Rumus Perhitungan : $= \frac{\text{Kontribusi PDRB Sektor Industri Pengolahan (Tahun } n - \text{Tahun } (n - 1))}{\text{Kontribusi PDRB Sektor Industri Pengolahan Tahun } n - 1} \times 100\%$	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Data BPS, Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			2 Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan	Makna : Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan merupakan indikator untuk menggambarkan peran sektor Perdagangan, Pengolahan dan jasa dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Alasan Pemilihan : Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan memberikan gambaran dan informasi yang sangat penting untuk mengetahui output pada sektor ekonomi dan melihat pertumbuhan di suatu wilayah tertentu. Dengan bantuan data PDRB, maka dapat ditentukannya sektor unggulan (leading sector) di suatu daerah/wilayah. Rumus Perhitungan : $= \frac{\text{Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan (Tahun } n - \text{Tahun } (n - 1))}{\text{Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan Tahun } n - 1} \times 100\%$		
1	1 Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	1 Meningkatnya Kontribusi Ekonomi Sektor Unggulan Non Pertambangan	3 Laju Pertumbuhan Ekonomi Pertanian dan Perikanan	Makna : Laju Pertumbuhan Ekonomi Pertanian dan Perikanan merupakan indikator untuk menggambarkan peran sektor Pertanian dan Perikanan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Alasan Pemilihan : Laju Pertumbuhan Ekonomi Pertanian dan Perikanan memberikan gambaran dan informasi yang sangat penting untuk mengetahui output pada sektor ekonomi dan melihat pertumbuhan di suatu wilayah tertentu. Dengan bantuan data PDRB, maka dapat ditentukannya sektor unggulan (leading sector) di suatu daerah/wilayah.	Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan	Data BPS, Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan

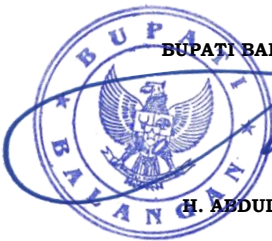
NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PENJELASAN (MAKNA, ALASAN PEMILIHAN DAN CARA PERHITUNGAN)	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
				Rumus Perhitungan : $= \frac{\text{Kontribusi PDRB Sektor Pertanian dan Perikanan (Tahun } n - \text{Tahun } (n - 1))}{\text{Kontribusi PDRB Sektor Pertanian dan Perikanan Tahun } n - 1} \times 100\%$		
			4 Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pariwisata	Makna : Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pariwisata merupakan indikator untuk menggambarkan peran sektor Pertumbuhan PDRB Sektor Pariwisata dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Alasan Pemilihan : Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pariwisata memberikan gambaran dan informasi yang sangat penting untuk mengetahui output pada sektor ekonomi dan melihat pertumbuhan di suatu wilayah tertentu. Dengan bantuan data PDRB, maka dapat ditentukannya sektor unggulan (leading sector) di suatu daerah/wilayah. Rumus Perhitungan : $= \frac{\text{Kontribusi PDRB Sektor Pariwisata (Tahun } n - \text{Tahun } (n - 1))}{\text{Kontribusi PDRB Sektor Pariwisata Tahun } n - 1} \times 100\%$		
		2 Meningkatnya Pertumbuhan Investasi	5 Persentase Peningkatan Investasi Daerah	Makna : Pertumbuhan nilai investasi (Milyar Rupiah) merupakan angka/nilai yang menggambarkan sejauh mana investasi dan permodalan perusahaan dapat dikembangkan di daerah. Alasan Pemilihan : Pertumbuhan nilai investasi (Milyar Rupiah) diperlukan sebagai gambaran kegiatan penanaman modal dalam menunjang pertumbuhan ekonomi daerah. Rumus Perhitungan : Angka realisasi investasi PMDN dijumlahkan dalam satuan Rupiah (Rp) dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Adapun realisasi investasi didapat dari Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) setiap perusahaan. LKPM dibuat setiap triwulan, sehingga dapat terlihat perkembangan realisasi pelaksanaan investasinya	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu,	Perhitungan Mandiri, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu,
2	2 Meningkatnya Kualitas SDM	3 Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	6 Usia Harapan Hidup	Makna : Usia Harapan Hidup penduduk adalah rata-rata kesempatan atau waktu hidup yang tersisa. Usia Harapan Hidup dapat diartikan pula dengan banyaknya tahun yang ditempuh penduduk yang masih hidup sampai umur tertentu. Alasan Pemilihan : Usia Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Rumus Perhitungan : Umur masing-masing yang meninggal dijumlahkan semuanya dan kemudian dibagi dengan jumlah orang yang meninggal pada tahun itu.	Dinas Kesehatan,	Data BPS, Dinas Kesehatan

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PENJELASAN (MAKNA, ALASAN PEMILIHAN DAN CARA PERHITUNGAN)	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		4 Meningkatnya Kualitas Pendidikan	7 Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Makna : Rata-rata Lama Sekolah (RLS)/Mean Years School (MYS) didefinisikan sebagai jumlah tahu yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Alasan Pemilihan : Mengetahui kualitas pedididikan masyarakat dalam suatu wilayah. Rumus Perhitungan : $RLS = \frac{1}{n} \times \sum_{i=1}^n x_i$ dimana : RLS = Rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas x_i = Lama sekolah penduduk ke-/ yang berusia 25 tahun N = Jumlah penduduk usia 25 tahun ke atas	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Data BPS, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			8 Angka Harapan Lama Sekolah	Makna : Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Alasan Pemilihan : Mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. Rumus Perhitungan : $HLS_a^t = FK \times \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$ dimana: HLS'_a = Harapan Lama Sekolah pada umur a di tahun t E'_i = Jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t i = Usia (a, a + 1, ..., n) FK = Faktor koreksi pesantren		
		5 Meningkatnya Pengeluaran Perkapita	9 Pengeluaran Perkapita	Makna : Pengeluaran rata-rata per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga tersebut.. Konsumsi rumah tangga dibedakan atas konsumsi makanan maupun bukan makanan tanpa memperhatikan asal barang dan terbatas pada pengeluaran untuk kebutuhan rumah tangga saja, tidak termasuk konsumsi/pengeluaran untuk keperluan usaha atau yang diberikan kepada pihak lain. Pengeluaran untuk konsumsi makanan dihitung selama seminggu yang lalu, sedangkan untuk bukan makanan dihitung selama sebulan dan 12 bulan yang lalu. Baik konsumsi makanan maupun bukan makanan selanjutnya dikonversikan ke dalam pengeluaran rata-rata sebulan. Angka-angka konsumsi/pengeluaran rata-rata per kapita yang disajikan dalam publikasi ini diperoleh dari hasil bagi jumlah konsumsi seluruh rumah tangga (baik mengkonsumsi makanan maupun tidak) terhadap jumlah penduduk. Alasan Pemilihan :	Bagian Perekonomian Setda	Data BPS, Bagian Perekonomian Setda

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PENJELASAN (MAKNA, ALASAN PEMILIHAN DAN CARA PERHITUNGAN)	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
				Pengeluaran perkapita menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin membaiknya ekonomi Rumus Perhitungan : $= \frac{\textit{Total Pengeluaran}}{\textit{Jumlah Penduduk}}$		
3	3 Menurunnya Kemiskinan	5 Menurunnya Ketimpangan Pendapatan	10 Indeks Gini Rasio	Makna : Indeks Gini Rasio merupakan gambaran untuk menunjukan adanya pemerataan distribusi <u>pendapatan antar penduduk</u>. Alasan Pemilihan : Indeks Gini Rasio diperlukan sebagai bahan evaluasi tingkat keberhasilan dalam menurunkan ketimpangan dalam pendapatan. Rumus Perhitungan : $GC = 1 - \sum_{i=1}^n (X_{i+1} - X_i) (Y_i + Y_{i+1}) \text{ atau } GC = 1 - \sum_{i=1}^n f_i (Y_{i+1} + Y_i)$ Ket: GC = Angka Gini Coeffisient. X_i = Proporsi jumlah RT kumulatif dalam kelas i f_i = Proporsi jumlah RT dalam kelas i Y_i = Proporsi jumlah pendapatan RT kumulatif dalam kelas i	Dinas Sosial	Data BPS, Dinas Sosial
		6 Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka	11 Angka Pengangguran Terbuka	Makna : Angka pengangguran terbuka merupakan gambaran kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap persediaan (supply) tenaga kerja yang ada. Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin banyak persediaan tenaga kerja yang tidak termanfaatkan. Indikator ini dapat memberikan sinyal tentang kinerja pasar kerja dan berlangsungnya kondisi ekonomi tertentu, seperti resesi, perubahan siklus bisnis dan teknologi, dan lain-lain. Alasan Pemilihan : Nilai angka pengangguran terbuka diperlukan sebagai bahan evaluasi tingkat keberhasilan ketenagakerjaan dan acuan bagi Pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja baru. Rumus Perhitungan : $TPT = \frac{\textit{Jumlah Pengangguran terbuka usia angkatan kerja}}{\textit{Jumlah penduduk angkatan kerja}} \times 100\%$ Keterangan : TPT = Tingkat Pengangguran Terbuka (%)		
4	4 Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	8 Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi	12 Nilai SAKIP	Makna : Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (E-SAKIP) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Reformasi dan Birokrasi terhadap substansi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja , evaluasi kinerja dan pencapaian sasaran kinerja. Alasan Pemilihan : Dengan Nilai SAKIP Pemerintah Kabupaten Balangan dalam hal ini Sekretariat Daerah yang merupakan salah satu tim pembina SAKIP kabupaten mampu mengukur tingkat akuntabilitas kinerja baik level Pemda, SKPD hingga ke Individu mampu mengukur tingkat akuntabilitas kinerja baik itu level Pemda, SKPD hingga ke Individu Pegawai. Rumus Perhitungan : LHE SAKIP Kemenpan RB RI	Setda, Inspektorat, Bapperida dan Seluruh SKPD	LHE SAKIP Kemenpan RB RI, Setda, Inspektorat, Bapperida dan Seluruh SKPD

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PENJELASAN (MAKNA, ALASAN PEMILIHAN DAN CARA PERHITUNGAN)	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			13 Opini BPK	Makna : Opini Badan Pemeriksa Keuangan merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Alasan Pemilihan : Untuk mengetahui kualitas pengelolaan keuangan negara yang menjamin bahwa informasi keuangan telah wajar disajikan sesuai standar akuntansi pemerintahan. Rumus Perhitungan : Perolehan Opini WTP dalam LHP BPK atas LKPD (UU Nomor 15 Tahun 2004)	BPKPAD, Inspektorat	LHP BPK atas LKPD, BPKPAD, Inspektorat
			14 Nilai EKPPD	Makna : EKPPD kabupaten/kota merupakan hasil evaluasi oleh Tim Daerah yang kemudian divalidasi oleh Tim Nasional pada saat EKPPD dilaksanakan (pembobotan nilai adalah 100% di dapat dari indeks capaian kinerja sebesar 95% dan indeks kesesuaian materi sebesar 5% pada capaian urusan pemerintahannya). Alasan Pemilihan : Untuk mengetahui kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan menggunakan sistem pengukuran kinerja. Rumus Perhitungan : Hasil Penilaian LPPD oleh Kementrian Dalam Negeri		
4	4 Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	8 Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi	15 Nilai IPP	Makna : Indeks Pelayanan Publik adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi. (Permenpan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penialian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik). Alasan Pemilihan : Guna memperoleh gambaran tentang kondisi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik untuk kemudian dilakukan perbaikan dalam rangka peningkatan. Rumus Perhitungan : Tahapan Penghitungan Indeks Pelayanan Publik : Menentukan nilai untuk setiap indikator - Nilai per indikator: $\left(\frac{\text{nilai } F01 + \text{nilai } F02 + \text{nilai } F03}{3}\right) \times \text{bobot perindikator}$ Menentukan nilai setiap aspek - Nilai per aspek: $\sum \text{nilai perindikator}$ Menentukan indeks - Nilai indeks: $\sum (\text{nilai aspek}_n \times \text{bobot aspek}_n)$	Setda dan UPP	Setda dan UPP

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PENJELASAN (MAKNA, ALASAN PEMILIHAN DAN CARA PERHITUNGAN)	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			16 Nilai IKM)	Makna : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah merupakan suatu ukuran untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya. Alasan Pemilihan : Dalam rangka mewujudkan tingkat kinerja masing-masing unit pelayanan instansi pemerintah, juga dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menilai secara obyektif dan periodik terhadap perkembangan unit pelayanan publik. Rumus Perhitungan : Bobot nilai rata-rata tertimbang = Jumlah bobot/jumlah unsur IKM = (Total dari Nilai Persepsi Per Unsur/Total Unsur yang terisi) x Nilai Penimbang	Setda dan UPP	Setda dan UPP
		9 Meningkatnya Kualitas SDGS Desa	17 Indeks Desa Membangun	Makna : Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu : Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan. Alasan Pemilihan : Indeks Desa Membangun memotret perkembangan kemandirian Desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dengan dukungan Dana Desa serta Pendamping Desa. Indeks Desa Membangun mengarahkan ketepatan intervensi dalam kebijakan dengan korelasi intervensi pembangunan yang tepat dari Pemerintah sesuai dengan partisipasi Masyarakat yang berkorelasi dengan karakteristik wilayah Desa yaitu tipologi dan modal sosial. Rumus Perhitungan : $Indeks\ Variabel = (\sum IndikatorX) / (Nilai\ Maksimum\ (X))$ Indeks dari setiap variabel menjadi Indeks Komposit yang disebut dengan Indeks Desa Membangun (IDM).		



BUPATI BALANGAN,

H. ABDUL HADI

LAMPIRAN III

BERITA ACARA PENAJAMAN
TUJUAN DAN SASARAN RPJMD



BUPATI BALANGAN

BERITA ACARA

PENAJAMAN TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2021-2026

Nomor: 060/390/ORG/SETDA-BLG/2024

Pada hari ini Rabu Tanggal Delapan Belas Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, kami :

Nama : H. ABDUL HADI, S.Ag., M.I.Kom.

Jabatan : Bupati Balangan

Berdasarkan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, hasil review pohon kinerja serta berdasarkan hasil evaluasi mandiri, maka dalam rangka perbaikan akuntabilitas kinerja kami adakan perbaikan terhadap beberapa target tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 sebagaimana tertuang dalam lampiran berita acara ini.

Demikian untuk menjadi maklum dan agar Berita Acara ini dapat dijadikan pedoman dalam penyusunan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

**BUPATI BALANGAN,**
H. ABDUL HADI, S.Ag., M.I.Kom.

Lampiran Berita Acara

No	Uraian Tindakanjnt Review
1.	Perbaikan pohon kinerja telah dilakukan namun belum dapat dilakukan penyesuaian terhadap Dokumen RPJMD Tahun 2021-2026 mengingat masa perubahan RPJMD belum dapat dilakukan sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Alasan kedua karena pada tahun 2025 akan disusun RPJMD terbaru 2025-2029 sehingga penyesuaian akan dilakukan pada periode tersebut. Hal ini selaras dengan berita acara yang dibuat pada tanggal 5 Mei 2023, dan ditandatangani oleh Tim Sakip Kabupaten dan Perwakilan SKPD serta diketahui oleh Bupati Balangan. Dan telah diupload ke dalam E-Sakip <i>review</i> Kemen PAN RB pada tanggal 26 Agustus 2023.
2.	Perbaikan pohon kinerja sebagaimana dimaksud pada poin 1 dilakukan dengan menuangkan kinerja ke dalam Perjanjian Kinerja Kabupaten Tahun 2024.
3.	Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada poin 2 sebagaimana Lampiran Berita Acara ini dan akan dipergunakan dalam Penyusunan LKIP tahun 2024 yang disusun pada tahun 2025.
4.	Beberapa target dalam Bab V RPJMD juga dilakukan rasionalisasi mengingat ada beberapa target yang sudah tercapai pada tahun 2023. Dan matrik target Bab V yang dirasionalisasi sebagaimana data dibawah ini: a. Target Akhir RPJMD Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Industri Pengolahan semula 4,59 menjadi 5,24. b. Target Akhir RPJMD Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan semula 5,8 menjadi 20,30. c. Target Akhir RPJMD Laju Pertumbuhan Ekonomi Pertanian dan Perikanan semula 5,32 menjadi 11,42. d. Target Akhir RPJMD Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pariwisata semula 6,03 menjadi 12,87. e. Target Akhir RPJMD Usia Harapan Hidup semula 68,92 menjadi 74,49. f. Target Akhir RPJMD Indeks Gini Ratio semula 0,275 menjadi 0,224. g. Target Akhir RPJMD Nilai IKM semula 85 menjadi 90. h. Target Akhir RPJMD Indeks Desa Membangun semula 0,6995 menjadi 0,8459.

LAMPIRAN IV

BERITA ACARA KESEPAKATAN
PERBAIKAN CASCADING



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Jend. Ahmad Yani No. 01 Paringin. Telp. (0526) 2028408

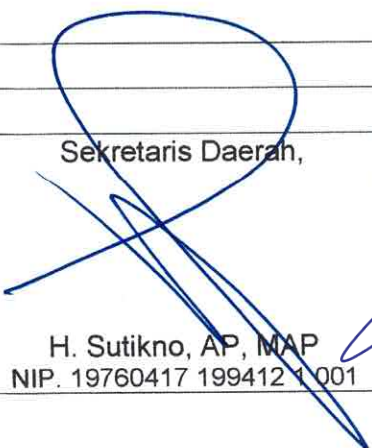
BERITA ACARA
KESEPAKATAN HASIL PEMBAHASAN DAN
ASISTENSI PERBAIKAN CASCADING KINERJA KABUPATEN DAN
SKPD LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN MENGACU PADA
PERMENPAN RB NOMOR 89 TAHUN 2021
TENTANG PENJENJANGAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Bahwa pada hari ini Jumat Tanggal 5 Mei 2023 bertempat di Benteng Tundakan Kantor Bupati Balangan telah dilakukan kesepakatan oleh TIM SAKIP Kabupaten dan perwakilan Kepala SKPD menyepakati hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa TIM SAKIP Kabupaten akan melakukan pembinaan dan pendampingan kepada SKPD untuk perbaikan cascading kinerja yang akan berfungsi sebagai bahan perbaikan dokumen perencanaan baik RPJMD maupun Renstra SKPD;
2. Bahwa TIM SAKIP Kabupaten akan selalu berkoordinasi dengan Kementerian PAN RB pada Deputi RB Kunwas dalam hal fasilitasi dan pembinaan serta supervisi kebijakan perbaikan SAKIP Balangan khususnya perbaikan cascading kinerja;
3. Bahwa Kepala SKPD berkenan untuk melakukan perbaikan sesuai arahan dan binaan TIM SAKIP Kabupaten berdasarkan pertimbangan teknis dari Kementerian PAN RB;
4. Bahwa output atau hasil perbaikan cascading kinerja ini akan menjadi bahan dalam perbaikan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen perencanaan SKPD;
5. Bahwa timeline perbaikan dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat) akan menyesuaikan dengan timeline perubahan dokumen perencanaan sesuai dengan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah;
6. Bahwa TIM SAKIP dan Kepala SKPD berkomitmen untuk melakukan perbaikan kinerja dan akan melakukan pemantauan dan evaluasi secara berjenjang.

Dokumen hasil pembahasan dan asistensi perbaikan cascading kinerja Kabupaten dan SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Balangan mengacu pada Permenpan RB nomor 89 tahun 2021 tentang penjenjangan kinerja instansi pemerintah sebagaimana lampiran berita acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk bahan selanjutnya.

Paringin, 05 Mei 2023		
TIM SAKIP KABUPATEN		
Sekretaris Daerah,	Inspektur Kabupaten Balangan,	Kepala Bappedalitbang,
		
H. Sutikno, AP, MAP NIP. 19760417 199412 1 001	Erwan MKL, SKM, M.Kes NIP. 19700510 199501 1 001	Rakhmadi Yusni, S.Sos, M.AP NIP. 19701207 199503 1 002

PERWAKILAN KEPALA SKPD		
Kepala Dinas PUPRPERKIM,  Rahmadiyah, ST, MT NIP. 19760309 200604 2 007	Kepala DKPPP,  Ir. H. Tuhalus, MP NIP. 19620412 199203 1 013	Kepala SATPOL PP,  Noor Aspariah, SP, MP NIP. 19660613 199802 2 003

	Mengetahui/Menyetujui;
	Bupati Balangan, H. Abdul Hadi, S.Ag, M.I.Kom